



RIGHT TO FREE QUALITY INCLUSIVE PUBLIC EDUCATION

JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA
(J P P I)
DALAM BERITA 2016-2019



RIGHT TO FREE QUALITY INCLUSIVE PUBLIC EDUCATION
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
dalam Berita 2016-2017-2018

Editor:
Ari Hardianto
Budi

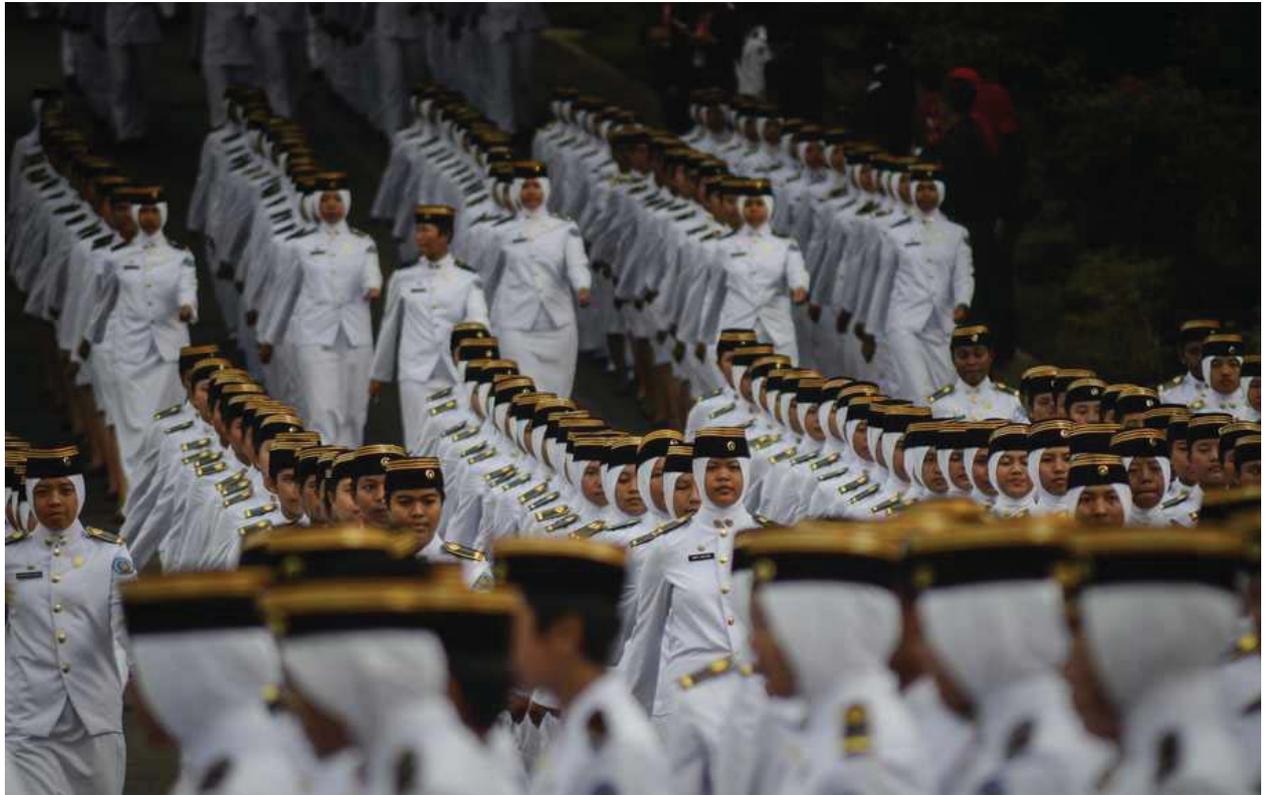
Desain sampul dan tata letak:
Poti & Lukman

Cetakan pertama, Oktober 2019.
Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh Jaringan
Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Jl. H. Ramli Selatan No. 23,
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta.

RIGHT TO FREE QUALITY INCLUSIVE PUBLIC EDUCATION

**JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA
(J P P I)
DALAM BERITA 2016-2019**

Sistem Pendidikan di Indonesia Disesuaikan Perubahan Zaman



Ribuan calon muda praja mengikuti pelantikan muda praja angkatan XXIX di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018). Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik 1.994 orang calon muda praja menjadi muda praja IPDN untuk selanjutnya menempuh pendidikan selama empat tahun guna mempersiapkan muda praja menjadi aparatur pemerintahan. (Foto: ANTARA FOTO / Raisan Al Farisi)

Model pendidikan di Indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan zaman

Maria Fatima Bona / EAS Jumat, 2 November 2018 | 11:32 WIB

Jakarta - Guru Besar bidang ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab mengatakan, upaya untuk menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter, unggul, dan kompetitif di masa depan, ditentukan sistem dan model pendidikan yang bermutu dan relevan dengan perubahan zaman.

“Sistem dan model pendidikan bermutu dan relevan ini tidak bisa lepas dari perhatian terhadap keberadaan, kondisi, serta potensi yang dimiliki oleh generasi muda di seluruh Indonesia. Hebatnya, Indonesia memiliki generasi muda dengan kearifan lokal yang berbeda-beda,” kata Rochmat kepada SP, baru baru ini.

Melihat hal itu, pemerintah dikatakan Rochmat sebaiknya menyediakan banchmark pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, bagi generasi muda yang memiliki potensi berkompetisi secara internasional harus disiapkan model pendidikan dan latihan bagi mereka. Model pendidikan dari dalam negeri yang bertumpu dengan lokal dengan parameter tingkat dunia, sehingga kualitasnya tetap diakui dunia. Selain itu, perlu diperbaharui setiap saat untuk

tetap terjaga relevansinya dengan tuntutan zaman.

Mantan rektor UNY ini juga mengatakan, selain fokus terhadap kompetensi, sistem dan model pendidikan yang perlu diciptakan harus memperhatikan tiga hal. Pertama, pembentukan karakter bangsa, kemampuan inovasi, dan penguasaan bahasa internasional. Sistem pendidikan formal harus berorientasi kepada pembentukan jati diri bangsa, berakhlak mulia, menjadi warga negara yang baik dan cinta Tanah Air (NKRI).

Kedua, kemampuan berpikir kritis dan kreatif harus dimiliki untuk menghasilkan inovasi yang tiada henti. Ketiga, mengupayakan generasi muda memiliki bahasa internasional yang menjadi pilihan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk berkiprah dalam dunia kerja.

“Penguasaan bahasa internasional membekali generasi tidak hanya pada tahap rekrutmen tapi juga pada saat aktif dalam tugas,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, penyelenggaraan pendidikan harus fokus pada pendidikan karakter dan keteladanan. Menurut dia, banyaknya masalah penyelenggaraan pendidikan seperti masih adanya pungutan liar (pungli) dan minimnya transparansi dana sekolah hingga masih tingginya korupsi di sektor pendidikan harus segera ditata.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mengatakan, kualitas pendidikan tentu harus didukung dengan anggaran. Namun, yang terjadi saat ini pemerintah malah memangkas anggaran pendidikan hingga Rp 4 triliun dari Rp 39 triliun menjadi Rp 35 triliun.



Penguasaan bahasa internasional membekali generasi tidak hanya pada tahap rekrutmen tapi juga pada saat aktif dalam tugas,” ujarnya.

Sumber : <http://www.beritasatu.com/nasional/520257-sistem-pendidikan-di-indonesia-disesuaikan-perubahan-zaman.html>

VOKASI

Jurusan Baru Terus Dikembangkan

DEONISIA ARLINTA

28 September 2018



Kompas/Iwan Setiyawan

Sejumlah siswa sekolah kejuruan mempraktikkan bongkar pasang mesin diesel di Balai Besar Latihan Kerja Industri di Solo, Jawa Tengah. Pendidikan vokasi bagi siswa SMK diharapkan bisa sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri.

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan pada sistem pendidikan vokasi di sekolah menengah kejuruan menjadi sebuah keniscayaan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Sejumlah pekerjaan, seperti di bidang otomotif, tekstil, dan busana terancam oleh otomatisasi. Untuk itu, pemerintah pun berupaya mengembangkan sejumlah jurusan baru yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad di Jakarta, Kamis (27/9/2018) menyampaikan, sejumlah bidang baru terkait teknologi 4.0 sudah mulai disiapkan. Bidang-bidang tersebut, seperti realitas maya atau virtual reality (VR), 3D printing, desain komunikasi visual (DKV), bisnis daring (e-commerce), dan augmented reality.

"Mulai tahun ini bidang-bidang baru tersebut dimasukkan dalam jurusan yang relevan seperti TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), elektronika, mekatronika, dan bisnis pemasaran. Upaya ini menjadi strategi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informatika yang terus berkembang," katanya.

Ia menyampaikan, sosialisasi terkait bidang baru itu masih akan dilakukan hingga Desember 2018 nanti. Pihaknya juga tengah menyiapkan kurikulum yang baru, serta tenaga pendidik yang

memiliki kompetensi yang sesuai. Sertifikasi terkait kompetensi guru di bidang baru ini juga disiapkan.

Kerjasama dengan Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) pun ditingkatkan untuk menunjang kematangan bidang pembelajaran baru tersebut. “Harapannya tahun depan sudah ada beberapa sekolah yang sudah menjalankan bidang baru ini. Kami akan intervensi sekolah yang memang siap melalui anggaran SMK,” ucap Hamid.

Selain itu, upaya revitalisasi SMK juga terus dilakukan. Ada empat upaya revitalisasi, yakni penyesuaian kurikulum dengan industri dengan 142 jurusan yang sudah diselaraskan dengan industri; peningkatan kompetensi guru; sertifikasi lulusan SMK; dan kerjasama langsung dengan industri, baik untuk pemagangan atau penerimaan tenaga kerja.

Secara terpisah, Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Nailul Faruq menilai, upaya revitalisasi SMK belum memperlihatkan hasil yang optimal. Pembenahan yang dilakukan, mulai dari kurikulum, kompetensi guru, anggaran, dan sarana praktik kurang memadai.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan kebijakan yang baik untuk sekolah kejuruan lewat penganggaran yang tepat. Penganggaran tersebut seperti, menambah alat praktik penunjang belajar siswa SMK, penambahan jumlah peralatan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta program peningkatan kualitas guru SMK secara profesional.

“Pengangguran lulusan SMK masih tinggi. Problem utamanya adalah tidak ada link and match dengan dunia kerja (DUDI) sehingga lulusan SMK menumpuk dan tidak terdistribusi dengan baik,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2018, mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebanyak 6,87 juta penduduk. Dari jumlah itu 8,92 persen merupakan penduduk berpendidikan SMK. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibanding kelompok pendidikan lain, seperti Diploma I-III (7,92 persen), SMA (7,19 persen), universitas (6,31 persen), SMP (5,18 persen), dan SD (2,67 persen).



Pengangguran lulusan SMK masih tinggi. Problem utamanya adalah tidak ada link and match dengan dunia kerja (DUDI) sehingga lulusan SMK menumpuk dan tidak terdistribusi dengan baik

TENAGA KERJA INDONESIA

Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor*



Definisi:

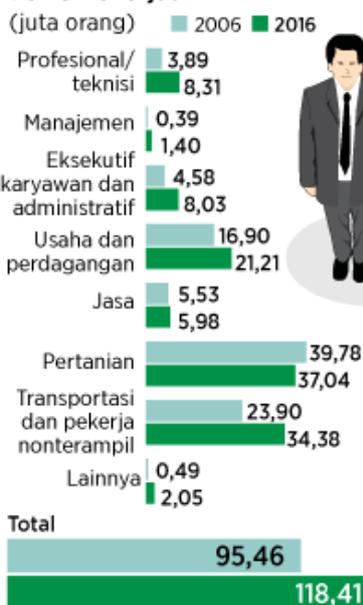
Sektor formal mencakup kategori:

- Berusaha dibantu buruh tetap
- Buruh/karyawan

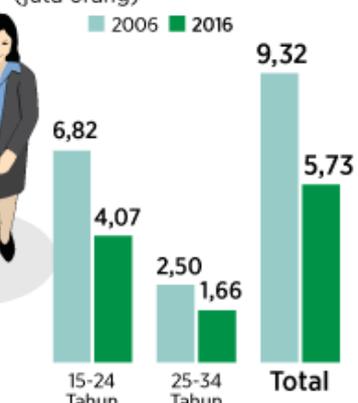
Sektor informal mencakup kategori:

- Berusaha sendiri
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap
- Pekerja bebas
- Pekerja tak dibayar

Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan***



Pengangguran Usia Muda***



Keterangan:

- * Data periode bulan Agustus
- ** Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu sebelum pelaksanaan survei
- *** Data ILO dalam laporan Indonesia Jobs Outlook 2017

Sumber: Litbang "Kompas"/RTA/ERN, diolah dari Badan Pusat Statistik dan Organisasi Buruh Internasional

INFOGRAFIK: ANDRI

Kerja sama

Untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK di bidang sains, teknologi, kerekayasaan, dan matematika, Kemdikbud bekerjasama dengan PT Casio Computer Co. Ltd. Kerjasama ini dimulai dengan mengirimkan 20 peserta didik terpilih dari 10 SMK di seluruh Indonesia untuk bekerja di pabrik Casio di Thailand pada Oktober 2018.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri) bersama Wakil Presiden Eksekutif Casio Computer Hiroshi Nakamura melakukan penandatanganan kerja sama dalam meningkatkan kompetensi siswa dan tenaga pendidik di bidang sains, teknologi, kerekayasaan, dan matematika di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Wakil Presiden Eksekutif Casio Computer Hiroshi Nakamura menyampaikan, ada 2.000 siswa yang akan dikirimkan secara bertahap untuk melakukan praktik kerja magang. Selain itu, sebanyak lebih dari 9.000 guru juga akan dilatih dalam memanfaatkan teknologi, seperti teknologi kalkulator saintifik sebagai penunjang pembelajaran di sekolah.

“Semua program yang telah kami jalankan sudah diformulasikan agar meningkatkan kompetensi pengajar dan peserta didik di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan penyediaan perangkat kurikulum, metode pembelajaran, dan bahan ajar,” katanya.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/09/28/jurusan-baru-terus-dikembangkan/>

Pembenahan Pendidikan Vokasi Belum Optimal
Pendidikan Kejuruan

Pembenahan Pendidikan Vokasi Belum Optimal

M Zaid Wahyudi 28 September 2018



KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Siswa mengikuti Ujian Praktik Kejuruan di bengkel kendaraan ringan SMK Negeri 3 Yogyakarta, Jetis, Yogyakarta, Senin (19/2/2018), sebagai alat ukur pencapaian kompetensi siswa selama di sekolah. Pendidikan vokasi akan jadi tumpuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Namun, pembenahan pendidikan vokasi itu hingga kini belum optimal.

JAKARTA, KOMPAS – Separuh penduduk usia produktif Indonesia adalah generasi milenial. Namun, kualitas mereka masih rendah. Keterampilan dan produktivitas mereka tak hanya kalah bersaing dengan negara lain, tetapi juga oleh robot.

Harapan lama sekolah tenaga kerja Indonesia memang sudah lebih dari 12 tahun, tapi rata-rata lama sekolahnya baru 8 tahun. Keterampilan kerja serta kemampuan matematika, sains dan membaca mereka termasuk rendah. Mereka juga punya beban stunting (tumbuh pendek) di masa balita yang membuat otak dan fisiknya kurang berkembang optimal.

Dengan segala keterbatasan itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit di Jakarta, Kamis (27/9/2018) menilai pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah dan pelatihan bagi yang sudah bekerja bisa jadi solusi untuk mendongkrak keterampilan mereka.

“Dengan pendidikan vokasi, mereka seharusnya bisa langsung masuk ke pasar kerja,” katanya. Hanya dengan keterampilan yang memadai dan terserapnya generasi milenial ke pasar

kerja akan membuat bonus demografi dan cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan ekonomi maju dan berkelanjutan bisa tercapai.

Secara terpisah, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir dalam kunjungan ke Universitas Jember, Jawa Timur, mengatakan 88 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan setara atau kurang dari SMA/SMK. Karena itu, pendidikan vokasi disiapkan bukan hanya agar mereka siap masuk pasar kerja, namun juga berwirausaha mandiri.



Kompas/Gregorius Magnus Finesso

Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Purbalingga, Jawa Tengah, sedang mengerjakan praktek teknik pengelasan di bengkel praktikum sekolah, Senin (21/11/2016). Pembenaan SMK mendesak dilakukan hingga mereka bisa langsung diserap pasar kerja.

Setengah hati

Meski dianggap penting, penguatan pendidikan vokasi di Indonesia dinilai Anton masih setengah hati. Pemerintah dan masyarakat masih menganggap vokasi sebagai pendidikan kelas dua, kalah dengan pendidikan umum dan profesi. Besar gaji mereka pun masih kalah dengan lulusan pendidikan umum lain meski seringkali mereka punya keterampilan lebih baik.

Upaya perbaikan SMK sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia belum optimal. Pengembangan SMK pun menjadi sangat bergantung pada kesadaran pemerintah daerah sebagai pengelola SMK.

Akibatnya, banyak pemerintah daerah membangun SMK tanpa guru, laboratorium, bengkel dan peralatan penunjang yang memadai. "Kebijakan penganggaran untuk sekolah kejuruan masih banyak yang belum tepat," kata Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nailul Faruq.

SMK pun banyak dibangun tanpa ditopang keberadaan industri dan potensi di sekitarnya hingga siswa tak bisa praktik, seperti SMK multimedia yang dibangun di daerah berbasis pertanian atau kelautan. Pendidikannya pun masih lebih banyak teori yang seringkali teori lama yang tak sejalan dengan perkembangan industri dan teori yang tak memiliki hubungan dengan peningkatan keterampilan siswa.

“Terbatasnya industri di daerah membuat kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri jadi terbatas,” kata Kepala Subdirektorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerja Sama Industri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Saryadi.



KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Calon petani dan penyuluh pertanian di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan, Kabupaten Batanghari, Jambi, Senin (10/10/2016), praktik di lapangan menanam bawang. Meski generasi milenial lebih tertarik masuk ke sektor industri jasa, pengembangan pertanian tidak boleh dilupakan karena menopang kebutuhan pangan Indonesia ke depan.

Belum kuatnya keterikatan antara SMK dengan dunia usaha dan industri sekitarnya membuat banyak lulusan SMK menganggur. Bahkan, jumlah pengangguran lulusan SMK paling tinggi dibanding kelompok pendidikan lain.

Studi Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada Oktober 2017 menunjukkan lulusan SMK yang paling banyak menganggur berasal dari jurusan teknik komputer dan informatika, otomotif, perminyakan, teknik elektronika dan teknik furnitur.

Kalaupun ada lulusan SMK yang terserap industri, industri harus melatih mereka terlebih dahulu hingga tidak efisien dan boros biaya. “Lulusan SMK masih belum sesuai kebutuhan industri,” tambah Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani.

Selain dukungan industri sekitar, pengembangan SMK seharusnya disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah, bukan berdasar tren di daerah lain yang belum tentu cocok diterapkan di tempat berbeda. Meski industri pariwisata sedang berkembang di banyak daerah dan diminati banyak generasi milenial, pengembangan SMK yang menopang industri manufaktur dan pertanian tidak boleh dilupakan.

“Pembangunan infrastruktur yang masif oleh pemerintah seharusnya mendorong pertumbuhan industri manufaktur sehingga kebutuhan tenaga pendukung juga diperlukan,” katanya. Selain itu, sebagai negara agraris, sektor pertanian akan tetap dibutuhkan sehingga perlu upaya serius menarik minat anak muda masuk ke vokasi bidang pertanian.

(ESTER LINCE NAPITUPULU dan DEONISIA ARLINTA)

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/09/28/pembenahan-pendidikan-vokasi-belum-optimal/>

“

**Studi Lembaga Demografi Universitas
Indonesia pada Oktober 2017
menunjukkan lulusan SMK yang paling
banyak menganggur**

”

Skema PPDB Diubah, Pengamat: Jangan Hanya Berpatokan pada Daerah Maju!



Ilustrasi penerimaan peserta didik baru. (Foto: Antara)

Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 19 September 2018 | 15:07 WIB

Jakarta - Untuk memperkuat sistem zonasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengubah skema penerimaan peserta didik baru (PPDB). Para peserta didik tidak harus mendaftarkan diri untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pasalnya, sejak awal Dinas Pendidikan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) telah menentukan peserta didik tersebut akan meneruskan ke sekolah sesuai dengan zonasi, termasuk menawarkan pilihan alternatif.

Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai, kebijakan Kemdikbud sering memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan kondisi di daerah atau kabupaten/kota. Ia menyarankan, setiap kebijakan Kemdikbud sebaiknya jangan hanya berpatokan pada daerah maju seperti DKI Jakarta. Hal ini berkaca dari kesuksesan sistem zonasi yang ditawarkan hanya dapat ditemui di sekolah-sekolah yang berada di DKI Jakarta.

Untuk itu, Ubaid menuturkan, setiap kebijakan, pemerintah pusat sebaiknya cukup memberikan gambaran-gambaran umum saja. Sedangkan teknisnya kembali diserahkan kepada pihak penyelenggara, karena sistem zonasi ini akan berdampak bagus pada sebagian kota yang

sudah siap. Sedangkan pada beberapa daerah dengan kualitas pendidikan tidak merata, kebijakan itu akan bermasalah.

Kemudian, ia mengatakan, perubahan skema PPDB dengan fokus ke zonasi atau apapun tetap akan menimbulkan masalah karena pemerintah pusat kerap membuat kebijakan yang tidak diterjemahkan secara tepat oleh pihak penyelenggara. Pasalnya, secara otonomi, kebijakan pendidikan ada di wilayah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Yang terjadi selama ini, penyelenggara sekolah selalu melakukan kebijakan yang tidak sinkron dengan pusat. Bahkan banyak kebijakan yang bertentangan satu sama lain.

"Jadi maunya di pusat apa dan dipahami serta ditangani pemprov dan kabupaten apa. Ini terbukti dengan model zonasi pada PPDB 2018 kemarin. Apa yang dikehendaki Kemdikbud diterjemahkan beda oleh penyelenggara. Kami (JPPI, red) menemukan bahwa banyak kabupaten kota dan provinsi yang menerjemahkan kebijakan zonasi dengan berbeda-beda. Hal ini menunjukkan carut-marut pendidikan baik di level pusat maupun penyelenggara langsung pemerintah provinsi atau kabupaten/kota," kata Ubaid kepada SP, Rabu (19/9) pagi.

Ubaid juga menyarankan, pemerintah pusat dalam berkoordinasi jangan hanya dengan dinas pendidikan. Pasalnya penyelenggara pendidikan di daerah adalah bupati, walikota dan gubernur karena mereka lah yang akan menandatangani peraturan terkait dengan PPDB.

"Sebaiknya pusat melakukan koordinasi dengan kepala daerah karena di daerah yang memiliki otoritas penuh adalah bupati dan wali kota, juga gubernur. Kerena meski Dinas Pendidikan sepatat dengan pusat tapi Bupati atau Gubernur tidak setuju, bisa lain ceritanya. Yang terjadi selama ini kepala daerah melakukan sebuah kebijakan bukan hanya pertimbangan persoalan pendidikan tetapi juga politik," ujarnya.

Sumber: <http://www.beritasatu.com/nasional/511408-skema-ppdb-diubah-pengamat-jangan-hanya-berpatokan-pada-daerah-maju.html>

IGI: Perekrutan Guru 2018 Hanya Tutupi Kekosongan



Ilustrasi belajar mengajar di sekolah. (Foto: Antara)

Jumlah guru pensiun 2018 dan 2019 jauh lebih banyak daripada formasi CPNS guru tahun ini. Tahun ini ada 51.000 guru pensiun, tahun 2019 ada 60.000 ttpi kuota guru yang diangkat tahun ini hanya 82.000.

Maria Fatima Bona / JAS Senin, 17 September 2018 | 10:14 WIB

Jakarta - Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, pendidikan saat ini tidak menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini berkaca dari jumlah kekurangan guru pada sekolah negeri.

Ramli mengatakan, jumlah guru pensiun 2018 dan 2019 jauh lebih banyak daripada formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru tahun ini. Hal ini menandakan perekrutan guru 2018 ini hanya untuk menutupi kekosongan guru 2018 dan 2019.

"Perekrutan guru yang akan dilakukan ini bukan untuk menutupi kekurangan guru tetapi mengganti posisi guru yang pensiun tahun ini dan tahun depan," kata Ramli kepada Suara Pembaruan, Senin(17/9).

Ramli menyebutkan, berdasarkan data IGI, tahun ini ada 51.000 guru yang pensiun. Sedangkan 2019, ada 60.000-an pensiun. Sedangkan kuota guru yang diangkat tahun ini hanya pada kisaran 82.000.

Padahal dari data Kemdikbud 2018, sekolah mengalami kekurangan guru sebanyak 707.324 orang. Maka, dengan tidak adanya keberpihakan formasi CPNS guru. IGI menilai pemerintah tidak serius menangani masalah kekurangan guru.

Untuk itu, Ramli mengatakan, IGI menawarkan solusi jangka pendek untuk kekurangan guru tersebut. Pertama; optimalisasi guru yang berlebih dengan cara mutasi dari sekolah yang kelebihan dengan sekolah yang kekurangan guru. Dalam hal ini, guru PNS yang saat ini mengabdikan di sekolah swasta sebaiknya ditarik untuk kembali ke sekolah negeri supaya kebutuhan sekolah negeri tertutupi.

Kedua; guru dapat mengajar multisubject. Ketiga; status guru honorer harus diperjelas yakni mereka sebaiknya dikontrak lima tahun agar dapat fokus mengajar.

“Selama ini guru honorer tidak konsen mengajar karena mereka dihantui apakah tahun depan masih dipakai lagi atau tidak dan selain itu gaji mereka tidak signifikan dan masih sangat rendah,”ujarnya.

Meski memperjuangkan guru honorer, Ramli juga menegaskan, skema pengangkatan guru honorer harus memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, guru tidak hanya profesionalisme saja, tetapi guru harus memenuhi empat kompetensi yakni pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

“Kita dulu menemukan guru yang secara akademik sangat mampu tetapi sulit atau tidak mampu melakukan transfer ilmu kepada kita. Dia ngajarin siswa, dia mengerti sendiri dan siswanya tidak mengerti. Nah seperti itu tidak boleh jadi guru,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, jumlah guru PNS sangat kurang bisa dilihat dari hampir semua sekolah negeri pasti diisi oleh guru honorer. Untuk itu, dalam mengatasi masalah kekurangan guru PNS pada sekolah negeri. Ubaid menyarankan, pemerintah sebaiknya membuka kuota afirmasi untuk guru honorer termasuk kategori K-2 yang sudah lama mengabdikan.

Selanjutnya, Guru Besar bidang ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab mengatakan, dengan adanya wajib belajar (Wajar) 12 tahun. Seharusnya ketersediaan guru menjadi salah satu prioritas. Apalagi Wajar 12 ini telah digaungkan dari pemerintah sebelumnya.

“Diakhir pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Wajar 12 tahun ini sudah dideklarasikan, maka seharusnya di era Jokowi Wajar 12 tahun leih dimantapkan. Berarti guru-gurunya pun harus wajib dipenuhi,” kata Rochmat.

Menurut Rochmat, prinsip zero growth untuk pengangkatan PNS belum tepat untuk guru. Hal ini berkaca dari data kekurangan guru kelas maupun guru mata pelajaran versi Kemdikbud. Belum lagi ditambah dengan Kementerian Agama (Kemag). Sedangkan kuota CPNS untuk guru 2018 ini pemerintah hanya menyediakan sebanyak 120.000 dialokasikan untuk formasi tenaga pendidik yakni guru dan dosen.

“Pemerintah hanya menyediakan kuota 120.000, Angka ini yang sangat jauh dari memadai. Tidak bisa kondisi ini diabaikan, Bagaimana kekurangan guru yang hampir separuh itu tidak ditangani. Tentu ini akan berdampak jelek terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan,” pungkasan mantan rektor UNY itu.

Menurut dia, dengan kondisi sekolah kekurangan guru ini. Banyak siswa tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Untuk itu, ia mengharapkan, pemerintah meningkatkan kuota CPNS untuk guru tiap tahunnya, sehingga dalam waktu 5 hingga enam tahun dapat terpenuhi kebutuhan guru tersebut.

Selanjutnya, Rochmat juga mengatakan, pemerintah harus mengubah prinsip pengangkatan guru. Dalam hal ini, prinsip pengangkatan PNS disesuaikan dengan angka pensiun dan kebutuhan baru seiring dengan penambahan penduduk. Sehingga PNS tidak mengikuti Zero Growth.

Selain itu, ia menyebutkan, penambahan sekolah negeri perlu dikendalikan dengan pertimbangan adanya sekolah swasta. "Jika ada dana untuk unit sekolah baru, sebaiknya diarahkan untuk pengangkatan guru PNS yang diperbantukan ke sekolah swasta,"ujarnya.

Menurut Rochmat, orientasi pembangunan ke depan sebaiknya tidak hanya pada infrastruktur, melainkan pada sumber daya manusia (SDM). Sedangkan untuk pengadaan infrastruktur sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan.

Secara terpisah, anggota komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, adanya data terbaru kekurangan guru. Ia menyarankan sebaiknya menghitung ulang terhadap kebutuhan guru. "Kenapa saya minta hitung ulang, karena selama ini Kemdikbud selalu mengatakan sesungguhnya tidak ada kekurangan guru," kata politisi Golkar itu.

Ia menyebutkan, jika kelebihan guru terjadi pada PNS di daerah tertentu maka harus ada ketegasan pemerintah untuk melakukan mutasi guru berdasarkan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara (ASN).

Sumber : <http://www.beritasatu.com/nasional/510902-igi-perekrutan-guru-2018-hanya-tutupi-kekosongan.html>



**Diakhir pemerintahan Pak SBY
(Susilo Bambang Yudhoyono),
Wajar 12 tahun ini sudah
dideklarasikan, maka seharusnya
di era Jokowi Wajar 12 tahun leih
dimantapkan**

JPPI Beberkan Sejumlah Persoalan Guru Honorer



Kornas JPPI Ubaid Matraji (batik hitam)/Wartabanten

15 Agustus, 2018 BANTEN HARI INI, Kota Tangsel 398 Views

Tangsel (WB)- Dari tahun ke tahun nasib para guru honorer terkatung-katung tanpa ada penyelesaian secara rigid. Hal tersebut dapat diketahui dari daftar inventarisasi masalah yang dialami oleh guru honorer yang pernah diadakan ke Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Kepada Warta Banten, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, membeberkan sejumlah persoalan yang pernah diadakan para guru honorer selama kurun waktu Januari 2017 hingga maret 2018. Menurutnya, selama satu tahun tiga bulan tersebut ada 637 pengaduan terkait dengan masalah guru honorer.

Diantaranya, guru honorer agama atau madrasah tidak dapat kucuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebanyak 130 aduan. Guru honorer tidak fokus mengajar, kerja sampingan sebanyak 66 aduan. Guru honorer status PNS yang hanya janji, sebanyak 101 aduan. Pencairan gaji guru honorer sering telat, sebanyak 91 aduan. Guru honorer tidak ada kepastian hukum, sebanyak 83 aduan. Gaji para tenaga honorer masih di bawah UMR, sebanyak 166 aduan.

"Aduan yang dilaporkan ke kami itu, dari guru honorer se-Jabodetabek. Didalamnya termasuk guru honorer Kota Tangerang Selatan (Tangsel)," bebernya.

Menurut Ubaid, keberadaan guru honorer adalah fakta karena masih banyak sekolah yang merasa kekurangan guru. Akan tetapi yang menjadi persoalan nasib guru-guru honorer terkatung-katung tanpa ada penyelesaian. Sehingga, pihaknya pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemrov)

Banten untuk mengutamakan guru honorer.

“Jadi harus ada kebijakan afirmasi untuk guru honorer kategori K2 yang belum PNS. Harus ada jalur khusus untuk guru honorer K2, mengingat mau ada rekrutmen jumlah guru, dan guru yang diangkat Pemerintah Daerah (Pemda),” pungkasnya (mg3/yat).

Sumber : <https://wartabanten.id/2018/08/jppi-beberkan-sejumlah-persoalan-guru-honorer.html>

JPPI: Asian Games Harus Jadi Momen Pembelajaran Siswa

Selasa 07 Agu 2018 06:06 WIB

Rep: Rahma Sulistya/Farah Noersativa/ Red: Bilal Ramadhan



Foto: dok. Istimewa

Disdik DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan 70 sekolah yang diliburkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 70 sekolah yang berada di rute venue Asian Games 2018 diliburkan selama 12 hari dari 20-31 Agustus 2018 mendatang. Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang mengalami penyesuaian waktu belajar mengajar selama Asian Games 2018.

Hal itu dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada perwakilan masing-masing sekolah untuk rapat koordinasi. Dia mengatakan sekolah-sekolah tersebut telah menyatakan menerima kebijakan penyesuaian waktu belajar atau libur sekolah tersebut.

Sebab menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk kontribusi dari sekolah demi menyukseskan perhelatan olahraga Asian Games 2018. Dia juga menegaskan, tak ada masalah dengan adanya keputusan dari INASGOC yang pada akhirnya menambah satu rute yang akan dilewati. Rute itu adalah rute sembilan dari Wisma Atlet Kemayoran ke Gelanggang Olah Raga (GOR) Bulungan Jakarta Selatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah satu rute yang dilewati oleh para atlet Asian Games. Hal itu berdasarkan validasi antara Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang kelancaran perjalanan atlet pada saat Asian Games.

“Bagi sekolah yang tidak terdampak, proses kegiatan belajar mengajar pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Provinsi DKI Jakarta tetap berlangsung seperti biasa,” kata Bowo, Senin (6/8).

Guru sejarah di SMA Diponegoro yang menjadi salah satu sekolah yang diliburkan, Nur Aprilia Juwita mengatakan akan memberikan tugas kepada para siswa selama libur akibat Asian Games. Dengan libur tersebut, maka ia akan kehilangan dua kali pertemuan dalam dua pekan tersebut. Mengenai materi pengayaan soal Asian Games, ia mengaku tidak dapat memasukkannya ke dalam materi pengajaran. Ia menjelaskan di kelas X, materi pelajaran seputar dasar-dasar sejarah. Kemudian di kelas XI terkait kolonialisasi Eropa. Sedangkan di kelas XII tentang disintegrasi bangsa. “Mungkin sih bisa dimasukkan ke kelas 12, tapi materinya tentang integrasi bangsa dan itu sekitar pertengahan semester dua bulan lagi,” kata Ria, begitu ia kerap disapa.

Terkait Asian Games, sekolahnya hanya meminta guru olahraga untuk mengimbuu kepada siswa untuk menonton pertandingan pesta olahraga tersebut. “Kalau dengan tekanan bisa mempengaruhi nilai, mungkin siswa akan nonton. Kalau hanya imbauan, saya pesimistis mereka mau nonton,” ujar dia.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid menekankan tidak mempermasalahkan liburnya sekolah. Namun pihak sekolah harus memiliki pedoman untuk memberikan pembelajaran di luar sekolah dengan mengaitkan pembelajaran di luar sekolah dan Asian Games.

“Artinya proses pembelajaran itu kan tidak harus di dalam kelas ya, tapi bisa dilakukan di luar kelas. Penting juga untuk memberi pengetahuan kepada siswa untuk tahu mengenai sejarah Asian Games, apakah dulu ada hal serupa di Indonesia, lalu bagaimana peran Indonesia,” kata Abdullah.

Dia juga menyarankan, sekolah juga bisa mengkaitkan perhelatan Asian Games dengan minat dari masing-masing siswa, terutama di bidang olah raga. Menurutnya, para guru bisa mendata siswa-siswa yang berminat di olah raga dengan berbagai bidang, lalu mengajak mereka berdiskusi mengenai olah raga tersebut.

Hal itu, artinya, kata dia, para guru bisa menjadikan Asian Games sebagai konten pembelajaran di luar sekolah. Para pendidik juga bisa mengajarkan perihal Asian Games dengan berbagai sudut pandang. Dia juga mengatakan, pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah juga menjadi penting. Sebab adanya perhelatan Asian Games di Indonesia menjadi sebuah peluang pembelajaran bagi masyarakat, terutama bagi siswa.

“Apalagi ini event internasional, yang belum tentu beberapa tahun lagi ada di Indonesia. Kapan lagi mereka akan bergaul dengan orang-orang di dunia internasional. Siswa-siswa yang juga bisa berbahasa Inggris juga bisa menerapkan atau mempraktikkan bicara dengan negara-negara lain. artinya ada banyak angle yang bisa dipelajari dari Asian Games,” kata dia.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/08/06/pd1s9u330-jppi-asian-games-harus-jadi-momen-pembelajaran-siswa>

Kebobrokan PPDB Online Di Tangsel 2018 Terungkap

Pendidikan SENIN, 23 JULI 2018 , 19:17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI
Kebobrokan PPDB Online Di Tangsel 2018 Terungkap



Foto : IST

RMOLBanten. Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Kota Tangsel membongkar bobroknya penerimaan peserta didik baru (PPDB) online 2018.

KMPP yang terdiri dari berbagai lembaga kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat ini mencatat ratusan pengaduan permasalahan PPDB online 2018. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdul Ubaid Matraji mengatakan, pihaknya mencatat selama proses PPDB online terdapat 692 pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut didominasi wilayah Jabodetabek.

"Pengaduan dari masyarakat banyak yang mempertanyakan soal zonasi, kuota dan juga adanya praktek pungli," katanya saat konferensi pers di Pamulang, Kota Tangsel, Senin (23/7). Menurutnya, permasalahan tersebut sudah terjadi sejak tahun lalu. Namun, tahun ini lebih parah. Apalagi kasus di Kota Tangsel, server PPDB online sering nge-down. Sehingga mempersulit akses saat orang tua calon siswa untuk mendaftarkan anaknya.

"Bahkan masih ada yang kami temukan operator penyelenggara PPDB yang masih belum paham soal sistem online," ujarnya. Selain itu, kuota penerimaan siswa di sekolah banyak menyalahi aturan. Salah satunya penerimaan melalui jalur orang tidak mampu. Pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sering disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Masih saja SKTM diperbolehkan untuk dijadikan siswa masuk kuota miskin.

"Padahal, SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah. Harusnya, untuk menunjukkan keterangan tidak mampu, bisa dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," tegasnya.

Sementara itu, terkait temuan pungli dan jual beli kursi, JPPI juga menemukan praktik pungli dan jual beli kursi yang dilakukan selama proses berlangsung sebelum pengumuman PPDB.

“Ya betul, (praktik pungli dan jual beli kursi) bisa dilakukan sebelum mendaftar, saat pendaftaran awal, dan bahkan saat proses daftar ulang,” terangnya. Sementara Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi TRUTH, Jupry Nugroho menjelaskan buruknya persiapan panitia PPDB online menjadi salah satu penyebab kekisruhan. Dalam catatan TRUTH, terdapat permasalahan PPDB online di Kota Tangsel.

“Yakni, minimnya sosialisasi cara pendaftaran PPDB online, kekeliruan NIK dengan nama peserta PPDB, server PPDB error, sistem zonasi serta pungli. Kami minta PPDB online ini dievaluasi dengan merevisi aturan Agara kedepannya lebih baik,” tutupnya. [mor]

Sumber : <http://www.rmolbanten.com/read/2018/07/23/2005/Kebobrokan-PPDB-Online-Di-Tangsel-2018-Terungkap->

“

Ada yang kami temukan operator penyelenggara PPDB yang masih belum paham soal sistem online

”

Sistem Zonasi Sekolah Timbulkan Ketidakpastian

Ester lince napitupulu
20 Juli 2018



KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/7/2018) yang menyuarakan penerimaan peserta didik baru. Salah satunya soal zonasi yang menimbulkan banyak masalah dan pemahaman yang beragam.

Penerimaan peserta didik baru pada 2018 dengan sistem zonasi masih memicu ketidakpastian di masyarakat karena pemahaman kebijakan ini beragam. Apalagi kebijakan itu belum diikuti dengan pemerataan mutu pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang dua tahun ini diterapkan memicu ketidakpastian pada masyarakat. Acuan zonasi yang dipahami masyarakat dan diterapkan di daerah yang beragam membuat kisruh penerimaan siswa baru di jenjang pendidikan dasar terus terjadi.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online atau daring yang diharapkan menjadi sistem penerimaan siswa baru yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel belum terjadi. Hal itu mengakibatkan dugaan kecurangan dalam PPDB mencuat.

Masalah PPDB itu diungkapkan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) bersama 34 jaringan yang tersebar di beberapa daerah. Hasil pantauan PPDB 2018 itu disampaikan Siti Juliantari dari Indonesia Corruption Watch, Ubaid dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Jupri Nugroho dari Truth Tangerang, Gufron dari Banten Bersih, dan Jumono dari Perkumpulan Wali Murid, Kamis (19/7/2018), di Jakarta.

Sejumlah soal penting dalam PPDB yang dilaporkan masyarakat terkait zonasi yakni implementasinya beragam dan tak sesuai acuan pemerintah pusat. "Pemahaman soal zonasi ini beragam. Ada yang menerapkan zonasi dilihat dari tempat tinggal, ada yang memperhitungkan nilai. Ketidakjelasan ini membuat masyarakat, yakni siswa baru dan orangtua, jadi korban," kata Siti.

Pemahaman soal zonasi ini beragam. Ada yang menerapkan zonasi dilihat dari tempat tinggal, ada yang memperhitungkan nilai. Ketidakjelasan ini membuat masyarakat, yakni siswa baru dan orangtua, jadi korban.

Laporan soal surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu mendominasi soal PPDB. Sejak tahun lalu, persoalan ini sudah muncul. Ada pula penerimaan siswa baru tingkat madrasah ibtidaiyah yang menerapkan tes membaca, menulis, dan menghitung (calistung), serta tak ada kuota afirmatif bagi anak berkebutuhan khusus. Laporan pungutan liar dan jual beli bangku masih ada.

Ubaid menambahkan, masalah zonasi baru dirasakan setelah pengumuman penerimaan siswa baru. Ada sekolah yang kekurangan siswa, ada siswa yang tinggal dekat sekolah tidak diterima, tetapi siswa dari luar zonasi diterima, hingga berbagai ketidakjelasan lain. "Zonasi ini harus dievaluasi secara serius, apakah sudah siap diberlakukan secara nasional? Tahun depan jangan lagi ada kisruh PPDB karena soal zonasi belum matang," ujarnya.

Mutu tidak merata

Ubaid mengingatkan, kebijakan zonasi tanpa disertai pemerataan mutu sekolah memicu pelanggaran dalam PPDB 2018. Karena itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan dengan indikator mencakup ketersediaan fasilitas penunjang belajar mengajar dan kualitas guru.

Menurut Jupri, PPDB di wilayah Tangerang Raya banyak dikeluhkan masyarakat. Kriteria yang digunakan terutama siswa miskin, jarak, nilai, dan prestasi. "Soal kuota siswa miskin ini jadi celah yang bisa dimainkan. Sementara soal zonasi belum ada pemahaman sama," ujarnya.

Jupri menjelaskan, jual beli bangku dilakukan oknum pejabat di tingkat RT sampai camat. Ada tarif yang dipasang untuk meloloskan calon peserta didik untuk dapat masuk ke sekolah yang diinginkan dengan meminta kuota kepada sekolah.

Data KMPP Tangerang menunjukkan, dari 12 SMA di Kota Tangerang Selatan, 10 sekolah menerima kurang dari kuota penerimaan dalam zonasi yang ditentukan, yakni 70 persen. Untuk kuota penerimaan domisili di luar zonasi, tak ada sekolah yang memenuhi kuota 5 persen. "Kami menerima aduan dari banyak orangtua murid soal PPDB 2018. Mereka mengeluh sistem zonasi dan sistem online yang buruk," kata Jupri.

Sementara Jumono menegaskan, sosialisasi kebijakan zonasi perlu digalakan agar tak ada kebingungan di kalangan orangtua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah. Ketidaktahuan orangtua murid jadi peluang oknum tertentu memanfaatkan situasi seperti pungli, jual beli bangku, dan kecurangan lain.

"Ini harus menjadi perhatian. Kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Banyak orangtua tidak

banyak mendapat informasi terkait PPDB," kata Jumono.

Menurut Siti Juliantari, berdasarkan pemantauan proses PPDB 2018 dari KMPP, mereka akan terus ikut mengawasi dan akan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama PPDB 2018.

Evaluasi

Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tahun depan Kemdikbud tetap memberlakukan PPDB dengan zonasi. Namun, evaluasi akan dilakukan. "Target saya, tahun depan sudah tidak ada ribut-ribut menjelang PPDB. Karena itu, kepala dinas pendidikan segera dikumpulkan agar mulai sekarang menyiapkan PPDB tahun depan," ujarnya.

Terkait zonasi, Muhadjir mengatakan masih terjadi salah paham. Zonasi bukan selalu berarti yang rumahnya paling dekat dengan sekolah pasti diterima.



KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Mendikbud muhadjir Effendy "yang dimaksud zonasi, jangan sampai anak yang masuk dalam zonasi tak diterima di sekolah-sekolah yang masih satu zonasi jika daya tampung mencukupi," katanya.

Dari dua tahun pelaksanaan zonasi, pemetaan sudah mulai terlihat. Berdasarkan pemetaan itu, pembenahan sistem zonasi itu dilakukan, termasuk membuat implementasi zonasi fleksibel. (E20).

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/07/20/sistem-zonasi-sekolah-timbulkan-ketidakpastian/>

Guru Harus Bersedia Dipindah

JPPI: Redistribusi Guru Jangan Hanya Wacana

Citra Larasati • 20 Juli 2018 14:54 WIB



Seorang guru mengajarkan siswa Sekolah Dasar, MI/Gino Hadi

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tegas dalam mengimplementasikan kebijakan redistribusi guru. Ia berharap, kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara konkret, sehingga pemerataan kualitas dan kebutuhan guru di Indonesia dapat segera terwujud.

"Redistribusi guru jangan hanya wacana. Langkahnya selama ini enggak konkret. Padahal sudah jelas, keberadaan guru honorer di sekolah negeri selama ini adalah tanda sekolah negeri masih ada daerah yang kekurangan guru," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kepada Medcom.id saat ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis, 19 Juli 2018.

Langkah-langkah nyata pun harus segera dilakukan, seperti melakukan pemetaan kebutuhan guru baik secara kuantitas maupun kualitas di seluruh Indonesia. Wilayah mana yang kelebihan guru, dan mana kekurangan guru harus secara detail dimiliki Kemendikbud.

Data persebaran, kebutuhan guru, persebaran kualitas itu harusnya di-publish kepada masyarakat, agar masyarakat ikut berpartisipasi memantau di daerahnya masing-masing. "Seperti PPDB 2019 ini, kasus-kasus yang terjadi itu banyaknya hasil laporan masyarakat. Saya tidak yakin

Kemendikbud punya data guru yang detail itu, karena dapodik (data pokok pendidikan) saja belum mencerminkan itu,” terang Ubaid.

Setelah ada pemetaan, harus dipikirkan solusinya. Siapa dan berapa guru yang harus dipindah, dan kemana guru tersebut harus dipindah. “Termasuk harus ada tindakan jika memang harus rekrut guru baru,” ujar Ubaid.

Ia juga menanggapi banyak guru yang ogah dipindah ke sekolah dan daerah lain, salah satunya karena alasan kesejahteraan. Ada juga guru yang menolak dipindah dari Jakarta ke Depok, karena akan berpengaruh pada perubahan penghasilannya. Perbedaan penghasilan tersebut salah satunya karena Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berbeda di tiap daerah.

“Kalaupun ada perbedaan angka (tunjangan) guru harus siap dipindah. Karena selain guru adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), saya kira skema Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang ada selama ini sudah sangat bagus. Ya, kecuali kalau gaji guru masih kecil seperti zaman dulu. Guru harus mau dipindah kemanapun beserta konsekuensinya.” tegas Ubaid.

Seperti diberitakan sebelumnya. Kemendikbud mulai menerapkan kebijakan mutasi guru untuk tujuan redistribusi secara rutin dan berkelanjutan, sebagai kelanjutan upaya pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan mutasi guru mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2018/2019 ini.

Upaya pemerataan kualitas pendidikan tidak hanya ditempuh pemerintah melalui penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Setelah ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga akan melakukan pemerataan kualitas guru dengan program mutasi guru yang dilakukan secara masif, rutin dan berkelanjutan.

Sumber : <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2VLYMb-jppi-redistribusi-guru-jangan-hanya-wacana>

PENERIMAAN SISWA BARU

Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 Sarat Masalah

DEONISIA ARLINTA

19 Juli 2018 · 19:25 WIB



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Suasana di posko pengaduan dan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta 2018 di SMKN 1 Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018). Nomor induk kependudukan (NIK) siswa yang tidak terdeteksi saat pendaftaran menjadi permasalahan yang paling banyak masuk di posko tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Meski bukan kali pertama sistem penerimaan peserta didik baru secara daring diberlakukan, sejumlah permasalahan masih ditemukan pada pendaftaran tahun ini. Setidaknya, dari hasil pemantauan koalisi masyarakat sipil peduli pendidikan ditemukan ada enam permasalahan utama dalam proses penerimaan siswa baru pada 2018.

Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Nailul Faruq, saat dihubungi Kamis (19/7/2018) di Jakarta, menyampaikan, salah satu catatan yang ditemukan adalah maraknya penggunaan surat keterangan tanda miskin (SKTM) palsu di sejumlah daerah, seperti di Jawa Tengah.

Kebijakan minimal kuota 20 persen untuk masyarakat miskin justru dimanfaatkan orangtua yang anaknya tidak memiliki nilai cukup ataupun takut bersaing agar bisa masuk ke sekolah pilihannya.

"Surat itu dapat dibuat dengan mudah tanpa ada verifikasi lebih lanjut dari pejabat yang mengeluarkan. Indikasi suap-menyuap pun bisa terjadi saat proses pembuatan SKTM ini," katanya.

Selain itu, masalah lain yang ditemukan adalah adanya tes baca tulis hitung (calistung) dan psikotes untuk calon peserta didik kelas I sekolah dasar di madrasah ibtidaiyah, Jakarta.

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2018 tentang PPDB tertulis, kedua tes tersebut diperbolehkan dalam pendaftaran peserta didik. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 terdapat aturan larangan tes calistung bagi siswa yang akan masuk sekolah dasar.

Tidak ada kuota afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 juga menuai masalah lain dalam PPDB 2018.

Banyak orangtua dari ABK enggan bersekolah di sekolah selain sekolah luar biasa (SLB) karena tidak ada komitmen dari pihak sekolah. Dalam konteks ini, aturan madrasah di bawah Kementerian Agama lebih ramah terhadap ABK. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2018 memberikan kuota minimal 10 persen bagi ABK.



Kompas/Wisnu Widianoro (NUT)

Warga dilayani petugas di Posko Penerimaan Peserta Didik Baru di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Senin (2/7/2018). Menurut sejumlah petugas, sebagian besar warga meminta perubahan data alamat domisili sesuai kartu keluarga mereka yang baru. Perubahan tersebut untuk dilakukan agar anak bisa mendaftar di sekolah yang dituju.

Kebijakan zonasi yang diterapkan saat ini dinilai sudah baik, namun karena tidak diimbangi dengan pemerataan kualitas sekolah menyebabkan sebagian orangtua masih bersikeras memasukkan anaknya di sekolah favoritnya. Di beberapa daerah, sistem zonasi mensyaratkan nilai calon peserta didik yang baik sehingga ditemukan peserta didik yang tidak diterima di sekolah yang dekat rumahnya karena nilai standar.

Masalah jaringan server juga masih ditemui di beberapa daerah. Hal ini ditemukan misalnya di SMAN 1 Balikpapan. Selain itu, masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar

dalam sistem juga menghambat pendaftaran siswa didik.

Pungutan liar dan jual beli bangku masih terjadi pada PPDB 2018. Pungli ini seperti pungutan yang disebutkan sekolah untuk biaya untuk perbaikan fasilitas, lembar kerja siswa, seragam, dan buku. Padahal dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB Pasal 25 disebutkan, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun masyarakat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang melakukan pungutan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemantauan proses PPDB 2018 tersebut, sejumlah rekomendasi diajukan koalisi masyarakat sipil ke pemerintah.

Rekomendasi tersebut antara lain, perlunya sinkronisasi peraturan PPDB yang diterbitkan oleh Kemendikbud dan Kemenag tentang hal-hal krusial terkait dengan proses PPDB. Misalnya, tidak adanya pungutan saat PPDB di semua jenjang, kuota afirmasi untuk anak tidak mampu dan ABK, serta tidak adanya tes calistung dan psikotes di jenjang SD/MI.

Selain itu, pemerintah diminta untuk menyamakan kualitas sekolah sebagai syarat pengimpelembtasian sistem zonasi. Hal ini penting agar konsep sekolah favorit yang dinilai unggul dari segi sarana dan prasarana sekolah tidak berlaku lagi.



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para orangtua mendampingi anaknya mengisi formulir pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online dengan komputer fasilitas yang disediakan oleh SMA Negeri 3, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6). Dalam PPDB tahun ini Jawa Barat menerapkan skor radius jarak rumah dengan sekolah untuk calon siswa SMA dan SMK.

Sistem PPDB daring juga perlu lebih terintegrasi dengan data Kepedudukan dan Catatan Sipil terkait dengan pemutakhiran NIK. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi masalah NIK yang tidak terdeteksi. Selain itu, Pemda harus memastikan bahwa permasalahan server down tidak akan terjadi lagi.

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB sangat diperlukan. "Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses PPDB. Tanpa ada laporan dari masyarakat dan orangtua murid, kecurangan PPDB akan terus terjadi dan berulang," ujar Nailul.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/07/19/penerimaan-peserta-didik-baru-2018-sarat-masalah/>

Menimbang Sistem Zonasi

Elin Driana Dosen Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta

13 Juli 2018



Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri telah memicu protes dan kekecewaan dari sebagian orangtua dan anak.

Gagalnya peserta didik yang memiliki nilai ujian nasional (UN) lebih tinggi untuk dapat diterima di sekolah negeri karena tergeser oleh peserta didik dengan nilai UN lebih rendah, namun tinggal lebih dekat dari sekolah atau memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM), merupakan salah satu isu yang muncul berdasarkan analisis atas respons warganet melalui Facebook dan pemberitaan media massa yang saya lakukan.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Suasana di posko pengaduan dan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta 2018 di SMKN 1 Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Penyalahgunaan SKTM oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak untuk memanfaatkan kuota minimal 20 persen bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan gangguan-gangguan teknis saat pendaftaran secara daring juga mewarnai pelaksanaan PPDB tahun ini.

Selain itu, analisis Ismail Fahmi, seorang ahli komputasi bahasa dan analisis media, yang memantau percakapan terkait PPDB di Twitter dan media daring menggunakan Drone Emprit, menunjukkan bahwa respons negatif masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB jauh lebih dominan dibandingkan dengan respons positif, sebagaimana ditulis di akun Facebook-nya pada tanggal 12 Juli 2018.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih cenderung lebih mendengarkan respons positif dari masyarakat. Meskipun demikian, terpantau juga dua orang kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo yang paling aktif merespons keluhan dan kekecewaan masyarakat dan mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan PPDB.

Tidak adil?

Banyak yang menilai bahwa sistem zonasi tidak adil karena nilai UN yang tinggi sebagai buah kesungguhan peserta didik dalam belajar seakan-akan sia-sia karena dikalahkan oleh jarak antara rumah dan sekolah ataupun status sosial ekonomi. Sistem zonasi juga dipandang dapat menurunkan motivasi peserta didik dalam belajar karena nilai yang tinggi tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.

Pembatasan jumlah peserta didik dari luar zona yang hanya 5 persen juga dirasa merugikan peserta didik yang ingin mendapatkan layanan pendidikan lebih baik dibandingkan dengan yang ada di dekat tempat tinggalnya.

Selama ini, pandangan bahwa peserta didik dengan prestasi akademik yang lebih tinggilah yang lebih pantas untuk diterima di sekolah-sekolah negeri mengingat kapasitasnya yang terbatas, apalagi di sekolah favorit, tampaknya telah terpatri di masyarakat. Sekolah-sekolah favorit tersebut dianggap memiliki mutu yang lebih tinggi dibandingkan sekolah-sekolah negeri lainnya.

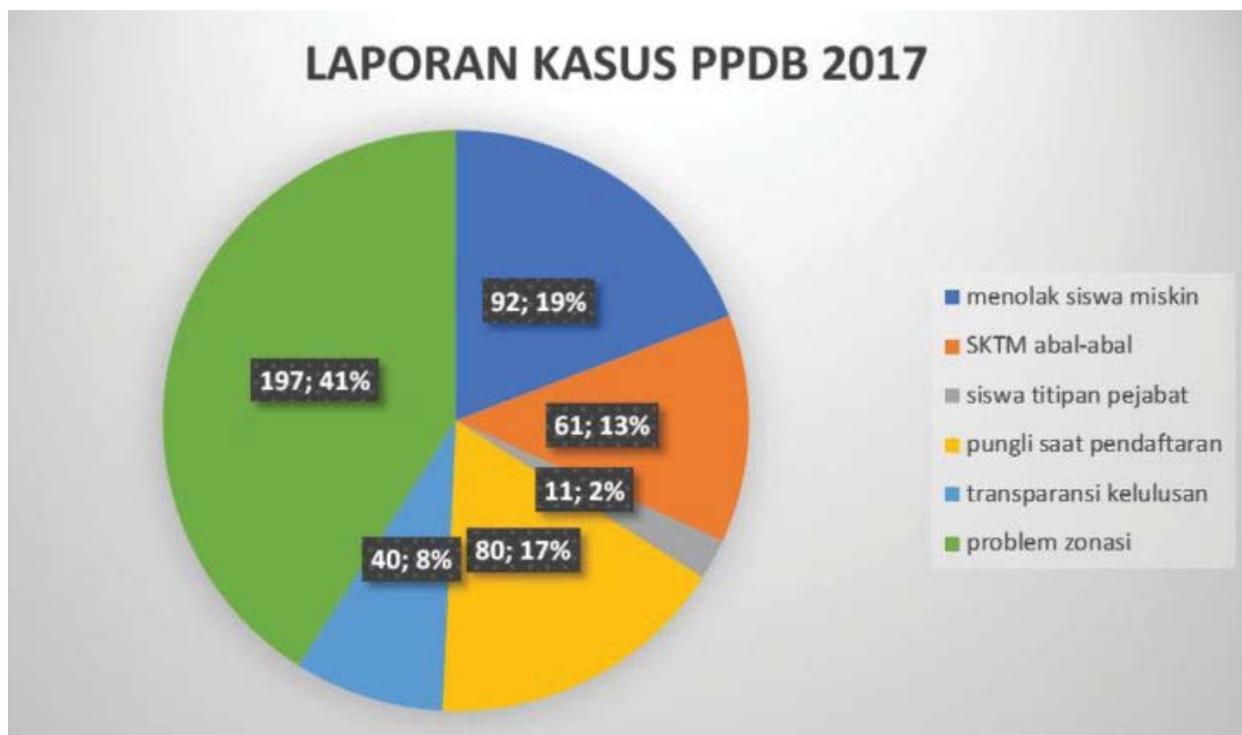


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Calon Siswa SMK – Para siswa lulusan SMP/MTs sederajat antri untuk melakukan verifikasi berkas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap I di SMK Negeri 19 Jakarta, Kamis (15/6). Proses PPDB Tahap I akan berlangsung hingga 17 Juni Besok. Kompas/Wawan H Prabowo (WAK) 15-06-2017

Iklm belajar di sekolah favorit ini pun dinilai lebih baik karena peserta didik yang diterima di sekolah tersebut umumnya memiliki kemampuan akademik dan motivasi belajar yang tinggi. Di samping itu, bersekolah di sekolah-sekolah favorit, terutama di jenjang pendidikan menengah, juga dianggap dapat membuka peluang lebih besar untuk dapat diterima di PTN melalui jalur SNMPTN yang mempertimbangkan nilai rapor, ranking siswa, dan reputasi sekolah.

Meskipun demikian, ada juga warganet yang berpendapat bahwa sistem zonasi sebenarnya positif untuk mendorong pemerataan pendidikan, sehingga ke depannya diharapkan mutu sekolah menjadi lebih setara. Mereka juga menilai bahwa sekolah-sekolah negeri yang selama ini dianggap bermutu oleh masyarakat sebenarnya lebih merupakan cerminan input dibandingkan mutu pembelajaran di sekolah itu sendiri karena selama ini peserta didik yang diterima di sekolah-sekolah itu adalah mereka yang memang memiliki prestasi akademik yang tinggi.



sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam beragam kesempatan menegaskan bahwa “penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.” Akan tetapi, kata “pemerataan” sendiri tidak muncul dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.”

Tidak terteranya frasa “pemerataan mutu”, tetapi hanya “akses layanan pendidikan” dikhawatirkan dapat mengurangi gaung pesan utama sistem zonasi ini sehingga tidak tertangkap sepenuhnya oleh para kepala daerah, pejabat-pejabat di dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan masyarakat dalam sosialisasi dan implementasi PPDB. Permendikbud ini tampaknya perlu direvisi lagi untuk lebih menegaskan tujuan sistem zonasi.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Orangtua calon peserta didik melihat pengumuman terkait pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 yang ditempel di dinding SMA N 78 Jakarta, Kamis (21/6/2018). Pendaftaran pertama untuk jalur lokal secasra daring di DKI Jakarta dimulai pada Senin (25/6/2018).

Di samping itu, Kemendikbud pun perlu segera menjabarkan dan mengimplementasikan “rangkai kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik” yang terkait dengan sistem zonasi ini. Rangkaian kebijakan ini amat esensial karena salah satu keraguan ataupun malah resistensi masyarakat atas sistem zonasi adalah kesenjangan mutu antar sekolah.

Orangtua tentu menginginkan anaknya mendapatkan hak atas pendidikan bermutu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 Ayat (1) bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Di sisi lain, Pasal 11 Ayat (1) menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Penentuan zona

Peraturan Mendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.”

Dalam penentuan zona, tiap-tiap daerah menggunakan kriteria masing-masing. Ada daerah yang menggunakan jarak antara rumah peserta didik dan sekolah, yang bervariasi antardaerah, dan ada pula yang mendasarkan pada kewilayahan, seperti di Sleman yang membagi dalam empat wilayah, yaitu Sleman barat, Sleman tengah, Sleman utara, dan Sleman timur (antaranews.com, 6/6/2018).

Dalam implementasinya, berbagai masalah terkait penentuan zona ini bermunculan yang disebabkan antara lain oleh tidak meratanya sebaran sekolah di suatu daerah, perbedaan mutu sekolah, perbedaan kepadatan penduduk di sekitar sekolah, dan ketimpangan antara lulusan suatu jenjang pendidikan dan daya tampung sekolah-sekolah negeri di jenjang berikutnya.



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

PPDB Kota Bandung Bermasalah – Sejumlah orang tua calon peserta didik bersama-sama mendatangi DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, untuk melaporkan Walikota Bandung Ridwan Kamil selaku Pemerintah Kota Bandung atas regulasi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru 2015 yang menimbulkan kekisruhan dalam prosesnya. Kontroversi aturan terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi salah satu yang menimbulkan pemasalahan tersendatnya PPDB 2015 di Kota Bandung sehingga mengantungkan nasib anak-anak mereka. Kompas/Rony Ariyanto Nugroho (RON) 06 Juli 2015

Konsekuensinya, ada sekolah-sekolah negeri di suatu zona yang kekurangan peserta didik dan ada pula yang terpaksa menolak peserta didik karena pendaftar melebihi daya tampung. Di zona yang padat penduduk, ada juga peserta didik yang tak dapat diterima di sekolah negeri manapun meskipun jarak antara rumah dan sekolah kurang dari satu kilometer.

Warganet juga mencatat adanya 'blank spot' dalam sistem zonasi ini, yaitu lokasi rumah yang tidak masuk ke dalam zona manapun sehingga peserta didik tidak dapat mendaftar ke sekolah negeri manapun. Peserta didik dari keluarga yang mampu mungkin memiliki alternatif untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, tetapi tentunya tidak begitu mudah bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu.



Kondisi posko pelayanan PPDB Online, Rabu (4/7/2018).

Beberapa daerah, misalnya DKI Jakarta, sejak beberapa tahun yang lalu telah memberikan bantuan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membayar SPP dan memenuhi keperluan sekolah lainnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Walikota Bandung, Ridwan Kamil, juga telah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan membiayai warga yang harus bersekolah di sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri, baik untuk SPP maupun perlengkapan sekolah lainnya. Solusi-solusi semacam ini perlu menjadi pemikiran para kepala daerah lainnya bila sistem zonasi ini memang akan tetap dipertahankan.

Untuk mengurangi masalah-masalah terkait penentuan zona, warganet juga mendorong pemerintah untuk membuat pemetaan yang akurat dengan memerhatikan, antara lain sebaran sekolah, daya tampung, jumlah guru, kepadatan penduduk, dan topografi wilayah. Pemetaan ini tentunya perlu didukung data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Zonasi atau prestasi?

Tidak mudah untuk menentukan sistem penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri yang paling tepat untuk Indonesia yang sangat beragam ini dan yang dapat memuaskan semua pemangku kepentingan. Penerimaan peserta didik baru, baik berdasarkan kedekatan tempat tinggal peserta didik dengan sekolah maupun prestasi akademik dan nonakademik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Dengan sistem zonasi, peserta didik dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lebih beragam, baik dari kemampuan akademik maupun latar belakang lainnya. Namun, guru akan menghadapi kelas yang lebih heterogen. Selain itu, peserta didik yang tinggal dekat sekolah yang kurang bermutu tentunya akan dirugikan.



Kompas/Ester Lince Napitupulu

Mendikbud Muhadjir Effendy menerima hasil pemantauan PPDB dari Wakil Ketua Ombudsman RI di JAKarta, Senin (31/7)

Di sisi lain, bukti-bukti empirik menunjukkan keterkaitan yang erat antara prestasi akademik dan status sosial ekonomi. Bila penerimaan didasarkan pada prestasi akademik, peserta didik yang berasal dari keluarga berada memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah-sekolah yang lebih bermutu. Konsekuensinya, mereka yang kurang dari sisi akademik ditambah lagi berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, akan cenderung terkumpul di sekolah-sekolah yang kurang bermutu.

Penelitian dan evaluasi atas sistem zonasi dalam PPDB amat mendesak dilakukan untuk memperoleh landasan yang kuat atas kebijakan yang dipilih, memperbesar peluang tercapainya tujuan kebijakan tersebut, dan mengurangi dampak-dampak negatifnya.

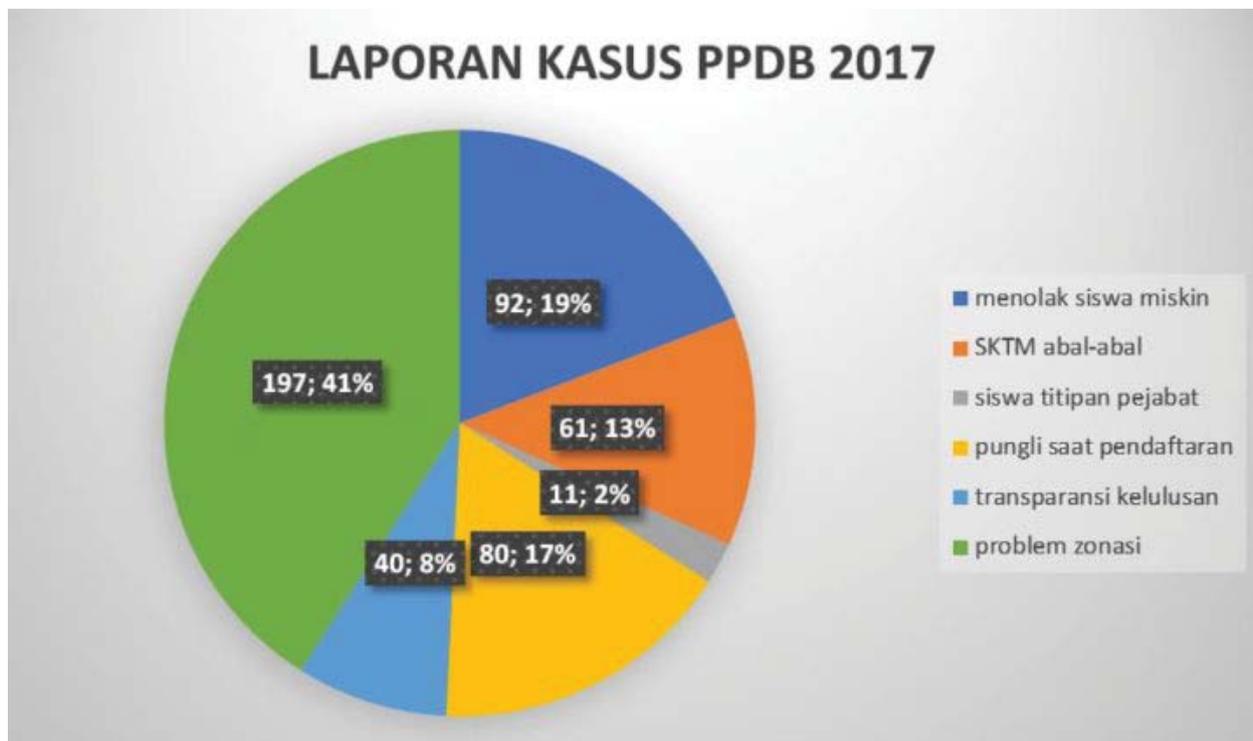
Sumber : <https://kompas.id/baca/opini/2018/07/13/menimbang-sistem-zonasi/>

PPDB DARING

Jalur Zonasi Perlu Dievaluasi

Kurnia Yunita Rahayu

12 Juli 2018 · 08:28 WIB



Sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru secara daring melalui jalur zonasi diapresiasi karena berupaya menghapuskan penerimaan siswa dengan dasar perolehan nilai ujian. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang justru membuat warga kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah terdekat.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (11/7/2018), mengatakan, penerimaan melalui jalur zonasi yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan bentuk lain yang sederajat itu membutuhkan penegasan pada beberapa bagian. Salah satunya mengenai penentuan domisili calon siswa yang didasarkan pada alamat di kartu keluarga.

Menurut Heru, ketentuan tersebut memunculkan peluang bagi warga dari luar zonasi sekolah untuk memindahkan keanggotaan KK demi mendapatkan sekolah favorit. Hal tersebut berpotensi menghilangkan hak warga setempat.

Heru menambahkan, pemetaan zonasi sekolah juga perlu dicermati. Sebab, jumlah sekolah negeri di beberapa daerah belum merata. Ada daerah yang berpenduduk padat tetapi hanya memiliki satu sekolah di daerahnya. Namun, ada pula wilayah berpenduduk jarang yang memiliki banyak sekolah.

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti mengatakan, salah satunya terjadi di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wilayah berpenduduk terpadat di Kabupaten Bogor itu tidak memiliki SMP dan SMA sehingga warga harus mendaftar sekolah yang berada di luar zonasinya. Oleh karena itu, kesempatan mendapatkan sekolah negeri menjadi kecil.

“Sistem zonasi akan bekerja secara optimal ketika jumlah sekolah negeri sudah merata,” kata Retno. Standar seluruh sekolah negeri pun perlu disamakan agar tidak ada pemusatan pendaftaran ke salah satu sekolah.

Meski demikian, Retno mengapresiasi konsep jalur zonasi. Menurut dia, konsep tersebut berupaya menghapuskan sistem penerimaan berbasis nilai. Oleh karena itu, fungsi ujian nasional mampu kembali pada pemetaan kemampuan murid, bukan penentu untuk mendaftar ke sekolah.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Siswa lulusan SMP/MTs sederajat antri untuk melakukan verifikasi berkas dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap I di SMK Negeri 19 Jakarta, Kamis (15/6/2017). Proses PPDB tahap I akan berlangsung hingga 17 Juni 2018.

Selain itu, menurut Heru, ketentuan penerimaan murid dari keluarga ekonomi lemah dalam satu wilayah juga menimbulkan potensi kecurangan. Dalam Pasal 19 Permendikbud No 14/2018 dijelaskan bahwa pemerintah wajib menerima murid berekonomi lemah dalam suatu daerah paling sedikit 20 persen dari kuota penerimaan. Pembuktian status ekonomi tersebut dilakukan menunjukkan surat keterangan tidak mampu.

Menurut Heru, mekanisme penerbitan SKTM masih lemah. Penerbitannya kerap tidak didasarkan pada kondisi ekonomi faktual warga. Retno mengatakan, beragam kelemahan tersebut dapat menghilangkan hak anak untuk mendapatkan sekolah negeri. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai PPDB perlu dilakukan lebih intensif dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Sumber : <https://kompas.id/baca/metro/2018/07/12/jalur-zonasi-perlu-dievaluasi/>

Ada Kecurangan SKTM, Mendikbud: Nanti Ada Verifikasi

Mutiul Alim | Selasa, 10/07/2018 15:30 WIB



Muhajir Effendy menginstruksikan semua sekolah memverifikasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang masuk

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy menginstruksikan semua sekolah memverifikasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang masuk, menyusul maraknya aduan penyalahgunaan SKTM dalam PPDB sistem zonasi tahun ini.

“Saya pastikan semua SKTM yang masuk di sekolah, harus verifikasi oleh sekolah masing-masing. Kemudian dicek di lapangan, kemudian harus ditetapkan, apabila dia memang terbukti bukan dari keluarga tidak mampu maka akan dicabut,” tegas Muhadjir di Kantor Kemendikbud Jakarta, pada Selasa (7/10).

Muhadjir mengakui selama ini terdapat beberapa masalah yang timbul akibat penyalahgunaan SKTM. Seperti adanya keluarga tidak mampu dari luar zona yang ingin masuk di suatu sekolah, lalu ditambah lagi keluarga mampu tapi memaksakan dirinya menjadi keluarga tidak mampu, padahal yang bersangkutan tidak berhak mendapatkannya.

Kendati demikian, Muhadjir belum bisa memastikan jumlah pasti pelanggaran tersebut. Dia hanya mengklaim jumlah pelanggaran itu tidak banyak.

“Ini jumlahnya saya belum tahu persis berapa sebenarnya, tetapi kemungkinan tidak banyak. Hanya memang, ada yang merasa lebih punya hak dibanding yang bersangkutan inilah yang kemudian kesannya menjadi sangat besar,” jelasnya.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) kembali membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tahun ini, JPPI masih menemukan maraknya manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pungutan liar.

Menurut Koordinator Nasional Ubaid Matraji, kasus seperti ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun lalu. Tapi tampaknya pemerintah tidak kunjung merevisi aturan.

“Masih saja SKTM diperbolehkan untuk dijadikan siswa masuk kuota miskin. Padahal, SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah. Harusnya, untuk menunjukkan keterangan tidak mampu, bisa dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” kata Ubaid.

Sumber : <http://www.jurnas.com/artikel/37462/Ada-Kecurangan-SKTM-Mendikbud-Nanti-Ada-Verifikasi/>

“

Masih saja SKTM diperbolehkan untuk dijadikan siswa masuk kuota miskin. Padahal, SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah.

”

PPDB DARING

Migrasi Kartu Keluarga demi Sekolah Negeri

Kurnia Yunita Rahayu
6 Juli 2018



ADITYA DIVERANTA

Yovi Andriani (38), salah satu orang tua murid yang terkendala teknis PPDB di SMPN 1 Jakarta, Selasa (4/7/2018).

Bagi warga Jabodetabek, masuk ke sekolah negeri bukan sekadar persoalan membekali diri dengan nilai ujian yang mumpuni, melainkan memerlukan ragam siasat dan kerja keras.

Salah satunya dilakukan oleh Fadhlan Rizky (15), warga Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski berdomisili Cibinong, sejak tiga tahun lalu, saat masih duduk di kelas VII sekolah menengah pertama (SMP), Fadhlan menumpang tinggal di rumah kerabatnya di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejak saat itu pula ia tinggal terpisah dengan orangtuanya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara administratif.

Fadhlan dikeluarkan dari keanggotaan kartu keluarga (KK) untuk dimasukkan pada KK kerabatnya yang tinggal di Kecamatan Kramat Jati. Tujuannya satu, yaitu persiapan untuk bisa melanjutkan sekolah di Ibu Kota.

Sejak tahun pelajaran 2016/2017, pemerintah memberlakukan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring melalui jalur zonasi atau jalur lokal. Penilaian terhadap lulusan sekolah dasar (SD) dan SMP untuk meneruskan ke jenjang sekolah berikutnya ditambahkan sesuai dengan kedekatan domisilinya dengan lokasi sekolah. Semakin dekat dengan sekolah, semakin tinggi nilai tambahan yang diperoleh.

Adapun domisili pendaftar didasarkan pada alamat yang tertera pada KK tempat ia bernaung. Batas waktu penerbitan KK paling lambat enam bulan sebelum PPDB Daring berlangsung.

Porsi penerimaan untuk pendaftar dari jalur zonasi pun paling tinggi ketimbang jalur-jalur lainnya. Jalur lain tersebut di antaranya jalur umum, jalur afirmasi, dan jalur prestasi.

Oleh karena itu, migrasi KK menjadi pilihan penting bagi Fadhlán. Perolehan nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang terdiri dari empat mata pelajaran mencapai 32,45. Nilai tersebut belum masuk pada posisi aman untuk bertarung dengan pendaftar-pendaftar lain pada jalur umum.

Upaya tersebut berhasil. Pada PPDB Daring 2018, Fadhlán diterima di SMA Negeri 113, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, melalui jalur zonasi.

Puti Ayla (16), kakak Fadhlán mengatakan, keberhasilan serupa juga telah ia raih sebelumnya. Ia diterima di SMA Negeri 48, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, berkat strategi migrasi KK setahun sebelum tahun pelajaran 2016/2017. Sejak perpindahan keanggotaan KK itu pula, ia pun tinggal di rumah kerabat yang ditumpanginya secara administratif.

"Kami ingin mendapat sekolah di DKI Jakarta, karena seluruh sekolah gratis," kata Puti di Jakarta, Kamis (5/6/2018). Mereka yang diurus oleh ibu tunggal merasa keberatan jika harus membayar uang sekolah.

Selain itu, menurut Puti, SMA negeri di Ibu Kota memberikan jaminan lebih besar untuk mengakses perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab, prestasi SMA negeri di sana lebih dilirik, lulusannya pun lebih banyak yang diterima di PTN.

Di SMA Negeri 113, tahun ini terdapat 45 lulusan yang diterima di PTN melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan. Tak heran, sekolah ini menjadi salah satu yang diburu banyak pendaftar.



Sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

Ketua Panitia PPDB Daring SMA N 113 Tahun 2018 Ating mengatakan, pada jalur zonasi, sekolah ini menerima pendaftar yang berdomisili di Kecamatan Cipayung, Kramat Jati, Makassar, dan Ciracas. Daya tampung sekolah adalah 360 murid, sedangkan jumlah pendaftar dari seluruh jalur masuk mencapai 1.700 orang. Adapun yang jumlah murid yang diterima pada jalur zonasi adalah 221 orang, jalur umum sebanyak 134 orang, dan jalur prestasi sebanyak lima orang.

Ating menambahkan, ketika pemrosesan data jalur zonasi, sekolah tidak memeriksa status pendaftar di KK merupakan anggota keluarga inti atau bukan. Sekolah hanya memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) mereka. Jika terverifikasi dan sesuai dengan keanggotaan di KK, data dan nilai pendaftar akan diproses. Sekolah akan meminta data domisili asli para pendaftar ketika mereka telah resmi menjadi murid.

"Berdasarkan penelitian sekolah sekitar tiga tahun lalu, proporsi murid yang berdomisili asli di DKI Jakarta dan Kota Bekasi kira-kira 40 persen berbanding 60 persen," kata Ating. Menurut dia, sekolah memang lebih banyak diisi oleh warga dari luar DKI Jakarta.

"Mungkin peraturan tentang KK ini perlu dipertimbangkan kembali. Misalnya, ada persyaratan bahwa calon murid harus berada dalam satu KK dengan orangtua kandungnya," ujar Ating. Ia khawatir, jika tidak ada ketentuan khusus mengenai keanggotaan di dalam KK tersebut, warga sekitar dari sekolah justru tidak bisa merasakan manfaat jalur zonasi.

Seperti dirasakan oleh Nur Fitriani (24), warga Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ia sudah gagal mendaftarkan adiknya ke SMP Negeri 9 Jakarta Timur baik dari jalur zonasi maupun jalur afirmasi.

Adik Nur yang memperoleh rata-rata nilai ujian sebesar 57 kalah dari pendaftar-pendaftar lain. Nilai tambahan yang didapatkan berkat domisilinya yang berada dalam satu zona dengan sekolah tersebut tidak mampu membantu. Di SMP Negeri 9, rata-rata nilai tertinggi yang diterima pada jalur lokal adalah 97,57, sedangkan rata-rata nilai terendah yang diterima adalah 89,67.

"Saya berharap masih ada bangku kosong yang bisa diisi adik saya," kata Nur. Sebab, PPDB Daring tahap kedua akan dibuka berdasarkan ketersediaan kursi yang tidak terisi.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para orangtua mendaftarkan anaknya pada hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah dasar di SD Negeri 02 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2018). Kegiatan PPDB hari pertama di sekolah tersebut diperuntukkan bagi calon siswa jalur umum yang berasal dari dalam dan luar Jakarta.

Harapan Nur semestinya terwujud lebih awal, karena jalur zonasi bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga di sekitar sekolah untuk sama-sama mendapatkan pendidikan. Namun, perlu ada mekanisme untuk menjamin agar keadilan benar-benar terwujud. Jangan sampai para warga justru beradu siasat, untuk mencari celah melumpuhkan peraturan.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/07/06/migrasi-kartu-keluarga-demi-sekolah-negeri/>

PPDB SD Diterpa Isu Pungli

Rabu, 04 Jul 2018 09:47 | editor : Aries Wahyudianto



Suasana belajar siswa di salah satu sekolah di Gresik. PPDB untuk SD ditengarai adanya pungutan liar. (Yudhi/Radar Gresik)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) diterpa isu tidak sedap. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai PPDB SD di Gresik ada pungutan liar (pungli). Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan di salah satu SDN di Gresik dugaan pungli dilakukan dengan alasan bantuan perbaikan fasilitas sekolah. Di daerah lain, ada juga dengan berbagai alasan berbeda, seperti biaya LKS, seragam, buku, dan lain-lain.

Padahal menurut dia, pungutan seperti ini sudah jelas dilarang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan sekolah menyediakan atau menjual peralatan sekolah, baik itu seragam, buku dan lain-lain. Sedangkan jual beli kursi, dilakukan dengan dua model sistem pendaftaran: dalam daring dan luar daring.

"Jika tak terpenuhi melalui online, bisa ditempuh dengan jalur offline, di situlah angka bisa dipasang. Padahal, berdasarkan Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB jelas harus menggunakan salah satu sistem, bukan dua-duanya digunakan," ungkap dia. Karena itu dia meminta agar semua oknum yang terlibat dalam pungli dan jual beli kursi ditindak tegas. Dia pun mendorong agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses PPDB.

"Tanpa ada laporan dari masyarakat dan orang tua murid, kecurangan PPDB akan terus terjadi. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas selama proses PPDB sangat diperlukan," tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dispendik Gresik Mahin belum bisa dikonfirmasi. Namun, sebelumnya Kepala Seksi Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nur Maslichah memastikan jika dengan sistem online akan sulit terjadi pungli. "Semua mekanisme sesuai dengan juknis yang ada," jelasnya. (han/jee)

Sumber : <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/07/04/85286/ppdb-sd-diterpa-isu-pungli>

Penerimaan Siswa Baru

Pemerataan Pendidikan Harus Jadi Fokus Perbaikan Pemerintah

DEONISIA ARLINTA/ESTER LINCE NAPITUPULU/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

2 Juli 2018



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Salah satu calon peserta didik melewati papan pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN 8 Jakarta Selatan, Senin (2/7/2018). Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2018/2019 tahap kedua jalur umum DKI Jakarta mulai dibuka hari ini, Selasa hingga Rabu (4/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS – Pemerataan layanan dan fasilitas di tingkat sekolah harus jadi fokus pemerintah guna mewujudkan kesetaraan pendidikan. Tanpa pemerataan, tujuan sistem zonasi, menghapus “kastanisasi” pendidikan, sulit terwujud.

Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema berpendapat, sistem zonasi sudah tepat dilakukan sebagai langkah awal untuk memperkecil disparitas akses pendidikan di Indonesia. Namun, pemerintah harus memastikan layanan pendidikan berkualitas sudah setara di semua sekolah negeri, baik di kota besar, pedesaan, maupun daerah pinggiran.

“Konsep kastanisasi sekolah atau sekolah favorit adalah persepsi masyarakat. Pemerintah akan sulit mengintervensi persepsi bila layanan pendidikan berkualitas tidak dipenuhi di semua sekolah negeri,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Di DKI Jakarta, misalnya, masih ditemukan orangtua calon peserta didik memilih sekolah yang dianggapnya favorit meskipun di luar zonasi tempatnya tinggalnya. Azhar Firdaus (45), warga Pondok Labu, Jakarta Selatan, mendaftarkan anaknya di tahap kedua jalur umum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. Dengan nilai rata-rata ujian nasional 9,25, ia percaya anaknya

bisa diterima pada jalur umum meski kuota yang ditawarkan jauh lebih kecil dibandingkan jalur lokal.

“Saya pilih SMA negeri dengan kualitas baik yang jauh dari rumah, daripada dekat rumah tetapi kualitasnya kurang. Memilih SMA harus selektif karena berpengaruh pada penerimaan anak saya di perguruan tinggi nanti,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 638 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019, disebutkan kuota yang disediakan untuk PPDB tahap pertama jalur lokal minimal 55 persen dari daya tampung, tahap kedua jalur umum (35 persen), jalur prestasi (5 persen), dan jalur afirmasi (5 persen).

Akan tetapi, menurut Doni, pemerintah masih belum fokus dalam upaya menyetarakan layanan pendidikan. Kesetaraan itu mencakup sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga pendidikan, serta kualitas pengajaran dan pembelajaran yang ditawarkan di sekolah. Diharapkan, selain akses pendidikan, tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan juga dapat dirasakan masyarakat.

Agus Asikin/ KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Ditemui terpisah, Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta Agusman Anwar menyatakan, melalui sistem zonasi, profil siswa yang masuk ke sekolahnya relatif lebih heterogen. Selain tingkat kecerdasan, latar belakang keluarga dan tingkatan ekonomi juga lebih beragam. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak memengaruhi kualitas anak didik di sekolahnya.

“Justru, itu menjadi tugas sekolah untuk bisa memberikan layanan yang baik dan berkualitas dalam proses belajar sehingga siswa bisa memiliki kualitas yang sama-sama unggul saat lulus SMA,” katanya.

Pengaduan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, sejumlah kasus terkait PPDB 2018 sudah dilaporkan ke posko pengaduan JPPI. Salah satunya, kebingungan orang tua dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar.

Jika masalah akses yang sulit atau server down mungkin bisa dilakukan dengan menunggu waktu sela, masalah NIK yang tertolak ini cukup membuat panik orang tua. Pasalnya mereka yang merasa tidak ada masalah dengan zonasi dan kuota, justru terganjal dengan NIK yang tidak bisa dimasukkan dalam sistem. Ini hampir terjadi merata di seluruh daerah.

Selain itu, Ubaid mengatakan, ada juga laporan soal manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kasus ini sudah terjadi pada tahun lalu dan masih menjadi masalah tahun ini.

“SKTM masih diperbolehkan jadi syarat siswa masuk kuota miskin. Padahal, SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah. Harusnya, bisa menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” jelas Ubaid.

Ubaid mengatakan, di beberapa daerah terlihat antusiasme masyarakat yang mendaftar dengan mengisi bangku kuota 20 persen bagi anak miskin bermodal SKTM. Di daerah lain, yang melarang SKTM, tapi mengharuskan menggunakan KIP atau PKH, justru sepi peminat. Hal itu terjadi di Kalimantan Timur.

“Di posko pengaduan juga ada laporan soal pungutan liar alias pungli dan jual beli kursi. Pungli dan jual beli kursi dapat dilakukan selama proses berlangsung sebelum pengumuman dan masuk sekolah. Bisa dilakukan sebelum mendaftar, saat pendaftaran awal, dan saat proses daftar ulang,” kata Ubaid.

Ia mencontohkan, pungli di salah satu SDN di Gresik. Pungli dilakukan dengan alasan bantuan perbaikan fasilitas sekolah. Di daerah lain, ada juga pungli bermotif biaya lembar kerja siswa, seragam, hingga buku. Padahal pungutan seperti ini sudah jelas dilarang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan sekolah menyediakan atau menjual peralatan sekolah, baik itu seragam, buku.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Salah satu orangtua siswa berjalan melewati ruang pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 untuk tahap kedua jalur umum di SMAN 68 Jakarta, Senin (2/7/2018). Pendaftaran jalur umum PPDB DKI Jakarta dibuka hari ini, Senin hingga Rabu (4/7/2018).

Laporan lainnya, ujar Ubaid, soal tes membaca, menulis, dan menghitung (calistung) dan psikotes di madrasah setingkat SD. Kebijakan ini banyak dikeluhkan oleh orang tua, karena tidak mendorong akses, tapi membebani anak kali pertama bersekolah dengan berbagai tes yang membingungkan.

“Tahun lalu sudah banyak diprotes, tapi tahun ini dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 481 Tahun 2018 tentang PPDB, aturan ini masih dilegalkan,” ujar Ubaid.

Persoalan lainnya yakni tidak ada kuota afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Padahal, tidak semua anak berkebutuhan khusus dapat mengakses Sekolah Luar Biasa yang terbatas jumlahnya dan jauh dari rumah tinggal. Keluarga yang memiliki ABK menyesalkan Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB tidak memberikan kuota afirmasi bagi kelompok difabel. Dalam konteks ini, aturan madrasah di bawah Kemenag lebih ramah terhadap difabel. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 481 Tahun 2018 memberikan kuota minimal 10 persen bagi ABK.

Sementara itu, di Bandung, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mewaspadaai adanya pelanggaran penyelenggaraan penerimaan siswa baru. Hal itu dipicu infrastruktur di setiap sekolah yang belum merata.

Haneda menilai, ketimpangan ini membuat praktik malaadministrasi masih dikhawatirkan terjadi. Sosialisasi, tutur Haneda, masih menjadi masalah dalam penerapan sistem ini. Tidak semua masyarakat paham sehingga masih berupaya memasukkan anaknya di sekolah yang diinginkan.

"Terkadang, potensi pelanggaran berasal dari masyarakat itu sendiri. Mereka masih berambisi menyekolahkan anaknya di tempat yang mereka anggap favorit. Jadi, oknum-oknum pasti mencari jalan bagi para orangtua, sehingga mereka mendapatkan keuntungan pribadi," tuturnya.



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Suasana di posko pengaduan dan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta 2018 di SMKN 1 Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Koordinator Pengawasan PPDB Jawa Barat ORI, Noer Adhe Purnama, menuturkan, meskipun sistem zonasi dianggap bisa mengurangi potensi pelanggaran, pihaknya tetap melakukan pengawasan di daerah untuk memastikan penerapan sistem sesuai dengan aturan. Ia berujar, dalam minggu ini ORI akan memantau lima daerah tingkat kota/kabupaten.

Menurut Noer, malaadministrasi dikhawatirkan masih terjadi karena fasilitas pendidikan yang belum merata di semua daerah. Tidak hanya infrastruktur, kualitas pendidikan yang tidak merata membuat masyarakat berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di tempat lain.

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/07/03/pemerataan-pendidikan-harus-jadi-fokus-perbaikan-pemerintah/>

PPDB Masih Diwarnai Pungli dan Manipulasi SKTM

Senin 02 Jul 2018 16:29 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani



Sejumlah calon peserta didik bersama orang tuanya mengikuti proses verifikasi berkas administrasi akademik dan non akademik di SMA Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (2/7). Hari ini mulai dilakukan verifikasi berkas bagi PPDB sistem Zonasi. Foto: Republika/Bowo Pribadi

SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) kembali membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tahun ini, JPPI masih menemukan maraknya manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pungutan liar.

Menurut Koordinator Nasional Ubaid Matraji, kasus seperti ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun lalu. Tapi tampaknya pemerintah tidak kunjung merevisi aturan.

"Masih saja SKTM diperbolehkan untuk dijadikan siswa masuk kuota miskin. Padahal, SKTM ini sangat rawan dimanipulasi karena dapat dibuat dengan mudah. Harusnya, untuk menunjukkan keterangan tidak mampu, bisa dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," kata Ubaid kepada Republika, Senin (2/7).

Dia mengatakan, di beberapa daerah antusiasme pendaftar yang menggunakan SKTM terbilang cukup tinggi yakni mengisi kuota 20 persen bagi anak miskin. Berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain yang melarang SKTM, tapi mengharuskan menggunakan KIP atau PKH, justru sepi peminat, seperti terjadi di daerah Kalimantan Timur.

Sementara itu, terkait temuan pungli dan jual beli kursi, JPPI juga menemukan praktik pungli dan jual beli kursi dapat dilakukan selama proses berlangsung sebelum pengumuman PPDB. "Ya betul, (praktik pungli dan jual beli kursi) bisa dilakukan sebelum mendaftar, saat pendaftaran awal, dan bahkan saat proses daftar ulang," jelas Ubaid

Dia mengambil contoh, di salah satu SDN di Gresik pungli dilakukan dengan alasan bantuan perbaikan fasilitas sekolah. di daerah lain, ada juga dengan berbagai alasan berbeda, seperti biaya LKS, seragam, buku, dan lain-lain.

Padahal menurut dia, pungutan seperti ini sudah jelas dilarang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan sekolah menyediakan atau menjual peralatan sekolah, baik itu seragam, buku dan lain-lain. Sedangkan jual beli kursi, dilakukan dengan dua model sistem pendaftaran: dalam daring dan luar daring.

"Jika tak terpenuhi melalui online, bisa ditempuh dengan jalur offline, di situlah angka bisa dipasang. Padahal, berdasarkan Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB jelas harus menggunakan salah satu sistem, bukan dua-duanya digunakan," ungkap dia.

Karena itu dia meminta agar semua oknum yang terlibat dalam pungli dan jual beli kursi ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia pun mendorong agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses PPDB.

"Tanpa ada laporan dari masyarakat dan orang tua murid, kecurangan PPDB akan terus terjadi dan reproduksi. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas selama proses PPDB sangat diperlukan," tegas dia.

Sumber: <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/07/02/pb8fp5335-ppdb-masih-diwarnai-pungli-dan-manipulasi-sktm>

JPPI Kritisi PPDB tak Berikan Kuota Anak Berkebutuhan Khusus

Senin 02 Jul 2018 18:01 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani



Sejumlah calon peserta didik bersama orang tuanya mengikuti proses verifikasi berkas administrasi akademik dan non akademik di SMA Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (2/7). Hari ini mulai dilakukan verifikasi berkas bagi PPDB sistem Zonasi. Foto: Republika/Bowo Pribadi

Padahal anak berkebutuhan khusus akan sangat terbantu dengan radius yang dekat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritisi Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB yang tidak memberikan kuota afirmasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau kelompok difabel. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus akan sangat terbantu jika bersekolah yang radiusnya dekat dengan tempat tinggal.

“Kendala akses yang masih terjadi hingga hari ini adalah kesempatan sekolah bagi kelompok yang tereksklusi. Karena memang tidak ada kuota afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus,” jelas Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada Republika, Senin (2/7).

Dia mengatakan, banyak orang tua dari ABK enggan bersekolah di sekolah selain SLB (Sekolah Luar Biasa), karena tidak ada komitmen dari pihak sekolah. Mereka juga menyesalkan, Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB tidak memberikan kuota afirmasi bagi kelompok difabel.

“Dalam konteks ini, aturan madrasah di bawah kemenag lebih ramah terhadap difabel. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 481 Tahun 2018 memberikan kuota minimal 10 persen bagi anak berkebutuhan khusus,” jelas dia.

Di sisi lain, JPPI juga menerima banyaknya keluhan terkait sistem PPDB online, seperti masalah server-down dan NIK yang belum terdaftar dalam sistem. Dia menjelaskan, jika masalah akses yang sulit atau server down mungkin bisa dilakukan dengan menunggu waktu sela, tapi masalah NIK yang tertolak ini cukup membuat panik orang tua.

“Pasalnya mereka merasa tidak ada masalah dengan zonasi dan kuota, justru mereka terganjal dengan NIK yang tidak bisa dimasukkan dalam sistem. Ini hampir terjadi merata di seluruh daerah,” jelas dia.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad mengakui masih ada keluhan atas sistem zonasi. Tapi dia mengklaim bahwa sistem ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

Basis untuk zonasi mencapai 90 persen, prestasi ujian nasional 5 persen, serta pindahan atau dari luar daerah mencapai 5 persen. Dengan sistem ini maka bisa jadi mereka yang memiliki nilai ujian tinggi pun belum tentu bisa langsung memilih sekolah sesuai dengan yang diinginkan.

“Jadi tidak masuk (SMP/SMA) walau nilai UN-nya lebih tinggi, mungkin karena zona-nya jauh dari sekolah tujuan,” ujar Hamid.

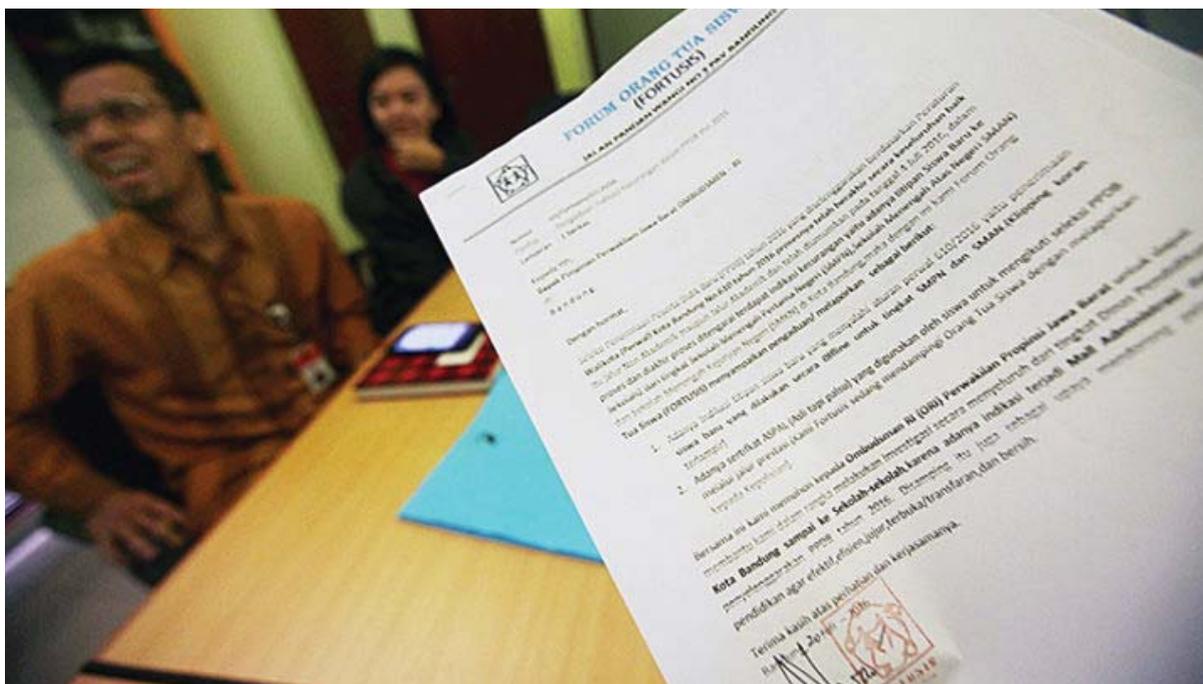
Sumber : <https://republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/07/02/pb8jyu335-jppi-kritisi-ppdb-tak-berikan-kuota-anak-berkebutuhan-khusus>

Penerimaan Siswa Baru

Dugaan Pungutan Liar di PPDB Daring Banten

DEONISIA ARLINTA

23 Juni 2018 · 05:00 WIB



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung melaporkan tindak penyelewengan proses penerimaan siswa baru kepada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/7/2016). Penyelewengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA tersebut adanya siswa titipan yang menyalahi Peraturan Walikota Bandung 610/2016 serta adanya penggunaan sertifikat palsu untuk siswa yang menggunakan jalur prestasi.

JAKARTA, KOMPAS- Sejumlah oknum memanfaatkan gangguan koneksi penerimaan siswa baru tingkat SMA di Banten dengan melakukan pungutan liar. Modusnya, oknum itu menawarkan bantuan pendaftaran penerimaan siswa baru secara daring dengan meminta imbalan uang.

"Saat datang ke SMAN 5 Kabupaten Tangerang, saya kesulitan mendaftar. Lalu, ada yang menawarkan bantuan pengisian formulir dengan biaya Rp 50.000. Tapi saya tolak," kata Lasiyah, warga Kabupaten Tangerang, Banten saat dihubungi dari Jakarta, Jumat, (22/6/2018). PPDB di Banten, dimulai sejak Kamis (21/6/2018).

Lasiyah mengatakan, orang yang menawarkan bantuan itu mengaku sebagai petugas sekolah. Oknum itu mengatakan, sudah berhasil mendaftarkan beberapa siswa dengan imbalan Rp 100.000.

Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018/2019 SMAN 5 Kabupaten Tangerang Muhammad Barried menyangkal kejadian itu. "Tidak ada pungutan apapun. Semua

gratis. Kalau ada pungutan justru harus dilaporkan. Kemungkinan hal itu dilakukan orang luar yang mengaku sebagai petugas sekolah,” katanya.

Hal itu sejalan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB. Di sana disebutkan pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah bebas dari biaya karena sudah dibebankan pada biaya operasional sekolah.

Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Banten Amal Herawan Budhi menyangkan muncul dugaan pungutan liar dalam proses PPDB di daerahnya. “Tidak ada (pungutan) sama sekali. Jika ditemukan adanya pungutan, orangtua ataupun siswa harap langsung melaporkan,” ujarnya.

Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nailul Faruq menilai, pemerintah pusat maupun daerah harus menegaskan pada sekolah-sekolah untuk mengutamakan transparansi dalam pembiayaan di sekolah. Selain itu, partisipasi publik menjadi penting untuk meminimalisir beberapa kasus yang terjadi selama ini.

“Kami langsung koordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait, seperti Ombudsman RI, Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan tim sapu bersih pungutan liar. Untuk sanksi, aturannya sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Kepala daerah harus tegas dalam hal ini,” kata Nailul.

Terkait gangguan sistem PPDB berbasis daring di Banten, Amal mengatakan masih ditemukan kendala hingga hari kedua. Gangguan itu disebabkan membludaknya jumlah orang yang mendaftar secara daring.

“Puncaknya saat jumlah yang ingin mendaftar mencapai 13 juta permintaan. Secara teknis, peluangnya 5:1. Satu masuk dan lima ditolak,” tutur Amal.

Selain itu, Amal berpendapat, kendala sistem daring ini juga dipicu kurang siapnya sumber daya manusia yang tersedia. Saat ini, penanganan sistem PPDB daring masih diserahkan pada pihak ketiga.

“Kami terus memperbaikinya. Kini, sudah delapan zona di Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan, yang sudah mendaftar. Jumlahnya mencapai 48.102 orang,” kata Amal.

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/06/23/dugaan-pungutan-liar-di-ppdb-daring-banten/>

Penerimaan Siswa Baru

Gangguan Sistem Daring Menjadi Kendala

DEONISIA ARLINTA
22 Juni 2018



KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Orangtua calon peserta didik melihat pengumuman terkait pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 yang ditempel di dinding SMA Negeri 78 Jakarta. Pendaftaran pertama untuk jalur lokal secara daring di DKI Jakarta dimulai pada Senin (25/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah permasalahan masih ditemukan pada sistem penerimaan peserta didik baru tingkat SMA tahun ajaran 2018/2019 berbasis internet. Masalah ini terutama pada sistem daring yang terganggu.

Jelita Dinar (14), salah satunya. Calon peserta didik yang ingin mendaftar sekolah ke SMK Negeri 1 Kota Tangerang ini lebih dari lima kali gagal mengisi formulir secara daring. Pada aplikasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Provinsi Banten Tahun 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Banten beberapa kali terjadi gangguan. Saat mengisi data pada lembar formulir daring, Jelita mengatakan, halaman pada web tiba-tiba menjadi putih bertuliskan '502 Bad Gateway'.

"Saya sudah coba buka website PPDB Provinsi Banten sejak semalam. Pendaftaran memang baru mulai dibuka pukul 00.00. Saat sudah dibuka, web-nya malah error. Lebih dari lima kali saya coba dan baru sekitar pukul 16.00 tadi berhasil," ujar Jelita yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Hal serupa juga dialami oleh Nina Maria Gultom (14). Namun, meski sudah dicoba berkali-kali, hingga pukul 20.00 ia belum juga berhasil mengisi formulir pendaftaran daring secara lengkap. Ia berencana mendaftarkan diri ke SMA N 2 Tangerang, Banten. "Seharusnya kalau lewat online (daring) kan lebih mudah, ini malah jadi ribet," ucapnya.

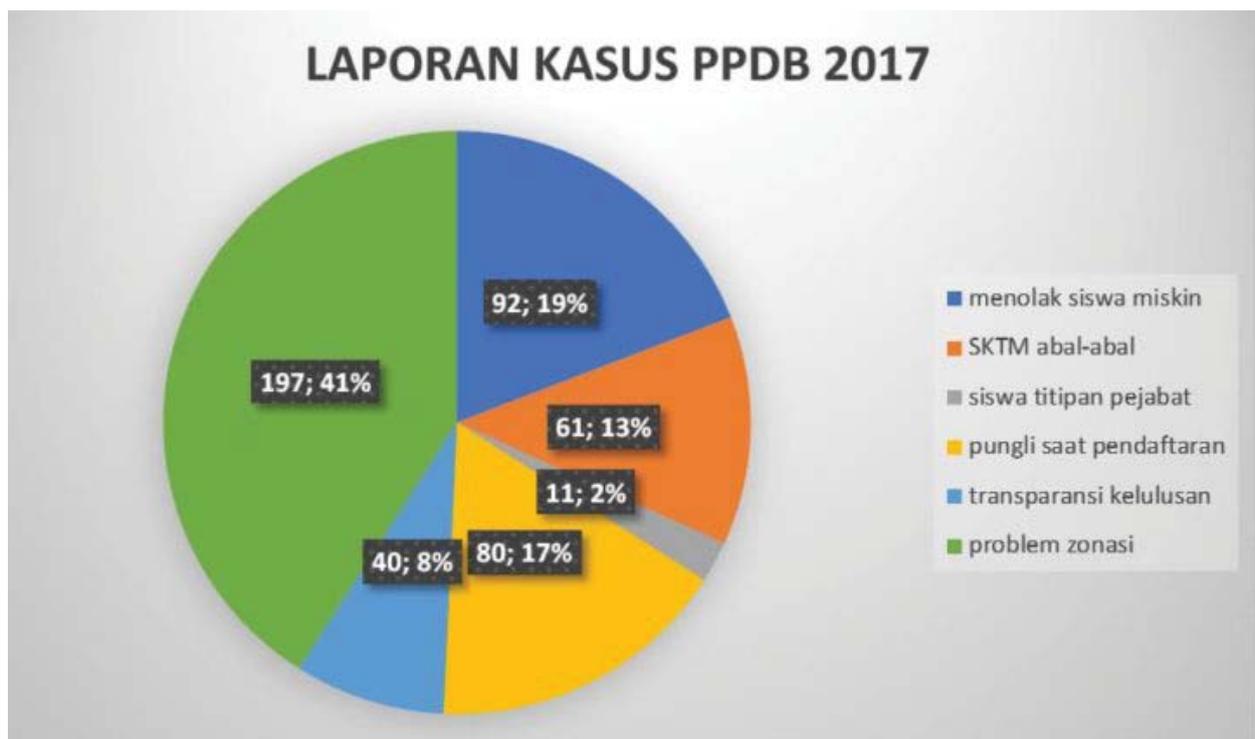
Pungutan

Akibat gangguan pada sistem daring ini, Lasiyah, orangtua salah satu siswa, sampai mendatangi sekolah yang dituju. Ia berharap ketika sampai di sekolah bisa mendaftarkan anaknya secara langsung atau setidaknya mendapatkan penjelasan terkait gangguan tersebut.

Namun, saat Lasiyah tiba ke sekolah tersebut, pihak sekolah justru meminta sejumlah dana untuk membantu proses pendaftaran. Karena curiga, Lasiyah akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dan tetap memilih mencoba mendaftarkan anaknya secara daring.

Pihak sekolah justru meminta sejumlah dana untuk membantu proses pendaftaran secara daring. "Kata pihak sekolah bayar Rp 50.000 saja, kalau yang lain malah (diminta membayar) sampai Rp 100.000 begitu," katanya.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, pada 2017 kasus PPDB didominasi oleh masalah zonasi dan pungutan liar, yaitu 41 persen untuk masalah zonasi dan 17 persen untuk pungutan liar saat pendaftaran.



Sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi JPPI Nailul Faruq menilai, pemerintah pusat maupun daerah harus menegaskan kepada sekolah-sekolah untuk mengutamakan transparansi dalam pembiayaan di sekolah. Selain itu, partisipasi publik menjadi penting untuk meminimalisir beberapa kasus yang terjadi selama ini.

"Kami JPPI langsung koordinasi dengan lembaga/kementerian terkait, seperti Ombudsman RI, Inspektorat Kemendikbud, Kementerian Agama, dan juga Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar). Untuk sanksi, aturannya sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Kepala daerah harus tegas dalam hal ini," kata Nailul.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan, kepala dinas pendidikan setempat memiliki tanggung jawab penuh akan proses PPDB yang berlangsung di daerahnya.

Kepala dinas pendidikan setempat memiliki tanggung jawab penuh akan proses PPDB yang berlangsung di daerahnya.

"Rakor (rapat koordinasi) PPDB sudah dilakukan dengan semua kadisdik (kepala dinas pendidikan) pada pertengahan puasa lalu. Semuanya sudah dijelaskan terkait pelaksanaan dan pengawasannya," ujarnya.

Persiapan

Sementara, sejumlah SMA di DKI Jakarta saat ini masih dalam persiapan pelaksanaan PPDB tahap pertama untuk jalur lokal yang dimulai pada 25 Juni 2018. Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMA N 78 Jakarta Erizal menyatakan, persiapan yang dilakukan pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu.

"Kami hanya melanjutkan proses tahun lalu, tidak ada yang berbeda. Semoga bisa berjalan lancar dengan sistem online ini," katanya.

Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, Rita Nurmastuti mengatakan, persiapan penerimaan siswa baru mulai dilaksanakan Jumat (22/6). "Kami siapkan perangkat, ruangan, dan simulasi layanan untuk mengantisipasi banyaknya pendaftar yang datang ke sekolah di hari pertama besok Senin ini," ujarnya.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/06/22/gangguan-sistem-daring-menjadi-kendala/>

Buka Data KIP Agar Terpantau

Laraswati Ariadne Anwar/Deonisia Arlinta

18 Juni 2018



Istimewa/Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud

Murid-murid di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (9/5/2017).

Transparansi data penyaluran Kartu Indonesia Pintar diperlukan agar masyarakat dapat memantau program yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin ini. Apalagi, pengawasan dari pemerintah masih lemah.

JAKARTA, KOMPAS – Transparansi data serta penguatan pemantauan oleh masyarakat dibutuhkan untuk memastikan penyebaran Kartu Indonesia Pintar tepat sasaran dan tidak ditunggangi kepentingan politik praktis. Penyaluran KIP bukan ranah partai politik maupun anggota legialatif. Legislatif bertanggung jawab sebatas menentukan budgeting (pembiayaan), pengawasan, dan regulasi. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta pihak sekolah harus tegas untuk tidak memberikan celah pada parpol dalam penyaluran KIP.

“Jika tidak ada ketegasan, program ini justru bisa dimanfaatkan bagi keuntungan parpol serta menyebabkan bias politik di masyarakat,” kata Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin Makasar Nur Sadik, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (17/6/2018).

Hal ini berkaitan dengan penemuan Indonesian Corruption Watch (ICW), antara lain di Yogyakarta, yang mengungkapkan ada partai politik menyebarkan KIP. Modusnya yang digunakan adalah politisi partai mendatangi sekolah dengan dalih membantu menyebarkan KIP di daerah pemilihan mereka (Kompas, 8/6/2018). Akibatnya, KIP tidak tepat sasaran karena para penerimanya bukan para siswa dari keluarga miskin sesuai Data Pokok Pendidikan.

Nur menilai, adanya intervensi dari parpol dalam penyaluran KIP disebabkan sistem yang berlaku saat ini masih longgar. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus turut berperan dalam pengawasan penyaluran KIP. "Jadi kalau ditemukan keterlibatan parpol, Bawaslu, dan KPU langsung bertindak," katanya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan bahwa semua KIP hanya boleh disalurkan oleh sekolah. Pengecualian penyebaran oleh sekolah hanya untuk anak-anak usia sekolah yang diasuh di panti-panti sosial. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan bahwa semua KIP hanya boleh disalurkan oleh sekolah.

Transparansi

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdullah Ubaid menuturkan, mayoritas keluhan yang diterima dari masyarakat adalah KIP tidak tepat sasaran. Masyarakat mempertanyakan alasan keluarga yang ekonominya tidak tergolong miskin, tetapi menerima KIP.

"Harus ada transparansi data yang digunakan. Misalnya, per kecamatan secara terbuka mengumumkan daftar para penerima KIP," tuturnya. Metode ini menurut Ubaid bisa membantu masyarakat memastikan penyebaran kartu tepat sasaran. Selain itu, data hendaknya dinamis dan selalu mengikuti perubahan situasi. Apabila sebuah keluarga kondisi ekonominya membaik menjadi tidak miskin, anak-anaknya tidak perlu lagi santunan KIP.

"Pengawasan seperti itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, butuh keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dari publik," ujar Ubaid.

Menanggapi temuan ICW, peneliti kebijakan publik dari Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad, mengatakan bahwa hal itu menunjukkan belum terintegrasinya lembaga pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Dinas pendidikan yang berada di bawah pemerintah daerah belum melakukan tugas pengawasan, pengawalan, dan pengelolaan dengan maksimal karena sekolah bisa diterobos oleh partai politik dalam penyebaran KIP.

"Tampak bahwa kebijakan di sektor pendidikan belum sepenuhnya dipahami oleh lembaga-lembaga pemerintah di bidang lainnya. Akibatnya, pengawasan lemah," ujarnya.

Menurut Nus Sadik, pengawasan di tingkat daerah juga perlu diperkuat. Koordinasi dan sinergi yang baik harus dilakukan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Pusat langsung tegur kalau ada pelanggaran di daerah," ucapnya.

KIP merupakan program pemerintah pusat untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah. Siswa yang menerima KIP akan mendapatkan bantuan keuangan secara reguler yang diberikan setiap semester.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/06/18/buka-data-kip-agar-terpantau/>

Jumat, 08 Juni 2018 16:19 WITA

Kemenristekdikti Data Nomor HP dan Medsos Mahasiswa, Fadli Zon: Grabak Grubuk Tidak Karuan

Editor: Abu Asyraf



Fadli Zon

RAKYATKU.COM - Rencana pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mendata nomor telepon seluler dan akun media sosial mahasiswa menuai polemik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon termasuk salah satu yang bingung dengan rencana itu.

Wakil Ketua DPR itu bahkan mengatakan, jika itu dilakukan Kemenristekdikti, maka bisa dikategorikan tindakan konyol. Bagi Fadli Zon, tindakan seperti itu merupakan kemunduran di era demokrasi.

"Jika ada orang yang memberikan stigma seperti itu (radikal) kepada kampus, pasti dia orang bodoh," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (8/6/2018).

Bagi Fadli, kampus adalah ruang untuk belajar. Jika stigma terorisme dilayangkan terhadap kampus, artinya pemerintah setuju jika kampus adalah label terorisme.

“Kampus kita ini adalah kampus modern dan tidak ada stigma itu. Mahasiswa radikal juga tidak ada. Kalau berpikir radikal dalam arti berpikir tajam, tidak ada masalah,” katanya menjelaskan.

Fadli berpendapat jika berpikir radikal adalah cara berpikir yang mengakar, bukan radikal dalam arti terorisme. Bagi Fadli, berpikir tajam adalah berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah pengetahuan.

Menurut dia, kekuatan kampus adalah kekuatan pemikiran yang menghasilkan karya-karya dan benteng peradaban. Ia pun menilai salah atas langkah pemerintah mengawasi ponsel mahasiswa, sehingga perlu dikoreksi.

Oleh karena itu, akun pribadi milik mahasiswa tidak perlu diawasi. Baginya hal tersebut telah menciderai demokrasi. Pengawasan tersebut juga dinilai telah melanggar hak privasi para mahasiswa.

“Kalau orang sudah merasakan ketidakadilan, dia akan mencari jalan sendiri untuk mencapai keadilan. Saya rasa perguruan tinggi dan mahasiswa harus menentang hal ini,” tambah Fadli.

Ia menambahkan, radikalisme dan terorisme jangan dijadikan proyek oleh segelintir pihak. Dirinya menekankan, pemerintah harus memberikan keamanan, keselamatan, dan keyakinan pada masyarakat. “Bukan grabak grubuk tidak karuan,” tegas Fadli.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohammad Nasir mengungkapkan, akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus. Salah satu pengawasan yang akan dilakukan yaitu dengan mendata nomor HP dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.

“Kami lakukan pendataan. Dosen harus mencatat nomor hp yang dimiliki. Mahasiswa medsosnya dicatat. Tujuannya agar mengetahui lalu lintas komunikasi mereka itu seperti apa dan dengan siapa,” ungkap Nasir di Hotel Fairmont Jakarta seperti dikutip dari Republika, Senin (4/6/2018).

Dia mengatakan, pendataan tersebut bukan bermaksud untuk merenggut hak privasi dosen, mahasiswa dan semua sivitas kampus. Kendati begitu, dia memastikan, bentuk pengawasan tersebut mesti dilakukan demi terwujudnya kampus yang steril, bersih dan aman dari segala bentuk paham radikal.

“Kalau mengganggu keamanan. Apapun bentuk (pengawasan) nya, harus dilakukan,” tegas Nasir. Nasir tidak menutup kemungkinan, saat ini masih banyak kampus yang telah terpapar paham radikal namun belum terdeteksi. Mengingat, menurut dia, paham radikal mulai tumbuh di ranah kampus sejak tahun 1983 ketika dibentuknya Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK BKK).

Kendati begitu, Nasir memastikan saat ini pihaknya tidak akan melakukan cara yang sama seperti halnya NKK/BKK untuk menangkal radikalisme di kampus. Karena jika dihidupkan kembali, maka kampus berpotensi menjadi wahana politik lagi.

“Dan itu bahaya. Jadi, nanti kami akan mendesain kurikulum agar kampus harus bisa memahami keamanan di Indonesia. Supaya kita mendapat kepercayaan dari dunia. Kalau kampus tidak aman bagaimana orang asing mau masuk,” ungkap dia.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji menilai niat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) mencatat

nomor ponsel dan media sosial (medsos) mahasiswa baru kurang tepat.

Menurut Ubaid, ada banyak faktor yang memengaruhi seseorang atau mahasiswa terpapar paham radikal. Maka itu, perlu melakukan pendalaman untuk mengetahui faktor dan siapa yang berperan dalam menanamkan radikalisme di kampus.

"Apakah memang gara-gara HP dan medsos semata? Menurut saya kok tidak," kata Ubaid seperti dikutip dari SINDOnews, Kamis (7/6/2018).

Menurut dia, upaya mencegah terpaparnya mahasiswa dari paham radikal bisa dilakukan tanpa harus mengawasi wilayah privasi mahasiswa. Misalnya melalui mekanisme pemberian sanksi dan pembinaan.

Sumber : <http://news.rakyatku.com/read/104760/2018/06/08/kemenristekdikti-data-nomor-hp-dan-medsos-mahasiswa-fadli-zon-grabak-grubuk-tidak-karuan>

Keinginan Kemenristek Awasi Ponsel dan Medsos Mahasiswa Tak Tepat

Rakhmatulloh Kamis, 7 Juni 2018 - 20:26 WIB views: 9.097



Rencana Kemenristek-Dikti awasi ponsel dan mahasiswa baru untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dikritisi. Keinginan tersebut dinilai tidak tepat karena sudah memasuki ruang privasi mahasiswa. Foto/Okezone

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji menilai niat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) mencatat nomor ponsel dan media sosial (medsos) mahasiswa baru kurang tepat.

Menurut Ubaid, ada banyak faktor yang memengaruhi seseorang atau mahasiswa terpapar paham radikal. Maka itu, perlu melakukan pendalaman untuk mengetahui faktor dan siapa yang berperan dalam menanamkan radikalisme di kampus. "Apakah memang gara-gara HP dan medsos semata? Menurut saya kok tidak," kata Ubaid kepada SINDOnews, Kamis 7 Juni 2018.

Menurut dia, upaya mencegah terpaparnya mahasiswa dari paham radikal bisa dilakukan tanpa harus mengawasi wilayah privasi mahasiswa. Misalnya melalui mekanisme pemberian sanksi dan pembinaan.

Sebelumnya, Menristek Dikti M Nasir berencana untuk melakukan upaya pencatatan nomor telepon seluler dan media sosial semua mahasiswa baru saat proses penerimaan. Hal itu sebagai salah satu upaya pemerintah mengawasi penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampus.

Dia menjelaskan, pengawasan akan dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sumber : <https://nasional.sindonews.com/read/1312486/14/keinginan-kemenristek-awasi-ponsel-dan-medsos-mahasiswa-tak-tepat-1528377976>

PENERIMAAN SISWA

Pungutan Mencurigakan di Lembaga Pendidikan

J Galuh Bimantara

26 Mei 2018 · 09:00 WIB



Kompas/Abdullah Fikri Ashri

Peserta menyaksikan data terkait pungutan liar di dunia pendidikan pada acara Sosialisasi Satgas Saber Pungli Jawa Barat di Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (10/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS — Orangtua dari anak yang dinyatakan lolos masuk Madrasah Tsanawiyah Negeri 21 Jakarta curiga pada pungutan Rp 2.350.000 yang dibayarkan ke koperasi madrasah saat mendaftar ulang karena tujuan pungutan tidak jelas.

Hal itu menambah panjang daftar dugaan pungutan liar di lembaga pendidikan. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pun didesak memperketat pengawasan penerimaan siswa baru di madrasah.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, pungutan liar di sekolah-sekolah negeri di Jakarta relatif sudah menurun. Namun, di madrasah, lembaga pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama, pungutan liar belum terkontrol.

"Itu karena Itjen (Inspektorat Jenderal) Kemenag tidak tegas. Madrasah-madrasah itu tidak terpantau," ucapnya dari Banda Aceh, saat dihubungi pada Jumat (25/5/2018).



KOMPAS/LASTI KURNIA

Paparan investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang Kinerja Penanganan Kasus Korupsi Semester I-2016 diselenggarakan di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (28/8/2016). Hadir sebagai pembicara Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri (kiri), peneliti Divisi Investigasi ICW Lais Abid (tengah), dan peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah. Menurut ICW, penindakan kasus korupsi pada semester I-2016 mengalami penurunan pada sisi jumlah kasus dan kerugian negara karena kinerja penindakan ditentukan oleh anggaran, penyidik, tensi politik, dan komitmen pemimpin antaraparat penegak hukum.

Pungutan mencurigakan baru-baru ini ditemukan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) MTsN 21, di Duren Sawit, Jakarta Timur. Daftar ulang bagi peserta yang dinyatakan lolos tes PPDB madrasah setingkat sekolah menengah pertama itu berlangsung pada Senin-Rabu, 21-23 Mei. Orangtua siswa yang datang mendaftar ulang diminta membayar Rp 2.350.000 sebelum menyerahkan berkas.

Nisya, ibu seorang siswa berinisial AHM, baru tahu ada pungutan sebesar itu ketika datang mendaftarkan ulang anaknya pada Senin (21/5/2018). Tidak ada pengumuman sama sekali sebelumnya, bahkan termasuk pada kertas yang ditempel di depan ruang daftar ulang di MTsN 21. Dari laman <https://www.mtsn21jkt.sch.id/>, informasi bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi PPDB hanyalah jenis-jenis berkas yang wajib dibawa saat daftar ulang. Tidak ada keterangan biaya.

Kejanggalan lainnya, petugas daftar ulang PPDB tidak memberikan kuitansi pembayaran kepada Nisya setelah menyerahkan jumlah uang yang diminta. "Satu-satunya yang dikasih panitia adalah form pemesanan seragam lewat koperasi," ujarnya.

Kompas pun mencoba menelusuri informasi tersebut ke MTsN 21 Jakarta pada Rabu atau hari terakhir daftar ulang. Kompas menanyakan ruang untuk daftar ulang peserta yang lolos seleksi PPDB. Sampai di salah satu ruang daftar ulang, Kompas diminta masuk terlebih dulu ke ruang sebelah, yaitu ruang bagian koperasi.

Kompas lantas diterima seorang petugas laki-laki yang menjelaskan, di ruang ini, peserta menyerahkan uang seragam terlebih dulu, baru ke ruang pertama yang didatangi Kompas untuk menyerahkan berkas. "Rp 2.350.000, itu untuk seragam, untuk psikotes juga di situ," ucap petugas tersebut.



KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Warga membubuhkan tanda tangan untuk berikrar dalam memberantas pungutan liar (pungli) dalam acara Sosialisasi Satgas Saber Pungli di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (18/12/2016). Sosialisasi itu untuk mendorong pemerintah dan warga agar memberantas pungli yang selama ini merajalela di negeri ini.

Uang Rp 2,35 juta tersebut tergolong terlampau besar jika hanya untuk membayar seragam dan psikotes. Penelusuran Kompas di satu toko busana di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, harga kemeja putih lengan panjang Rp 63.000, celana panjang biru Rp 71.500, kemeja pramuka lengan panjang Rp 74.000, dan celana panjang pramuka Rp 69.500. Jika ditotal, biayanya Rp 278.000. Adapun biaya psikotes dari pencarian di dunia maya berkisar Rp 100.000-Rp 500.000 per siswa.

Kepala Sekolah MTsN 21 Mahmudah, di Jakarta, Jumat, membantah adanya pungutan liar terhadap siswa baru tahun pelajaran 2018/2019. "Tidak benar ada pungutan liar di sekolah kami," ujarnya. Meski demikian, Mahmudah membenarkan, sekolah mengoordinasikan pembelian seragam sekolah melalui koperasi sekolah. Namun, dia enggan membenarkan bahwa jumlah uang yang ditarik sebesar Rp 2.350.000 atau bukan. Dia tidak berkenan pula merinci penggunaannya.

Menurut Mahmudah, pembelian seragam lewat koperasi sekolah tidak diwajibkan. Orang tua siswa boleh membeli pakaian di luar sekolah. Namun, seragam yang digunakan siswa identik dengan identitas sekolah. Pembelian seragam lewat koperasi sekolah tidak diwajibkan. Orang tua siswa boleh membeli pakaian di luar sekolah.

Murid kelas VIII MTsN 21 mengatakan, mereka menggunakan pakaian berbeda dari Senin hingga Jumat. Pada Senin, siswa mengenakan atasan dan bawahan putih dilengkapi rompi khas sekolah. Selasa, seragam yang dikenakan berupa atasan putih dan bawahan biru dengan sebuah rompi.

Hari Rabu, siswa akan mengenakan pakaian pramuka, sedangkan pada Kamis, seragam yang dikenakan batik sekolah dengan bawahan putih. Sementara itu, pada Jumat, siswa mengenakan setelan pakaian muslim hijau toska.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Warga melintasi spanduk sosialisasi pungli sebagai tindakan melanggar hukum.

Pada 2017, murid wajib membayar pakaian seragam seharga Rp 1,7 juta. Dari sejumlah uang tersebut, siswa mendapatkan antara lain rompi, satu set pakaian pramuka, satu set pakaian muslim, dan satu set pakaian olahraga. Atribut lain yang didapatkan antara lain emblem lambang sekolah, topi, dasi, dan ikat pinggang. Adapun atasan putih, bawahan putih, serta bawahan biru harus mereka beli secara mandiri.

Selain membayar uang seragam, murid juga membayar Rp 100.000 untuk mengikuti psikotes. Psikotes diadakan secara massal di sekolah.

Mahmudah mengatakan, menurut rencana, psikotes serupa akan dilaksanakan tahun ini. Tes tersebut dibutuhkan untuk memetakan minat dan bakat siswa serta menentukan pola ajar terhadap mereka. Keberagaman kecenderungan siswa dalam belajar mengharuskan guru mengetahuinya sejak dini agar pembelajaran berlangsung optimal. "Sekolah bermaksud mengoordinasikan penyelenggaraan psikotes agar lebih mudah dan murah," ujarnya.

Akan tetapi, menyusul keberatan dari salah satu orangtua siswa, penyelenggaraan psikotes akan dievaluasi kembali. Menurut Mahmudah, siswa diperbolehkan mengikuti psikotes di mana saja dan sekolah akan menerima hasilnya.

Tidak prosedural

Kepala Subdirektorat Kesiswaan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Abdullah Faqih menyatakan, pungutan pada masa daftar ulang peserta yang lolos PPDB tersebut tidak sesuai prosedur.



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Siswa lulusan SMP/MTs sederajat antre untuk melakukan verifikasi berkas dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap I di SMK Negeri 19 Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Menurut Faqih, pembelian seragam mestinya masuk ke pengeluaran personal tiap orangtua siswa dan tidak ada pemaksaan. Urusan pembelian seragam seharusnya dibahas setelah daftar ulang dengan disertai kesepakatan dari orangtua dan transparansi biaya dari madrasah. "Untuk psikotes, sebenarnya bisa dimasukkan dalam DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) agar ditanggung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ucapnya.

Untuk pelaksanaan PPDB, lanjut Faqih, madrasah tidak boleh menarik pungutan dari orangtua siswa, termasuk untuk kebutuhan honor panitia. Sebab, biaya PPDB sepenuhnya ditanggung negara lewat APBN.

Meski demikian, madrasah memang boleh menarik dana masyarakat karena tidak semua anggaran peningkatan mutu madrasah bisa ditanggung APBN. Namun, Faqih mengingatkan, caranya tidak bisa dengan "tembak langsung" ke orangtua saat daftar ulang.

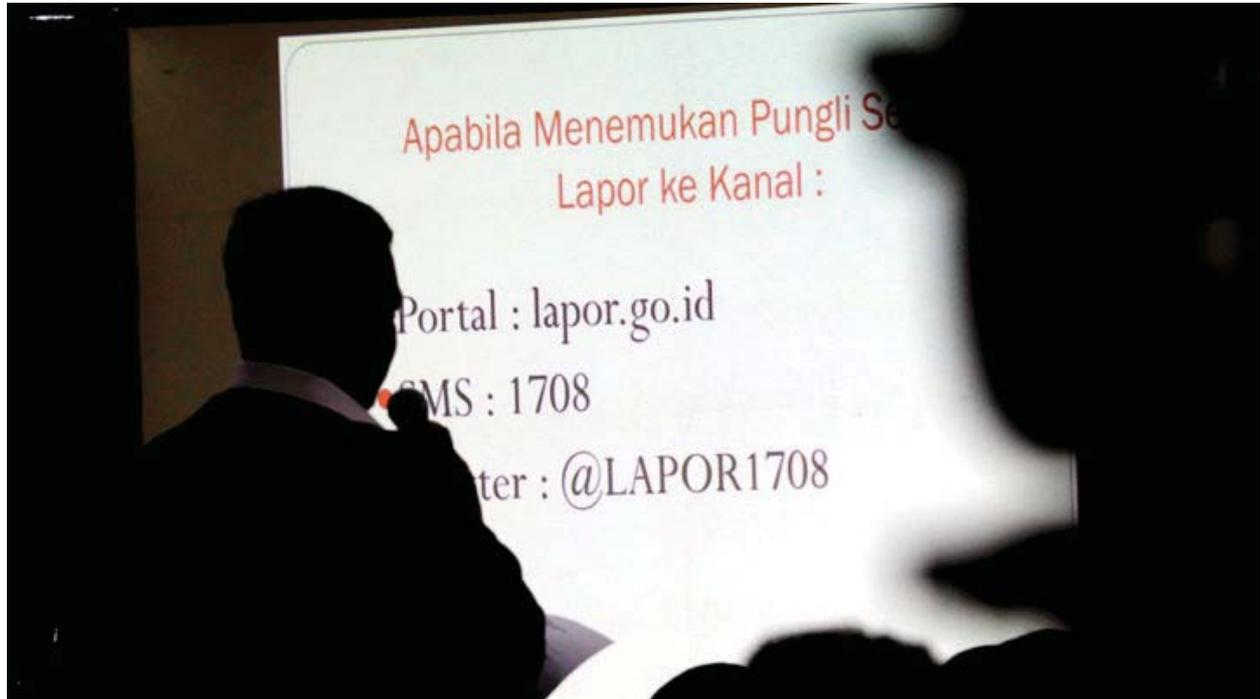
Untuk pelaksanaan PPDB, madrasah tidak boleh menarik pungutan dari orangtua siswa, termasuk untuk kebutuhan honor panitia. Sebab, biaya PPDB sepenuhnya ditanggung negara lewat APBN. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016, dana dari masyarakat harus dikelola oleh komite madrasah, bukan kepala madrasah. Pada sisi lain, besar dana yang ditarik harus sesuai dengan jumlah dana yang tidak ditanggung APBN.

Faqih mengatakan, jika ingin menarik dana dari orangtua murid, madrasah harus menjelaskan dulu dalam rapat komite bersama orangtua tentang besar anggaran yang diterima dan kekurangan dana untuk menjalankan program-program. Program yang butuh dana tambahan tersebut pun harus disepakati dulu dengan orangtua, apakah program dibutuhkan atau tidak.

Ajakan melapor

Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dari 400 aduan yang diterima seusai PPDB 2017 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sebanyak 17 persen terkait pungutan liar.

Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi JPPI Nailul Faruq mengatakan, data aduan untuk PPDB 2018 masih dalam pengumpulan mengingat PPDB tahun ini belum berjalan serentak.



KOMPAS/LASTI KURNIA

Layar berisi informasi pelaporan pungutan liar (pungli) yang dapat digunakan masyarakat ditampilkan saat jumpa pers Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengenai penerbitan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar, di kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (18/10/2016). Surat edaran tersebut yang diterbitkan sebagai tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo untuk pemberantasan pungli di lingkungan instansi pemerintah. Masyarakat yang menemukan kasus pungli diharapkan segera melapor ke portal lapor.go.id, SMS ke 1708, atau Twitter @LAPOR1708.

Nailul mendorong partisipasi publik untuk memantau langsung PPDB. Pelaporan bisa melalui laman www.laporpendidikan.com. "Masyarakat kami minta berani melapor, untuk meminimalkan kasus-kasus seperti tahun-tahun sebelumnya," ucapnya. (KYR)

Sumber : https://kompas.id/baca/utama/2018/05/26/pungutan-mencurigakan-di-lembaga-pendidikan/?asaldaftarakun=baca_artikel

Problematika Pendidikan Indonesia

Brilio stories 18 Mei 2018



Ilustrasi Media.

Sungguh miris membaca hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI/ New Indonesia) tahun lalu mengenai Right to Education Index (RTEI) mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di 14 negara, termasuk Indonesia.

Dari 14 negara yang disurvei (Inggris, Kanada, Australia, Filipina, Ethiopia, Korea Selatan, Indonesia, Nigeria, Honduras, Palestina, Tanzania, Zimbabwe, Kongo dan Chili) dipilih secara acak, kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah Ehtiopia dan Filipina!

Berdasarkan penelitian bertema "Bridging The Gap Between Education Policy and Implementation" yang menggunakan lima indikator, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan nilai skor sebanyak 77%. Kelima indikator itu yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability.

Dari lima indikator itu, ada dua hal yang membuat skor Indonesia lemah yakni kualitas guru (availability) dan sekolah yang belum ramah anak (acceptability). Jelas kondisi ini menjadi tamparan bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa masih butuh kerja keras untuk terwujud. Bukan rahasia jika warga negara yang cerdas akan membangun negara yang kuat bertarung di kancah persaingan global. Pada titik inilah peran pendidikan penting artinya. Sayangnya, hal ini berbanding terbalik dengan keadaan pendidikan di Indonesia.



**Right to Education Index 2017:
Advocacy strategies in Honduras, Indonesia,
Palestine, Tanzania, and Zimbabwe**

March 2018

RIGHT TO
EDUCATION
INDEX

Sumber Foto: <https://www.rtei.org/en/blog/rtei-2017-report-launch/>

“Soal tata kelola guru bermasalah dari sisi kuantitas dan kualitas. Belum ada pemetaan atau evaluasi secara nasional mengenai kualitas guru di Indonesia,” ujar Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional JPPI ketika ditemui di kantornya baru-baru ini.

Memang beberapa waktu lalu sempat ada program Uji Kompetensi Guru (UKG). Namun program itu dipertanyakan banyak kalangan. Metode itu dinilai belum cukup memotret kualitas guru secara nasional. Sedangkan program sertifikasi yang selama ini dilakukan lebih ditujukan pada insentif kepada guru agar mendapat tunjangan yang lebih layak.

Hingga saat ini, sudah 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan. Dari jumlah itu, 80% dialokasikan untuk tunjangan guru. Mestinya ketika tingkat kesejahteraan guru sudah meningkat, harus dibarengi dengan peningkatan mutu guru. Tapi fakta yang terjadi justru sebaliknya. Hingga kini kualitas guru masih dipertanyakan.

Tapi, benarkah kualitas guru adalah problem utama pendidikan di Indonesia? Pernyataan Ubaid dibantah Retno Ambarwati, guru SMP Negeri 47 Jakarta Pusat. Menurut pengajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) itu, secara umum kualitas guru saat ini sudah baik. Retno tidak memungkiri masih ada guru yang kurang memenuhi standar profesionalisme. Tapi tidak bisa digeneralisir semua guru kualitasnya minim.

Jadi, jika ukuran kualitas guru hanya disandarkan pada masalah materi akademik yang disampaikan kepada peserta didik (murid), maka hal itu harus dilihat secara holistik. Tidak bisa setengah-setengah. Menurut Retno, selain memberikan materi pelajaran, guru juga harus memperhatikan perkembangan peserta didik, seperti membantu dan menangani murid yang memiliki masalah di luar jam sekolah.

Lain lagi pendapat Supriyanto, guru Matematika SMP Negeri 47 Jakarta Pusat, dalam melihat kualitas pendidikan ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan yakni subjek (guru, sekolah,

manajerial sekolah), objek (peserta didik, keluarga, dan lingkungan), dan kebijakan (kurikulum, pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan).

Kalau ditinjau dari sisi kualitas guru, ketika tiga faktor itu belum terpenuhi akan sangat berpengaruh pada kualitas guru.



Ilustrasi media

“Memang masih ada faktor yang memengaruhi mutu guru. Masih banyak guru yang melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan paradigma lama dengan pola text book. Buku itu yang ditransfer ke anak. Sekarang abad 21 harus lebih global lagi,” kata Supriyanto.

Saat ini setidaknya guru harus memerhatikan faktor 4C (communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation). Faktor inilah yang belum banyak dikuasai guru apalagi di daerah terpencil. Karena itu pendidikan dan pelatihan pendidikan guru harus terus ditingkatkan. Tapi menurutnya secara umum standar guru sudah cukup baik.

Selain guru, sebenarnya peran anak juga menjadi sorotan penting untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, banyak anak yang merasa tidak cocok terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia. Pelarian mereka adalah jalur pendidikan alternatif.

Sebut saja sekolah alternatif Erudio School of Art (ESoA) yang didirikan oleh Monika Irayati. ESoA sendiri berfokus dengan sistem pembelajaran yang menggunakan seni visual dan desain sebagai perantara. Monika beranggapan banyak anak yang memiliki keinginan tidak sejalan dengan tujuan sekolah pada umumnya, yaitu belajar untuk mendapat nilai dan naik kelas yang menurutnya adalah kepentingan jangka pendek.

Ditanya mengenai tanggapan terhadap riset JPPI bahwa pendidikan Indonesia lebih rendah dari negara ketiga (Ethiopia), Monika memiliki pendapat sendiri. "Kalau kita terus berduka, bersedih, nyalahin sana-sini, untuk apa? Kalau saya orangnya practical. Lebih baik kita melakukan sesuatu dan menjadi bagian untuk perkembangan pendidikan di Indonesia daripada kita komplain terus," tuturnya.

Dari sisi guru, pendidikan alternatif memang berbeda dalam menilai kemampuan seorang guru, tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Menurut Monika, yang terpenting untuk menjadi guru adalah panggilan hati mereka yang memang mau berbagi ilmu kepada anak-anak, bukan karena terpaksa, yang tentunya akan meningkatkan kualitas guru.

"Di dalam jaringan pendidikan alternatif, cara kami melihat guru bisa jadi berbeda dengan pemerintah. Untuk kami, hal terpenting pada saat merekrut bukanlah berdasarkan sertifikat ataupun ijazah, tetapi lebih kepada karakternya. Apakah memang dia punya keinginan dan hasrat untuk berbagi, atau dia memiliki pengetahuan yang pas dengan cara kami dan sebagainya," ungkapnya.

Menurut dia, jangan sampai sertifikasi atau bentuk apapun menghalangi orang yang memang sebenarnya terpanggil untuk menjadi guru, kemudian terkendala. Padahal belum tentu individu yang punya sertifikat terpanggil untuk mengajar dan memang menjiwai profesinya tersebut.

Selain karena adanya faktor guru, sekolah yang ramah anak pun perlu menjadi sorotan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Terbukti, masih banyaknya kekerasan hingga bullying yang terjadi di sekolah.

Untuk meminimalisir kejadian tersebut, harus ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa, seperti yang sudah diterapkan di beberapa sekolah

Tugas kami itu bukan hanya memberikan akademi, tapi di luar akademis pun lebih dominan. Terkadang banyak siswa yang whatsapp saya di luar jam sekolah untuk menceritakan masalah mereka di rumah ataupun antara teman-temannya. Dengan banyaknya masalah itu, otomatis kami memberikan materi akademis itu tidak mudah", ungkap guru SMPN 47, Retno Ambarwati.

Di sekolah alternatif seperti ESoA, pendekatan yang dilakukan terhadap anak dengan membantu mereka mencari tahu siapa dirinya. Kunci utamanya anak dibantu untuk mencari tahu, dia apa dan siapa. "Kemudian, diharapkan nantinya bisa ikut serta untuk berkontribusi di lingkungannya", ujar Monika.

Karena setiap murid berbeda dari beragam sudut pandang seperti kemampuan menyerap ilmu atau menyelesaikan masalah, maka sudah menjadi tugas guru untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan pendidikan muridnya. Inilah yang dilakukan ESoA.



Ilustrasi media

Artinya, people power menjadi penting, baik melalui pendidikan umum ataupun alternatif. Karena itu pendidikan harus dikelola dengan baik bukan hanya sekolah tapi juga semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan sekolah dengan tetap mengacu pada tujuan dan arah pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Memang mengatasi problematika pendidikan di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor-faktor yang harus diperbaiki dan memerlukan waktu yang tidak singkat.

Perlunya kesadaran masyarakat untuk berbagi juga bisa menjadi salah satu faktor untuk mendorong pendidikan Indonesia agar lebih baik. Sudah banyak lembaga yang memberikan kemudahan untuk membantu masyarakat, khususnya anak muda, untuk ikut serta berperan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia Mengajar, yang memberikan wadah kepada generasi millennial untuk membantu mengajar di sekolah-sekolah yang berada di pelosok daerah. Kamu bisa mendaftarkan diri sebagai relawan di sini

Selain itu, kamu juga bisa ikut serta di Akademi Berbagi, sebuah gerakan sosial nirlaba yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan langsung sehingga para peserta bisa meningkatkan kompetensi di bidang yang telah dipilihnya. Kamu juga bisa ikut sebagai relawannya.

Sumber : <https://www.brilio.net/stories/pendidikan/>

Lulusan SMK banyak mengganggu karena kualitasnya tak layak

Muhammad Nur Rochmi 11:18 WIB - Jumat, 27 April 2018

Seorang siswa SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/4/2018) membuat roti saat ujian kompetensi keahlian pengolahan hasil pertanian. Banyak lulusan SMK yang mengganggu karena kualitasnya tak layak dengan kebutuhan dunia kerja.



Seorang siswa SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/4/2018) membuat roti saat ujian kompetensi keahlian pengolahan hasil pertanian. Banyak lulusan SMK yang mengganggu karena kualitasnya tak layak dengan kebutuhan dunia kerja. | Aditya Pradana Putra /Antara Foto

Niat pemerintah membekali tenaga kerja terampil lewat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) melahirkan masalah lain: ledakan pertumbuhan jumlah lulusan SMK. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy setidaknya kini ada 13.900 SMK dikelola swasta dan 3.400 yang dikelola negeri. Namun sayangnya tidak diikuti dengan pertumbuhan kualitas.

Muhadjir menceritakan, ada SMK yang jumlah siswanya hanya 50 anak dalam satu sekolah. Artinya rata-rata hanya ada 10 siswa setiap kelas. "Kelihatan ideal, tapi malah 'terlalu' ideal karena hanya membangun, tidak disertai dengan kualitas yang baik," ujar Muhadjir, Kamis (26/4/2018) seperti dikutip dari Kompas.com. Sebab kualitasnya tak sesuai ini, banyak lulusan SMK banyak yang mengganggu karena tidak layak diserap lapangan kerja.

Salah satu contoh adalah lulusan SMK di Jakarta. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, 30 persen lulusan SMK ini mengganggu. Sebabnya, mereka tak mampu bersaing di dunia kerja.

Secara nasional, bahkan pengangguran di Indonesia banyak disumbang oleh mereka yang pernah mengenyam pendidikan di SMK. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, jumlah pengangguran pada Agustus 2017 jika dilihat dari pendidikan, lebih banyak dari lulusan SMK dibanding lulusan pendidikan lainnya.

“Untuk SMK paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain. Yaitu sebesar 11,41 persen,” kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (6/11/2017) seperti dikutip dari *financedetik*. Pengangguran dari lulusan SD justru paling kecil, hanya 2,62 persen.

Menurut data statistik Kemendikbud, pada 2017 jumlah lulusan SMK mencapai 1.285.178 orang. Tapi tak ada data berapa yang diserap oleh lapangan kerja dan berapa yang menganggur.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, belum ada perhatian serius terhadap pendidikan selama 12 tahun terakhir. Mereka berdialog dengan berbagai stakeholder. “Secara umum ada semacam miss match antara demand side dan supply,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI seperti dikutip dari CNN Indonesia, Februari lalu. Ubaid menjelaskan, sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja banyak, tetapi tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha.

Pembangunan sekolah gencar di berbagai wilayah tapi tidak diikuti tata kelola yang baik termasuk laboratorium yang tidak up to date. Misalnya bengkel untuk siswa jurusan otomotif. “Servis bengkel motor masih utak atik karburator, padahal motor-motor zaman sekarang sudah enggak pakai,” tambahnya.

Muhadjir menjelaskan, kementeriannya tengah ‘merestorasi’ sektor pendidikan. Antara lain dengan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Kemendikbud memberikan bantuan program revitalisasi SMK kepada 219 SMK guna meningkatkan kualitas pendidikan di SMK.

Selain bantuan, juga akan diikuti dengan program ‘link and match’ bekerja sama dengan dunia industri. Sudah ada 219 SMK yang telah memiliki standar perusahaan, sehingga lulusannya dapat langsung diterima bekerja.

Sumber : <https://beritagar.id/artikel/berita/lulusan-smk-banyak-menganggur-karena-kualitasnya-tak-layak>

“

Secara umum ada semacam miss match antara demand side dan supply,”

Anda Mengalami Kecurangan Saat Penerimaan Peserta Didik Baru Laporkan Kesini

Selasa, 17 April 2018, 16:15



MaTA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan membuka Pos Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pos pemantauan ini tersebar di 33 provinsi kabupaten/kota di Indonesia dengan tujuan mengawal proses penerimaan peserta didik baru agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Pos pemantauan juga dapat menjadi sumber informasi bagi orang tua murid mengenai proses penerimaan peserta didik baru.

Pos ini dibuka mulai 16 April hingga 30 September 2018 mendatang dan bagi masyarakat yang ingin melapor atau bertanya, dapat dilakukan melalui telepon di nomor 082360006117 atas nama Sari Yulis atau datang langsung ke pos pemantauan dikantor MaTA yang beralamat di Jalan Kebon Raja Nomor 27, Gampong le Masen Kayee Ading, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh atau bisa mengakses website www.laporpendidikan.com.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi mengatakan, selain membuka posko pengaduan, MaTA juga berharap masyarakat luas dapat terlibat dalam proses pemantauan penerimaan peserta didik baru, terutama orang tua siswa yang akan mendaftarkan anak-anaknya pada sekolah negeri tertentu. Disisi lain, MaTA juga berharap agar Ombudsman RI perwakilan Aceh juga menaruh perhatian dalam proses ini.

"Menurut MaTA, ini juga termasuk dalam pelayanan public yang perlu mendapat perhatian khusus dari Ombudsman," ujarnya Selasa (17/4/2018).

Dari hasil penelusuran MaTA, dunia pendidikan di Indonesia akan memasuki tahun ajaran baru 2018/2019 yang ditandai dengan tahapan penerimaan peserta didik baru dan pendaftaran

ulang bagi siswa/siswi yang naik kelas. Peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru tercantum dalam PP nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

"Kemudian secara lebih rinci Kementerian Pendidikan mengeluarkan Permendikbud nomor 17/2017 tentang penerimaan peserta didik mulai taman kanak – kanak hingga sekolah menengah atas," katanya.

Aturan-aturan tersebut, lanjut Baihaqi, berlaku bagi sekolah negeri dibawah Kemendikbud, sedangkan dibawah Kementerian Agama diatur melalui SK Dirjen Pendidikan Islam No. 481/2018 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru yang berlaku untuk seluruh sekolah di bawah Kementerian Agama (Min/ MTSn/MAn/MAKn).

"Hasil analisis MaTA, PP 17/2010 dan Permendikbud 17/2017 dapat dikatakan cukup progresif. Dalam aturan tersebut, tidak ada jalur umum karena prinsipnya seluruh anak-anak terdekat dari sekolah bisa mengakses Pendidikan berdasarkan dari jarak tempuh dan waktu. Sedangkan SK Dirjen Pendidikan Islam No 481/2018 cenderung berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan PP 17/2010," jelasnya.

Misalnya, dalam hal penerimaan peserta didik kelas 7, dalam PP 17/2010 penerimaan siswa berdasarkan nilai ujian akhir berstandar nasional sedangkan pada SK Dirjen Pendidikan Islam 481/2018 seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian keluar dan dapat didasarkan pada hasil test potensi belajar/ tes akademik sejenisnya. Selain kedua aturan tersebut, seringkali peraturan terkait PPDB yang dikeluarkan Walikota/Bupati maupun Gubernur seolah tidak mengacu pada PP 17/2010 maupun Permendikbus 17/2017.

"Melihat hasil pemantau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada proses PPDB tahun 2017 silam, setidaknya ditemukan tiga permasalahan besar, yaitu, pertama, proses PPDB yang berpotensi dengan korupsi, misalnya jual beli bangku. Kedua, terkait sistem zonasi yang membingungkan dan meribetkan orangtua murid. Ketiga terkait transparansi proses penerimaan peserta didik baru," ungkapnya.

Proses penerimaan peserta didik baru kerap menjadi "mimpi buruk" bagi orang tua sebab seringkali mereka dibebankan dengan berbagai macam pungutan, mulai dari uang formulir, seragam hingga uang masuk sekolah yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal jika mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar seharusnya sekolah, khususnya SD dan SMP, tidak membebani orang tua dengan berbagai pungutan yang mengatasnamakan sumbangan. Selain itu, sekolah juga sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan dalam proses PPDB.

"Hal yang juga tak kalah membebani orang tua murid adanya kewajiban daftar ulang yang disertai dengan pembebanan biaya daftar ulang. Pihak sekolah seharusnya tidak perlu memberlakukan biaya daftar ulang pada siswa, cukup dengan pemenuhan syarat administrasi saja," katanya lagi. Berbagai permasalahan itu jelas akan menghambat pemenuhan hak-hak warga negara atas pendidikan. Warga negara dirugikan karena hak atas pendidikan tidak terpenuhi meski dijamin oleh konstitusi.

"Sementara negara juga dirugikan karena kewajibannya guna memenuhi hak pendidikan warga negara "dibajak" oleh sekelompok orang untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya," tambahnya.

Sumber : <https://www.acehportal.com/2018/04/17/anda-mengalami-kecurangan-saat-penerimaan-peserta-didik-baru-laporkan-kesini/>

Masih Ada Persoalan dalam Penyaluran KIP



Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastra kepada masyarakat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3). (Foto: Investor Daily/Novy Lumanaw)

Maria Fatima Bona / Markus Junianto Sihalo / AO Rabu, 18 April 2018 | 23:43 WIB

Jakarta - Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program prioritas pemerintahan Jokowi-JK masih ditemukan masalah. Salah satu persoalan adalah kurangnya keterlibatan publik, terutama untuk mengawasinya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan, dalam penyaluran KIP, pemerintah terkesan bergerak sendiri tanpa ada keterlibatan publik.

"Masyarakat harus aktif mengawasi. Pemerintah harus menyediakan akses bagi publik untuk ikut mengontrolnya," kata Ubaid, Selasa(17/4).

Ia juga mengatakan, pencairan dan distribusi KIP harus merata dan tepat waktu. Pasalnya, berdasarkan temuan JPPI selama kurun Juli 2017- Februari 2018, terdapat sejumlah laporan pengaduan masalah KIP. Dari 112 total pengaduan, 32 di antaranya terkait dengan pendistribusian yang tidak merata di daerah terluas, terdepan, dan tertinggal, serta wilayah marginal. Selain itu, 30 pengaduan karena distribusi KIP tidak tepat sasaran, 27 laporan penerima KIP sulit mencairkan dan, 10 laporan adanya keterlambatan, 8 pengaduan terkait data real time, dan tidak ada keterlibatan publik 5 laporan.

Secara terpisah, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Persatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI) Mohammad Abduzen mengatakan, Program Indonesia Pintar (PIP) dinilai lebih pada upaya peningkatan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Jika tujuan utama KIP ini berjalan secara baik, dapat berimplikasi pada pengurangan angka putus sekolah sehingga ada peningkatan APK (angka partisipasi kasar),” jelasnya.

Meski demikian, dia mengakui, PIP dan alokasi anggaran APBN 20% untuk pendidikan, belum efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Pasalnya, masih terjadi tumpah tindih anggaran pendidikan. Oleh karena itu, dia mengusulkan adanya penataan kembali lembaga-lembaga pendidikan di bawah kementerian atau lembaga yang menggunakan anggaran pendidikan.

Guru Besar Ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab berpendapat, PIP bisa menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan siswa putus sekolah. Namun, dalam praktiknya harapan itu belum sepenuhnya terwujud.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, alokasi dana untuk harus benar-benar diawasi pemanfaatannya, jangan sampai untuk menambah belanja keluarga. Kedua, besaran dana PIP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, karena anggaran yang diperlukan untuk mereka relatif lebih besar.

“Perlu dipercepat pendirian sekolah inklusif sehingga anak bisa belajar di sekolah yang lebih dekat,” kata mantan rektor UNY ini.

Dia juga menyebutkan, anak putus sekolah tidak semata-mata diartikan berhenti dari partisipasi belajar, tetapi juga karena ketidakmampuannya mengikuti proses pembelajaran akibat layanan tidak bisa menjangkau anak tersebut. Untuk itu, PIP harus diperluas orientasinya untuk program-program remedial yang membuat anak bisa menikmati proses pembelajaran. “Dengan begitu akan terhindar putus sekolah,” ujarnya.

Rochmat juga mengatakan, PIP juga perlu memberi perhatian khusus kepada mereka yang berpotensi putus sekolah. Hal yang dilakukan antara lain mengalokasikan dana lebih besar untuk memberi bekal keterampilan tertentu sesuai dengan potensi dan kondisi siswa bersangkutan.

Sedangkan, penggiat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin mengatakan, PIP dirancang untuk mengatasi kesulitan keluarga miskin dalam mendidik anak. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Jokowi-JK mengatasi kesenjangan sosial.

Menurut Totok, PIP dapat menekan angka putus sekolah, tetapi sejauh ini masih kurang berhasil meningkatkan angka partisipasi belajar siswa. Sebab, mendorong anak-anak yang sudah telanjur putus sekolah untuk kembali ke sekolah tidak mudah.

“Sejauh ini Kemdikbud bersama pemda di seluruh Indonesia bekerja keras agar anak-anak di luar sekolah mau kembali ke sekolah. Banyak anak seperti ini yang tidak mau ke sekolah karena usianya sudah lewat, dan telanjur menikmati bekerja dalam usia sekolah,” papar Totok.

Sedangkan, Staf Ahli Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan, Andreas Tambah menilai, PIP adalah program pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Maka, dengan adanya BOS, orangtua sudah tidak membayar uang sekolah. “PIP ini agar anak-anak mendapat subsidi untuk belanja keperluan sekolah. Dari manfaat keduanya, maka tidak ada alasan anak putus sekolah oleh karena biaya,” ujarnya.

Bahkan, dia menambahkan, berdasarkan data BPS partisipasi anak sekolah meningkat dan anak putus sekolah cenderung turun. “Saat ini, anak putus sekolah lebih banyak terdapat di daerah terpencil, di mana akses dan fasilitas sangat terbatas, khususnya untuk sekolah lanjutan seperti SMP dan SMA atau sederajat,” terangnya.

Peran Kementerian

Secara terpisah, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P, Irine Yusiana Roba Putri mengungkapkan, melalui PIP, pemerintah menggenjot wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan Permendikbud Nomor 19/2016, ada tiga tujuan PIP, yakni meningkatkan akses bagi anak usia 6-12 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out), dan menarik siswa putus sekolah agar kembali bersekolah.

Menurutnya, tujuan itu terlihat belum tercapai. Sebab, tujuan itu sebenarnya adalah proyek besar yang harus melibatkan banyak pihak di aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Analisis tersebut juga didasarkan pada data dari Kemdikbud, evaluasi tentang pelaksanaan PIP di berbagai dapil DPR, hingga masukan dari pihak lain dan masyarakat luas. "Belum tercapai," tandasnya.

Dia melihat, PIP salah satu strategi utama demi memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi bencana. Sebagai contoh, berdasarkan data BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SLTA pada 2017 masih sekitar 60. Artinya, masih ada anak-anak usia SLTA yang tidak melanjutkan sekolah. Bonus demografi pada 2030 bisa jadi bahaya bila APM tak diperbaiki. "APM memang menjadi salah satu tujuan agenda bersama Kemdikbud dan Komisi X," katanya.

Terkait langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan APM, Irine berpendapat, berbagai kementerian harus mengambil langkah. Bila Kemdikbud sudah bekerja melalui PIP, maka Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan kementerian lain wajib mendukung terhadap keluarga yang kurang mampu. Pemerintah daerah juga membuat berbagai program.

"Karena pendidikan terkait erat dengan kesejahteraan keluarga dan faktor-faktor ekonomi lainnya, juga sosial budaya," katanya.

Lebih jauh, ketika ditanya tanggapannya soal anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang belum mampu memperbaiki mutu pendidikan, Irine mengatakan memang harus ada yang berubah. Dia mendukung ide jika 20% dana pendidikan dikelola utuh oleh Kemdikbud dan Kemristekdikti.

Sementara di APBN 2018, telah ada alokasi dana pendidikan 20% sejumlah Rp 444,131 triliun. Dari angka ini, yang mendapat alokasi terbesar adalah Kementerian Agama sebesar Rp 52,7 triliun, diikuti Kemristekdikti sebesar Rp 40,4 triliun, dan Kemdikbud sebesar Rp 40,1 triliun.

Menurutnya, Kemdikbud sebagai aktor utama pendidikan perlu memegang peran utama. Karena basis data yang paling luas juga dari kementerian itu. "Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan akan terjadi dalam fokus dan standar yang sama. Ini lebih susah jika terbagi di beberapa kementerian dan lembaga," tandas Irine.

Sumber : <http://www.beritasatu.com/nasional/488872-masih-ada-persoalan-dalam-penyaluran-kip.html>

65.119 Sekolah Diklaim Siap UNBK

Sabtu, 31 Maret 2018 06:49 WIB



Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (ANTARA | ASEP FATHULRAHMAN)

Pelaksanaan ujian disebut hanya menggunakan jaringan lokal.

JAKARTA (HN) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) digelar secara bertahap pada April ini. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengklaim, 65.119 sekolah siap melaksanakan UNBK.

“Dinas pendidikan setiap daerah lebih dulu memverifikasi kesiapan sekolah menerapkan UNBK,” kata Kepala BSNP Bambang Suryadi, Jumat (30/3).

Pernyataan Bambang sekaligus menanggapi potensi sekolah di daerah mengalami kendala jaringan terkait pelaksanaan UNBK. Dia menjelaskan, dinas pendidikan di daerah tidak memaksa sekolah untuk menggelar UNBK. Sekolah yang dinilai tak layak menggelar UNBK maka bisa menggelar ujian nonkomputer atau Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

“Sekolah yang akan menjalani UNKP sebanyak 30.061,” katanya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengatakan, sekolah yang sudah ditetapkan menerapkan UNBK tidak bisa beralih ke UNKP. Dia berujar, pelaksanaan ujian hanya menggunakan jaringan lokal.

Totok mengakui, sekolah yang tidak memiliki jaringan internet tidak dipaksa melakukan UNBK. Mereka dibolehkan menggunakan UNKP.

Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan Kemendikbud Abduh mengakui, UNBK merupakan pilihan untuk setiap sekolah. Sekolah boleh memakai sistem resource sharing atau melaksanakan UNKP apabila fasilitas pendukung UNBK tak memadai

Abduh menjelaskan, koneksi internet saat UNBK hanya digunakan saat sinkronisasi dan merilis token dari pusat ke sekolah. Pelaksanaan ujiannya berlangsung offline. Menurut Abduh, sinkronisasi adalah proses pengunduhan soal ujian dari pusat. Proses ini dilakukan dua hari sebelum ujian setiap jenjang dimulai.

Abduh menambahkan, pemerintah berupaya meminimalisasi kecurangan saat UNBK.

"Soal bisa dibuka setelah siswa memasukkan username, password, dan token. Semuanya baru dibuka pada hari pelaksanaan," katanya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nailul Faruq mendesak pemerintah menyiapkan formulasi tepat mencegah kecurangan.

"Kecurangan dalam UNBK akan berdampak pada paradigma ketidakjujuran siswa saat melaksanakan ujian," katanya

Reportase : Alvin Tamba
Editor : Aria Triyudha

Sumber : <http://www.harnas.co/2018/03/30/65119-sekolah-diklaim-siap-unbk>

Ketimbang Beri Kredit Pendidikan, Lebih Baik Efektifkan APBN dan Zakat



Ilustrasi Perguruan Tinggi (Foto: Istimewa)

Pemerintah serta perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa kurang mampu. Kerja sama dengan perbankan harus ada kesepakatan dan hitungan yang realistis terhadap besaran bunga. Maria Fatima Bona / AO Selasa, 20 Maret 2018 | 17:12 WIB

Jakarta - Pendidikan merupakan eskalator bagi warga negara untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan anggaran untuk pendidikan, tetapi juga mengelola dana tersebut agar tepat sasaran. Wacana pemberian kredit pendidikan (student loan), seperti yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi alternatif pembiayaan.

Namun, pemerintah disarankan untuk mengefektifkan pengelolaan dana pendidikan dari APBN 2018 sebesar Rp 444,131 triliun (20%) dan menggenjot potensi dana zakat nasional yang bisa mencapai Rp 217 triliun untuk dana pendidikan. Peran swasta melalui beasiswa pendidikan juga perlu ditingkatkan agar lebih banyak lagi warga negara yang berpendidikan tinggi.

Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, usulan penerapan student loan atau kredit mahasiswa itu kurang tepat diterapkan di Indonesia. Pola seperti itu akan membuat pendidikan lebih mengarah kepada komersialisasi dan industrialisasi.

"Peserta didik, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu, akan terbebani. Setelah lulus mereka akan kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman pendidikan tersebut, sehingga tidak ada kepastian untuk pengembalian dana," kata Ubaid kepada di Jakarta, Selasa (20/3).

Ubaid juga menegaskan, pinjaman dana ini tidak sesuai dengan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal itu menegaskan, pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Artinya, negara bertanggung jawab untuk memfasilitasi mahasiswa, bukan menjerat mereka dengan utang dana pendidikan.

“Student loan ini akan menjerat leher mahasiswa dengan tanggungan utang setelah mereka lulus. Anak dari orang tua yang tidak mampu juga tidak memiliki kepastian untuk mengembalikan dana yang dikredit setelah mereka lulus,” katanya.

Menurutnya, upaya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan bukan dengan pinjaman pendidikan. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap alokasi dana 20% pendidikan di APBN. Alokasi dana tersebut belum menunjukkan dampak signifikan, karena mutu pendidikan Indonesia masih rendah, termasuk akses pendidikan yang masih minim.

Pekan lalu, Presiden Jokowi mengusulkan ada pola pinjaman dana untuk calon mahasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan. Presiden mencontohkan program student loan di Amerika Serikat (AS). Di negara itu, kredit pendidikan itu mencapai US\$ 1,3 triliun per 2016. Pinjaman bagi mahasiswa itu berada di peringkat kedua setelah kredit pemilikan rumah (KPR).

Tidak Fokus

Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) Asep Saefuddin mengatakan, pemanfaatan dana pendidikan 20% dari APBN tidak fokus pada pendidikan, melainkan disalurkan ke berbagai sektor lainnya. Hal itu yang membuat dana tersebut tidak hanya disalurkan ke Kemdikbud dan Kemristekdikti, tetapi juga ke Kementerian Agama dan kementerian/lembaga lainnya.

“Bila hanya fokus ke kementerian terkait (Kemdikbud dan Kemristekdikti), saya pikir dana pendidikan 20% APBN itu lebih dari cukup. Dana sebesar itu juga bisa memenuhi gaji guru dan dosen. Bila kebutuhan primer dan sekunder mereka sudah terpenuhi, saya yakin dosen dan guru bisa fokus di akademik,” ujarnya.

Dia pun mengusulkan agar anggaran pendidikan di Kementerian Agama, juga kementerian/lembaga lainnya, diserahkan ke Kemdikbud atau Kemristekdikti. Sehingga, apabila ada ketidakberesan, dua kementerian itu yang bertanggung jawab.

Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab menambahkan, usulan student loan ini menunjukkan pemerintah positif memiliki perhatian terhadap pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan dana bantuan keuangan. Pasalnya, 20% dana pendidikan di APBN sejak awal dirancang untuk operasional, bukan untuk pengembangan pendidikan.

Menurut dia, kredit pendidikan itu sebaiknya menjadi alternatif terakhir. Skema pinjaman ini pernah dijalankan oleh Bank BNI dengan memberi Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) dan hingga kini banyak yang tidak bisa melunasi. Bahkan, ijazah sebagai jaminan masih banyak yang tersimpan di kampus. Dia justru mendorong pemanfaatan dana zakat dan mendorong peran serta dunia usaha untuk berkolaborasi dalam memberikan beasiswa.

Pernah Gagal

Mantan Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam menerapkan kredit mahasiswa itu. Apalagi, sistem kredit mahasiswa tersebut pernah dijalankan oleh BNI dan gagal. Kegagalan program ini karena banyak lulusan yang

belum membayar. Ketika itu, data terkait dunia pendidikan juga masih sangat lemah. Belum ada single identity number seperti saat ini, sehingga perguruan tinggi dan perbankan sulit melacak keberadaan dan tempat kerja lulusan tersebut.

“Dulu itu urusan data masih lemah. Berbeda dengan sekarang, yang sudah ada KTP elektronik. Data sekarang sudah bisa terintegrasi, sehingga bisa memantau keberadaan mahasiswa tersebut setelah lulus dan bekerja. Jadi, bila mau ada kebijakan kredit mahasiswa, selama data terintegrasi, tentu akan mudah dan positif untuk perbankan,” tuturnya.

Nuh menyarankan, pemerintah memperhatikan peluang pelamar kredit mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, program studi (prodi) dan akreditasi perguruan tinggi harus diperhatikan. Pasalnya, apabila mahasiswa tersebut sulit mendapat pekerjaan, karena jurusan dan perguruan tinggi bermutu jelek, maka akan berpotensi terjadi kredit macet.

Lalu, kerja sama dengan perbankan harus ada kesepakatan dan hitungan yang realistis terhadap besaran bunga yang akan diberikan. Dengan demikian, kredit itu tidak membebani mahasiswa. Terakhir, program student loan itu diuji coba terlebih dulu di beberapa daerah dan perguruan tinggi (PT).

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, usulan student loan itu sebagai salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan APK perguruan tinggi, yang saat ini masih 37% dan solusi mengatasi mahasiswa putus kuliah.

Nasir menuturkan, program itu mengingatkannya kembali pada KMI beberapa tahun lalu. Menteri Nasir adalah salah satu mahasiswa penerima dana KMI sebesar Rp 1,5 juta untuk menyelesaikan tugas akhir. Saat itu, ujarnya, banyak mahasiswa yang tidak melunasi pinjaman mereka.

Meski demikian, Nasir mengatakan, usulan Presiden Jokowi itu positif dan patut diapresiasi, karena bisa memberi peluang baru untuk meningkatkan APK pendidikan. Hanya saja, kata dia, hingga saat ini belum ada pembahasan khusus terkait wacana student loan itu.

Pemerhati pendidikan, Indra Charismiaji mengatakan, jika ingin diterapkan, student loan itu harus disinergikan dengan cetak biru kebutuhan tenaga kerja pada Revolusi Industri 4.0. Artinya, tidak semua program studi berhak mengajukan pinjaman, melainkan hanya jurusan-jurusan yang sesuai dengan kemajuan industri.

“Saran saya, student loan ini jangan dibuka untuk semua jurusan. Misalnya, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang setiap tahun meluluskan lebih dari 20.000 tenaga pendidik, namun tidak semua terserap lapangan kerja. Ini bisa menjadi beban,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap ada kerja sama antara dunia usaha dan dunia industri dengan perguruan tinggi. Sehingga, perguruan menjalankan kurikulum sesuai kebutuhan industri. Lulusan perguruan tinggi langsung terserap dan dapat segera membayar kredit tersebut.

Sumber: Suara Pembaruan <http://www.beritasatu.com/satu/484142-ketimbang-beri-kredit-pendidikan-lebih-baik-efektifkan-apbn-dan-zakat.html>

Akses Pendidikan

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Perlu Pengawasan

14 Maret 2018 · 04:00 WIB



KOMPAS/AHMAD ARIF

Kondisi Kampung Waegrahe, Desa Waereman, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Maluku. Akses menuju kampung ini sangat terbatas, menyebabkan minimnya pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS – Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar masih menuai beberapa permasalahan di lapangan, seperti pendistribusian dan pencairan. Perlu ada sinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan perbankan, agar tujuan program untuk pengentasan angka putus sekolah tersebut dapat terwujud.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dari Juli 2017 hingga Februari 2018, setidaknya terdapat 112 aduan terkait pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Aduan tersebut meliputi, tidak ada keterlibatan publik dalam memonitor data KIP (5 aduan), tidak ada data aktual KIP (8 aduan), keterlambatan pencairan KIP (10 aduan), kesulitan pencairan KIP (27 aduan), KIP tidak tepat sasaran (30 aduan), dan distribusi KIP tidak merata (32 aduan).

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji di Jakarta, Selasa (13/3), mengatakan, permasalahan-permasalahan di lapangan menunjukkan optimalisasi program KIP belum berjalan optimal.

“Di lapangan ternyata masih ada keluhan-keluhan yang perlu segera diselesaikan. Beberapa siswa masih belum mendapat akses pendidikan. Harus ada data yang akurat soal pendataan KIP,” ujar Ubaid.

Pendistribusian KIP belum bisa menjangkau daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain itu, KIP juga belum bisa diakses oleh anak-anak yang tereksklusi. Di beberapa kasus juga dialami soal keterlambatan pencairan.

“Misal daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di beberapa daerah akses sekolah jauh, juga terjadi di Solok Selatan, medannya pegunungan. Kalau pun ada yang dapat akses, tetapi ke bank-nya susah,” ujar Ubaid.

Berdasarkan data Kemdikbud per 11 Maret 2018, KIP sudah tersalurkan kepada sebanyak 18.248.287 anak usia 6-21 tahun. Penerima mencakup anak dari keluarga tidak mampu yang ada di sekolah dan anak yang tidak sekolah.



NIKOLAUS HARBOWO

Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/3).

Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman, menuturkan, pencairan dana KIP sudah mencapai 74 persen atau 13.424.149 anak.

Pencairan dana sebesar 26 persen belum terealisasi karena beberapa hal, seperti siswa kesulitan mengaktivasi rekening karena terkendala akses ke bank, dan siswa sengaja tidak mengaktivasi rekening agar uang terkumpul.

“Kalau di usia 21 tahun ke atas uang itu belum diambil juga, uang itu mau tidak mau harus kembali ke negara,” ujar Alpha.

Karena itu, lanjut Alpha, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah, sekolah, dan perbankan untuk secara aktif memberi tahu kepada siswa dan orangtua agar segera mencairkan KIP. Uang tersebut akan membantu mengentaskan masyarakat miskin, membuka akses pendidikan, dan memastikan anak-anak miskin tidak putus sekolah.

Terkait keluhan kesulitan pencairan dana, Alpha mengatakan sudah memberi kemudahan kepada siswa yang tinggal di daerah 3T untuk mencairkan dana KIP secara kolektif oleh pihak sekolah. Untuk aktivasi rekening, syarat yang diperlukan cukup fotokopi rapot dan surat keterangan

dari kepala sekolah.

“Kami mendorong perbankan untuk ikut memudahkan. Sebagaimana pesan mendikbud agar pemerintah daerah, sekolah, dan perbankan di daerah aktif mendorong percepatan pencairan,” ujarnya.

Alpha menuturkan, Kemdikbud melalui Data Pokok Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dapodikdasmen) akan terus berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kementerian Sosial terkait sinkronisasi data penerima KIP. Hal itu untuk meminimalisir kesalahan sasaran. (DD18)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/03/14/pelaksanaan-program-indonesia-pintar-perlu-pengawasan/>

Ini 6 Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut Rektor UAD

Senin, 12 Maret 2018 13:09



Rektor UAD Dr. Kasiyarno M. Hum dalam Kuliah Umum Rembuk Guru Desa di Kampus 4 UAD Yogyakarta, Senin(12/3/2018).

Laporan Reporter Tribun Jogja Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM - Pada Kuliah Umum Rembuk Guru Muda, Senin (12/03/2018), Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Dr. Kasiyarno M. Hum menyebut ada 6 masalah pendidikan di Indonesia.

Data ini berdasarkan hasil penelitian dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

"Salah satu masalah utamanya adalah kekerasan di sekolah, baik secara fisik atau pun mental," papar Kasiyarno kepada peserta, termasuk tribunjogja.com.

Selain kekerasan di sekolah, 5 masalah lainnya adalah program pendidikan 12 tahun yang belum berjalan maksimal, angka putus sekolah masih tinggi, lemahnya pengakuan negara terhadap pendidikan informal dan alternatif, biaya pendidikan yang tinggi, serta tidak imbangnya kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja terampil.

Terkait dengan kasus kekerasan di sekolah, Kasiyarno menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang tertinggi dalam hal tersebut.

"Kekerasan sekolah di Indonesia masuk tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN," ungkap Kasiyarno

Selain 6 masalah tersebut, Kasiyarno juga menyoroti kemampuan dan kompetensi guru yang dianggapnya masih rendah. Klaim ini didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015.

"Kemampuan guru-guru kita masih di bawah rata-rata. Idealnya kompetensi seorang guru bisa mencapai 60%," ujar Kasiyarno.

Baca: Anggaran Pendidikan Sebesar 400 Trilyun Rupiah Belum Terserap Sepenuhnya

Rektor UAD Kasiyarno menjadi pembicara dalam Kuliah Umum Rembuk Guru Muda di Kampus 4 UAD, Banguntapan, Bantul.

Selain beliau, hadir pula Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi Ph.D.

Kehadiran Didik untuk menggantikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy yang berhalangan hadir. (tribunjogja)

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Ini 6 Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut Rektor UAD, <http://jogja.tribunnews.com/2018/03/12/ini-6-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-rektor-uad>.

Penulis: Alexander Aprita Editor: has

Rektor UIN: Larangan bercadar untuk cegah radikalisme, fundamentalisme

6 Maret 2018



Universitas Islam Negeri (UIN) sebelumnya dikenal dengan mahasiswa pendukung Islam progresif./BBC Indonesia

Empat puluh dua mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga, Yogyakarta memakai cadar telah dikumpulkan, diminta mencabut cadar dengan kemungkinan dikeluarkan. Rektor Yudian Wahyudi mengatakan para mahasiswi akan diberikan sesi penyuluhan sampai sembilan kali. "Kita mengumpulkan mahasiswa itu. Jumlahnya sudah ketahuan. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan jurusan asal dan sebagainya. Saya juga sudah, tadi setelah rapat untuk membuat tim konseling.

"Konseling ini nanti terdiri dari dosen yang dari berbagai disiplin keilmuan ... Sampai sembilan kali kalau mereka masih bertahan pada pendiriannya, ya sudah kami minta mereka tidak kampus," kata Yudian Wahyudi kepada Nuraki Aziz untuk BBC Indonesia.

Langkah yang diambil UIN ini didukung Abdullah Ubaid, kordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) karena itu memang urusan dalam kampus itu sendiri.

"Kalau memang kebijakan internal kampusnya begitu, ya tidak ada salahnya juga. Karena identitas mahasiswa atau identitas negara itu harus jelas. Kalau misalnya hanya yang terlihat matanya saja itu kan tidak jelas.

"Dalam Indonesia malah menjadi aneh. Kalau ada perempuan yang memakai cadar itu malah justru menjadi perhatian publik. Yang harusnya perempuan itu, kalau dalam Islam tidak menjadi perhatian publik supaya tidak menjadi sumber fitnah," kata Ubaid dari LSM yang memantau berbagai masalah pendidikan.



Aksi protes menentang Perppu Ormas pelarangan HTI/Reuters

Radikal?

Sebelumnya, terdapat sekitar satu hingga dua mahasiswi yang bercadar di UIN yang dikenal beraliran Islam progresif. Peningkatan jumlahnya menjadi puluhan menunjukkan gejala peningkatan radikalisme.

“Kami melihat gejala itu, kami ingin menyelamatkan mereka, karena mereka ini, jangan sampai ya, tersesat administrasi pendidikan, jadi politik administrasi pendidikan.

“Mungkin soal aqidah nggak ada masalah. Tetapi kalau mereka melakukan ini, kan sudah banyak kasus di tempat-tempat lain, orang-orang yang didoktrin seperti itu akibatnya hanya akan menjadi korban dari gerakan-gerakan radikal itu,” kata Rektor UIN, Yudian Wahyudi.

Beberapa waktu lalu, sejumlah pihak sempat mengibarkan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kelompok terlarang yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, di kampus UIN. Salah satu mantan dosen tidak tetap UIN diduga terlibat Muslim Cyber Army. Mantan dosen bahasa Inggris yang telah ditangkap ini menyebarkan berita bohong tentang mualif yang dibunuh orang.

Tetapi pengamat Islam dan politik, Prof Dr Noorhaidi Hasan mengatakan, berdasarkan penelitian yang didukung UNDP di SMA dan universitas pada 16 provinsi terkait bahan bacaan Islam, kebanyakan mahasiswa tidak menyukai literatur jihad.

“Mahasiswa itu sudah tidak menyukai lagi bacaan-bacaan yang mempropagandakan ide jihadisme. Yang mempropagandakan ideologi Hizbut Tahrir juga semakin lemah. Yang agak besar itu Salafi, tetapi juga masih sedikit. Yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin agak lumayan banyak.

“Tetapi yang paling banyak dibaca oleh mahasiswa dan mempengaruhi aspirasi mereka itu sebenarnya Islamisme populer. Masih ada cita-cita tentang keagungan Islam dan khususnya penerapan Islam secara menyeluruh, tapi mereka bisa mengkompromikan kecenderungan ini

dengan modernitas dan globalisasi,” kata Noorhaidi yang juga direktur sekolah pasca sarjana UIN.

Universitas dengan sekitar 20.000 mahasiswa ini sebelumnya dikenal paling progresif, misalnya jika dibandingkan dengan sebagian mahasiswa Universitas Gajah Mada dengan kegiatan Islam konservatif, Institut Pertanian Bogor terkait HTI dan Institut Teknologi Bandung dengan Ikhwanul Muslimin.

Dari 42 mahasiswi UIN yang bercadar ini belajar di semua fakultas, yaitu ekonomi, pendidikan, syariah dan hukum, dakwah, sains dan teknologi.



Hak atas foto ROBERTUS PUDYANTO/GETTY IMAGES Image caption Apakah diperlukan hukum yang lebih ketat dalam mengatasi radikalisme?

Hukum lebih ketat?

Rektor UIN Kalijaga Yudian Wahyudi mengatakan sejumlah langkah administratif dilakukan untuk memberikan keamanan kepada berbagai pihak.

“Kami berusaha untuk memberikan keamanan, bukan hanya bagi kampus serta umum, tetapi juga bagi para mahasiswi yang pada umumnya mereka itu bercadar karena mereka belum paham, karena mereka seringkali hanya dikampanye, didoktrin orang lain, sehingga nanti mereka ini terpisah dari masyarakat. Juga dalam kenyamanan administrasi. Kalau seseorang bercadar, kita kan tidak bisa memastikan apakah benar dia si A misalnya,” Yudian Wahyudi menjelaskan.

Jadi apakah diperlukan hukum nasional yang lebih rinci dalam menangani gejala peningkatan radikalisme di Indonesia, mengingat pemakaian cadar sebenarnya tidak melanggar hukum Indonesia tetapi terjadi peningkatan gejala radikalisme, fundamentalisme yang bertentangan dengan nilai akademik dan NKRI?

“Tidak perlu pemerintah melakukan peraturan yang mewajibkan seperti yang dilakukan UIN. Dikembalikan kepada norma dan nilai-nilai yang berkembang di lembaga pendidikan itu sendiri,” kata Abdullah Ubaid.

“Kalau di sekolah tinggi agama Islam, norma-norma yang dikembangkan semacam itu, ya itu kan merupakan konsensus bersama. Berikanlah otoritas kepada institusi pendidikan untuk bagaimana mereka meng create etika atau nilai-nilai yang harus dikembangkan di dalam dunia akademik,” tambah Ubaid dari JPPI.

Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43288075>

BPS: Lulusan SMK Banyak Menganggur Sepanjang 2017

Elise Dwi Ratnasari, CNN Indonesia | Senin, 26/02/2018 10:53 WIB



BPS: Lulusan SMK Banyak Menganggur Sepanjang 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) ungkap pada 2017 justru penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia berasal dari lulusan SMK yakni sebanyak 11,41 persen. (Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah gencar mendorong anak Indonesia untuk menuntaskan pendidikan 12 tahun hingga jenjang sekolah menengah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK digadang-gadang bakal jadi pencetak tenaga kerja yang siap terjun ke lapangan.

Akan tetapi, justru temuan berbeda dipaparkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Belum ada perhatian serius terhadap pendidikan 12 tahun. Ditambah lagi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 justru penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia berasal dari lulusan SMK yakni sebanyak 11,41 persen.

"Lulusan SMK yang digadang-gadang langsung bekerja, malah nganggur. Kami pun berdialog dengan berbagai stakeholder, secara umum ada semacam miss match antara demand side dan supply," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI dalam sebuah forum di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut lagi Ubaid menjelaskan, sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja banyak, tetapi tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha. Selain itu, lanjutnya, ada kesan akses lebih diutamakan. Pembangunan sekolah gencar di berbagai wilayah tapi tidak diikuti tata kelola yang baik termasuk laboratorium yang tidak up to date. Ubaid memberikan contoh bengkel untuk siswa jurusan otomotif.

“Servis bengkel motor masih utak atik kaburator, padahal motor-motor zaman sekarang sudah enggak pakai,” tambahnya.

Sementara itu, Abdul Waidl, Koordinator Konsorsium Ketenagakerjaan memperingatkan bahwa ke depan, segala sesuatu akan berjalan otomatis nyaris tanpa bantuan tenaga manusia. Ia mengambil contoh ritel milik Jack Ma yang hanya memiliki sedikit pegawai sebab banyak hal digantikan oleh mesin berteknologi canggih. Belum lagi industri manufaktur yang memang menggunakan banyak mesin. Kemudian, apakah tenaga manusia benar-benar tak lagi dibutuhkan?

“Nanti muncul pekerjaan baru, tapi perlu keahlian. The World Economic Forum pada 2016 sempat mencetuskan bahwa nanti 65 persen anak-anak SD kita di masa depan tak akan merasakan pekerjaan yang kita rasakan sekarang,” kata Abdul dalam kesempatan serupa.

Kenyataan pahit ini memang mau tidak mau dihadapi para calon pekerja. Ia menyoroti bukan lagi soal ketimpangan demand dan supply. Namun soal input. Pertama, input siswa SMK. SMK selama ini memiliki passing grade lebih rendah daripada Sekolah Menengah Atas (SMA).

Abdul pun memberikan contoh perbandingan passing grade antara SMK dan SMA dari hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2016. Di Jakarta, passing grade untuk SMA sebesar 79,11 sedangkan SMK 66,17. Kota lain misalnya Semarang, untuk SMA sebesar 58,63 sedangkan SMK hanya 24,50. Passing grade rendah tak menuntut calon siswa untuk memiliki NEM atau nilai tinggi.

Kedua, input guru. Kini, jumlah SMK di seluruh Indonesia sekitar 13.710 sekolah, tetapi guru produktif hanya 22 persen. Guru produktif ialah guru yang mengajar mata pelajaran jurusan. Sedangkan 78 persen terkait mata pelajaran lain seperti agama, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan.

Tak hanya jumlah, persoalan guru ini juga terkait kompetensi. Mungkin guru tersebut memang mampu mata pelajaran produktif tetapi kadang latar belakang pendidikan tak sesuai. Kemungkinan lainnya, latar belakang mendukung, tapi sang guru tak pernah terjun ke lapangan, padahal sekolah kejuruan menuntut anak untuk terlibat aktif bukan duduk, mendengarkan dan menulis.

“Input kita kelas dua, guru-guru enggak memenuhi syarat, apa yang kita harapkan?” keluhnya.

Revitalisasi SMK

Meski presentasi angka pengangguran dari lulusan SMK memang yang terbesar, tetapi Saryadi Guyatno, Kepala Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri, Kemendikbud mengajak publik untuk beranjak ke angka faktual. Menurutnya, bila dikonversikan ke jumlah riil, penganggur terbuka dari lulusan SMA justru jumlahnya lebih besar.

Kondisi sekarang, pengangguran terbuka mencapai 7,04 juta orang. Lulusan SMK menduduki presentase 11,41 persen atau sebanyak 1,6 juta. Sedangkan lulusan SMA yang memiliki presentase 8,29 persen bila dikonversikan ke angka riil menjadi 1,9 juta orang.

“Penghitungan presentase ini berdasarkan jumlah lulusan. Yang masuk SMK tidak sebanyak SMA sehingga presentasinya lebih tinggi. Dari angka riil ini, kita melihat bahwa lulusan SMK itu enggak kalah dari SMA,” ujarnya.

Saryadi tidak menampik paparan persoalan-persoalan yang dihadapi SMK kini. SMK perlu revitalisasi, tapi tak bisa sekaligus. Kemendikbud menjalankan revitalisasi secara bertahap mulai dari 219 SMK yang menjadi sasaran program. Program revitalisasi meliputi empat hal yakni, satuan sistem pembelajaran, satuan pendidikan, peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan.

“Sasarannya untuk mewujudkan keselarasan dunia pendidikan dengan dunia industri,” kata Saryadi.

Ia pun menjelaskan, implementasi revitalisasi ini bisa terwujud misalnya dengan adanya kurikulum yang fleksibel. Fleksibel artinya bisa mengakomodasi perkembangan dunia industri. Harapannya sekolah dapat melakukan kerjasama dengan industri atau mengadakan pelatihan untuk guru. Kerjasama ini memungkinkan untuk diadakannya sertifikasi sehingga siswa yang lulus dapat langsung mengisi slot di perusahaan.

Bakrun, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dalam kesempatan serupa menambahkan bahwa kepala sekolah juga termasuk sasaran revitalisasi. Kepala sekolah SMK diharapkan merupakan orang yang memiliki kegiatan wirausaha atau berjiwa wirausaha. Hal ini untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan para siswa SMK.

“Revitalisasi tuntas sampai 2025. Kami inginnya kalau bisa 2019, tapi kan tidak mungkin,” katanya pada CNNIndonesia.com.

Ia pun berkata bahwa selama ini pemerintah melalui Kemendikbud telah melakukan berbagai usaha, tapi kurang terdengar gaungnya. Ada begitu banyak persoalan tapi seringkali Kemendikbud yang jadi sasaran protes publik.

Perlu komitmen

Sebagai pengamat sekaligus praktisi pendidikan, Jimmy Phaet berpendapat bahwa selain peningkatan jumlah dan kualitas, pengajar juga perlu tahu budaya kelas bawah. Pengajar yang mengenal karakter dan budaya siswanya, diharapkan bakal membuat siswa betah belajar di sekolah.

“Berapa presentase anak SMK dan SMA? Asumsi saya SMK lebih banyak. Hasrat belajar tak begitu jalan karena pengajar kurang memahami budaya anak-anaknya,” jelas Jimmy.

Selain pemahaman budaya siswa, sekolah pun perlu menumbuhkan budaya produktivitas. Namun, Jimmy tak melihat hal ini dijalankan sekolah padahal nanti begitu lulus siswa akan langsung terjun ke dunia kerja, dunia yang berbeda dengan dunia sekolah.

Jimmy pun memberikan catatan terkait ujian di SMK. Model ujian antara SMK dengan SMA harus dibedakan. SMK melihat kompetensi kemampuan sesuai dengan jurusan dengan banyak praktek lapangan, bukan mengerjakan soal di belakang meja.

“Anak-anak SMK ini kebanyakan jurusan mesin sastra. Mereka enggak pernah ketemu mesin, ketemunya di buku-buku, padahal mesin yang di pabrik beda dengan yang di buku. Mana bisa mereka kerja seperti yang kita harapkan, kebiasaan menghapal. Ini sama saja seperti menyamakan model penilaian universitas dan akademi,” tuturnya.

Meski Kemendikbud mengklaim telah melakukan berbagai hal, Jimmy menekankan bahwa perlu ada komitmen demi mengusahakan perbaikan pendidikan tingkat SMK.

“Saya sampai bosan mendengar bahwa kurang publikasi. Ayolah, ini perlu komitmen bersama,” tutupnya. (rah/rah)

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180223141505-282-278333/bps-lulusan-smk-banyak-menganggur-sepanjang-2017>

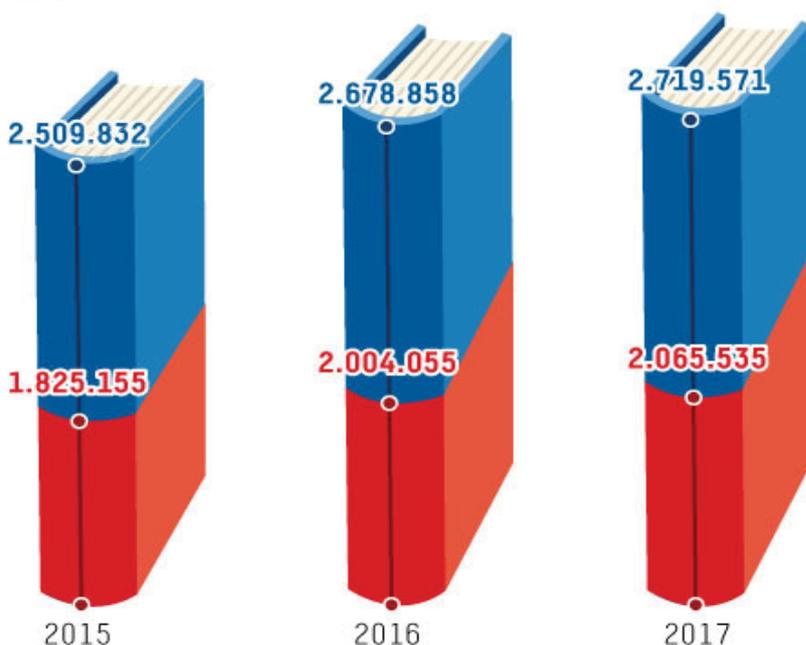
Pendidikan Kejuruan Belum Diurus Optimal

23 Februari 2018

Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK

Jumlah Siswa SMK

- Negeri
- Swasta



Jumlah Berdasarkan Bidang Keahlian



Sumber: Data Statistik SMK 2017/2018 PDSP, Dapodik 30 November 2017, Dapodik data cut off 22 Juli 2017

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah siswa sekolah menengah kejuruan terus bertambah tiap tahun dan lebih banyak dari siswa sekolah menengah atas. Namun, di tengah tingginya minat siswa memilih SMK, lulusan yang seharusnya siap bekerja malah menjadi bagian dari penganggur terdidik.

Karena itu, komitmen pada revitalisasi SMK yang dicanangkan pemerintah harus dijadikan momentum untuk membuat pendidikan vokasi, khususnya di SMK, mampu menjawab kebutuhan akan tenaga kerja terdidik dan terampil di tingkat menengah yang berkualitas.

Direktur Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan M Bakrun dalam diskusi publik bertajuk "SMK Cetak Pengangguran, Apa yang Salah?" yang digelar Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di Jakarta, Kamis (22/2), mengatakan, jumlah siswa SMK saat ini lebih banyak dari siswa SMA. Selisihnya 80.000-100.000 orang. Namun, kualitas SMK beragam. Ada yang minim peralatan sehingga siswanya pun minim. Bahkan, ada sekitar 7.000 SMK yang dari sekitar 13.710 yang punya siswa di bawah 200 orang.

Menurut Bakrun, revitalisasi SMK dilakukan dengan memperkuat SMK untuk menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP P1). Saat ini terdapat 570 SMK dan akan ditingkatkan hingga 10 persen atau sekitar 1.300 SMK. Lalu, satu SMK ini menjadi induk minimal 10 SMK di sekitarnya sehingga mutu SMK terangkat.

"Penyesuaian kurikulum dilakukan. Muatan praktik sudah diubah jadi 60 persen dan teori 40 persen, termasuk pula fleksibilitas kurikulum. Namun, keterhubungan dengan industri terkendala karena belum semua punya standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia," kata Bakrun.

Penganggur

Kepala Subdirektorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerja Sama Industri, Direktorat Pembinaan SMK Saryadi Guyatno mengatakan, data penganggur lulusan SMK pada November 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik mencapai sekitar 11,4 persen dari sekitar 7 juta penganggur. hal ini tengah dicari solusinya. Namun, perlu dicermati juga tantangan keberkerjaan SMK tergantung pula pada kesempatan kerja.

Menurut Saryadi, dengan pertumbuhan ekonomi 5,07 persen pada 2017, lapangan kerja masih terbatas. Sementara ada lulusan SMA dan perguruan tinggi yang juga menjadi saingan. Secara geografis, sebaran pekerjaan banyak di Pulau Jawa. Ada pula masalah kompetensi yang belum memadai dan akses informasi kesempatan kerja yang terbatas.

"Ada juga masalah usia. Sekitar 40 persen lulusan SMK yang lulus dalam tahun itu belum 18 tahun sehingga perusahaan tidak berani merekrut sebagai pekerja," ujar Saryadi.

Koordinator Konsorsium Ketenagakerjaan Abdul Waidl mengatakan, SMK memang mulai diminati. Namun, standar nilai siswa yang masuk ke SMK lebih rendah dari yang masuk ke SMA. Pengembangan vokasi belum didukung keberpihakan anggaran. Pada 2017, untuk penguatan vokasi di Kemdikbud, Kemristek dan Dikti, serta Kementerian Ketenagakerjaan baru sekitar 0,021 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bandingkan dengan negara-negara maju yang lebih dari 1 persen.

Anggota Komisi X DPR, Ridwan Hisyam, mengatakan, komitmen merevitalisasi SMK sudah bagus. Tinggal implementasinya harus dilakukan serius. Kebutuhan guru produktif yang menjadi bagian penting untuk memperkuat praktik di SMK harus segera diatasi. Jumlah guru produktif hanya 22 persen.

Pengamat pendidikan Jimmy Phaet mengatakan, dalam pengembangan SMK, pemerintah belum dapat menjawab kebutuhan guru yang mampu menghadirkan budaya mutu dan kerja. Akibatnya, pendidikan di SMK pun belum mampu mewujudkan budaya kerja dalam diri siswa. (ELN)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/02/23/pendidikan-kejuruan-belum-diurus-optimal/>

PENDAFTARAN SISWA BARU

Pungutan Liar Masih Terjadi

DD18 14 Februari 2018 · 03:22 WIB



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pengisian PPDB Online – Para orantua mendampingi anaknya mengisi formulir pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online dengan komputer fasilitas yang disediakan oleh SMA Negeri 3, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6). Dalam PPDB tahun ini Jawa Barat menerapkan skor radius jarak rumah dengan sekolah untuk calon siswa SMA dan SMK. Kompas/Rony Ariyanto Nugroho (RON) 08-06-2017

JAKARTA, KOMPAS – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis internet masih ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya pungutan liar. Pemerintah daerah dan pihak sekolah pun diminta untuk konsekuen dalam Pelaksanaan PPDB, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, agar tidak ada jalur lain di luar jalur yang telah ditentukan pemerintah pusat.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dari 400 aduan yang diterima usai pelaksanaan PPDB 2017 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ditemukan sebesar 17 persen terkait pungutan liar. Selain itu, aduan meliputi masalah jalur zonasi, penolakan siswa miskin, surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu, dan titipan pejabat.

Koordinator Bidang Advokasi dan Investigasi JPPI Nailul Faruq mengatakan, data sebesar 17 persen itu menunjukkan pungutan-pungutan liar masih terjadi di lembaga pendidikan meskipun sistem PPDB sudah berbasis dalam jaringan (online). Dalam laporan, orang tua murid dipungut biaya oleh pihak komite sekolah dalam proses daftar ulang dan dimintai uang untuk pembelian peralatan sekolah, seperti seragam dan alat tulis. Namun demikian, ketika kasus itu ditelusuri, kata Nailul, baik pihak sekolah maupun panitia PPDB malah mengaku tidak tahu urusan pungutan itu.

“Ironis sekali, panitia PPDB tidak tahu, kepala sekolah juga tidak tahu. Ini jadi tanda tanya besar, berarti tidak ada transparansi antara pihak sekolah dan komite sekolah. Harapan

transparansi dengan adanya sistem PPDB online pun tidak terjadi,” ujar Nailul dalam diskusi bersama perkumpulan wali murid di Sekretariat Indonesia Corruption Watch, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (12/2).

Ketua Perkumpulan Wali Murid, Heru Narsono, menuturkan, sistem PPDB online masih diliputi suasana kapitalis. Ia menyebut, pada penerimaan tahun lalu, praktik penambahan siswa di luar sistem PPDB masih terjadi. Alhasil, jumlah siswa melebihi kapasitas.

Padahal, sesuai Permendikbud Nomor 17/2017, jenjang pendidikan SD maksimal adalah 24 siswa, SMP sebanyak 33 siswa, SMA sebanyak 36 siswa, dan SMK sebanyak 24 siswa.

“Kalau aturan itu dipatuhi betul, pihak sekolah tidak bisa seenaknya memasukkan anak di luar sistem PPDB online,” ujar Heru.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, seharusnya kehadiran sistem PPDB online bisa meminimalisir adanya jalur lain, seperti pungutan liar. Namun, apabila pungutan liar itu benar terjadi di lapangan, maka orang tua murid berhak langsung melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

“Kalau bukti penyimpangan masalah uang itu benar ada, bisa langsung dilaporkan. Kalau bukti lengkap, pasti akan langsung ditindaklanjuti,” ucap Hamid.

Oleh karena itu, menurut Hamid, semua kembali lagi kepada pemerintah daerah dan sekolah masing-masing dalam upaya pencegahan terjadinya pungutan liar. Ia berharap Permendikbud No 17/2017 dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

“Kalau sudah menggunakan sistem PPDB online, ya mutlak jangan menggunakan sistem lain. Laksanakan itu secara konsekuen,” ujarnya.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema, mengatakan, pemerintah telah mengatur keberadaan komite sekolah dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam aturan tersebut, kata Doni, setiap kegiatan komite sekolah harus di bawah sepengetahuan kepala sekolah. Komite sekolah juga seharusnya tidak boleh ikut mengintervensi dalam proses seleksi penerimaan siswa baru.

“Jadi kalau ada komite sekolah buat kebijakan tanpa sepengetahuan kepala sekolah itu adalah pungutan liar yang seharusnya langsung dilaporkan ke saber pungli atau kemendikbud,” ujar Doni.

Untuk mengantisipasi hal itu, kata Doni, sistem PPDB harus lebih transparan untuk masyarakat. Masyarakat harus bisa ikut memantau proses penerimaan siswa baru.

“Sekarang masyarakat tidak bisa memantau karena server ditutup lalu muncul permainan dalam. Saat itulah ada anak tidak lolos tetapi tiba-tiba ada siswa masuk. Jadi, masyarakat harus punya akses ikut mengontrol atau mengawasi supaya PPDB berjalan objektif dan adil,” tutur Doni.

Koordinator tim pendidikan Ombudsman Ahmad Sobirin mengatakan, berdasarkan evaluasi PPDB online tahun kemarin, pungutan liar di luar sistem PPDB tidak banyak muncul dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait hal itu, pihaknya sedang berkoordinasi dengan JPPI dalam menindaklanjuti laporan permasalahan pungutan liar tersebut.

“Di balik layar ada. Kami akan ada investigasi tertutup dengan pihak sekolah-sekolah yang terlibat. Sejauh ini sigarnya baru dugaan,” ujar Sobirin.

Sobirin menambahkan, apabila dugaan itu kelak terbukti, pihaknya akan langsung memanggil kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian, pihak sekolah akan diminta untuk memberhentikan praktik tersebut dan mengembalikan uang yang pernah dipungut kepada wali murid.

“Pungutan itu harus jelas dipergunakan dalam koridor dalam pelaksanaan pendidikan dan harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada ya harus dihentikan,” kata Sobirin.

Karena masih ditemukannya praktik pungutan liar di luar sistem PPDB online, Sobirin menuturkan, pihaknya telah merekomendasikan beberapa hal perbaikan kepada Kemendikbud terkait sistem pelaksanaan sistem PPDB online selanjutnya. Rekomendasi tersebut di antaranya menindak tegas terhadap praktik jual beli kursi dan pungutan liar yang tidak resmi, serta mencegah perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu karena jabatan atau profesinya.

“PPDB itu dari segi sistem didesain untuk tidak bisa direkayasa. Tetapi, pihak sekolah juga harus punya upaya pencegahan untuk tidak ada pungutan liar di luar sistem yang sudah baik itu. Kalau tidak ada upaya pencegahan, pasti bolong-bolong itu akan terus ada,” kata Sobirin.

(DD18)

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2018/02/14/pungutan-liar-masih-terjadi/>

Pemerintah Dinilai Kurang Serius Tangani PAUD



Ilustrasi PAUD (Foto: Istimewa)

Maria Fatima Bona / FER Selasa, 13 Februari 2018 | 15:15 WIB

Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, pemerintah kurang serius dalam mengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pasanya, dalam jenjang pra-sekolah dasar (SD) ini penguatan yang harus diutamakan adalah pendidikan karakter yang didukung oleh kualitas guru.

"Tapi apa yang terjadi? Kualitas guru-gurunya lagi-lagi dipertanyakan. PAUD didirikan tapi tidak dipikirkan bagaimana anak-anak itu dapat dididik dengan baik," kata Ubaid di Jakarta, Selasa (13/1).



Ilustrasi PAUD

Menurut Ubaid, pihaknya juga mempertanyakan alokasi dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD (DAK BOP) sebesar Rp 4,1 Triliun. Pasalnya, dana tersebut tidak diimbangi dengan kualitas guru. "Padahal, mutu guru merupakan hal penting yang harus lebih didahulukan daripada yang lain," jelasnya.

Terkait transparansi dan ketepatan penggunaan dana, Ubaid mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima JPPI, pada tahun-tahun sebelumnya dana tersebut dimainkan oleh beberapa oknum. "Misalnya dana disunat. Jadi, yang diterima pihak pengelola PAUD tidak utuh," tambahnya.

Menurutnya, perlu ada pengawasan dari berbagai pihak, terutama yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di luar sekolah.

Sumber: Suara Pembaruan <http://www.beritasatu.com/satu/478303-pemerintah-dinilai-kurang-serius-tangani-paud.html>

Program Indonesia Pintar

Pemanfaatan Dana Dipastikan untuk Pendidikan

8 Januari 2018



Kompas/Tatang Mulyana Sinaga

Siswa di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menggunakan perahu sebagai transportasi ke sekolah, seperti terlihat, Selasa (5/12/2017). Perahu itu menjemput dan mengantar siswa ke sejumlah pulau yang berada di kawasan perbatasan Indonesia itu.

JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar untuk memastikan penerima menikmati layanan pendidikan bakal dievaluasi. Pemanfaatan dana yang diberikan lewat Kartu Indonesia Pintar harus betul-betul untuk keperluan sekolah.

Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman, di Jakarta, beberapa waktu lalu, mengatakan, untuk memastikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) betul-betul digunakan untuk keperluan sekolah, pada ATM KIP (Kartu Indonesia Pintar) direncanakan ada sistem wallet.

Dengan demikian, sebagian uang yang diterima peserta didik penerima dana PIP hanya bisa digunakan untuk membeli keperluan sekolah di koperasi sekolah. Uji coba sistem ini sudah dilakukan di Yogyakarta.

Selain itu, kata Alpha, akan dilihat dan dipastikan bahwa PIP betul-betul berhasil menahan siswa dari keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah. Adapun anak tidak sekolah harus bisa

ke sekolah formal ataupun nonformal.

"PIP juga akan dilihat dampaknya pada peningkatan angka partisipasi kasar ataupun murni serta mutu pendidikan," kata Alpha.

Pada tahun 2017, KIP ditargetkan untuk 17,9 juta anak usia 6-21 tahun. Penerima mencakup anak dari keluarga tidak mampu yang ada di sekolah dan anak yang tidak sekolah.

"Mendorong anak tidak sekolah yang umumnya usia SMA untuk kembali ke sekolah formal tidak mudah. Umumnya (mereka) merasa malu. Kita dorong supaya mereka bisa ikut pendidikan nonformal, seperti pendidikan kesetaraan atau pelatihan/kursus," ujar Alpha.

PIP ini merupakan bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program ini dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan nonformal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

Adapun besaran dananya, peserta didik penerima dana PIP untuk tingkat SD/MI/Paket A mendapatkan Rp 450.000 per tahun, tingkat SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp 750.000 per tahun, dan tingkat SMA/SMK/ MA/Paket C mendapatkan Rp 1 juta per tahun.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, dana yang diberikan dalam bentuk tabungan yang diberi nama Simpanan Pelajar. Hal ini untuk mendukung sejak dini agar siswa melek finansial.

Pendidikan luar sekolah

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Nailul Faruq, mengatakan, untuk mendorong anak tidak sekolah mendapat pendidikan hingga setara SMA/SMK jangan hanya mengandalkan sekolah formal. Pendidikan di luar sekolah harus disediakan sebagai alternatif.

"Namun, pendidikan di luar sekolah belum menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan adanya PIP, pendidikan nonformal yang baik dan berkualitas harus disediakan," kata Nailul. (eln)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/01/08/pemanfaatan-dana-dipastikan-untuk-pendidikan/>

Perbaikan Pendidikan

Diusulkan, Tata Kelola Guru secara dalam Jaringan

Laraswati Ariadne Anwar

13 Juni 2017 · 07:27 WIB



KOMPAS/HARRY SUSILO

Ratusan guru honorer menggelar doa bersama di lapangan upacara Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (21/4). Lewat aksi simpatik itu, mereka mendesak Wali Kota Bekasi untuk mengubah status mereka dari guru honorer menjadi tenaga kerja kontrak atau TKK. Guru honorer hanya memperoleh bayaran Rp 500.000-Rp 1 juta per bulan meskipun memiliki beban kerja yang sama dengan TKK ataupun pegawai negeri sipil. TKK bisa mendapatkan honor hingga Rp 3 juta sebulan.

JAKARTA, KOMPAS — Pengawasan kinerja guru dan peningkatan kapasitasnya melalui moda dalam jaringan atau daring niscaya harus dilakukan. Selain mudah, hal ini juga membuat pemutakhiran data bisa berlangsung cepat, tidak perlu berbelit-belit dan berjenjang.

“Cara kerjanya bisa ditiru dari e-tata kelola dosen. Setiap kali dosen mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ataupun butuh perubahan data tinggal memasukkan informasi terbaru ke situs e-tata kelola,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi dalam diskusi “Resolusi Tata Kelola Guru untuk Pendidikan Berkualitas” di Jakarta, Senin (12/6).

Acara tersebut diadakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Turut hadir sebagai pembicara Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Garti Sri Utami dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Suyitno.

Unifah mengkritik pengelolaan guru oleh pemerintah, baik Kemdikbud dan Kemenag, yang ia nilai belum jelas. Belum ada kerangka rancangan pengelolaan guru beserta target capaian untuk lima tahun ke depan ataupun jangka waktu lebih lama lagi.

"Data pokok pendidikan milik Kemdikbud sudah lama tidak diperbarui. Sistemnya lama karena harus menunggu laporan lengkap berjenjang dari sekolah, wilayah, dan provinsi. Kalau memakai e-tata kelola, setiap guru bisa memutakhirkan data pribadi langsung dari telepon pintar ataupun komputer mereka," kata Unifah. Pemerintah tinggal menyiapkan saringan untuk memverifikasi kebenaran data yang diunggah guru.

Kejelasan status

Dalam kesempatan yang sama, Unifah juga mengkritik ketidakjelasan pemerintah menangani 500,000 guru tidak tetap (GTT) yang belum tersertifikasi. Menurut data Kemdikbud, di Indonesia ada 2,9 juta guru yang terdiri dari 2,2 juta guru pegawai negeri sipil dan 700,000 GTT.

Dalam uji kompetensi guru pada 2015 dan 2016, sebanyak 500,000 guru tidak mendapatkan sertifikasi. "Akan tetapi, ketika pemerintah menghitung rasio guru dengan siswa, yaitu 1:18, GTT tersebut tetap dimasukkan. Ini tidak adil karena di satu sisi jasa mereka digunakan, tetapi hak mereka diabaikan," ucap Unifah.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional JPPI Abdullah Ubaid mengusulkan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah. Langkah pertama ialah mendeteksi alasan guru-guru tersebut belum tersertifikasi. Ia menduga ada dua kemungkinan, pertama adalah urusan administrasi yang masih belum selesai. Kedua, guru tersebut memang tidak memenuhi syarat kompetensi.

"Kalau disebabkan alasan kedua, harus dicari cara peningkatan kapasitas guru-guru tersebut. Pada kenyataannya, mereka masih mendidik siswa di sekolah. Kalau guru tidak ditingkatkan kemampuannya, siswa yang merugi," kata Ubaid.

Garti mengungkapkan, bagi guru tersertifikasi, pemerintah menyediakan berbagai modul pelatihan. Ada yang berupa dalam jaringan selama tiga bulan dan ada pula kursus intensif tiga pekan. Sementara di Kemenag, Suyitno menjelaskan pada 2017 baru akan didata kompetensi guru-guru madrasah. "Harus dicari dulu peta permasalahannya. Baru bisa mendapat langkah intervensi yang tepat," ujarnya. (DNE)

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2017/06/13/diusulkan-tata-kelola-guru-secara-dalam-jaringan/>

Alih Kelola SMA Masih Gagap

Mendikbud: Sejumlah Masalah Muncul dalam Masa Transisi

28 Desember 2017



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

JAKARTA, KOMPAS — Alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi dinilai belum menjawab kebutuhan terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah provinsi terhadap akses-mutu untuk pendidikan menengah belum optimal.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Nailul Faruq di Jakarta, Rabu (27/12), mengatakan, dari kajian JPPI yang dilakukan di Banten, di Kabupaten Malang (Jawa Timur), Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau) terlihat belum ada sinergi antara pemprov dan pemkab/kota untuk membuat wajib belajar 12 tahun dapat segera dilaksanakan. "Yang terjadi saling lempar tanggung jawab. Pemkab/kota kini merasa itu tugas pemprov. Padahal, siswa usia sekolah menengah itu merupakan anak-anak kota/kabupaten," kata Nailul.

"Yang terjadi saling lempar tanggung jawab. Pemkab/kota kini merasa itu tugas pemprov. Padahal, siswa usia sekolah menengah itu merupakan anak-anak kota/kabupaten.

Menurut dia, alih kelola SMA/SMK dengan suksesnya wajib belajar 12 tahun diragukan. Selain dukungan kebijakan yang belum jelas, dukungan anggaran di APBD juga tak memadai. Sebagian besar alokasi minimal 20 persen dari APBD murni untuk fungsi pendidikan, baik di tingkat kota maupun kabupaten, tidak memenuhi ketentuan. Pada 2016, baru anggaran DKI Jakarta yang di atas 20 persen. Provinsi lainnya berkisar 1-10 persen.

Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, alih kelola justru menimbulkan beragam masalah baru untuk eksistensi wajib belajar 12 tahun. Pungutan di SMA/SMK cukup membebani, terutama keluarga tidak mampu. Padahal, di SMA/SMK banyak institusi swasta yang lebih mengandalkan pendanaan dari masyarakat untuk operasional pendidikan.

Ubaid mengatakan, kebijakan pengalihan wewenang ini perlu dievaluasi dan diperbaiki. "Kalau mau memperbaiki kualitas dan akses ke jenjang SMA/SMK, pemerintah pusat seharusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak ke jenjang SMA/SMK dengan mudah berkualitas, bukan dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru, tetapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan mutu," tutur Ubaid.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, di acara pemaparan Kinerja Kemdikbud Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018, mengakui peralihan kewenangan yang masih dalam masa transisi sehingga muncul beberapa masalah. "Ada keluhan pemkab sulit koordinasi dengan Pemprov terutama yang berada di pulau-pulau. Permasalahan seperti ini akan dievaluasi dan dicarikan solusinya," ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, wajib belajar 12 tahun secara resmi diluncurkan 2015 ketika Presiden meluncurkan Kartu Indonesia Pintar. Alih kelola SMA/SMK ke provinsi lebih banyak untuk berbagi tugas dan sumber daya agar efektivitas wajib belajar 12 tahun lebih optimal.

Kondisi di daerah

Mekanisme pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) khusus untuk jenjang SMA/SMK perlu diubah agar tidak terjadi keterlambatan yang mengganggu kegiatan belajar-mengajar.

"Kami menyarankan agar ada diskresi, misalnya melalui peraturan presiden. Regulasi ini mengatur secara baku pencairan BOS langsung ke sekolah," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Irwan Lahace saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Diskresi ialah keputusan/tindakan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak pengelolaan SMA/SMK berpindah dari kabupaten/kota ke provinsi dalam setahun terakhir, pencairan dana BOS tersendat. Sebelumnya dana disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke sekolah. Setelah alih kelola, dana disalurkan terlebih dahulu ke kas provinsi sebelum ke sekolah. Proses itu membuat pencairan dana terlambat (Kompas, 27/12).

Irwan mengakui pihaknya kesulitan mencairkan dana tepat waktu karena lokasi sekolah (jumlahnya 357) tersebar di 14 kabupaten/kota. Kondisi itu memperlambat pencairan BOS. Pada 2017, Sulteng bahkan dua kali difasilitasi Kementerian Dalam Negeri buat pencairan BOS.

Secara terpisah, Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Sadik menyatakan, panjangnya birokrasi tidak mencerminkan roh otonomi daerah. Spirit dasar otonomi daerah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kinerja prima. Ia sepakat dana BOS dicairkan langsung dari pemerintah pusat ke sekolah-sekolah. Tersendatnya BOS pasti berdampak pada kinerja pelayanan guru dan sekolah secara keseluruhan. (ELN/VDL)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/12/28/alih-kelola-sma-masih-gagap/>

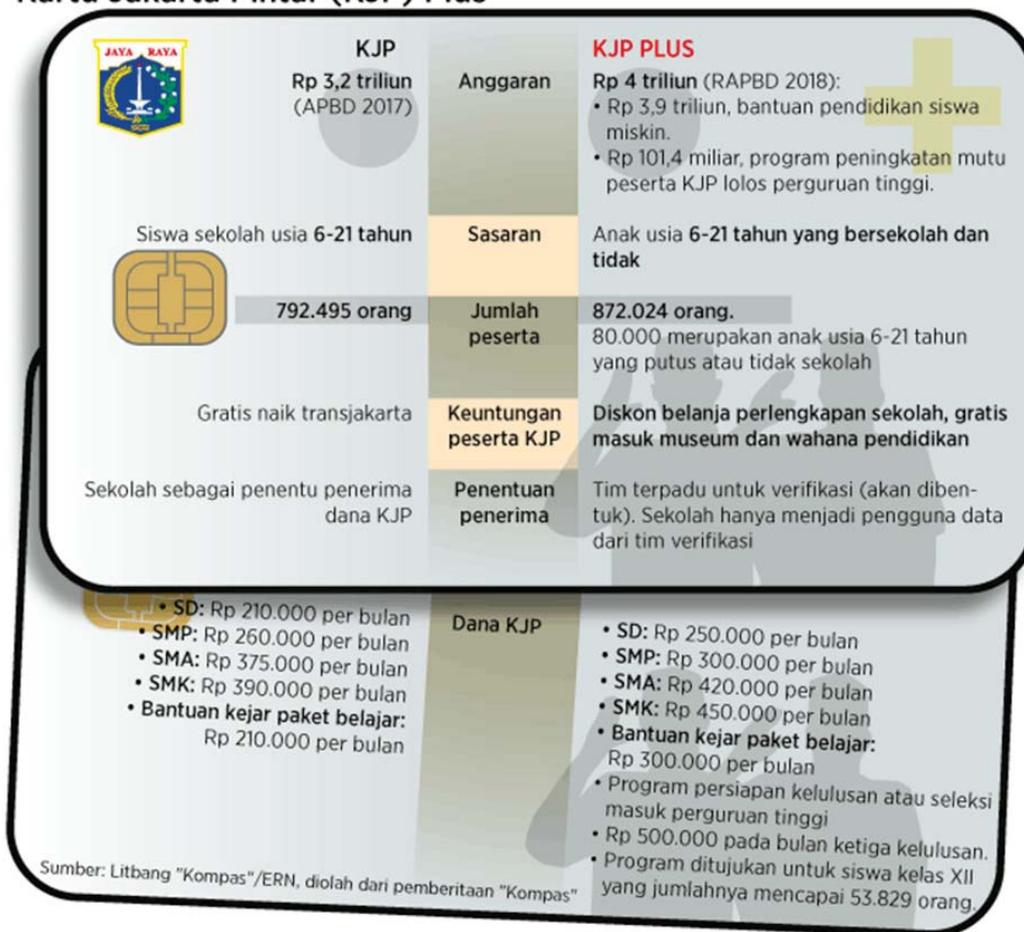
METROPOLITAN ANGGARAN BESAR KJP PLUS

Anggaran Besar KJP Plus

Kontrol dan Parameter Program Belum Jelas

27 November 2017

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus



INFOGRAFIK: PANDU

JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme pengawasan, cara penyaluran, dan tolok ukur keberhasilan pemberian komponen tambahan dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus dinilai belum jelas. Ada peluang besar penyalahgunaan bantuan sosial yang diusulkan mencapai sekitar Rp 4 triliun itu.

Mekanisme yang dimaksud di antaranya cara pencairan tunai atau nontunai, pengawasan, kursus yang bisa masuk dalam KJP Plus, komponen biaya, dan verifikasi data penerima. Meskipun mekanisme belum jelas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan anggaran KJP Plus sekitar Rp 4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2018.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Nahdiana mengatakan, saat ini seluruh mekanisme untuk KJP Plus tengah dalam pembahasan. "Ditargetkan (pembahasan itu) selesai akhir Desember 2017," katanya di kantornya, di Jakarta Timur, Jumat (24/11).

Program KJP Plus merupakan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. Anggaran ini salah satu nomenklatur biaya terbesar dalam RAPBD 2018. Dalam APBD DKI 2017, KJP (tanpa plus) sekitar Rp 3,2 triliun.

Komponen biaya KJP Plus dalam RAPBD 2018 masuk di anggaran Bantuan Sosial. Anggaran terdiri dari bantuan biaya personal siswa miskin Rp 3,9 triliun dan peningkatan mutu pendidikan bagi peserta KJP yang lolos seleksi perguruan tinggi negeri senilai Rp 101,4 miliar.

Hasil pembahasan mekanisme KJP Plus itu nantinya dikukuhkan dalam peraturan gubernur yang mengatur KJP Plus.

Tahapan selanjutnya verifikasi data penerima ditargetkan pada Januari. Dalam program KJP dulu, sekolah menjadi penentu penerima KJP. Dalam KJP Plus, verifikasi data dilakukan tim terpadu yang tengah menyusun data tunggal warga Jakarta yang layak menerima bantuan sosial. Data ini nantinya juga digunakan untuk pemberian bantuan-bantuan sosial lain. Tim terpadu ini di antaranya kelurahan, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat.

Tambah peserta dan nilai

Jumlah peserta KJP Plus diusulkan 872.024 orang. Tahun lalu, jumlah penerima sekitar 790.000 orang. Besaran nominal bantuan juga bertambah dengan alasan penyesuaian inflasi serta hasil survei harga kebutuhan sekolah dan data Bank Dunia.

Sebanyak 80.000 orang dalam daftar penerima KJP Plus 2018 dialokasikan untuk bantuan anak tidak sekolah. Bantuan ini direncanakan diberikan untuk anak usia 6-21 tahun yang tidak sekolah atau putus sekolah. Bantuan diberikan saat si anak sudah terdaftar di lembaga kursus atau sekolah. Jenis lembaga yang diperbolehkan masih dibahas.

Nahdiana mengatakan, data anak tidak sekolah ini dari basis data terpadu Kementerian Sosial tahun 2017. "Data itu masih perlu diverifikasi," ucapnya.

Selain itu, ada juga usulan pemberian bantuan untuk bimbingan pelajar kelas XII yang disebut bridging. Menurut Nahdiana, melanjutkan tidaknya ke jenjang perguruan tinggi tetap jadi pilihan penerima KJP Plus. Tambahan bantuan diharapkan menstimulus peningkatan pendidikan warga miskin, baik dengan meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi maupun menurunkan angka putus sekolah.

Tidak boleh tunai

Nahdiana mengajak warga berpartisipasi mengawasi pelaksanaan KJP Plus. Pada program KJP lalu, tingkat penyalahgunaan diperkirakan sekitar 1 persen.

"Sistem KJP yang dulu ditentukan oleh toko dan belanja apa saja yang diperbolehkan masih banyak disalahgunakan untuk beli HP atau hal-hal di luar kebutuhan pendidikan. Sebaiknya dievaluasi dulu penyaluran bantuan yang dulu, bukan ditambah lagi," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdullah Ubaid di Jakarta, Sabtu (25/11).

Tambahan bantuan itu akan sulit diawasi apabila disalurkan secara tunai tanpa syarat tambahan. Bantuan akan lebih tepat sasaran apabila dialihkan sebagai subsidi atau bantuan nontunai, salah satunya bantuan biaya transportasi. Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema

mengatakan, tujuan bridging dan bantuan anak tidak sekolah juga sangat rawan manipulasi data.

Menurut anggota Komisi E DPRD DKI, Belly Bilalusalam, Jumat lalu, KJP menasar anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Kini, KJP Plus menasar anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak putus sekolah. Namun, DPRD menilai jumlah penerima berlebihan dan harus dikurangi. Sekretaris Komisi E Veri Yonnevil mengatakan, KJP Plus tetap program nontunai. "Tak boleh ada pencairan tunai," ujarnya. (HLN/IRE)

Sumber : <https://kompas.id/baca/metro/2017/11/27/anggaran-besar-kjp-plus/>

JPPI Sebut Pendidikan Maros Tak Maksimal, Begini Pembelaan Kadisdik

Kamis, 28 Desember 2017 15:33

JPPI Sebut Pendidikan Maros Tak Maksimal, Begini Pembelaan Kadisdik



TRIBUN TIMUR/ANSAR

Kadis Pendidikan Arifuddin Wahab (Tengah) didampingi Muhammad Taufik Koordinator JPPI Pusat dan Koordinator Advokasi JPI, Nailul Faruq saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) di aula PGRI.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Maros, Arifuddin Wahab mengatakan, tidak masimalnya program wajib belajar 12 tahun di Maros, lantaran kemauan dari siswa dan keluarganya. Padahal, pemerintah selalu mendukung program wajib belajar 12 tahun. Sejumlah siswa putus sekolah karena kemauannya meski orangtuanya mampu.

"Pemerintah sudah berupaya maksimal untuk menjalankan program 12 tahun pendidikan. Tapi kita kembalikan lagi ke siswanya. Apakah dia mau atau tidak. Semoga program pendidikan 12 tahun tahun depan berjalan maksimal," katanya.

Hal ini dikatakannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Network for Education Watch atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di aula Sekretariat PGRI Maros.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi JPI, Nailul Faruq mengatakan, berdasarkan penelitiannya di Maros, program wajib belajar 12 tahun dan anggaran pendidikan dinilai belum berjalan maksimal atau buruk.

Sejumlah siswa harus putus sekolah ke jenjang SMA dan SMK lantaran tidak memiliki biaya. Padahal, siswa tersebut berprestasi.

Kegiatan tersebut dihadiri, Kadis Pendidikan Maros Arifuddin Wahab, Ketua Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) Maros Husni Siame, Koordinator Riset JPPI Muh Taufik, Perwakilan Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip) Maros, Bagus Dibyo dan beberapa guru.

JPPI melakukan riset pendidikan, di 20 Kota dan Kabupaten se-Indonesia yakni, Aceh Besar, Banda Aceh, Serdang Bedagai, Bengkalis, Palembang, Bandung, Sukabumi, Sukabumi, Cilacap, Kebumen, Pekalongan, Gunung Kidul, Bojonegoro, Malang, Mempawah, Maros, Jembrana, Lombok Timur, Kupang dan Parepare. (*)

Sumber : Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul JPPI Sebut Pendidikan Maros Tak Maksimal, Begini Pembelaan Kadisdik, <http://makassar.tribunnews.com/2017/12/28/jppi-sebut-pendidikan-maros-tak-maksimal-begini-pembelaan-kadisdik>.

Edisi 19-12-2017.

77.186 Anak di Kepri Tak Sekolah



BINTAN– Sekitar 77.186 anak usia 7-18 tahun di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diketahui tidak bersekolah untuk tingkatan sekolah dasar dan menengah. Angka tersebut bersumber dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ahmad Taufik saat menjadi nara sumber Focus Group Discussion (FGD) di Community Center Gedung Nasional Tanjunguban, Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Senin (18/12). “Anak usia sekolah yang tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah di Kepri ini mencapai 17,6 persen,” kata Ahmad Taufik. Dia mengatakan, dari 77.186 anak yang tidak sekolah itu rinciannya 34.930 anak usia sekolah dasar (SD); 17.460 anak usia sekolah menengah pertama (SMP); dan 24.795 anak usia sekolah menengah atas (SMA).

Sedangkan anak yang bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah di Kepri sebanyak 360.745 anak. Terdiri dari 221.910 anak SD; 79.005 tingkat SMP; 34.636 tingkat SMA/MA; dan 25.194 anak tingkat SMK. Khusus di wilayah Kabupaten Bintan, ada 11.190 anak (27,2%) yang tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah. Terdiri dari 5.824 anak usia SD; 3.366 anak usia SMP; dan 2.001 anak sekolah menengah.

Sedangkan anak yang bersekolah sebanyak 29.917. Rinciannya 18.341 anak tingkat SD; 6.772 anak tingkat SMP; 3.185 anak tingkat SMA/MA; dan 1.619 anak di jenjang SMK. Menurut Ahmad Taufik, penyebab masih tingginya anak tidak bersekolah di antaranya karena tidak berjalannya akselerasi program wajib belajar 12 tahun di daerah. JPPI mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan anggaran minimal 20% dari APBD. “Perlu inovasi pemerintah daerah dengan peraturan daerah agar wajib belajar 12 tahun sampai anak lulus sekolah menengah. Bukan hanya wajib belajar 9 tahun atau sampai anak lulus SMP,” kata dia.

Selama ini anggaran pendidikan di daerah lebih banyak dihabiskan untuk belanja tak langsung, yaitu menggaji guru dan tunjangan guru dan pegawai. Semestinya sebagian anggaran itu digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru, serta inovasi layanan pendidikan. JPPI juga mendorong pemerataan guru ke seluruh pelosok Tanah Air. Ahmad Taufik mengatakan, secara nasional, Indonesia kelebihan tenaga guru. Namun ironisnya, banyak daerah yang mengeluhkan kekurangan guru. Hal tersebut disebabkan guru lebih terkonsentrasi di pusat kota.

Diberikannya tambahan dan tunjangan/ insentif guru di daerah terpencil, terluar, perbatasan, tetap saja tidak membuat guru betah. “Itu yang harus dicari formulasi untuk mengubah sistem kerja guru. Penyebaran guru harus lebih merata,” kata dia. Pengamat pendidikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Tanjungpinang Endri Sanopaka, mengatakan, anggaran pendidikan 20% lebih dari APBD banyak dihabiskan hanya untuk menggaji dan memberi tunjangan guru sekitar 68%. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan 32% saja. “Data itu dari hasil riset kami tahun 2007. Menurut saya, saat ini kurang lebih sama,” kata dia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Thamrin Kasman yang hadir pada FDG itu mengatakan, banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah bukan hanya di Kepri saja, namun terjadi hampir di seluruh Indonesia. “Secara nasional, saat ini angka partisipasinya

baru mencapai 74 persen, dari target 93-97 persen pada 2020 nanti," ujarnya.

Kendala utama dalam meningkatkan angka partisipasi di antaranya, kurangnya koordinasi i antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Banyak daerah yang mengaku kebutuhan sarana prasarana tinggi, di sisi lain pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencukupi untuk membangunnya. Ditambah lagi, dana alokasi khusus (DAK) dari pusat juga belum memadai.

"Dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebanyak Rp45 triliun yang diperuntukkan bagi semua daerah di Indonesia juga belum mencukupi. Ini semua memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi. Serta komitmen daerah untuk menuntaskan wajib belajar hingga jenjang sekolah menengah atas," kata dia. /M rofik

**Sumber : http://koran-sindo.com/page/news/2017-12-19/6/4/77_186_
Anak_di_Kepri_Tak_Sekolah**

JPPI Dorong Pemkab Maros Terapkan Wajib Belajar 12 Tahun

28 Dec 2017 54 kali



Network for Education Watch atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan aktivitas Focus Group Discussion (FGD) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros serta sebagian Organisasi Keguruan yang berada di Kabupaten Maros di Aula Sekretariat PGRI Maros, Kamis (28/12/2017).

JPPI lakukan riset pendidikan mengenai tujuan biaya pendidikan yang berkeadilan pada program harus belajar (lumrah) 12 th. Riset ini dikerjakan di 20 kota/kabupaten yang diambil dengan random (acak) yaitu, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bengkalis, Kota Palembang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Maros, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, serta Kota Parepare.

Koordinator Advokasi JPPI Pusat Nailul Faruq menyebutkan, orogram harus belajar 12 th. dinilai belum juga jalan dengan maksimum. Karna doa sholat jenazah terkecuali banyak yang belum juga dapat nikmati pendidikan SMA atau SMK, sarana yang didapatkan juga relatif masih tetap kurang, jadi ini tanggung jawab propinsi serta pemda setempat.

"Kami dari pihak JPPI mengharapkan Dinas Pendidikan (Disdik) serta Pemkab Maros untuk lebih proaktif, jadi kita jadi pelopor serta mendorong supaya program harus belajar 12 th. ini jalan lancar," tuturnya.

Aktivitas ini di hadiri Kadis Pendidikan Kabupaten Maros, Arifuddin Wahab, Ketua BKRI Kabupaten Maros, Husni Siame, Koordinator Penelitian JPPI Muhammad Taufik, Perwakilan Keluarga Perduli Pendidikan (KERLIP) Maros, Bagus Dibyو serta beberapa guru.

Sumber : <http://sekolah.jardiknas.kemdikbud.go.id/berita/jppi-dorong-pemkab-maros-terapkan-wajib-belajar-12-tahun->

JPPI Maros Gelar FGD Dorong Program Wajib Belajar 12 Tahun



Kamis, 28 Desember 2017 | 14:41 Wita - Editor: Irfan Wahab - Reporter: Muhammad Yusuf - GoSulsel.com

Maros, GoSulsel.com – Network for Education Watch atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Pendidikan Kab Maros dan beberapa Organisasi Keguruan yang ada di Kabupaten Maros di Aula Sekretariat PGRI Kabupaten Maros, Kamis, (28/12/2017)

Dengan mengambil tema “mendorong implementasi kebijakan regulasi dan anggaran untuk akselerasi program wajib belajar 12 tahun di daerah”

JPPI)melakukan penelitian pendidikan tentang orientasi anggaran pendidikan yang berkeadilan pada program wajib belajar (wajar) 12 tahun.

Penelitian ini dilakukan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara random (acak) yakni, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bengkalis, Kota Palembang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Maros, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, dan Kota Pare-Pare

Koordinator Advokasi JPPI Pusat Nailul Faruq mengatakan, Program wajib belajar 12 tahun dinilai belum berjalan secara maksimal. Karena selain masih banyak yang belum bisa menikmati pendidikan SMA atau SMK, fasilitas yang diberikan pun cenderung masih kurang, jadi ini tanggung jawab provinsi dan pemda setempat.

“Kami dari Pihak JPPI berharap Dinas Pendidikan (Disdik) dan Pemkab Maros untuk lebih pro aktif, jadi kita sebagai pelopor dan mendorong agar program wajib belajar 12 tahun ini berjalan lancar,” katanya.

Sementara itu Kadis Pendidikan Maros Arifuddin Wahab menjelaskan kami dari pihak pemerintah kabupaten maros khususnya dibidang pendidikan sangat mendukung wajib belajar 12 tahun tapi kita kembali sama pelajar-pelajarnya .

“Semoga hak wujud pendidikan 12 tahun ini dengan sesuai riset data anggaran pemerintah yang sudah diuji oleh pihak JPPI,” pungkasnya.

Dalam acara ini dihadiri Kadis Pendidikan Kab. Maros Arifuddin Wahab, Ketua BKKI Kab. Maros Husni Siame, Koordinator Riset JPPI Muhammad Taufik, Perwakilan Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP) Maros, Bagus Dibyو dan para guru-guru yang hadir. (*)

Sumber : <https://gosulsel.com/2017/12/28/jppi-maros-gelar-fgd-dorong-program-wajib-belajar-12-tahun/>

Menuju Wajib Belajar 12 Tahun, Disdik Dan Jppi Gelar Fgd Di Maros



Posted by Maros Fm on 10:19 pm in News Pendidikan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Pendidikan Kab. Maros di Aula Sekretariat PGRI Kab. Maros, Kamis, (28/12/2017)

Kegiatan bertema "Mendorong Implementasi kebijakan regulasi dan anggaran untuk akselerasi program wajib belajar 12 tahun di Daerah" dihadiri Kadis Pendidikan Maros, Arifuddin Wahab dan beberapa guru serta aktivis pendidikan di Maros.

Koordinator Advokasi JPPI Pusat, Nailul Faruq mengatakan Program wajib belajar 12 tahun dinilai belum berjalan maksimal di berbagai daerah

Menurutnya masih banyak anak usia sekolah yang belum bisa menikmati pendidikan SMA atau SMK, dan fasilitas yang diberikan pun cenderung masih kurang, sehingga permasalahan ini menjadi tanggung jawab provinsi dan Pemda setempat.

Sementara itu Kadis Pendidikan Kab. Maros Arifuddin Wahab menjelaskan pihak pemerintah Kabupaten maros khususnya bidang pendidikan sangat mendukung program wajib belajar 12 tahun.

Menurutnya, selain dukungan pemerintah utamanya terkait persoalan anggaran, namun partisipasi aktif keluarga dan masyarakat serta berbagai pihak pemerhati pendidikan juga harus bersinergi mewujudkan program wajib belajar 12 tahun ini. (maros fm news department)

Sumber : <http://www.marosfm.com/2017/12/menuju-wajib-belajar-12-tahun-disdik.html?m=1>

Kamis, 28 Desember 2017 21:00 WITA

Dinas Pendidikan Maros-JPPI Gelar FGD, Ini Tujuannya



Penulis: Muh. Basri

Editor: Adil Patawai Anar

Dinas Pendidikan Maros-JPPI Gelar FGD, Ini Tujuannya

RAKYATKU.COM, MAROS - Network for Education Watch atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dan beberapa Organisasi Keguruan yang ada di Kab. Maros di Aula Sekretariat PGRI Kabupaten Maros, Kamis, (28/12/2017).

Dengan mengambil Tema "Mendorong Implementasi kebijakan regulasi dan anggaran untuk akselerasi program wajib belajar 12 tahun di daerah", JPPI melakukan penelitian pendidikan tentang orientasi anggaran pendidikan yang berkeadilan pada program wajib belajar (wajib) 12 tahun.

Penelitian ini dilakukan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara random yakni, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bengkalis, Kota Palembang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Maros, Kabupaten Jember, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, dan Kota Parepare.

Koordinator Advokasi JPPI Pusat Nailul Faruq mengatakan, Program wajib belajar 12 tahun dinilai belum berjalan secara maksimal. Karena selain masih banyak yang belum bisa menikmati pendidikan SMA atau SMK, fasilitas yang diberikan pun cenderung masih kurang, dan hal ini menjadi tanggung jawab provinsi dan pemda setempat.

“Kami dari Pihak JPPI berharap Dinas Pendidikan (Disdik) dan Pemkab Maros untuk lebih pro aktif, jadi kita sebagai pelopor dan mendorong agar program wajib belajar 12 tahun ini berjalan lancar,” katanya.

Sementara itu Kadis Pendidikan Kab. Maros Arifuddin Wahab menjelaskan, dari pihak pemerintah kabupaten Maros khususnya di bidang pendidikan sangat mendukung wajib belajar 12 tahun tapi kita kembali sama pelajar-pelajarnya .

“Semoga hak wujud pendidikan 12 tahun ini dengan sesuai riset data anggaran pemerintah yang sudah diuji oleh pihak JPPI,” pungkasnya.

<http://news.rakyatku.com/read/80033/2017/12/28/dinas-pendidikan-maros-jppi-gelar-fgd-ini-tujuannya>

JPPI Maros Gelar FGD Dorong Program Wajib Belajar 12 Tahun



Kamis, 28 Desember 2017 | 14:41 Wita - Editor: Irfan Wahab - Reporter: Muhammad Yusuf - GoSulsel.com

Maros, GoSulsel.com – Network for Education Watch atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Pendidikan Kab Maros dan beberapa Organisasi Keguruan yang ada di Kabupaten Maros di Aula Sekretariat PGRI Kabupaten Maros, Kamis, (28/12/2017)

Dengan mengambil tema “mendorong implementasi kebijakan regulasi dan anggaran untuk akselerasi program wajib belajar 12 tahun di daerah”

JPPI melakukan penelitian pendidikan tentang orientasi anggaran pendidikan yang berkeadilan pada program wajib belajar (wajib) 12 tahun.

Penelitian ini dilakukan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara random (acak) yakni, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bengkalis, Kota Palembang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Maros, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, dan Kota Pare-Pare

Koordinator Advokasi JPPI Pusat Nailul Faruq mengatakan, Program wajib belajar 12 tahun dinilai belum berjalan secara maksimal. Karena selain masih banyak yang belum bisa menikmati pendidikan SMA atau SMK, fasilitas yang diberikan pun cenderung masih kurang, jadi ini tanggung jawab provinsi dan pemda setempat.

“Kami dari Pihak JPPI berharap Dinas Pendidikan (Disdik) dan Pemkab Maros untuk lebih pro aktif, jadi kita sebagai pelopor dan mendorong agar program wajib belajar 12 tahun ini berjalan lancar,” katanya.

Sementara itu Kadis Pendidikan Maros Arifuddin Wahab menjelaskan kami dari pihak

pemerintah kabupaten maros khususnya dibidang pendidikan sangat mendukung wajib belajar 12 tahun tapi kita kembali sama pelajar-pelajarnya .

“Semoga hak wujud pendidikan 12 tahun ini dengan sesuai riset data anggaran pemerintah yang sudah diuji oleh pihak JPPI,” pungkasnya.

Dalm acara ini dihadiri Kadis Pendidikan Kab. Maros Arifuddin Wahab, Ketua BKKI Kab. Maros Husni Siame, Koordinator Riset JPPI Muhammad Taufik, Perwakilan Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP) Maros, Bagus Dibyo dan para guru-guru yang hadir. (*)

<https://gosulsel.com/2017/12/28/jppi-maros-gelar-fgd-dorong-program-wajib-belajar-12-tahun/>

77.186 Anak di Kepri Tak Sekolah

Reporter: M Rofik Selasa, 19 Desember 2017 | 11:16 Dibaca : 189 kali



Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud Thamrin Kasman menyampaikan materi pada FGD Akselerasi Program Wajib Belajar 12 Tahun, di Gedung Nasional Tanjunguban, Bintan Utara, Senin (18/12/2017). /M ROFIK

KEPRI – Pusat Data dan Statistis Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia mencatat, tahun 2016 ada 77.186 anak di Provinsi Kepri yang belum bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah. Ribuan anak tersebut berada di usia 7-18 tahun.

“Anak usia sekolah yang tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah di Kepri ini mencapai 17,6 persen,” kata Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ahmad Taufik di acara Focus Group Discussion (FGD) di Community Center Gedung Nasional Tanjunguban, Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Senin (18/12/2017).

Ahmad Taufik mengatakan, dari 77.186 anak yang tidak sekolah itu, 34.930 di antaranya anak usia sekolah dasar (SD), 17.460 anak usia sekolah menengah pertama (SMP), dan 24.795 anak usia sekolah menengah (SM).

Sedangkan anak yang bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah di Kepri sebanyak 360.745 anak. Terdiri dari 221.910 anak tingkat SD, 79.005 tingkat SMP, 34.636 tingkat SMA/MA, dan 25.194 anak tingkat SMK.

Khusus di wilayah Kabupaten Bintan, ada 11.190 anak atau 27,2% anak yang tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah. Terdiri dari 5.824 anak usia SD, 3.366 anak usia SMP dan 2.001 anak sekolah menengah. Sedangkan anak yang bersekolah sebanyak 29.917 anak, terbagi pada 18.341 anak tingkat SD, 6.772 anak tingkat SMP, 3.185 anak tingkat SMA/MA, dan 1.619 anak di SMK.

Menurut Ahmad Taufik, penyebab masih tingginya anak usia sekolah yang tidak bersekolah di antaranya karena tidak berjalannya akselerasi program wajib belajar 12 tahun di daerah. JPPI mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan anggaran minimal 20% dari APBD.

“Perlu inovasi pemerintah daerah dengan peraturan daerah agar wajib belajar 12 tahun sampai anak lulus sekolah menengah. Bukan hanya wajib belajar 9 tahun atau sampai anak lulus SMP,” kata dia.

<http://sindobatam.com/77-186-anak-di-kepri-tak-sekolah/>

Anak Usia Sekolah di Kepri Banyak yang Belum Menikmati Pendidikan

Selasa, 19-12-2017 | 10:26 WIB | Penulis: Harjo



Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Thamrin Kasman. (Foto: Harjo)

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Berdasarkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, sebanyak 77.186 anak usia sekolah 7-18 tahun di Provinsi Kepri, tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ahmad Taufik mengatakan, berdasarkan data tersebut, anak usia sekolah yang tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah di Kepri ini mencapai 17,6 persen. Dari 77.186 anak tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah tersebut sebanyak 34.930 anak usia sekolah dasar (SD), 17.460 anak usia sekolah menengah pertama (SMP), dan 24.795 anak usia sekolah menengah atas (SMA).

"Sedangkan anak yang bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah sebanyak 360.745 anak, terdiri dari 221.910 anak tingkat SD, 79.005 tingkat SMP, 34.636 tingkat SMA/MA, dan 25.194 anak tingkat SMK," kata Ahmad Taufik, pada Focus Group Discussion (FGD) 'Mendorong Implementasi Kebijakan dan Anggaran, Akaselerasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Daerah', yang diadakan JPPI, di Community Center Gedung Nasional Tanjunguban, Bintan Utara, Senin (18/12/2017).

Sementara untuk Kabupaten Bintan saja, kata Ahmad Taufik, sebanyak 11.190 anak atau 27,2 persen tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah. Terdiri dari 5.824 usia SD, 3.366 anak usia SMP, dan 2.001 sekolah menengah atas.

"Anak yang menikmati layanan pendidikan sebanyak 29.917 anak, terbagi pada 18.341 anak tingkat SD, 6.772 anak tingkat SMP, 3.185 anak tingkat SMA/MA, dan 1.619 anak tingkat SMK," jelas Ahmad.

Masih tingginya anak usia sekolah yang tidak menikmati layanan pendidikan di Kepri, menurut Ahmad Taufik diantaranya disebabkan tidak berjalannya akselerasi program wajib belajar 12 tahun di daerah. Untuk itu pihaknya mendorong diimplementasikannya kebijakan dan anggaran minimal 20 persen dari APBD.

"Perlu inovasi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) agar wajib belajar 12 tahun, sampai anak lulus sekolah menengah, bukan hanya wajib belajar 9 tahun atau sampai anak lulus SMP," kata Ahmad.

Anggaran pendidikan di daerah, lanjutnya, selama ini dihabiskan untuk belanja tak langsung, yaitu menggaji guru dan tunjangan guru dan pegawai. "Mestinya sebagian untuk meningkatkan kompetensi guru, serta inovasi layanan pendidikan," tambahnya.

JPPI juga mendorong pemerataan guru, karena secara nasional Indonesia kelebihan guru, namun di daerah selalu mengeluhkan kekurangan guru. Ini disebabkan guru terkonsentrasi di pusat kota. Diberikannya tambahan dan tunjangan/insentif guru di daerah terpencil, terluar, perbatasan, tetap saja tidak membuat guru betah.

Pengamat pendidikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan, berdasarkan riset pihaknya pada tahun 2007, anggaran pendidikan yang besarnya 20 persen lebih dari APBD dihabiskan untuk menggaji dan memberi tunjangan guru sebanyak 68 persen. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan hanya 32 persen. "Itu dari hasil riset kami tahun 2007. Menurut saya saat ini kurang lebih sama," kata Endri Sanopaka.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Thamrin Kasman mengatakan, banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak bisa menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah merata di seluruh Indonesia.

"Saat ini angka partisipasinya baru mencapai 74 persen secara nasional," kata Kasman. Secara nasional, lanjutnya, angka partisipasinya ditargetkan mencapai 93-97 persen pada tahun 2020.

Ia menjelaskan, kendala utama dalam meningkatkan angka partisipasi pada kurangnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Di mana daerah mengaku kebutuhan sarana prasarana tinggi, di sisi lain pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencukupi untuk membangunnya, ditambah dengan dana transfer dana alokasi khusus (DAK) dari pusat juga tidak tercukupi.

"Dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebanyak Rp45 triliun se-Indonesia juga belum mencukupi. Ini semua memerlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk mengatasi. Serta komitmen daerah untuk menuntaskan wajib belajar hingga jenjang SMA/MA/SMK," jelasnya.

<https://m.batamtoday.com/berita-102666-Anak-Usia-Sekolah-di-Kepri-Banyak-yang-Belum-Menikmati-Pendidikan.html>

JPPI : Perhatian Terhadap Pendidikan Inklusi Masih Minim



Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) A Ubaid Matraji mengajak para pemangku kebijakan menggiatkan advokasi pendidikan sepanjang hayat (Lifelong learning) di tanah air. Indonesia dinilai masih memprioritaskan anggaran pendidikan untuk sekolah formal dan vokasi semata, sementara perhatian pemerintah kepada pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat masih minim.

Koordinator JPPI Ubaid Matraji membuka resmi Workshop Pendidikan Lifelong Learning yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini (12/12/2017). Pelatihan diikuti lebih 20 (dua puluh) perwakilan organisasi jaringan NEW Indonesia/JPPI.

“Ketika kawan-kawan kita, anggota jaringan (CSO) bicara mengenai penerapan pendidikan lifelong learning, di area apa saja mereka jauh lebih menguasai,” tegas Ubaid.

Ubaid menambahkan, ada diantara dari anggota jaringan kita yang menjadi pendamping para ibu-ibu agar lebih mandiri dan mampu mengadvokasi diri mereka sendiri guna memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, baik yang bergerak untuk advokasi difabel, kebebasan berkeyakinan, hak masyarakat adat serta masalah sosial dan kemanusiaan lainnya.

Menurut Ubaid, ranah advokasi kita terkait peningkatan kualitas pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) tidak terbatas kepada pendidikan formal, namun perlu lebih fokus kepada masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan kerja-kerja sosial kesejahteraan lainnya, advokasi kita menyasar kepada ibu rumah tangga, pemuda pengangguran, balita dan kelompok-kelompok dengan keterbatasan akses pendidikan dan pembelajaran sebagai warga negara.

Semua sesi workshop berlangsung cukup interaktif, sedikitnya 20 partisipan mewakili lembaga

jaringan memberi sejumlah masukan guna mendorong Indonesia lebih proaktif memfasilitasi warga negaranya memperoleh akses pendidikan sepanjang hayat. Terutama masukan-masukan terkait kajian regulasi (aspek legal), sumber daya manusia, tata kelola, aspek anggaran serta peran kolektif pemangku kepentingan yang diharapkan lebih mendorong negara mengkomodasikannya dalam regulasi sistem pendidikan nasional yang komprehensif.

Koordinator Program The Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) Cecilia Soriano dalam sesi Workshop menyampaikan beberapa mekanisme terkini yang menjadi program prioritas yang diperkuat oleh ASPBAE.

Cecilia memberi referensi negara yang dinilai berhasil menerapkan pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning), terutama negara-negara yang memberikan perhatian kepada pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning).

“Organisasi sipil (LSM) dapat berkontribusi memberi masukan kepada Pemangku kebijakan (pemerintah), salah satunya melalui kajian-kajian akademis lebih komprehensif guna mendorong Indonesia mencurahkan perhatian terhadap pendidikan sepanjang hayat yang diselaraskan dengan program nasional dan global,” tambah Cecilia.

Pekan ini Cecilia bertolak ke Bandung, Jawa Barat mendampingi Presiden ASPBAE Nani Zulminarni bersama sejumlah perwakilan anggota ASPBAE. Selama di Bandung, delegasi ASPBAE berpartisipasi dalam sebuah Forum Pendidikan Dunia, melakukan pertemuan dengan kalangan muda para penggerak pusat belajar berbasis komunitas (Community Learning Center-CLC) di Bandung.

Diharapkan dari kunjungan lapangan dan mengikuti forum pendidikan dunia di Bandung, anggota ASPBAE dapat memetik pelajaran berarti dalam menerapkan program-program pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning), terutama yang dikelola komunitas guna diterapkan di wilayah lain di tanah air.

Analisis mengatakan, negara-negara perlu memberi ruang lebih besar kepada organisasi sipil (CSO) guna berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan guna mewujudkan keberpihakan kepada kaum muda dan dewasa memperoleh akses pendidikan layak. Negara Asia Tenggara seperti Thailand dan negara-negara Amerika Utara terutama Kanada dinilai telah memiliki sistem pendidikan dan regulasi komprehensif terkait penerapan pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning system).

Sejauh ini proses pendidikan sepanjang hayat dipandang tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, namun terus berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan dan proses pembelajaran terus-menerus bagi seseorang dinilai cukup bermanfaat guna memperkaya perspektif serta menyesuaikan diri meraih kehidupan yang lebih baik menghadapi kerasnya kompetisi dan perubahan global.

<https://m.batamtoday.com/berita-102666-Anak-Usia-Sekolah-di-Kepri-Banyak-yang-Belum-Menikmati-Pendidikan.html>

Presiden ASPBAE Pimpin Konsultasi Nasional Indonesia



Kampanye aksi "Triple L"(Lifelong Learning) Presiden ASPBAE Nani Zulminarni (hijab kuning tengah) bersama perwakilan organisasi anggota ASPBAE di Indonesia dalam kegiatan Konsultasi Nasional yang digelar atas kerjasama ASPBAE-PEKKA di Jakarta Jumat (15/12). dok ASPBAE Indonesia

Jakarta – Presiden ASPBAE (The Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education) Nani Zulminarni memimpin langsung Konsultasi Nasional anggota ASPBAE di Jakarta, Jumat (15/12). Pendidikan kaum muda dan dewasa Agenda SDG 4 dan CONFINTEA VI jadi tema induk konsultasi nasional di Indonesia. Praktik baik dan peluang kesiapan Indonesia lebih berperan dalam menjalankan kerangka pendidikan luar sekolah, Pendidikan sepanjang hayat (Lifelong Learning) turut menjadi tema khusus pembahasan.

Nani Zulminarni mengatakan, komitmen dunia dalam pembangunan berkelanjutan SDG, terutama diselaraskan dengan penerapan pembangunan pendidikan (SDG 4) perlu didorong ke dalam sistem pendidikan nasional.

Optimisme dan tantangan Indonesia, tambah Nani, terutama dalam penerapan agenda SDG bidang Pendidikan perlu diselaraskan lebih komprehensif.

Menurut Nani, butir-butir rekomendasi konferensi pendidikan dunia di Korea baru-baru ini, dalam "the sixth International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI) diharapkan menjadi referensi, opsi dan solusi dalam mengatasi berbagai kendala sehingga pembangunan dan kebijakan pendidikan nasional yang dicita-citakan cepat terwujud.

Sedikitnya 10 dari 12 perwakilan organisasi anggota ASPBAE Forum Indonesia hadir dalam kegiatan Konsultasi Nasional Indonesia kerjasama PEKKA-ASPBAE Jumat (15/12). Dari forum konsultasi dihasilkan beberapa masukan, terutama mendesak pemerintah lebih proaktif menyelaraskan komitmen Indonesia menjalankan SDG 4 dan beberapa rekomendasi KTT Pendidikan dunia lainnya, mengagendakan forum nasional menyelaraskan perspektif guna mendukung kesiapan Indonesia dalam mewujudkan pendidikan kaum muda dan dewasa, terutama mewujudkan pendidikan sepanjang hayat (Lifelong learning) lebih menyeluruh.

Sampai saat ini anggota ASPBAE Indonesia terdiri dari sejumlah organisasi prodemokrasi yang fokus dan konsisten menjalankan programnya dalam beragam sektor, terutama berbasis pendidikan, pemberdayaan dan kesetaraan, pangan gizi dan kesehatan, serta program sosial kemanusiaan, termasuk demokrasi dan perdamaian. Anggota ASPBAE Indonesia JPPI/NEW Indonesia, PEKKA, ACE, Koalisi Perempuan Indonesia, CCDE, Institut Kapal Perempuan, PPSW, PESADA, Capacity Building Learning Sumatera Forum, ASPPUK, YIS dan RUMPUN.

Pengangguran dan Sekolah Vokasi/SMK

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2017 mengalami penurunan menjadi 5,33% dari Februari 2016 yang sebesar 5,50%. Dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, terdapat 124,54 juta orang yang bekerja, dan sisanya 7,01 juta orang dipastikan pengangguran.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto seperti dilaporkan detikcom mengatakan. Berdasarkan pendidikan, tingkat pengangguran terbuka terendah berada di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yakni 3,54%.

"TPT terendah sebesar 3,54% terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah," kata Kecuk di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (5/5/2017). Tingkat pengangguran terbuka sektor pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03%. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9,27%. Diploma III (D3) sebesar 6,35%, dan universitas 4,98%.

"Yang tertinggi sebesar 9,27% pada jenjang pendidikan SMK, ke depan SMK ini jurusannya perlu diperluas, agar tidak ada kekeliruan link dari yang dipelajari SMK dengan yang dibutuhkan dunia kerja," jelasnya.

Dari total penduduk Indonesia terdapat 190,59 juta orang masuk ke dalam usia kerja. Dari total tersebut terdapat 131,55 juta orang angkatan kerja di mana 7,01 juta orang pengangguran.

Sedangkan 124,54 juta orang bekerja. Dari 124,54 juta, 87,00 juta pekerja penuh, 28,05 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,49 juta orang setengah menganggur.

Sedangkan 59,04 juta orang dari 190,59 juta usia kerja, merupakan bukan angkatan kerja. Di mana, 36,08 juta orang mengurus rumah tangga, 15,24 juta orang sekolah, dan 4,72 juta orang lainnya.

Lebih 2 juta Anak Indonesia Putus Sekolah

Manajer Fundraising Yayasan Amal Khair Yasmin, Mujtahidien dikutip laman berita terkemuka nasional Kabar24bisniscom mengungkapkan masalah pendidikan gratis di Indonesia masih relevan.

Berdasarkan data UNICEF tahun ini sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Data statistik tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

"Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar daripada mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan. Untuk data statistik geografis, tingkat putus sekolah anak SD di desa 3:1 dibandingkan dengan di daerah perkotaan," Kata Mujtahidien dalam workshop pendidikan gratis, di Jakarta, Selasa (23/6)

Menurut Mujtahidien, Hal tersebut terjadi karena dipicu oleh faktor kekurangan tenaga pengajar untuk daerah terpencil dan tergolong berpenghasilan rendah.

"Tingkat putus sekolah anak di desa dapat mencapai 3% jika dibandingkan dengan anak di perkotaan," tambahnya.

Hal tersebut, kata Mutjahidien seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia.

Dengan diadakannya guru garis depan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini diharapkan mampu mengurangi jumlah anak putus sekolah terutama di daerah terpencil.

Anggaran Pendidikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip laman Kompascom mengatakan bahwa persoalan anggaran pendidikan Indonesia dan kualitasnya menjadi sorotan Bank Dunia. Pasalnya, kualitas pendidikan Indonesia kalah dari Vietnam, meski besar anggarannya sama.

"Indonesia dan Vietnam sama-sama spending 20 persen dari budget negara untuk pendidikan. Tapi hasilnya sangat beda," terang Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (22/11)lalu.

Menurutnya anggaran pendidikan dalam APBN 2018 mencapai Rp 441 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp 416 triliun.

Anggaran Pendidikan dikritik

Bank Dunia mengkritik alokasi anggaran pendidikan Indonesia yang dinilai lebih banyak diperuntukkan bagi guru dibandingkan murid. Apalagi, kondisi itu belum diimbangi dengan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Direktur Bank Dunia Rodrigo Chavez dilaporkan CNNIndonesia mengungkapkan dengan kondisi saat ini, pemerintah membutuhkan waktu 50 tahun agar seluruh siswa di Indonesia mencapai rata-rata kompetensi siswa berdasarkan standar Organisasi Kerja Sama Negara Berkembang di dunia (OECD).

“Saya pikir Indonesia tidak bisa dan tidak mau untuk menunggu selama itu,” tutur Chavez dalam Konferensi Pendidikan Internasional ‘Belajar untuk Semua: Prinsip Bersama untuk Pemerataan Sistem Pendidikan Dasar yang Kuat’ di Jakarta baru-baru ini.

Rodrigo mengingatkan, pendidikan adalah kendaraan yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karenanya, alokasi anggaran pendidikan harus dimonitor dengan baik dengan kinerja yang terukur.

“Sistem pendidikan yang kuat dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif dan memberikan setiap warga Indonesia kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka, sehingga bisa tampil sebagai warga negara global yang trampil dan berpendidikan tinggi,” ujarnya.

Komitmen CONFINTEA VI Suwon

Situs UNESCO melaporkan KTT Pendidikan Suwon, Republik Korea Oktober 2017 lalu, bahwa Lebih dari 400 pemangku kepentingan internasional dari 98 negara berkumpul guna meninjau pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan orang dewasa di seluruh dunia.

Pada pertemuan global yang diselenggarakan bersama oleh UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), delegasi negara peserta berbagi pengalaman yang dicapai dalam memberikan kesempatan belajar dan pendidikan bagi kaum muda dan orang dewasa.

Dalam Konferensi Internasional tentang Pendidikan Dewasa Keenam (CONFINTEA VI) disepakati, bahwa negara-negara berkomitmen mewujudkan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya SDG 4 tentang pendidikan dan kehidupan seumur hidup, negara-negara berkeinginan mewujudkan dan memberikan pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar sepanjang hayat (lifelong learning) kepada kaum muda dan orang dewasa untuk mencapai SDGs.

Peserta Review Mid-Term CONFINTEA, menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama, untuk membantu memperbaiki dan memperkuat kebijakan belajar dan pendidikan orang dewasa, rencana, strategi dan praktik. Konferensi Suwon menghasilkan serangkaian tindakan strategis berwawasan ke depan untuk Negara-negara Anggota UNESCO, serta untuk mitra pembangunan nasional, regional dan global, mengenai pelaksanaan yang berkelanjutan Kerangka Aksi Belém serta Rekomendasi 2015 tentang Pembelajaran dan Pendidikan Orang Dewasa. Dokumen hasil akan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran akan manfaat pembelajaran dewasa dan pendidikan orang dewasa di berbagai sektor yang berbasis keberagaman masyarakat selaras dengan SDG 4 sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Pendidikan 2030, dan Agenda Berkelanjutan Pembangunan 2030 yang lebih luas. Konferensi tersebut juga menetapkan jadwal Konferensi Internasional Pendidikan lanjutan yang akan berlangsung pada 2021 mendatang. (Berbagai sumber, Tim)

<http://new-indonesia.org/2017/12/17/presiden-aspbae-pimpin-konsultasi-nasional-indonesia/>

Wajib Belajar 12 Tahun Belum Maksimal, Disdik Dituntut Pro Aktif

Penulis Endra Kurniawan - 15 Desember 2017 dilihat 725



Dok foto. Ilustrasi media

MALANGTODAY.NET – Program wajib belajar 12 tahun dinilai belum berjalan secara maksimal. Karena selain masih banyak yang belum bisa menikmati pendidikan SMA atau SMK, fasilitas yang diberikan pun cenderung kurang mendukung. Dinas Pendidikan (Disdik) pun akhirnya dituntut untuk lebih pro aktif.

Kepala Divisi Korupsi Politik dan Kebijakan MCW, Mayedha Adifirsta menyampaikan, semenjak SMA/SMK diambil alih pengaturannya oleh Pemerintah Provinsi, berbagai kegiatan menurutnya mulai menemui kendala baru. Diantaranya terkait penyaluran anggaran yang dinilai sangat rancu.

“Salah satunya untuk dana hibah, yang pada akhirnya membuat Dinas Pendidikan Kota Malang saling lempar karena kesiapan yang kurang,” katanya pada wartawan.

Sehingga, lanjutnya, pemerintah hendaknya segera mengeluarkan aturan baru untuk menunjang aktivitas pendidikan, khususnya untuk para siswa SMA/SMK yang ada di setiap kota. Hal itu dirasa penting karena untuk mengatur hak dan kewajiban yang akan diberikan untuk siswa.

“Ketika tidak ada regulasi, maka ada celah melakukan korupsi,” terangya.

Peraturan terkait subsidi itu menurutnya sudah diatur. Dimana ketika ada aturan wajib belajar 12 tahun, maka setiap siswa SMA dan SMK wajib untuk memperoleh subsidi. Hal itu sebelumnya juga sudah ditegaskan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah menelurkan regulasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah menyampaikan, selama ini pihaknya memang mengalami kesulitan untuk menyalurkan hibah. Karena sebelumnya, pihak Provinsi Jawa Timur masih belum siap untuk menyelesaikan administrasi karena kurangnya tenaga.

“Sehingga, kami nggak bisa menyalurkan hibah,” terangnya lagi. Lebih lanjut perempuan berhijab ini menyampaikan, hibah nantinya akan terus diupayakan dapat disalurkan. Ketika sudah ada aturan yang jelas, maka hibah akan disalurkan untuk kemudian dapat kembali dinikmati oleh siswa dan siswi SMA maupun SMK yang ada di Kota Malang.

<https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/wajib-belajar-12-tahun-disdik/>

YIS Solo Fokuskan Advokasi Pendidikan



Tim JPPI Nailul Faruq bersama pengurus dan staf YIS/Ist

Solo – Baru-baru ini, delegasi Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) diwakili oleh Koordinator Advokasi Nailul Faruq menggelar pertemuan dengan pimpinan Yayasan Insan Sembada (YIS) di kota Solo. Kedatangan kali ini, merupakan wujud silaturahmi dan koordinasi koalisi jaringan. Kedatangan Staff JPPI ini disambut langsung oleh Direktur YIS Joko Setiawan dan beberapa staff YIS diantaranya, staf bidang pendidikan, staf bidang pemberdayaan dan staf bidang ekonomi lembaga (23/11) di Solo.

Yayasan Insan Sembada (YIS) merupakan bagian dari koalisi JPPI sejak berdirinya JPPI yang sebelumnya masih bernama CSOiEFA. Sebagai salah satu anggota koalisi YIS cukup berperan aktif dalam beberapa kegiatan JPPI, antara lain pada tahun 2015 YIS pernah menggelar Global Action Week (GAW) di Solo dengan para peserta komunitas difabel terbesar pertama yang pernah digelar di Solo khusus isu pendidikan inklusi. Selain itu, beberapa kegiatan yang digelar oleh Sekretariat Nasional (Seknas) JPPI, YIS juga terlibat menjadi peserta aktif.

Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq dalam kesempatan sambutannya menyampaikan beberapa hal diantaranya hasil Rapat Tahunan Anggota (RTA) 2017 di Bandung, soal Goal utama yakni Meningkatnya akses Pendidikan Dasar 12 Tahun yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan. Hal tersebut tercantum dalam Logical Framework Analys (LFA) 2017 hasil keputusan rapat pleno RTA Bandung tahun 2017, sekaligus memperkuat misi untuk isu strategis pendidikan di tahun 2018 mendatang dengan program yang relevan.

Sementara itu , Direktur YIS Joko Setiawan menyatakan, bahwa YIS Solo berkomitmem mendukung apa yang menjadi fokus JPPI dan mandat hasil RTA Bandung. YIS berharap ada sinergi dalam pelaksanaan program di daerah sebagaimana tindak lanjut kegiatan pelatihan Partisipation Action Research (PAR) beberapa bulan lalu di Bogor, Jawa Barat. YIS , tambah Joko, juga menginginkan ada kegiatan langsung yang bersentuhan dengan daerah, terlebih di Solo sebagai area fokus YIS.

Pokok rekomendasi YIS :

1. Penguatan advokasi pada isu guru, terlebih guru yang sudah disertifikasi terkait dengan penggunaan dana sertifikasi oleh guru;
2. Pemantauan isu di daerah lebih diperkuat sebagai basis pendidikan dan implementasi pendidikan;
3. Perlunya data atau riset soal penggunaan dana sertifikasi oleh guru, terutama di daerah;
4. Mendorong pemerintah daerah mewujudkan transparansi anggaran pendidikan daerah;
5. Pengarusutamaan pendidikan inklusi

Menurut Joko Setiawan, pada 2018 nanti, YIS akan melakukan rencana strategi yang berkaitan denan program pendidikan di daerah secara berkelanjutan. Tentunya, lanjut Joko, akan mempertimbangkan masukan JPPI terkait hasil RTA Bandung dan LFA 2017 sebagai acuan dasar merumuskan program.

Joko menambahkan, Beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan YIS pada tahun 2018 terkait dengan isu "guru". YIS mengaku mempunyai jaringan banyak komunitas guru di Solo, nanti akan menyesuaikan dengan isu atau konteks di tahun 2018, dan tentunya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah komunitas guru di Solo.

<http://new-indonesia.org/2017/11/27/yis-solo-fokuskan-advokasi-pendidikan-daerah/>

JPPI- Kemenag RI Konkritkan Pencegahan Pungli

November 12, 2017



Sekretaris Itjen Kemenag RI Muhammad Tambrin (kemeja batik hijau), dan beberapa staf bidang pengawasan dan pengaduan masyarakat (Dumas) menerima kunjungan Koordinator JPPI Ubaid Matraji dan tim/.ist

Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memenuhi undangan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Itjen Kemenag RI), perihal rapat koordinasi dan audiensi soal maraknya pungutan liar (Pungli) di sektor pendidikan. Pertemuan digelar di ruang rapat OR Lantai 2 kantor Itjen Kemenag RI, di Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (9/11)

Kedatangan JPPI yang terdiri dari Koordinator Nasional dan jajaran staff JPPI, disambut langsung oleh Sekretaris Itjen Kemenag RI Muhammad Tambrin, dan beberapa staff bidang pengawasan dan pengaduan masyarakat (Dumas). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas soal laporan masyarakat kepada JPPI atas kasus dugaan pungli pendidikan (Madrasah), seperti kasus-kasus terkait pelaksanaan PPBD 2017, Ujian Nasional (UN), iuran dalam satuan pendidikan dan sejumlah kasus lainnya. Kondisi tersebut, menurut JPPI harus perkuat dengan bagaimana pencegahan pungli, bukan hanya pemberantasan.

Sekretaris Itjen Kemenag RI Muhammad Tambrin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada JPPI yang telah membantu kinerja pemerintah dalam hal ini Itjen Kemenag, untuk memantau langsung beberapa kasus di madrasah. "Kami apresiasi langkah tersebut, dan yang

kami tekankan adalah pemantauan di ASN/PNS atau dalam madrasah di jenjang MIN, MTSN, MAN dan Perguruan Tinggi Negeri,” ujar Tambrin.

Selain itu, Tambrin juga menegaskan, dirinya akan melibatkan JPPI dalam beberapa kegiatan Itjen terkait dengan pemantauan dan evaluasi kasus-kasus di madrasah. Itjen Kemenag, imbuah Tambrin, ada bidang pengaduan masyarakat (Dumas), nanti dapat disinergikan dengan agenda JPPI dalam melakukan sosialisasi dan menampung laporan warga kepada JPPI, “Kami sangat terbuka, JPPI bisa bersinergi dengan Dumas di Itjend jika ada kasus yang dilaporkan warga kepada JPPI. Mari bersama-sama untuk ciptakan madrasah yang unggul, berkualitas dan tentunya bersih dari praktek pungli,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat oleh pihak Itjen Kemenag. JPPI lanjut Ubaid, selain fokus terhadap advokasi kebijakan, JPPI juga melakukan pemantauan langsung terhadap event-event tertentu, seperti PPDB, Ujian Nasional, dan lain-lain. “Kami punya situs pengaduan di www.laporpendidikan.com. Saat ini, JPPI masih dipercaya warga sebagai tempat pengaduan berbagai kasus di sekolah atau madrasah. Kami butuh kerjasama lembaga terkait yang punya wewenang terhadap kasus tersebut, misalkan Pungli di madrasah itu wewenang Itjen Kemenag,” papar Ubaid.

Ubaid juga memaparkan, kasus PPD 2017 kemarin masih menjadi polemik yang harus dievaluasi dan diselesaikan oleh pemerintah. Hasil laporan JPPI, soal sistem zonasi ini menjadi yang terbesar karena banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Oleh sebab itu, banyak yang ditolak di sekolah negeri atau favorit karena sistem ini.

“Kebijakan soal zonasi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga mereka terkena dampak secara langsung. Ada beragam alasan bagi mereka yang terkena sistem ini,”

“Kebijakan soal zonasi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga mereka terkena dampak secara langsung. Ada beragam alasan bagi mereka yang terkena sistem ini,” kata Ubaid.

Atas kasus tersebut, JPPI merekomendasikan peninjauan ulang kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Selain itu, sosialisasi sistem mesti disampaikan dari jauh-jauh hari. “Sistem zonasi perlu ditinjau ulang sebab banyak memakan korban, hanya gara-gara ketidaklengkapan administratif. Perlu ada sosialisasi jauh-jauh hari supaya calon peserta didik menyiapkan segala keperluan administratif. Dan yang paling penting adalah adanya transparansi pihak sekolah atas pembiayaan PPDB, seperti kasus yang kami temui kemarin di madrasah negeri, kami menilai tidak ada transparansi oleh pihak madrasah,” imbuhnya.

Senada dengan Ubaid, Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq, menyampaikan soal agenda pencegahan pihak JPPI akan segera merumuskan rencana strategi untuk melakukan sosialisasi pencegahan praktek pungli di daerah-daerah, “Memang benar, tindakan pencegahan itu penting. Bagaimana masyarakat menjadi agen pengawas dan kontrol langsung terhadap pemerintah. Idealnya, jika keterlibatan publik itu sudah kuat dalam pencegahan, maka para pejabat akan berfikir ulang untuk melakukan tindakan pungli,” jelasnya.

Nailul juga menambahkan, JPPI ingin mengajak Itjen Kemenag untuk bersama-sama mensosialisasikan program pencegahan.” Kami ingin ada sinergi antara CSO dan pemerintah untuk menghentikan praktik pungutan di sekolah atau madrasah. Awal tahun 2018 nanti, kami akan lakukan program sosialisasi ke daerah, kami minta Itjen Kemenag mendukung langkah dan agenda kami,” pungkasnya.—

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia(JPPI)/NEW Indonesia merupakan koalisi dari beberapa lembaga masyarakat sipil yang memiliki concern untuk memperkuat akses pendidikan 12 yang berkualitas dan berkeadilan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Saat ini, koalisi JPPI beranggotakan 22 lembaga yang masing-masing punya konsen terhadap isu pendidikan.

Adapun isu strategis NEW Indonesia/JPPI adalah meningkatkan kerjasama dan sinergi antara NEW Indonesia/JPPI dan jejaring masyarakat sipil lain untuk pencapaian pendidikan dasar 12 tahun, mendorong keterlibatan masyarakat terkait isu-isu pendidikan dasar 12 tahun, mendorong lahirnya kebijakan wajib belajar/pendidikan dasar 12 tahun di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan nasional, mendorong akses pendidikan lanjutan bagi anak perempuan, mendorong sistem akreditasi sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah, dan mendorong instansi pendidikan yang transparans dan bersih dari praktek pungutan liar (pungli) atau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

<http://new-indonesia.org/2017/11/12/jppi-itjen-kemenag-ri-konkritkan-penguatan-pencegahan-pungli/>

YBS-Workshop: Penulisan Isu Pendidikan

December 6, 2017



Peserta pelatihan dari perwakilan jaringan koalisi Seknas JPPI /foto.Rahmad

Jakarta – Kalangan aktivis dari sejumlah organisasi pro-demokrasi mengikuti pelatihan sehari tentang pemanfaatan media sosial, penulisan opini dan karya-karya penulisan relevan untuk kampanye pendidikan dan tema sosial lainnya. Kegiatan diprakarsai Yayasan Balita Sehat (YBS) dengan dukungan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pelatihan kali ini masih merupakan rangkaian peningkatan kapasitas internal anggota koalisi jaringan dalam melakukan kampanye yang lebih masif, produktif di era media multiplatform .

Pimpinan Yayasan Balita Sehat yang juga Pengurus Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Helga Dyah Vianinditasari mengatakan di Jakarta Kamis (2/1/2017), bahwa pemanfaatan media sosial untuk tujuan kampanye dan advokasi isu pendidikan dan isu sosial lainnya, cukup bermanfaat dan dapat menjangkau pengguna medsos di tanah air yang lebih masif”.

Mentor pelatihan, Jurnalis senior televisi terkemuka Alida Bahaweres memuji antusias peserta dan berharap terjadi lebih banyak perubahan bagi rekan-rekan dalam mengelola publikasi multimedia, medsos dan situs internal lembaga masing-masing lebih dikenal luas, dengan menampilkan hal-hal yang lebih edukatif, kreatif dan informatif.”

“Menulis itu dapat dengan kalimat sederhana, yang utama semua pesan-pesannya sampai

dan mudah dicerna.”, tambah Alida memotivasi partisipan pelatihan.

Salah seorang peserta pelatihan Amang A Rochman mengakui, kegiatan ini cukup positif dan minta agar agenda serupa dilanjutkan guna mempertajam skil para aktivis dalam menulis karya yang lebih baik”.

Beberapa peserta lainnya merasa cukup puas, dan pembekalan dalam pelatihan diharapkan semakin memotivasi organisasi jaringan dan mitra dalam mengatasi berbagai kendala terkait penulisan dan publikasi karya, tulisan dan relasi komprehensif dengan media arus utama terutama pemanfaatan media sosial untuk kampanye peduli pendidikan dan beragam isu turunannya, sesuai fokus kampanye di lembaga masing-masing.

Beberapa praktisi media mengatakan, melalui tulisan, kalangan aktivis dapat menyampaikan apa saja yang menjadi kegelisahan, gagasan serta isu – isu pemenuhan hak setiap warga Negara baik sosial, politik, ekonomi, kesehatan bahkan pendidikan. Dengan berbagai macam media massa guna membangun opini publik untuk memperjuangkan suatu ide atau gagasan bersama sehingga bisa menciptakan gerakan sosial yang mengarah pada perubahan demokrasi lebih baik.

Yayasan Balita Sehat Indonesia (Koordinator Pelatihan)

Berdiri 2001 , the Foundation for Mother and Child Health Indonesia (Yayasan Balita Sehat Indonesia), merupakan organisasi “cabang” dari FMCH UK. Selain di Indonesia, juga terdapat FMCH India. FMCH Indonesia saat ini memiliki 4 site dampingan yaitu Cipete-Jakarta, Bojonggede-Jawa Barat, Semarang-Jawa Tengah, dan Kab. Timur Tengah Selatan –NTT. Tugas utama dari FMCH Indonesia yaitu memberikan edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak. YBS mengembangkan 12 PAUD yang tersebar di Jakarta, Bojonggede dan NTT. Sistem belajar dan kurikulum pembelajarannya diintegrasikan dengan pendidikan kesehatan.

Perkembangan Seknas JPPI

Per Desember 2017, anggota koalisi jaringan JPPI bertambah dua organisasi lembaga, yang direkomomodasi dalam pertemuan tahunan Bandung baru-baru ini, kedua lembaga jaringan baru tersebut Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Solo dan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Jakarta. (tim)

<http://new-indonesia.org/2017/12/06/ybs-inisiasi-pelatihan-penulisan-produktif/>

ORI-JPPI Konkritkan Pencegahan Pungli



Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq (kemeja batik) bersama Tim Ombudsman RI saat rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (31/10)|NEW Indonesia

November 1, 2017

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) datangi panggilan Ombudsman RI, perihal rapat koordinasi dan audiensi soal pungutan liar (Pungli) pendidikan. Rapat digelar di ruang sidang kantor Ombudsman RI lantai 6 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Kedatangan JPPI yang disambut langsung oleh Bidang Pelayanan Pendidikan Ombudsman RI ini, membahas soal maraknya kasus pungli pendidikan seperti kasus PPBD 2017, Ujian Nasional (UN) dan sejumlah kasus pungutan di Sekolah. Kondisi tersebut, harus perkuat dengan bagaimana pencegahan pungli, bukan hanya pemberantasan.

Dalam sambutannya, Asisten Layanan Pendidikan Ombudsman RI, Shobirin menyampaikan apresiasi kepada JPPI yang saat ini masih fokus mengawal isu pendidikan, khususnya advokasi kasus pungli di pendidikan dan komitmen ingin desak pemerintah wujudkan akses pendidikan 12 tahun berkualitas dan merata.

“Kami mengapresiasi langkah JPPI, sebagai lembaga pemantau pendidikan. Kami bergarap pertemuan ini menjadi momentum perkuat gerakan untuk mencegah praktik pungli di pendidikan,” ujar Shobirin.

Selain itu, Shobirin juga memaparkan konsen Ombudsman bidang pendidikan terkait pengawasan pungutan di sekolah, seperti kasus di PPBD 2017 kemarin. Menurut Shobirin, aturan

dalam Permendikbud nomer 17 tahun 2017 sudah bagus, namun masih banyak celah di lapangan.

“Permendikbud 17 tahun 2017 perlu aturan turunan, terutama soal zonasi agar jelas dan bisa direalisasikan di semua daerah. Karena setiap daerah mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Kasus pungli pun masih banyak dalam PPBD 2017 kemarin, Kemendikbud harus mengkaji ulang temuan kasus-kasus di PPBD kemarin,” tegasnya.

Soal pencegahan pungli, Shobirin menyebut, Ombudsman akan fokus pada sosialisasi tindakan pencegahan, dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam melakukan gerakan ini, termasuk JPPI yang konsen di pemantauan pendidikan.

“Kami berharap, JPPI bisa lebih intens koordinasi dengan Ombudsman, apabila menemukan temuan kasus pungli. Kami akan melakukan tindakan cepat. Soal gerakan pencegahan, ke depan kita akan bekerjasama agar pencegahan pungli pendidikan bisa hentikan dan untuk mewujudkan apa yang disebut sekolah anti pungli,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq menyampaikan, maraknya kasus pungli itu akibat dari pihak sekolah yang mengabaikan peraturan, dalam hal ini permendikbud 17 dan permendikbud 75. Akhirnya, kasus serupa masih terjadi dimana-mana.

“Kami mengapresiasi langkah ombudsman yang dengan cepat lakukan tindakan terhadap kasus pungli di beberapa daerah. Ombudsman juga harus mengkaji ulang Permendikbud 75, karena masih banyak pungli yang dilakukan sekolah. Itu karena hanya berganti pelaku pungli saja. Makanya kami pernah minta Mendikbud untuk merevisi Perewndikbud 75 tersebut,” ujar Nailul.

Terkait dengan tindakan pencegahan, JPPI komitmen membantu pemerintah dalam hal ini Ombudsman untuk sosialisasi sekolah anti pungli. Banyaknya laporan pengaduan warga kepada JPPI soal kasus-kasus pendidikan menjadi catatan penting JPPI untuk dilakukan advokasi dan langkah pencegahan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman terkait laporan pengaduan warga yang berkaitan dengan pungli. Saat ini kami juga sedang menyusun renstra untuk memperkuat pencegahan, dan akan kami sosialisasikan ke beberapa daerah khususnya daerah rawan pungli. Kami berharap Ombudsman bisa mendukung langkah dan gerakan kami untuk mewujudkan pendidikan bebas pungli,” tutupnya.(tim)

<http://new-indonesia.org/2017/11/01/ombudsman-ri-jppi-perkuat-pencegahan-pungli-pendidikan/>

Workshop Video untuk Advokasi Pendidikan

December 6, 2017



Peserta instruktur kompak/ist

Jakarta – Baru-baru ini, Perhimpunan untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat – Association for Community Empowerment (PPKM – ACE) mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Workshop Pemanfaatan Kamera ponsel untuk Vidio Kampanye multiisu, baik pendidikan dan isu sosial lainnya. PPKM-ACE merupakan salah satu anggota jaringan koalisi NEW Indonesia, dari sedikitnya 22 (anggota) jaringan koalisi Seknas JPPI per Desember 2017.

Sedikitnya 17 partisipan aktivis mewakili masing-masing lembaga koalisi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau NEW Indonesia mengikuti pelatihan pembuatan video untuk tujuan-tujuan kampanye kepedulian terhadap terhadap kondisi pendidikan dan kasus-kasus pendidikan melalui media visual terutama memanfaatkan teknologi digital (vidio).

Koordinator pelatihan PPKM-ACE Siti Masriyah mengatakan, tujuan utama pelatihan salah satunya guna membekali pengetahuan mendasar termasuk aspek teknis pembuatan vidio , narasi dan kreatifitas kalangan aktivis untuk tujuan advokasi pendidikan multiaspek.

“Peningkatan kapasitas untuk anggota jaringan dan lembaganya ini yang kita tekankan dalam pelatihan”, tambah Masriyah. Pelatihan menghadirkan mentor Mohammad Solihin, jurnalis media terkemuka nasional, kegiatan dipusatkan di hall utama Gedung PPKM-ACE Jakarta, 2 Oktober 2017.

Teknologi komunikasi lebih efektif

Analisis mengatakan, Keberhasilan kegiatan advokasi untuk merubah kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat ditentukan oleh banyak hal. Salah satu hal yang saat ini banyak digunakan untuk mendukung perubahan sosial adalah penggunaan video. Saat ini, video diakui sebagai satu alat paling efektif untuk mendorong munculnya gerakan yang dapat menginspirasi perubahan.

Beberapa praktisi media mengatakan, Salah satu halnya karena video mampu memunculkan emosi yang lebih efektif daripada tulisan. Narasi cerita yang kuat didukung dengan sudut pengambilan gambar yang tepat berpadu dalam satu video adalah alat kampanye yang memiliki kekuatan untuk memunculkan inisiatif perubahan. Sebelumnya, Peserta disyaratkan oleh panitia membawa telepon genggam yang memiliki perangkat kamera video yang berkualitas baik dan masih mempunyai kapasitas cukup untuk install program edit video.

Beberapa partisipan mengatakan, pelatihan agak singkat namun mereka merasa memiliki pengetahuan baru yang cukup penting terutama terkait pemanfaatan teknologi dan teknis pembuatan narasi untuk aksi dan kampanye kepedulian terkait isu sosial, terutama dalam mengatasi kesenjangan masalah-masalah pendidikan yang mejadi salah satu prioritas pembangunan.

Kelas sehari penuh training video kali ini, partisipan pelatihan memperoleh beberapa modul kunci terkait pembuatan narasi dan video, antara lain terkait Teori dasar pengambilan gambar (EDFAT, long shot, medium shot, close up, jumping shot, intercut, dll) dan perumusan ide cerita, hingga praktik pengambilan gambar, editing dan aspek teknik kunci lainnya. (tim)

<http://new-indonesia.org/2017/12/06/ace-ppkm-adakan-workshop-vidio-untuk-advokasi-pendidikan/>

Bogor Bangkit untuk Pendidikan Inklusi Berkualitas

Jumat, 01 September 2017



Publik Kab/Kota Bogor bersatu bangkit bergerak untuk pendidikan inklusi berkualitas dan masa depan ABK Indonesia kompetitif sejahtera.foto rahmad

BOGOR – Pekan ini publik Bogor bersatu dengan kalangan siswa sekolah berpartisipasi dalam berbagai cabang perlombaan memeriahkan Festival ABK 2017 . Festival yang digelar merupakan kegiatan puncak diisi setelah sebelumnya pihak penyelenggara mengadakan workshop dua hari terkait pendidikan inklusi dan tata kelola pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 2017 . Festival didisi dengan beragam lomba, antara lain lomba mewarnai, fashion show, lomba menyanyi yang dipusatkan di hall kompleks parlemen Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (31/8).

Dalam sambutannya, Teguh Prasetyo dari Yayasan Diffable Action Indonesia (YDAI) memuji besarnya partisipasi dan peran serta para orang tua dan dewan guru, masyarakat serta kalangan swasta dalam mewujudkan masa depan pendidikan inklusi yang lebih ramah di Kabupaten/Kota Bogor.

“Festival diharapkan menggugah publik lebih peduli terhadap pendidikan inklusi, utamanya peluang pendidikan bagi siswa sekolah ABK di Bogor dan tanah air umumnya”, demikian Teguh.

Selain dihadiri ratusan siswa, praktisi pendidikan dan tamu undangan hadir kalangan pemangku kebijakan kabupaten dan kota serta tokoh masyarakat Jawa Barat.

Koordinator Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubaid Matraji mengatakan, perhatian para pemangku kebijakan terkait pendidikan dan masa depan ABK perlu didorong multiaspek, terutama terkait pelayanan serta aspek sarana prasarana yang berdinggungan dengan

kebijakan anggaran pendidikan.

"Kabupaten dan Kota Bogor diharapkan dapat menjadi kawasan model nasional guna mewujudkan pendidikan inklusi yang lebih komprehensif, harap Ubaid.

Sekolah inklusi, tambah Ubaid, perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah. "Pemerintah harus memastikan keberadaan sekolah inklusi ini sebagai akses yang memudahkan ABK untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ujar Ubaid.

Baru-baru ini dalam riset JPPI melalui Right To Education Index (RTEI) menyebut bahwa problem krusial pendidikan nasional sedikitnya terdapat tiga hal. Pertama, Kualitas guru rendah. Kedua, Diskriminasi terhadap kelompok marginal. Dan yang ketiga, sekolah masih belum ramah anak.

"Pendidikan inklusi untuk ABK ini kami rasa masih belum merata. Pemerintah harus melakukan rencana strategi guna memastikan adanya anggaran untuk mendukung penyandang difabel mendapat peluang pendidikan yang cukup layak," jelas Ubaid.

Festival juga menampilkan sejumlah stan sekolah dan lembaga-lembaga peduli pendidikan inklusi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Beberapa stan memamerkan karya-karya pelajar sekolah inklusi serta penyandang disabilitas yang aktif dalam program UMKM kewirausahaan yang memproduksi asesoris busana berbagai bahan, produk-produk kuliner yang syarat asupan gizi dan ramah lingkungan.

Kabupaten Bogor akan segera mendata ABK

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, seperti dilaporkan Bogornews belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah pasti Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Untuk itu guna mendapatkan jumlah ABK yang akurat, Disdik Kabupaten Bogor pada akhir 2017 akan melakukan pendataan di kurang lebih 100 SD yang tersebar di 40 Kecamatan.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Ade Suryana Sabtu (26/8) usai menghadiri Workshop Pendidikan Inklusi yang diadakan Yayasan Diffable Action Indonesia (YDAI) di kawasan Jl. Pajajaran, Kota Bogor.

"Akhir 2017 nanti kami akan melakukan pendataan. Pendataan ini membutuhkan dana yang besar dan waktu yang panjang. Anggaran untuk pendataan sudah diakomodir di Anggaran Perubahan," ujarnya.

Ia pun sangat berharap, dengan ada pendataan tersebut pihaknya mendapatkan data yang valid baik ABK yang berada di sekolah maupun di luar sekolah.

Untuk itu ia sangat berharap kerjasama banyak pihak, baik masyarakat maupun orangtua yang memiliki ABK agar dapat menyampaikannya pada saat pendataan dilakukan.

"Kalau ABK yang ada di sekolah, mendatanya sangat mudah karena ada formatnya. Data dari sekolah lalu dikirim ke UPT. Susahnya kalau ada ABK diluar sekolah, kita susah mendatanya," tuturnya.

Persoalannya, masih adanya perasaan malu dari sebagian masyarakat terutama yang memiliki ABK.

"Ini yang sulit, masyarakat merasa jika memiliki salah satu anggota keluarganya yang ABK adalah suatu hal yang tabu dan memalukan. Kita perlu sosialisasikan agar perasaan seperti itu tidak benar," pungkasnya.

Media-media jaringan nasional baru-baru ini menurunkan laporan bahwa Penyandang

difabel tidak mau ketinggalan ikut memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-534 guna mewujudkan Bogor Ramah Difabel. Dari lebih 3500 orang penyandang disabilitas masih sekitar 300 yang aktif dan berpartisipasi di Bogor.

Beberapa analis mengatakan, Indonesia dinilai tengah memacu mewujudkan pendidikan inklusi lebih berkualitas. Survei Nasional Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta di antaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus.

Di level global, Finlandia , Swedia, Jerman dan Jepang dinilai merupakan negara-negara dengan pendidikan inklusi cukup komprehensif. tim

<http://new-indonesia.org/beranda/2016-03-25-08-28-09/berita-new-indonesia/875-bogor-bangkit-bergerak-untuk-pendidikan-inklusi-indonesia-lebih-berkualitas.html>

Revitalisasi Sekolah Inklusi

indopolitika.com 23 September 2017



Oleh: Nailul Faruq

Koord. Advokasi dan Investigasi – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

Pendidikan inklusi merupakan konsep ideal yang memberikan kesempatan dan peluang sepenuhnya kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hal yang sama, pendidikan difabel baik di sekolah inklusi atau di Sekolah Luar Biasa (SLB), terlebih SLB yang sudah berusia puluhan tahun ini seakan menjadi sedikit tersisih karena adanya program pendidikan inklusi. Dikotomi tersebut bukan lantas mematikan salah satu lembaga antara sekolah inklusi dan SLB, keduanya sama-sama program pemerintah yang mesti harus di seragamkan, baik soal kemudahan akses masuk sekolah ataupun pembiayaan.

Aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, Konferensi Dunia tahun 1994 oleh UNESCO di Salamanca, Spanyol, menyatakan komitmen "pendidikan untuk semua" atau "Education For All (EFA)", komitmen ini menegaskan pentingnya pemberian pendidikan bagi anak, remaja dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan dalam sistem pendidikan reguler serta menyetujui kerangka aksi pendidikan bagi ABK.

Selain itu, dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2016 mencatat, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta di antaranya adalah ABK. Angka satu juta anak

ABK adalah angka yang cukup fantastik, lantas kemana perhatian pemerintah terlebih kemeterian terkait dalam menangani hal tersebut?

Celah Kebijakan di Lapangan

Maskipun perkembangan pendidikan inklusi atau difabel di Indonesia cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan. Namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

Pertama, pemahaman tentang pendidikan inklusif bagi anak ABK ternyata belum dipahami sebagai upaya peningkatan akses dan layanan kualitas pendidikan, namun masih dipahami sebagai upaya memasukkan ABK ke sekolah regular dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan saja.

Kedua, kebijakan di beberapa sekolah masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua difabel dalam penyediaan guru khusus. Sebagian sudah memiliki guru khusus untuk menangani anak difabel dengan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun hal tersebut cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.

Ketiga, proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Artinya, guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan kurikulum yang tepat dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Problemnya karena keterbatasan fasilitas sekolah dan minimnya pelatihan dan bimbingan langsung dari dinas terkait.

Keempat, ketersediaan guru dan kondisi guru belum didukung dengan kualitas yang memadai dan mumpuni. Pasalnya, guru kelas ABK masih dipandang kurang proaktif terhadap permasalahan, baik kondisi dan kebutuhan ABK. Maka, diperlukan adanya guru yang berkualitas dan menguasai dibidang penanganan ABK dalam mengayak pembelajaran yang semestinya.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Dalam mengimplemtasikan pendidikan inklusif ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi sebagaimana disebutkan diatas. Untuk itu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya.

Maka, langkah pemerintah harus lebih serius dalam mengatasi problem pendidikan untuk ABK, khususnya soal layanan dan akses yang benar-benar berkualitas, agar tidak terkesan mengkotak-kotakan pendidikan umum dan pendidikan khusus (difabel).

Pertama, langkah utama yang harus ditempu, menurut saya yang paling urgen adalah peningkatan kualitas guru ABK/difabel, kenapa? Pendidikan kaum difabel kuncinya adalah guru yang benar-benar mumpuni daalam bidang pembelajaran difabel. Lambatnya program pelatihan dan pembinaan khusus peningkatan kualitas guru untuk ABK menjadikan kualitas pendidikan difabel menjadi mandeg dan tak ada perkembangan.

Kedua, pemenuhan hak ABK melalui sarana dan prasarana merupakan salah satu syarat utama dalam pembelajaran di kelas, bukan hanya sarana dalam bentuk alat peraga pembelajaran, namun sarana dan prasarana di ruang kelas dan akses menuju ke sekolah yang juga harus benar-benar aman dan ramah anak.

Ketiga, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan koordinasi yang kuat dalam merencanakan penguatan akses pendidikan berkualitas untuk ABK pada sekolah inklusi. Selain itu, keterlibatan lembaga/organisasi masyarakat/LSM yang fokus terhadap isu ABK/difabel

menjadi sangat penting untuk diajak komunikasi, koordinasi dan kerjasama untuk berperan langsung dalam penanganan problem sekolah inklusi.

Terakhir, dalam mengembangkan kapasitas guru, harus dilakukan berdasarkan roadmap yang jelas, terukur, dan berkesinambungan. Evaluasi dan monitoring juga harus dilakukan secara berkala. Lalu, menindaklanjuti temuan-temuan evaluasi di lapangan. Jika tidak, maka kualitas guru difabel akan terus masih menjadi dilema yang berkepanjangan. Dan yang jelas ini akan berdampak pada kualitas anak-anak difabel dalam mengembangkan bakat dan kreativitas yang mereka miliki, sedangkan kita berharap anak-anak difabel mampu mengembangkan minat bakat dan skill untuk menunjang dunia kerja demi kelayakan hidup mereka.

**“Pendidikan kaum difabel kuncinya
adalah guru yang benar-benar
mumpuni daalam bidang
pembelajaran difabel”**

<https://indopolitika.com/revitalisasi-sekolah-inklusi/>

Perpres Dituding Rawan Pungli, Kemendikbud Ajak Satu Visi

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Jumat, 08/09/2017 16:58 WIB)



Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Penguatan Pendidikan Karakter. (CNN Indonesia/Christie Stefanie

Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Bidang Pembangunan Karakter, Arie Budhiman meminta masyarakat berpikir positif dalam rangka membangun pendidikan nasional daripada menduga-duga terjadinya pungutan liar oleh sekolah-sekolah.

Pernyataan Arie itu menanggapi pendapat dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia mengatakan, pelaksanaan Perpres No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) rawan pungutan liar. Dia berani menyatakan hal tersebut karena pada Pasal 15 menyebutkan dana dapat bersumber dari masyarakat selain APBN dan APBD.

"Ya kita harus berprasangka baik. Kalau semua berpikir pungli, pungli, pungli, ya enggak akan pernah habis," tutur Arie kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (8/9).

Arie menjelaskan, telah ada peraturan sebelumnya yang memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu. Peraturan yang Arie maksud adalah Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Oleh karenanya, dia mengaku heran apabila ada pihak yang menganggap Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang PPK rawan terjadinya praktik pungli.

“Dan di dalam Permendikbud Nomor 75 itu, sudah divalidasi oleh Tim Saber Pungli. Ketuanya Pak Wiranto. Jadi udah enggak masalah itu,” tutur Arie.

Ia menambahkan, Kemendikbud dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah bersinergi di tingkat pusat dan daerah untuk mencegah terjadinya pungli. Sanksi pun telah disediakan bagi sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Menurut Arie, pembangunan pendidikan memang perlu membutuhkan bantuan dana dari segala pihak. Termasuk juga masyarakat. Dia mengatakan, APBN dan APBD memang akan digunakan sebagai sumber dana. Akan tetapi, apa bila masyarakat turut membantu, maka proses pembangunan pendidikan akan berjalan lebih cepat dan mendapat hasil yang lebih memuaskan.

“Kita ini harus sama-sama memiliki visi yang sama bahwa pendidikan harus menjadi lebih baik,” kata Arie. “Tapi tentu saja dengan tata cara dan ketentuan yang baik pula,” katanya menambahkan.

Diketahui, Perpres No. 87 tahun 2017 tentang PPK akan dilengkapi dengan peraturan turunan, seperti peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan atau peraturan menteri agama. Saat ditanya apakah peraturan turunan itu akan mengatur sumber pendanaan, Arie tidak menjawab banyak.

Lihat juga: ‘Perpres Penguatan Pendidikan Karakter Rawan Pungli’ “Saya belum bisa berkomentar. Kalau dibutuhkan, akan dilakukan. Permendikbud No. 75 saya pikir sudah memperkuat lah,” tutur Arie.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170908163355-20-240426/perpres-dituding-rawan-pungli-kemendikbud-ajak-satu-visi?>

Lima Catatan Kritis JPPI Atas Perpres Pendidikan Karakter

Kamis 07 Sep 2017 20:30 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Andri Saubani



Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers terkait Perpres Penguatan Pendidikan Karakter di Istana Negara, Rabu (6/9). Foto: Republika/Debbie Sutrisno

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengimbau pada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memantau pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). “JPPI menghimbau pada masyarakat dan juga wali murid untuk turut serta mengontrol implementasi perpres ini,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (7/9).

Ubaid menjabarkan, JPPI menilai tidak ada terobosan gagasan tentang apa itu pendidikan karakter dan penerapannya. Ia menyebut, isi perpres tidak ada bedanya dengan konsep dan muatan kurikulum yang selama ini dipraktikkan di sekolah. Ia mencontohkan, integrasi pendidikan karakter melalui Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam struktur Kurikulum 2013 (K-13). “Semua gagasan tentang pendidikan karakter yang termaktub dalam perpres itu tidak ada yang baru,” jelasnya.

Kedua, ia menilai Perpres PPK akan melegitimasi Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Ia menjabarkan, dalam Pasal 9 mempersilahkan satuan pendidikan untuk memilih penerapan PPK dalam lima atau enam hari dalam sepekan. Namun, dalam Pasal 14, menteri yang mengatur peraturan teknisnya.

Ia menyebut, apabila mencermati Permendikbud 23 Tahun 2017, tidak ada yang bertentangan dengan Perpres PPK ihwal penerapan PPK di satuan pendidikan. Ketiga, ia menilai orientasi Perpres PPK dan Permendikbud Hari Sekolah masih sama, yakni ihwal pemenuhan beban kerja guru.

Ia menjabarkan dalam Pasal 6 menjelaskan penyelenggaraan PPK merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan formal dan guru, dan tanggung jawab itu ditunaikan sebagai pemenuhan beban kerja guru. "Ujung dari PPK adalah pemenuhan beban kerja guru, bukan atas dasar kebutuhan siswa," jelasnya.

Keempat, ia meminta Kementerian Agama segera mengeluarkan payung regulasi yang mengakomodir kebutuhan siswa dan santri, serta karakteristik pendidikan keagamaan. Ia mewanti-wanti jangan sampai ada protes pelaksanaan Perpres PPK. Sebab, banyak SD/SMP yang berdiri di lingkungan pesantren dan bersinggungan dengan waktu dan pendidikan diniyah. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 itu tidak bicara jam belajar. Sehingga, menurutnya ketentuan tentang jam belajar dari Kemendikbud bisa masih diberlakukan.

“Kemenag harus mengeluarkan Permenag untuk melindungi madrasah diniyah dari gerusan durasi jam sekolah,” Ubaid.

Kelima, ia menilai pemberlakuan PPK berdasarkan rawan terjadi pungli di sekolah. Alasannya, dalam Pasal 15 menyebut, pendanaan pelaksanaan PPK bersumber dari APBN, APBD, masyarakat dan/atau, sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. "Di sinilah letak pungli akan sangat mudah dimainkan oleh sekolah dan komite sekolah," jelasnya.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/09/07/ovwvz5-lima-catatan-kritis-jppi-atas-perpres-pendidikan-karakter>

Perpres Penguatan Pendidikan Karakter Rawan Pungli'

Lalu Rahadian, CNN Indonesia | Kamis, 07/09/2017 20:09 WIB



'Perpres Penguatan Pendidikan Karakter Rawan Pungli' Perpres Pendidikan Penguatan Karakter yang diterbitkan Joko Widodo dinilai dapat membuka peluang terjadinya pungutan liar di sekolah. (CNN Indonesia/Elise Dwi Ratnasari)

Jakarta, CNN Indonesia -- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dinilai rawan pungutan liar (pungli).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menjelaskan, dalam Pasal 15 ada keterangan yang menyebutkan selain dari APBN dan APBD, pendanaan atas pelaksanaan PPK dapat bersumber dari masyarakat. "Di sinilah letak rawan, pungli akan sangat mudah dimainkan oleh sekolah dan komite sekolah. Yang sudah jelas-jelas dilarang saja masih ada pungutan, apalagi ada lampu hijau," kata Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7).

Lihat juga: Respons Mendikbud Soal Perpres Penguatan Pendidikan Karakter Pasal 15 Perpres 87/2017 menyebutkan, Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari (a) anggaran pendapatan dan belanja negara, (b) anggaran pendapatan dan belanja daerah, (c) masyarakat, dan (d) sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Ubaid, pihak sekolah bisa dengan mudah memungut beragam iuran kepada wali murid untuk menunjang kegiatan PPK di sekolah dengan menggunakan dasar Perpres PPK ini.

Lihat juga: Perpres Pendidikan Karakter, Kemenag Akui Usul soal Keagamaan. Kata Ubaid, JPPI

mengimbau kepada masyarakat dan juga wali murid untuk turut serta mengontrol implementasi Perpres ini. Misalnya, soal potensi dugaan praktik pungli dan juga penerapan kebijakan 5 hari seminggu. "Semua itu tidak bisa diterapkan oleh pihak sekolah tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam Perpres 87/2017," katanya.

Aturan Turunan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 harus didukung dengan aturan turunan seperti penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menteri lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan tersebut.

Penerbitan Permen dibutuhkan agar implementasi Perpres dapat dilakukan efektif. Alasannya, isi Perpres disebut belum memuat definisi yang jelas ihwal penguatan pendidikan karakter bagi anak didik.

"Bagaimana pun konsep Perpres yang dituangkan tidak akan bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat bagaimana realisasinya di lapangan kecuali dengan adanya permen," kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (7/9).

Kementerian yang bertanggung jawab atas implementasi Perpres adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Penerbitan Perpres 87/2017 disebut dapat menenangkan kisruh di masyarakat ihwal penerapan waktu belajar-mengajar di sekolah. Aturan itu diterbitkan karena muncul penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170907194229-20-240222/perpres-penguatan-pendidikan-karakter-rawan-pungli?>

Akhir 2017 Disdik akan Mendata ABK yang Ada di Kabupaten Bogor

By Redaksi 27 Agu 2017, 20:12:13 WIB | dibaca: 1445



Dok.

BOGORnews.com ::: Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah pasti Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Untuk itu guna mendapatkan jumlah ABK yang akurat, Disdik Kabupaten Bogor pada akhir 2017 akan melakukan pendataan di kurang lebih 100 SD yang tersebar di 40 Kecamatan.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Ade Suryana kepada BOGORnews.com Sabtu (26/08/2017) usai menghadiri Workshop Pendidikan Inklusi yang diadakan Yayasan Difable Action di sebuah rumah makan di kawasan Jl. Pajajaran, Kota Bogor.

"Akhir 2017 nanti kami akan melakukan pendataan. Pendataan ini membutuhkan dana yang besar dan waktu yang panjang. Anggaran untuk pendataan sudah diakomodir di Anggaran Perubahan," ujarnya. Ia pun sangat berharap, dengan ada pendataan tersebut pihaknya mendapatkan data yang valid baik ABK yang berada di sekolah maupun di luar sekolah.

Untuk itu ia sangat berharap kerjasama banyak pihak, baik masyarakat maupun orangtua yang memiliki ABK agar dapat menyampaikannya pada saat pendataan dilakukan. "Kalau ABK yang ada di sekolah, mendatanya sangat mudah karena ada formatnya. Data dari sekolah lalu dikirim ke UPT. Susahnya kalau ada ABK diluar sekolah, kita susah mendatanya," tuturnya.

Persoalannya, masih adanya perasaan malu dari sebagian masyarakat terutama yang memiliki ABK.

“Ini yang sulit, masyarakat merasa jika memiliki salah satu anggota keluarganya yang ABK adalah suatu hal yang tabu dan memalukan. Kita perlu sosialisasikan agar perasaan seperti itu tidak benar,” pungkasnya. *(Dimas Ferry)

“Ini yang sulit, masyarakat merasa jika memiliki salah satu anggota keluarganya yang ABK adalah suatu hal yang tabu dan memalukan. Kita perlu sosialisasikan agar perasaan seperti itu tidak benar,”

<http://bogornews.com/berita-akhir-2017-disdik-akan-mendata-abk-yang-ada-di-kabupaten-bogor.html>

Indonesia Tertatih Penuhi Akses Pendidikan Inklusi?

Sabtu, 26 Agustus 2017



Workshop dua hari mengenai tatakelola guru dan masa depan pendidikan inklusi Indonesia dihadiri para pemangku kepentingan pendidikan Kota/Kabupaten Bogor, Jawa Barat|JPPI dok

[Share to Facebook](#) [Share to Twitter](#) [Share to Google Plus](#)

BOGOR – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menggelar workshop peningkatan tatakelola guru untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), acara yang berkerjasama dengan Yayasan Diffabel Action Indonesia (YDAI) ini digelar di Kota Bogor, (26/08/2017).

Acara yang dihadiri langsung oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Bogor dan sejumlah guru Sekolah Inklusi di Bogor ini akan fokus pada pelatihan pengelolaan dan model pembelajaran untuk siswa ABK di sekolah inklusi.

Dalam sambutannya, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, mengapresiasi kegiatan ini, Sekolah inklusi, menurut Ubaid, masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. "Pemerintah harus memastikan keberadaan sekolah inklusi ini sebagai akses yang memudahkan ABK untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ujar Ubaid.

Selain itu, pria kelahiran Gresik ini juga menjelaskan, bahwa hasil riset JPPI dalam Right To Education Index (RTEI) menyebut bahwa problem krusial pendidikan saat ini ada 3 hal. Pertama, Kualitas guru rendah. Kedua, Diskriminasi terhadap kelompok marginal. Dan yang ketiga, sekolah masih belum ramah anak.

"Pendidikan inklusi untuk ABK ini kami rasa masih belum merata. Pemerintah harus melakukan rencana strategi dan memastikan adanya anggaran untuk mendukung kaum difabel untuk pendidikan yang layak," jelas Ubaid.

Sementara itu, Kasi Kurikulum Kadisdik Kab. Bogor Ade Suryana, menjelaskan bahwa, tenaga pendidik atau harus punya kompetensi soal inklusi. "Termasuk guru pendamping juga bisa dari ortu atau guru pelajaran di sekolah" jelas Ade.

Akses pendidikan inklusi, lanjut Ade, harus menjawab kebutuhan pendidikan ABK baik sarana prasarana yang semestinya harus memadai. Selain itu, Ade juga mengapresiasi kegiatan pelatihan tersebut.

"Kegiatan ini saya apresiasi, sebagai upaya peningkatan kualitas guru inklusi, dan Pemkab bogor siap fasilitasi kebutuhan ABK melalui yayasan atau lembaga difabel di Bogor. Nanti kita akan lakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga inklusi.," tegasnya.

Senada dengan hal itu, Kasi kurikulum Diknas Kota Bogor Wasi Jatmiko, mengatakan di Kota Bogor pelayanan akses untuk peningkatan akses ABK sudah didukung oleh pemerintah kota, dan tiap sekolah harus mau menerima siswa ABK. "Tiap sekolah di Kota Bogor harus menerima dan memenuhi permintaan siswa dari ABK" terang Wasi.

Terkait anggaran inklusi, Wasi menjelaskan, Anggaran daerah untuk inklusi saat ini masih dari pusat, dan pusat seharusnya penuh anggaran d daerah.

"Kami akan sosialisasi dengan pihak stakeholder DPRD dan Eksekutif, termasuk soal anggaran. Agar mengalokasikan anggaran buat sekolah inklusi, problem utama di daerah saat ini adalah soal insentif pendidik masih belum maksimal, dan terakhir sarana prasarana," jelasnya.

Menanggapi statement dari Disdik Kab/Kota Bogor, ketua Yayasan Difabel Action Teguh Prasetyo, berharap ada pengembangan lebih lanjut, terkait perhatian dan akses kepada ABK dan inklusi.

"Saya rasa perhatian Kota dan Kabupaten sudah maksimal, pemkab sudah lakukan sosialisasi tapi kendalanya masih di anggaran yang belum maksimal dari pemerintah. Kami juga ingin gandeng dinas untuk sosialisasikan inklusi ke masyarakat, agar ada pemahaman bahwa sekolah inklusi itu bukan SLB," pungkasnya.

“Pendidikan inklusi untuk ABK ini kami rasa masih belum merata. Pemerintah harus melakukan rencana strategi dan memastikan adanya anggaran untuk mendukung kaum difabel untuk pendidikan yang layak,”

Sumber : <https://www.wartademokrasi.net/jppi-gandeng-yayasan-difabel-perkuat-akses-pendidikan-inklusi-berkualitas/>

JPPI Gandeng YDAI Perkuat Akses Pendidikan Inklusi Berkualitas

Sabtu, 26 Agustus 2017 | 13:59 WIB | Oleh

Yudi Rahmat., diterbitkan oleh Juli



Bogor, infopublik - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menggelar workshop peningkatan tata kelola guru untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), berkerja sama dengan Yayasan Difabel Action Indonesia, Kota Bogor, Sabtu (26/8).

Acara yang dihadiri langsung oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Bogor dan sejumlah guru Sekolah Inklusi di Bogor ini akan fokus pada pelatihan pengelolaan dan model pembelajaran untuk siswa ABK di sekolah inklusi.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengapresiasi kegiatan ini. Sekolah inklusi, menurut Ubaid, masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. "Pemerintah harus memastikan keberadaan sekolah inklusi ini sebagai akses yang memudahkan ABK untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ujar Ubaid.

Selain itu, pria kelahiran Gresik ini juga menjelaskan, bahwa hasil riset JPPI dalam Right To Education Index (RTEI) menyebut bahwa problem krusial pendidikan saat ini ada 3 hal. Pertama, Kualitas guru rendah. Kedua, Diskriminasi terhadap kelompok marginal, dan yang ketiga, sekolah masih belum ramah anak.

"Pendidikan inklusi untuk ABK ini kami rasa masih belum merata. Pemerintah harus melakukan rencana strategi dan memastikan adanya anggaran untuk mendukung kaum difabel untuk pendidikan yang layak," jelas Ubaid.

Sementara itu, Kasi Kurikulum Kadisdik Kab. Bogor Ade Suryana, menjelaskan bahwa, tenaga pendidik harus punya kompetensi soal inklusi. "Termasuk guru pendamping juga bisa dari ortu atau guru pelajaran di sekolah," kata Ade.

Akses pendidikan inklusi, lanjut Ade, harus menjawab kebutuhan pendidikan ABK baik sarana prasarana yang semestinya harus memadai. Selain itu, Ade juga mengapresiasi kegiatan pelatihan tersebut.

"Kegiatan ini saya apresiasi, sebagai upaya peningkatan kualitas guru inklusi, dan Pemkab bogor siap fasilitasi kebutuhan ABK melalui yayasan atau lembaga difabel di Bogor. Nanti kita akan lakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga inklusi," tegasnya.

Senada dengan hal itu, Kasi kurikulum Diknas Kota Bogor Wasi Jatmiko, mengatakan di Kota Bogor pelayanan akses untuk peningkatan akses ABK sudah didukung oleh pemerintah kota, dan tiap sekolah harus mau menerima siswa ABK. "Tiap sekolah di Kota Bogor harus menerima dan memenuhi permintaan siswa dari ABK," terang Wasi.

Terkait anggaran inklusi, Wasi menjelaskan anggaran daerah untuk inklusi saat ini masih dari pusat, dan pusat seharusnya penuh anggaran di daerah. "Kami akan sosialisasikan dengan pihak stakeholder DPRD dan Eksekutif, termasuk soal anggaran. Agar mengalokasikan anggaran buat sekolah inklusi, problem utama di daerah saat ini adalah soal insentif pendidik masih belum maksimal, dan terakhir sarana prasarana," jelasnya.

Menanggapi pernyataan dari Disdik Kab/Kota Bogor, Ketua Yayasan Difabel Action Teguh Prasetyo, berharap ada pengembangan lebih lanjut, terkait perhatian dan akses kepada ABK dan inklusi. "Saya rasa perhatian Kota dan Kabupaten sudah maksimal, Pemkab sudah lakukan sosialisasi tapi kendalanya masih di anggaran yang belum maksimal dari pemerintah. Kami juga ingin gandeng dinas untuk sosialisasikan inklusi ke masyarakat, agar ada pemahaman bahwa sekolah inklusi itu bukan SLB," pungkasnya.

134 kali <http://infopublik.id/read/219031/jppi-gandeng-yayasan-difabel-perkuat-akses-pendidikan-inklusi-berkualitas.html>

JPPI Sebut Ada Oknum Guru dan Pejabat Diknas Terlibat Timses Pilkada

11 Agustus 2017, 20:20:39 WIB | Editor: Fadhil Al Birra



Ilustrasi (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Pilkada serentak bakal dihelat lagi pada 2018 mendatang. Para guru dan pejabat dinas pendidikan daerah kembali diingatkan untuk tidak terlibat dalam tim sukses (Timses) kemenangan pemilu.

Hal tersebut dikatakan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Melalui portal pengaduan JPPI di www.laporpendidikan.com, JPPI menerima sejumlah kasus-kasus pendidikan. Mulai dari kasus pungutan liar, bullying, dan kasus politisasi guru jelang pilkada.

Koordinator Advokasi dan Investigasi JPPI, Nailul Faruq mengaku telah menerima pengaduan dari masyarakat kota Palembang terkait keterlibatan sejumlah Kepala Unit Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pengurus PGRI Palembang, dan Kepala Sekolah SMPN Palembang dalam timses kemenangan Pilkada. Mereka bahkan ikut serta dalam kegiatan peresmian Timses Palembang Pintar yang dilaksanakan oleh pihak calon incumbent.

"Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut, dan akan segera kami laporkan langsung kepada Kementerian terkait dan Pengurus Besar PGRI, bahwa ada keterlibatan pejabat Diknas dan Pengurus PGRI yang terlibat langsung dalam tim pemenangan Pilkada," jelas Nailul saat ditemui media di kantornya kawasan Tebet Jakarta Selatan, Jumat (11/8).

Nailul menjelaskan, potensi pelanggaran pilkada pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan modus pemilu pada umumnya. Pelanggaran yang sering terjadi adalah keterlibatan peran guru atau pejabat Dinas Pendidikan daerah dan organisasi guru yang semestinya berlaku independen.

"Politisasi guru memang sangat rawan terjadi. Namun, pelanggaran kasus tersebut jarang mendapat perhatian sehingga luput dari penegakan hukum pemilu. Guru memang memegang posisi pengaruh yang strategis. Dan hal tersebut membuat mereka potensial digerakkan untuk berpartisipasi dalam kampanye yang menguntungkan salah satu calon, umumnya pada calon incumbent," jelas Nailul.

Keterlibatan guru dan Dinas Pendidikan maupun organisasi guru, lanjut dia, kadang dapat berubah dari partisipan menjadi bagian dari "Tim Kampanye" secara langsung atau tidak langsung. Atau menggunakan kewenangan yang melekat padanya untuk mendukung calon tertentu.

"Politisasi guru memang bukan suatu yang baru. Misalkan, para guru yang bisa naik pangkat seperti bekerja di dinas pendidikan apabila berhasil memenangkan calon kepala daerah. Jika tidak, mereka bisa kehilangan jabatannya sendiri," tegas Nailul.

Dia menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

"Institusi pendidikan dan organisasi guru itu sebagai tempat membina manusia agar bermartabat dan bermoral, tidak direduksi sebagai instrumen transaksi politik. Masyarakat juga harus melaporkan apabila ada keterlibatan guru dalam timses pemenangan pemilu," pungkasnya. (fab/JPC)

Sumber : <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/11/08/2017/jppi-sebut-ada-oknum-guru-dan-pejabat-diknas-terlibat-timses-pilkada>

ASN Jadi Timses, Bawaslu Sumsel Jangan Cuma Diam

MINGGU, 13 AGUSTUS 2017 , 21:55:00 WIB | LAPORAN:



RMOL. Informasi tentang adanya dugaan pelibatan kepala sekolah, pejabat Diknas Pemkot Palembang dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan peresmian Timses Palembang Pintar yang dilaksanakan oleh pihak calon incumbent Wali Kota Palembang dinilai sebagian pihak sebagai bentuk pelanggaran.

Terkait itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk turun tangan dan melihat soal kebenaran kabar tersebut. Jika memang ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka menurutnya Bawaslu harus tegas.

"Bawaslu Sumsel harus segera bertindak," tegas Jimly, Minggu (13/8).

Terpisah, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengaku menyayangkan adanya dugaan pelibatan ASN dalam kegiatan timses tersebut. Sebab menurut dia hal itu melanggar UU. ASN, kata dia harusnya bersikap netral dalam ajang pesta rakyat itu. Diapun mendesak Panwaslu setempat untuk segera mengecek kebenaran informasi tersebut.

"Panwas jangan menunggu laporan. Harus proaktif mengecek di lapangan. Jika ada kendala laporkan ke tingkat provinsi atau Bawaslu di Jakarta," desaknya.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) telah mengingatkan para guru dan pejabat dinas pendidikan daerah untuk tidak terlibat dalam tim sukses (timses) pemenang pemilu. Melalui portal pengaduan JPPI di www.laporpendidikan.com, JPPI menerima sejumlah kasus-kasus pendidikan mulai dari kasus pungutan liar, bullying, dan kasus politisasi guru jelang pilkada.

Koordinator Advokasi dan Investigasi JPPI, Nailul Faruq mengungkapkan, JPPI telah menerima pengaduan dari masyarakat Kota Palembang terkait dugaan keterlibatan sejumlah Kepala Unit Dinas Pendidikan Kota Palembang, pengurus PGRI Palembang dan Kepala Sekolah SMPN Palembang dalam timses pemenang pilkada dan ikut serta dalam kegiatan peresmian Timses Palembang Pintar yang dilaksanakan oleh pihak calon incumbent. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk selanjutnya dilaporkan kepada kementerian terkait dan Pengurus Besar PGRI.

"Bahwa ada keterlibatan pejabat diknas dan pengurus PGRI yang terlibat langsung dalam tim pemenang pilkada," jelas Nailul. [ian]

Sumber : <https://nusantara.rmol.co/read/2017/08/13/302881/ASN-Jadi-Timses,-Bawaslu-Sumsel-Jangan-Cuma-Diam->

Pertemuan Satgas Saber Pungli Dan JPPI Bahas Penguatan Agenda Pencegahan

indopolitika.com 23 Agustus 2017



Ilustrasi media

Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendatangi Satgas Saber Pungli Pusat di Kantor Kemenko Polhukam RI, di Jalan Medan Merdeka Barat, No. 15 Jakarta Pusat. Kedatangan JPPI, selain melaporkan kasus pungli, JPPI juga meminta kerjasamanya Tim Satgas Saber Pungli untuk bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Pungli di bidang pendidikan.

Kedatangan JPPI Selasa (22/08/2017), disambut langsung oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol M. Ghufron, dalam sambutannya M. Ghufron mengatakan, memang masih banyak pelaku pungutan liar di bidang pendidikan. "Kita saat ini, bukan hanya fokus pada pemberantasan pungli, tapi yang paling penting lagi adalah upaya pencegahan," ujar Ghufron.

Selain itu, Ghufron juga menekankan kepada JPPI untuk melakukan sosialisasi kepada publik untuk pencegahan praktik pungli khususnya di bidang pendidikan, "JPPI kan fokus di pemantau pendidikan, mari kita lakukan upaya pencegahan di masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye anti pungli. Ini sangat penting, karena jika kita hanya melakukan pemberantasan saja tidak cukup, harus ada langkah pencegahan," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq, menyampaikan JPPI telah menerima banyak aduan masyarakat terjadi pungutan di sekolah, seperti beberapa waktu lalu pungutan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) tahun 2017 dan adanya tidak transparansi oleh pihak sekolah soal pembiayaan.

“Kami menilai, salah satu faktor karena adanya Permendikbud nomor 75/2016, aturan tersebut hanya menggeser perilaku pungutan yang biasanya dilakukan Komite Sekolah menjadi oleh pihak sekolah, terutama untuk jenjang SMA/SMK. Permendikbud 75 ini juga bisa melemahkan komite dan lampu hijau pungli semakin terang,” ujar Nailul.

Jika pihak sekolah, lanjut Nailul, mengambil alih peran komite sekolah menarik pungutan? Menurut kami pungutan akan semakin merajalela dan tidak terkendali terutama pada daerah yang melegalkan adanya pungutan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kontrol atas pada sekolah yang menarik pungutan.

“Kami meminta Kemdikbud untuk melakukan revisi Permendikbud 75 tersebut, dan merevitalisasi peran komite sekolah agar difokuskan pada penguatan kewenangan Komite Sekolah dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan kinerja serta anggaran sekolah,” pinta Nailul.

Menanggapi soal agenda pencegahan, Nailul menambahkan, pihak JPPI akan segera merumuskan rencana strategi untuk melakukan sosialisasi pencegahan praktek pungli di daerah-daerah, “Memang benar, tindakan pencegahan itu penting. Bagaimana masyarakat menjadi agen pengawas dan kontrol langsung terhadap pemerintah. Idealnya, jika keterlibatan publik itu sudah kuat dalam pencegahan, maka para pejabat akan berfikir ulang untuk melakukan tindakan pungli,” tutupnya. – (Fied)

<https://indopolitika.com/pertemuan-satgas-saber-pungli-dan-jppi-bahas-penguatan-agenda-pencegahan/>

JPPI Dampingi Warga Soal Dugaan Pungli di MTSn 1 Tangsel

By kabartangsel.com on Selasa, 18 Juli 2017



Koordinator Advokasi Investigasi JPPI Nailul Faruq/ist.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendampingi seorang warga untuk melakukan klarifikasi soal dugaan pungutan liar (Pungli) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSn) 1 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (17/7/2017).

Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq menerangkan, bahwa sekolah harus mempermudah akses warga miskin untuk memperoleh pendidikan, bila perlu tanpa pungutan.

"Kedatangan kami memang ingin melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Karena setau saya registrasi keuangan itu tidak dibenarkan, itu sebabnya kami datang ke MTSN Pamulang untuk mempertanyakan itu, jangan sampai ada pungli di sekolah-sekolah, dan memastikan akses warga miskin mudah masuk sekolah, jangan sampai warga miskin mengeluh. Pelapor ini belum mendapat KIP, jadi jangan sampai terbebani oleh biaya dalam pendidikan," ujar Nailul dalam keterangannya kepada kabartangsel.com.

Nailul mengatakan, selama proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017, JPPI menerima sejumlah aduan atau temuan berbagai macam persoalan terkait PPDB melalui portal www.laporpendidikan.com, selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017.

"Kami meminta untuk komite sekolah lebih transparans terhadap pihak sekolah, kasus di MTSN ini saya rasa tidak transparan. Ketika kami minta data rincian, pihak sekolah malah tak tahu menahu karena itu ada di komite," jelasnya.

Nailul juga menambahkan, jangan sampai ada warga atau wali murid bertanya ke pihak sekolah dilempar ke komite.

“Ini sekolah bukan milik komite, pihak sekolah atau penyelenggara PPBD juga harus tau soal rincian pembiayaan pendidikan,” pungkas Nailul.

Sementara itu, Slamet Santoso (33) warga Kelurahan Bambu Apus yang meminta JPPI untuk mendampingi menyambangi MTSn 1 Kota Tangsel mengaku bahwa ada dana sebesar Rp. 3.165.000 yang dibebankan kepada kerabatnya yang tidak mampu sebagai salah satu persyaratan untuk biaya daftar ulang.

“Saya datang didampingi langsung oleh Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq, untuk mempertanyakan sejumlah pungutan yang dibebankan kepada kerabat saya. Karena mereka keluarga kurang mampu, jadi baru bisa bayar Rp. 800.000 ribu saja, ” kata Slamet Santoso. (pr/fid)

<https://kabartangsel.com/jppi-dampingi-warga-soal-dugaan-pungli-di-mtsn-1-tangsel/>

Kamis 06 Juli 2017, 19:28 WIB

JPPI: Penolakan Siswa Miskin dan Pungli masih Ada di PPDB 2017

Jabbar Ramdhani - detikNews



Pendaftaran Murid Baru SMA di Jakarta (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) membuka posko pengaduan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Hasilnya, ada sebesar 41 persen masyarakat yang melaporkan bermasalah dengan sistem zonasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Laporan soal sistem zonasi ini menjadi yang terbesar karena banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Oleh sebab itu, banyak yang ditolak di sekolah negeri atau favorit karena sistem ini. "Kebijakan soal zonasi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga mereka terkena dampak secara langsung. Ada beragam alasan bagi mereka yang terkena sistem ini," jelas JPPI lewat keterangan tertulis yang diterima, Kamis (6/7/2017).

Di antara alasan yang disampaikan di antaranya ialah nama anak belum masuk kartu keluarga (KK), tinggal di kecamatan atau kabupaten sebelah mengikuti orang tua kerja, ikut keluarga merantau, dan pisah dengan orang tua dan tinggal bersama sanak saudara.

Selain itu, ada juga alasan tidak mau pilih sekolah sesuai zonasi karena minimnya infrastruktur dan ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Kasus ini masuk ke JPPI dari daerah Nunukan, Bali, Aceh, dan Kota Tangerang.

Atas laporan ini, JPPI merekomendasikan peninjauan ulang kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Selain itu, sosialisasi sistem mesti disampaikan dari jauh-jauh hari.

“Sistem zonasi perlu ditinjau ulang sebab banyak memakan korban, hanya gara-gara ketidaklengkapan administratif. Perlu ada sosialisasi jauh-jauh hari supaya calon peserta didik menyiapkan segala keperluan administratif. Juga, sistem ini dinilai menimbulkan masalah karena kualitas sekolah dan SDM-nya belum merata,” katanya.

Diagram laporan masyarakat ke Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017



infografik :JPPI

Laporan terbanyak kedua ialah soal adanya sekolah swasta atau negeri yang menolak siswa miskin. Banyak sekolah yang menolak siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) banyak yang ditolak dengan alasan kuota sudah penuh.

“Ini harusnya tidak boleh terjadi, karena batas kuota di Permendikbud No.17/2017 adalah minimal 20 persen. Jadi, bisa lebih banyak dari 20 persen. Harusnya bisa ditambah. Karena mereka adalah kelompok rentan putus sekolah,” tulisnya.

Kasus ini terjadi di Bandung, Surabaya, Kabupaten Tangerang, dan Ambon. Bahkan, di daerah Kulonprogo tidak menerapkan kuota untuk orang miskin sama sekali. Namun, kuota 20 persen siswa miskin memiliki problem lain. Dalam PPDB 2017 ini masyarakat melaporkan adanya pemalsuan data siswa miskin.

Banyak kalangan yang memanfaatkan hal ini dengan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Di temukan SKTM abal-abal yang tidak sesuai dengan fakta seperti punya mobil tapi mempunyai SKTM. Laporan atas kasus ini banyak terjadi di propinsi Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur.

Persoalan pungutan liar (pungli) saat mendaftar juga masih terjadi. Laporan ini banyak terjadi di sekolah swasta yang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Ada sekolah swasta yang meminta biaya formulir pendaftaran Rp 150 ribu dan dana sumbangan pendidikan (DSP) mencapai Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Harusnya, untuk sekolah swasta yang tidak mendapatkan BOS, boleh saja memungut biaya. Tapi, untuk sekolah swasta yang mendapatkan BOS, maka dilarang memungut biaya saat PPDB.

JPPI meminta pihak Kemendikbud menindak tegas oknum yang melakukan pungli dan jual beli bangku di sekolah. Sebab rata-rata semua sekolah swasta di daerah menerima dana BOS, hanya sedikit yang tidak terima dana BOS.

"Jadi, masuk sekolah negeri tanpa biaya, juga daftar di sekolah swasta juga tanpa biaya," tegasnya. Persoalan lain yang dilaporkan oleh masyarakat di antaranya ialah adanya laporan siswa titipan pejabat, tidak ada transparansi saat pengumuman kelulusan karena sistem online yang hang, dan daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, harus daftar ke swasta tapi berbayar. (jbr/dhn)

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3550861/jppi-penolakan-siswa-miskin-dan-pungli-masih-ada-di-ppdb-2017>

Orangtua Palsukan Surat Tidak Mampu agar Anaknya Masuk Sekolah Negeri



Ilustrasi penerimaan siswa baru. (Foto: Antara)

Maria Fatima Bona / FMB Rabu, 5 Juli 2017 | 21:42 WIB

Jakarta - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 berbeda dengan sebelumnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 17/2017 tentang PPDB. Salah satunya, sekolah wajib menerima siswa miskin yang berada di zonasi dengan kuota 20 persen.

Kuota siswa miskin tersebut menjadi polemik. Pasalnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menemukan adanya pihak orangtua yang diduga memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Koordinator JPPI, Abdullah Abaid mengatakan, pemalsuan ini merugikan kesempatan siswa benar-benar miskin untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri karena haknya dirampas.

"Ditemukan orangtua murid yang membuat SKTM dari kelurahan untuk kepentingan masuk sekolah sebenarnya bukan berasal dari keluarga miskin. Sekolah harus melakukan verifikasi dengan data siswa miskin dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat(KIS)," kata Abdullah kepada Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik), di Jakarta, Rabu(5/7).

Meksi ada temuan, Abdullah enggan untuk menunjukkan bukti. Ia mengaku, pihaknya masih mengumpulkan data -data sehingga belum dapat memberikan informasi secara rinci tentang masalah tersebut.

Kepada pemerintah, Abdullah meminta, harus memberikan sanksi tegas. Dalam hal ini, jika siswa terbukti memalsukan SKTM, siswa harus dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan ke sekolah yang sesuai. Maka, sangat penting peran serta dari Inspektorat Jenderal dan pengawas sekolah untuk menegakan peraturan.

Menurutnya, adanya surat sakti tersebut, menguntungkan sejumlah pihak. Yakni siswa dapat masuk sekolah tujuan dan sekolah dapat menjadikan lahan pungutan liar (pungli).

Secara terpisah, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lestyarti mengatakan, banyaknya siswa menggunakan SKTM untuk dapat masuk sekolah incaran membuat sekolah kewalahan. Sehingga sekolah menerima siswa hanya berpatok pada 20 persen kuota siswa miskin dari pemerintah.

Menurut Retno, sekolah tidak dapat disalahkan jika menolak siswa pemegang SKTM. Peralnya, sekolah memenuhi Permendikbud PPDB, dengan menerima 20 persen siswa miskin. Maka, seharusnya yang disalahkan pemerintah yang membuat kebijakan, karena tidak ada solusi. Peralnya, pendidikan jenjang SMA/MA dan sederajat belum 100 persen dibiayai oleh APBN, seperti pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP.

"Kenapa dalam peraturan menyebutkan 20 persen kuota untuk siswa miskin. Ini yang menjadi pemicu orangtua membuat SKTM. Biaya sekolah kan mahal. Jika, banyak orangtua memanfaatkan kebijakan wajib menerima siswa miskin. Ini akan membahayakan sekolah. Kalau tidak ada biaya, siapa yang nanggung? Emang gampang cari uang membiayai keperluan sekolah. Pemerintah harus evaluasi peraturan ini,"kata Retno kepada Suara Pembaruan, Rabu (5/7).

Dijelaskan dia, sekolah negeri menolak siswa miskin, bukan tidak memberikan kesempatan pada siswa miskin. Tetapi, sekolah mempertimbangkan biaya pendidikan jangka panjang. Retno menambahkan, dalam menyelesaikan masalah di lapangan. Negara harus hadir, jangan hanya sekedar mengeluarkan regulasi. Peralnya, kebijakan 20 persen ini membatasi anak bangsa. Serta merugikan siswa yang benar- benar miskin karena maraknya SKTM.

Untuk itu, Retno mengharapkan pemerintah memberi solusi. Apalagi anggaran APBD setiap daerah berbeda, tidak dapat disamaratakan dengan DKI Jakarta yang mampu mengalokasikan anggaran pendidikan diatas 20 persen sehingga SD-SMA gratis. Sedangkan, daerah lain belum dapat menerapkan sekolah gratis. Sehingga, kebijakan zona dengan mewajibkan sekolah menerima siswa miskin dimanfaatkan oleh orangtua siswa.

Mantan kepala sekolah SMAN 3 Jakarta ini menuturkan, berdasarkan pengaduan yang diterima FSGI, kecurangan PPDB selalu terjadi tiap tahun. Dalam hal ini, terjadi pada daerah yang belum memperlakukan PPDB Online. Sehingga sekolah masih bisa menjual kursi, karena tidak transparan. Orang tua dan siswa tidak dapat memantau langsung.

Menurutnya, diberlakukan PPDB Online membentuk transparansi. Orangtua dan siswa dapat mengakses langsung karena berpatok pada nilai. Namun, untuk tahun ini, FSGI tidak membuka posko aduan. Sebab, hasil analisis aduan tersebut tidak berpengaruh pada kebijakan. Peralnya, kelapa dinas pendidikan (Kadisdik) tidak menindaklanjuti temuan tersebut.

"Sekolah negeri jual kursi sering terjadi dan cukup banyak. Karena belum menggunakan menggunakan PPDB online. Tapi kan dilaporkan dinas pendidikan tidak bisa buat apa- apa,"kata Retno.

Ia juga mengatakan, kecurangan tidak terjadi di DKI karena menerapkan sistem online. Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah membenahi dan mengevaluasi sebelum mengeluarkan regulasi agar tidak memunculkan masalah baru.

Sementara untuk kebijakan zonasi, Retno mengaku, FSGI mendukung. Sistem zonasi akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di suatu sekolah. Peserta didik yang unggul akan tersebar merata ke berbagai sekolah sehingga siswa unggul tidak berkumpul di sekolah tertentu sehingga tidak melahirkan sekolah favorit menurut masyarakat.

Selain itu, sistem zonasi menguntungkan semua pihak. Seperti; siswa akan mendaftar di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya, sehingga waktu tempuh lebih singkat dan dapat berjalan kaki atau naik sepeda. Siswa tidak kelelahan, berangkat tidak terburu-buru dan teman sekolahnya juga tetangganya.

Retno juga menyebutkan, bagi kota besar, zonasi akan berdampak mengurangi kemacetan karena sekolah dengan rumah dekat. Selain itu, dapat mengurangi potensi tawuran pelajar, karena umumnya tawuran pelajar terjadi karena gesekan sepele saat siswa dalam perjalanan ke dan dari sekolah.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajdir Effendy mengatakan, meski ada Permendikbud Nomor 17/2018 ini. Pemerintah masih memberi kebebasan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menerapkan aturan sendiri dalam menggelar seleksi PPDB 2017.

Untuk jenjang SMA/SMK sederajat mengacu kepada peraturan gubernur, sedangkan pada jenjang SMP/SD sederajat pada peraturan walikota/bupati. Meski demikian, ia tetap berharap pemda menerapkan Permendikbud PPDB terutama tentang sistem zonasi. Sistem tersebut, mengharapkan sekolah untuk tidak menolak siswa miskin yang berada di zona sekolah.

Sumber: Suara Pembaruan

<http://www.beritasatu.com/nasional/439998-orangtua-palsukan-surat-tidak-mampu-agar-anaknya-masuk-sekolah-negeri.html>

Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Mendikbud

Andika 3 Agustus 2017 9:57 PM



Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

VIEWS: 1.564

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perlu dievaluasi. Mengingat banyaknya problem pendidikan yang tak kunjung tuntas dan kebijakan menteri yang cenderung kontroversi membuat banyak kalangan menginginkan Mendikbud untuk mundur dari jabatannya.

Dari hasil riset JPPI melalui Right To Education Indeks (RTEI) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa, ada tiga problem pendidikan yang krusial, pertama, diskriminasi kelompok marginal, kedua sekolah belum ramah anak dan ketiga kualitas guru rendah.

Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq mengatakan, terkait dengan isu resufle jilid 3 kabinet Jokowi-JK, JPPI minta presiden untuk melakukan evaluasi mendikbud dan benar-benar membereskan problem pendidikan yang kian numpuk.

“Hasil kajian JPPI, setidaknya banyak masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dalam mewujudkan nawacita bidang pendidikan,” kata Nailul Faruq, pada Jum’at (28/7).

Baca juga Dampingi Warga ke MTSN 1 Tangsel, JPPI Temukan Kejanggalan Baru dikatakan Nailul Faruq, ada sekira delapan point inti yang seharusnya diselesaikan dengan pemerintah. Pertama terkait nasib program wajib belajar (wajib) 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Sebab, tidak-adanya payung hukum. Perbincangan soal realisasi wajar 12 tahun ini mengemuka sejak awal pemerintahan Jokowi hingga tahun 2015.

Kedua, Program Full Day School (FDS) dengan Permendikbud 23 harus dikaji ulang atau bila perlu di cabut, agar tidak menjadi polemik di masyarakat secara luas dan terkesan menyampingkan pendidikan madrasah (Madrasah Diniyah).

Ketiga, Problem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 beberapa waktu masih menuai banyak persoalan, sesuai dengan pantauan JPPI problem yang krusial adalah problem soal zonasi dan pungutan liar.

Keempat, kualitas guru harus ditingkatkan. Jangan hanya gajinya saja yang naik, kualitasnya juga harus meningkat. Untuk itu, pemerintah harus lebih serius dalam mengembangkan kapasitas.

Kelima, untuk menciptakan rasa aman dan ramah anak di sekolah, pemerintah dan juga pihak sekolah harus memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak manapun apabila melakukan kekerasan di lingkungan sekolah.

Keenam, perlunya kebijakan afirmasi untuk kelompok marginal. Diskriminasi pendidikan bagi kelompok marginal harusnya tidak terjadi. Khususnya bagi kalangan miskin, difabel dan para pengungsi. Mereka juga punya hak atas pendidikan. Ketujuh, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat waktu. Bersekolah bagi kaum marginal masih jadi impian. Kedelapan, adanya ketidak-sesuaian (mismatch) antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini ada lebih dari 7 juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan.

"Semuanya itu merupakan catatan untuk mendibud Muhadjir Effendy. Kami pun, dari pihak JPPI meminta Presiden untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Mendikbud," pungkasnya. (fn)

Sumber : <http://www.suaradewan.com/presiden-jokowi-diminta-evaluasi-kinerja-mendikbud-muhadjir-effendy/>

Gagap Alih Kelola Korbankan Mutu

Di Bawah Provinsi, Sejumlah Siswa SMA/SMK Terbebani Biaya

21 Juli 2017



KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Para murid baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta, Kamis (20/7). Beberapa sekolah mengisi awal tahun ajaran dengan aneka kegiatan edukatif guna memacu semangat belajar murid baru.

JAKARTA, KOMPAS — Kegagalan dalam alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi sebetulnya tak perlu terjadi jika semua lini pemerintahan berkomitmen memajukan pendidikan. Tarik ulur kewenangan berisiko mengorbankan proses dan mutu pendidikan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji di Jakarta, Kamis (20/7), mengatakan, alih kelola SMA/SMK harus menjamin wajib belajar 12 tahun terwujud. Pemerintah provinsi perlu segera membuat peraturan daerah untuk menunjukkan komitmen dan berkoordinasi serta bersinergi dengan pemerintah kota/kabupaten.

“Dari kajian kami, dana pendidikan murni di APBD provinsi umumnya sekitar 10 persen. Baru DKI Jakarta yang lebih dari 20 persen. Selain itu, belum ada nomenklatur wajib belajar 12 tahun. Jadi, alih kelola ini jangan sampai merugikan masyarakat yang sudah merasakan pendidikan gratis hingga 12 tahun,” kata Ubaid.

Meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendukung alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi, masyarakat dan Pemkot Surabaya terus berupaya mengembalikan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemprov Jawa Timur ke Pemkot Surabaya. Sejak

pengelolaan beralih ke provinsi pada 1 Januari 2017, banyak siswa kesulitan membayar sekolah. Kasus seperti itu tidak ditemukan saat pengelolaan SMA/SMK berada di tangan Pemkot Surabaya.

Siswa terbebani biaya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, Pemkot Surabaya melayangkan surat kepada presiden pada Rabu (19/7) tentang permohonan pembebasan biaya pendidikan. Sebab, setelah alih kelola SMA/SMK ke tangan provinsi, siswa harus membayar biaya sumbangan pembinaan pendidikan. Sebelumnya, hal itu tidak perlu dilakukan karena Pemkot Surabaya menanggungnya melalui APBD.

Saat ini, siswa SMA di Surabaya membayar SPP Rp 150.000 per bulan. Adapun siswa SMK membayar Rp 225.000 per bulan. Akibatnya, banyak siswa terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya tersebut. Setidaknya ada 55 permohonan siswa yang meminta pembebasan biaya sekolah.

Radian Jadid, salah satu pemohon uji materi Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari Surabaya, mengatakan, orangtua siswa SMA/SMK di Surabaya sangat berharap MK menerima gugatan yang diajukannya. Sebab, mereka ada yang kesulitan membayar biaya pendidikan karena tidak semua siswa terlindungi dengan beasiswa dari Pemprov Jatim.

Terkait putusan MK yang menolak gugatannya, Rabu lalu, Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar menyatakan pasrah. Namun, ia juga menyayangkan karena dengan pengambilalihan kewenangan oleh provinsi, banyak siswa yang resah. Mereka harus membayar biaya sekolah.

"Saat ini dalam penerimaan murid baru banyak orangtua atau siswa yang komplain karena mereka tidak diterima di sekolah tertentu. Harusnya sekolah gratis untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat," tutur Samanhudi.

Pemkot Blitar menerapkan sekolah gratis sejak tujuh tahun lalu. Namun, dengan munculnya UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, jenjang sekolah yang bebas biaya terpangkas. Kini hanya dari TK-SMP saja yang gratis. "Semua gratis, tas, sepatu, dan lainnya dibelikan oleh pemerintah daerah," ucapnya.

Saat ini Kota Blitar mengalokasikan 38 persen dari total APBD untuk pendidikan. Angka ini turun dari sebelumnya yang mencapai 46 persen (sebelum alih kelola SMA/SMK). APBD Kota Blitar saat ini sekitar Rp 800 miliar. (ELN/ETA/SYA/WER)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/07/21/gagap-alih-kelola-korbankan-mutu/>

KEKACAUAN PPDB

Lain Daerah, Sama-sama Bermasalah karena Zonasi

12 Juli 2017



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Orangtua siswa antri untuk memperoleh berkas daftar ulang siswa baru di SMA Negeri 1 Tangerang, Jalan Daan Mogot, Sukarasa, Tangerang, Banten, Senin (10/7). Di jenjang SMP, sejumlah masalah terjadi terkait sistem daring dan kebijakan zonasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk sekolah negeri dari tahun ke tahun diwarnai masalah. Tahun ini, masalah bertambah seiring regulasi baru terkait sistem zonasi. Semakin dekat tempat tinggal dengan sekolah, siswa kian berpeluang diterima.

Regulasi diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di sana diatur, seleksi siswa baru mempertimbangkan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasar ketentuan jarak tempat tinggal ke sekolah, usia, nilai hasil ujian SD, dan prestasi.

Di Tangerang Selatan, permen itu diturunkan jadi Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 15 Tahun 2017 tentang PPDB yang mengatur lebih detail perihal pelaksanaan PPDB. Perbedaan dengan PPDB sebelumnya, nilai bukan penentu satu-satunya. Yang paling menentukan adalah jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.

Bahkan, disebutkan, jarak tempat tinggal kurang dari 200 meter dari sekolah, berapa pun nilai siswa pasti diterima. Lalu, penambahan poin diberikan untuk jarak 200 meter hingga 2 kilometer dan seterusnya hingga maksimal 10 kilometer.

Dalam pelaksanaan, masalah muncul. Lia (41), warga Griya Asri Pamulang, mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 20 di Pamulang. Jarak rumah dengan sekolah 300 meter. Seharusnya, ia dapat poin untuk zona 40 yang kemudian akan ditambahkan dengan poin-poin lain.

Namun, Lia menyebut, anaknya hanya mendapat poin 10. Selisih 30 poin itu, katanya, sangat besar dan seharusnya anaknya bisa memperoleh poin sebagaimana mestinya sehingga bersaing adil. "Saya harus berjuang ke sana kemari setelah sebelumnya juga mengalami gangguan pada sistem online (daring). Benar-benar menghabiskan waktu dan tenaga, harus bolak-balik ke dinas pendidikan memprotes kesalahan pemberian poin itu juga ke dinas kependudukan dan catatan sipil mengecek nomor induk kependudukan yang ternyata tidak ada masalah," ujarnya.

Lia mengatakan, tak masalah jika setelah semua poin dijumlah benar dan anaknya memang tergeser karena ada anak-anak lain yang nilainya lebih tinggi. Masalahnya, anaknya ternyata tak mendapat poin semestinya.

Sistem daring

Sebelumnya, banyak orangtua siswa juga terkendala mendaftarkan anaknya, terutama karena gangguan sistem daring. PPDB dibuka Selasa (4/7), tetapi pendaftaran daring baru bisa Kamis (6/7). Banyak pendaftaran akhirnya manual. Namun, masalah lain muncul. Banyak data masuk tidak sesuai, dari jenis kelamin calon siswa, alamat yang berpengaruh pada poin zona, hingga pilihan sekolah kedua dan ketiga yang lenyap. Orangtua kian waswas anaknya tak diterima karena faktor kesalahan-kesalahan itu. Dinas pendidikan kebanjiran komplain dari orangtua.

Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Kota Tangsel Taryono mengakui, dengan aturan baru zonasi, banyak pihak kesulitan, apalagi dengan waktu sangat terbatas harus menyiapkan dan menyosialisasikannya.

"Ketentuan zonasi ini kontraproduktif meningkatkan kualitas pendidikan karena faktor nilai bukan lagi penentu utama. Di sisi lain, mendorong semua sekolah jadi sekolah favorit, tak sedikit seperti dulu," katanya.

Taryono mengakui, banyak kendala dalam PPDB. Beberapa hal perlu dievaluasi, dari regulasi, infrastruktur pendukung, hingga kesiapan SDM. Ketiga hal itu harus diperbaiki.

Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nailul Faruq menyebut, dari pengaduan yang masuk lewat www.laporpendidikan.com, 41 persen masalah zonasi. Kedua dan ketiga adalah penolakan siswa miskin (19 persen) dan pungli saat pendaftaran (13 persen). Persoalan lain adalah surat keterangan tidak mampu abal-abal, transparansi kelulusan, dan siswa titipan pejabat.

Di Kabupaten Tangerang, Bupati Ahmed Zaki Iskandar juga mempersoalkan PPDB. Ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meninjau kembali Permen No 17/2017 karena menimbulkan polemik dan masalah. Itu karena tak sesuai perda dan kondisi lapangan.

"Kami sudah kirim surat ke Kemendikbud sejak Jumat. Kami meminta peraturan kembali seperti dulu," kata Zaki. Sistem zonasi juga disorot.

Jumlah SMP negeri di Kabupaten Tangerang 70 sekolah. Lulusan SD 50.000 siswa dan daya tampung hanya 30.000 siswa. Zaki berharap Kemendikbud segera mengambil langkah cepat agar tidak terus terjadi kekisruhan di masyarakat. (UTI/PIN)

Sumber : <https://kompas.id/baca/metro/2017/07/12/lain-daerah-sama-sama-bermasalah-karena-zonasi/>

Kamis 6/7/2017 | 06:30

Penerimaan Siswa

Diduga Ada Penyalahgunaan Surat Keterangan Miskin



Foto : istimewa

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan adanya dugaan pihak orang tua yang memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. JPPI meminta pemerintah menelusuri serta menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab jika benar, dapat merugikan kalangan anak miskin mengingat kuotanya diisi oleh siswa yang tidak layak.

Koordinator JPPI, Abdullah Ubaid, mengatakan sejumlah orang tua diduga sengaja meminta SKTM kepada pihak kelurahan untuk kepentingan mendaftar sekolah. Padahal, para peminta SKTM itu sebagian tidak masuk kategori miskin. Ubaid mengatakan SKTM memang rawan disalahgunakan dan memiliki tingkat akurasi yang rendah untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan PPDB.

“Karena itu, kami minta kepada panitia PPDB agar melakukan verifikasi ulang di lapangan terkait data siswa miskin yang membawa SKTM dengan data siswa miskin yang ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ungkap Ubaid dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (5/7).

Ia mengaku saat ini pihaknya masih mengumpulkan data-data sebagai bukti dugaan

peruntukkan SKTM yang tidak tepat itu. Namun, hal ini dapat dijadikan bahan bagi sekolah untuk mengantisipasi masuknya siswa yang mengaku miskin. "Sanksi tegas juga harus diberikan jika terbukti memalsukan SKTM siswa harus dikeluarkan dan dikembalikan pada sekolah yang sesuai," tegasnya.

Pihak inspektorat dan pengawas sekolah juga harus proaktif menindaklanjuti laporan masyarakat terkait SKTM ini, dan tidak sekadar menunggu. "Jika terbukti langsung dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," jelasnya. Pelanggaran bermotif pura-pura miskin ini berpotensi menguntungkan sejumlah pihak yakni dari siswanya sendiri, dia dapat masuk ke sekolah.

Sedangkan dari pihak sekolah, dapat dimanfaatkan untuk melakukan pungutan liar atau pungli sebagai syarat masuk. "Jadi, SKTM bisa dimainkan, harusnya anak ini tidak dapat masuk, namun diberikan kesempatan oleh sekolah menggunakan kuota kursi siswa miskin supaya dapat masuk, namun harus membayar sejumlah rupiah ke sekolah," tegasnya.

Hapuskan Kuota Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan seharusnya pemerintah tidak perlu membuat patokan kuota 20 persen untuk siswa kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) atau miskin. Jika membuat batasan, sekolah tidak bisa disalahkan jika menolak siswa dalam kondisi kuota 20 persen sudah terpenuhi.

Sistem kuota ini, menurut Retno, membahayakan kelangsungan sekolah. Sebab sekolah akan sulit membiayai proses pembelajaran jika terlalu banyak siswa RMP.

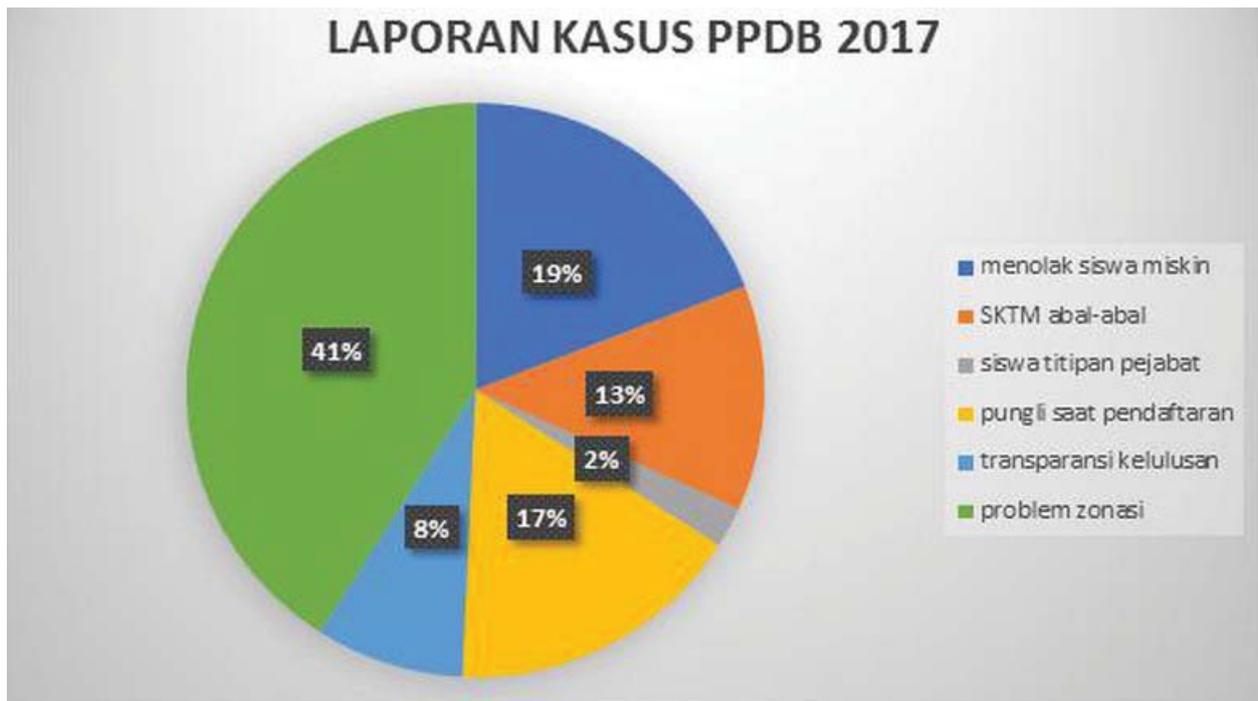
"Harus ada win-win solution untuk persoalan ini," tegasnya. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud, Wowon Widaryat, menegaskan ada dua prinsip yang tidak bisa ditolak dalam proses PPDB, yakni sekolah harus menerima siswa yang terdekat dalam sistem zonasi dan tidak boleh menolak usia anak didik yang sudah termasuk dalam usia memasuki sekolah tersebut. "Kalau itu ditolak maka itu melanggar Permedikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB," tandasnya. cit/E-3

Sumber : <http://www.koran-jakarta.com/diduga-ada-penyalahgunaan-surat-keterangan-miskin/>

Senin 10 Juli 2017, 16:34 WIB

Polemik PPDB, Sultan HB X: Jangan Mengajari Anak Memanipulasi

Usman Hadi - detikNews



Ilustrasi (Foto: Dok. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia/JPPi)

Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, ikut mengomentari dugaan manipulasi data dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi jarak di Kabupaten Bantul.

"Aja oleh (jangan boleh memanipulasi) kalau memang sudah dasarnya zonasi. Saya berharap orangtua jangan memanipulasi," tegas Sultan, Senin (10/7/2017). Menurut sultan, praktek manipulasi data jarak tersebut akan menjadi preseden buruk dan bisa mengajari anak-anak untuk berbuat curang.

"Jangan mendidik anaknya menjadi tidak baik. Jangan ngajari anake (mengajari anaknya) memanipulasi," lanjutnya. Walaupun surat keterangan jarak dibuat pemerintah desa setempat, namun tidak menutup kemungkinan manipulasi jarak tersebut atas kehendak wali murid. "Dasarnya kan yang nulis mungkin orang tua murid," kata sultan.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, memaparkan PPDB SMP di Bantul memang menjadi polemik. Terdapat dugaan sejumlah siswa dari 15 SMP di wilayah tersebut memanipulasi data jarak. Kasus ini sekarang sedang ditangani oleh ORI Perwakilan DIY.

"Informasi yang kami dapat sekarang sudah menjadi 15 SMP," ujar Budhi.

Meski data jarak antara sekolah dengan rumah dibuktikan lewat surat keterangan desa, menurut Budhi, jika tidak disertai dengan verifikasi ketat maka datanya rawan dimanipulasi.

"Memang alat untuk membuktikan lewat SK lurah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada praktek kolusi, nepotisme. Bisa juga ada motif lain, suap misalnya, tapi kami belum menemukan motif ini," pungkasnya.(mbr/mbr)

Sumber : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3554595/polemik-ppdb-sultan-hb-x-jangan-mengajari-anak-memanipulasi>

PPDB 2017, Masih Ada Siswa Miskin yang Ditolak Sekolah

Rahman Indra, CNN Indonesia | Sabtu, 08/07/2017 09:50 WIB



Sekolah swasta atau negeri yang menolak siswa miskin masih jadi persoalan dan aduan publik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. (Foto: CNN Indonesia/ Hesti Rika)

Jakarta, CNN Indonesia -- Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2017 masih diwarnai oleh sejumlah persoalan. Salah satunya yang memprihatinkan adalah masih adanya sekolah negeri atau swasta yang menolak siswa miskin.

Kalangan siswa yang tergolong Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) tersebut banyak yang ditolak dengan alasan kuota sudah penuh. Ini harusnya tidak boleh terjadi, karena batas kuota di Permendikbud No.17 tahun 2017 adalah minimal 20 persen. Jadi, bisa lebih banyak dari 20 persen. Harusnya kuota tersebut bisa ditambah, karena mereka adalah kelompok rentan putus sekolah.

Kasus ini terjadi di Bandung, Surabaya, Kab. Tangerang, dan Ambon. Bahkan, di daerah Kulonprogo tidak menerapkan kuota untuk orang miskin sama sekali.

Ungkapan itu disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji lewat pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, pada Jumat (7/7). Penolakan siswa miskin itu hanya satu dari tujuh laporan atau temuan kasus PPDB 2017. Ada 19 persen aduan mengenai penolakan ini.

Diungkap Ubaid, selama PPDB berlangsung, JPPI membuka posko pengaduan masyarakat melalui portal Lapor Pendidikan. Hingga Kamis (6/7), sudah ada 481 suara pengaduan yang masuk.

Selain penolakan siswa miskin, berikut di antaranya kasus-kasus yang dilaporkan:

- Pemalsuan data siswa miskin (13 persen)

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) banyak dijadikan senjata untuk masuk sekolah, karena adanya jatah minimum 20%. Karena itu, banyak kalangan yang memanfaatkan peluang ini, padahal mereka tidak tergolong siswa miskin. Di temukan SKTM abal-abal yang tidak sesuai dengan fakta. Misalnya, punya mobil tapi mempunyai SKTM. Laporan atas kasus ini banyak terjadi di propinsi Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur.

- Siswa titipan oleh pejabat (2 persen)

Laporan terkait dengan adanya siswa titipan ini terjadi di banyak tempat. Ada yang bilang dengan berbagai istilah rekomendasi pejabat, titipan teman kepala sekolah atau guru, titipan kerabat. Kejadian ada di beberapa tempat, antara lain: Bekasi, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, dan Cimahi. Meski pendaftaran lewat jalur online, tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan melalui cara-cara titipan atau rekomendasi seperti ini.

- Pungli saat pendaftaran (17 persen)

Adanya biaya pendaftaran ini banyak laporan terjadi di sekolah swasta. Dia mencontohkan biaya formulir pendaftaran Rp 150 ribu dan dana sumbangan pendidikan (DSP) mencapai Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Harusnya, untuk sekolah swasta yang tidak mendapatkan BOS, boleh saja memungut biaya. Tapi, untuk sekolah swasta yang mendapatkan BOS, maka dilarang memungut biaya saat PPDB.

- Tidak ada transparansi saat pengumuman kelulusan (8 persen)

Sistem online yang ada tidak dapat dipantau realtime, karena sering error atau hang. Bahkan ketika pengumuman siswa yang lulus, pendaftar tidak tahu latar belakang dan pertimbangan mengapa mereka lulus dan tidak lulus. Harusnya ada keterangan terkait berapa anak yang masuk jalur kuota miskin, zonasi, prestasi, dan ketengan yang lain.

- Ditolak di sekolah negeri/favorit karena sistem zonasi (41 persen)

Kebijakan soal zonasi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga mereka terkena dampak secara langsung. Ada beragam alasan bagi mereka yang terkena system ini: misalnya, nama anak belum masuk KK, tinggal di kecamatan/kab sebelah mengikuti orang tua kerja, ikut keluarga merantau, pisah dengan orang tua dan tinggal bersama sanak saudara, ada juga yang berasal: tidak mau pilih sekolah sesuai zonasi karena minimnya infrastruktur dan ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Kasus ini masuk dari daerah: Nunukan, Bali, Aceh, dan Kota Tangerang.

Di luar itu, ada juga yang mengadukan persoalan daya tampung sekolah negeri yang tidak mencukupi, sehingga harus daftar ke swasta tapi berbayar.

Banyak juga masyarakat yang melapor tentang terbatasnya kuota di sekolah negeri. Mereka yang tidak lulus, harus daftar di sekolah swasta, tapi sanyangnya harus berbayar. Perlu ditegaskan, sekolah swasta yang mendapatkan BOS tidak boleh memungut biaya. Laporan atas kasus ini terjadi di Pangkalan Kerinci, Kupang, dan Tangerang Selatan.

Rekomendasi

Dengan banyaknya aduan seputar PPDB tersebut, Ubaid lalu menilai perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah.

Dinas Pendidikan, kata dia, harus tegas bahwa kuota untuk siswa miskin itu minimal 20 persen, bukan maksimal 20 persen. "Ini harus terpenuhi dan tidak boleh ada pemalsuan data kemiskinan. Jika ada yang memalsukan, harus dijatuhkan sanksi. "

Bila siswa tidak diterima di sekolah negeri, dapat pindah mendaftar di sekolah swasta dengan tanpa biaya. Ini berlaku bagi semua sekolah swasta yang menerima dana BOS. Dan rata-rata semua sekolah swasta di daerah menerima dana BOS, hanya sedikit yang tidak terima dana BOS. Jadi, masuk sekolah negeri tanpa biaya, juga daftar di sekolah swasta juga tanpa biaya.

Selain itu, kata dia, perlu adanya tindak tegas oknum yang melakukan pungli dan jual beli bangku di sekolah.

Sementara, untuk sistem zonasi perlu ditinjau ulang sebab banyak memakan korban, hanya gara-gara ketidaklengkapan administratif. Perlu ada sosialisasi jauh-jauh hari supaya calon peserta didik menyiapkan segala keperluan administratif. Juga, system ini dinilai menimbulkan masalah karena kualitas sekolah dan SDM-nya belum merata.

JPPI menilai perangkat sekolah belum bekerja optimal dalam mengawasi proses PPDB, misalnya: Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan juga Komite Sekolah. Perlu lebih proaktif, sebab beberapa lokasi kejadian yang disebutkan di atas adalah hanya kasus yang muncul/dilaporkan, JPPI menduga kuat bahwa kasus-kasus semacam ini terjadi merata di seluruh daerah. (rah/rah)

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170707144646-282-226351/ppdb-2017-masih-ada-siswa-miskin-yang-ditolak-sekolah?>

JPPI Kantongi Tujuh Macam Kasus Selama PPDB 2017 Berlangsung

Amie 8 Juli 2017 8:54 PM



Laporan Kasus PPDB 2017

VIEWS: 7.867

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) membuka posko pengaduan masyarakat melalui portal, www.laporpendidikan.com. Hingga saat ini, Sabtu (08/7) sudah ada 481 suara pengaduan yang masuk.

Kepada SuaraDewan.com Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, sejumlah kasus-kasus yang dilaporkan melalui portal kami, diantaranya pertama, terkait sekolah swasta atau negeri menolak siswa miskin. Kalangan siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) banyak yang ditolak dengan alasan kuota sudah penuh. Padahal batas kuota di Permendikbud No.17 tahun 2017 adalah minimal 20%. Jadi, bisa lebih banyak dari 20%.

“Kasus ini terjadi di Bandung, Surabaya, Kab. Tangerang, dan Ambon. Bahkan, di daerah Kulonprogo tidak menerapkan kuota untuk orang miskin sama sekali,” kata Ubaid Matraji, pada Sabtu (08/7).

Ke dua, kata Ubaid Matraji, pemalsuan data siswa miskin. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) banyak dijadikan senjata untuk masuk sekolah, karena adanya jatah minimum 20%. Laporan atas kasus ini banyak terjadi di propinsi Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur.

Ketiga, adanya siswa titipan oleh pejabat. Kejadian ini ada di beberapa tempat, antara lain, Bekasi, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, dan Cimahi. Ke empat, adanya Pungutan Liar (Pungli) saat pendaftaran. Adanya biaya pendaftaran ini banyak laporan terjadi di sekolah swasta.

“Dia mencontohkan biaya formulir pendaftaran mencapai Rp 150 ribu dan dana sumbangan pendidikan (DSP) mencapai Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Harusnya, untuk sekolah swasta yang tidak mendapatkan BOS, boleh saja memungut biaya. Tapi, untuk sekolah swasta yang mendapatkan BOS, maka dilarang memungut biaya saat PPDB,” katanya

Baca juga *Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Tangerang Beberkan Sejumlah Temuan Selama PPDB 2017 Berlangsung*

Selanjutnya, yang ke lima, jenis kasus yang diadukan berupa tidak adanya transparansi saat pengumuman kelulusan. Ke enam, jenis kasus daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, harus daftar ke swasta tapi berbayar, laporan atas kasus ini terjadi di Pangkalan Kerinci, Kupang, dan Tangerang Selatan. Kemudian yang ke tujuh, jenis kasus ditolak di sekolah negeri atau favorit karena sistem zonasi, dan kasus ini masuk dari daerah Nunukan, Bali, Aceh, dan Kota Tangerang.

“Kebijakan soal zonasi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga mereka terkena dampak secara langsung,” tegasnya. (fn)

Sumber : <http://www.suaradewan.com/jppi-kantongi-tujuh-macam-kasus-selama-ppdb-2017-berlangsung/>

Pelanggaran Penerimaan Siswa Baru Marak

Media Indonesia • Senin, 10 Jul 2017 09:15 WIB



Ilustrasi pendidikan. Foto: MTVN.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mulai hari ini sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga SMA di berbagai daerah akan mengumumkan hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017. Dalam pelaksanaannya, Kemendikbud menerapkan Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengutamakan siswa yang bertempat tinggal lebih dekat dengan sekolah tujuan (zonasi).

Pada praktiknya di lapangan, kebijakan zonasi banyak disalahgunakan untuk mengakomodasi siswa di luar tempat sekolah itu berada sehingga bertentangan dengan tujuan awal PPDB. Ombudsman Republik Indonesia (ORI), lembaga yang mengawasi penyelenggaraan layanan publik, banyak sekali menerima pengaduan dan laporan dari berbagai daerah terkait dengan PPDB.

"Pelanggaran dari zonasi, pemalsuan surat miskin, hingga aturan kepala daerah yang menabrak kebijakan PPDB. Pekan depan kami serahkan ke Kemendikbud untuk ditindaklanjuti. Terutama mengenai adanya kepala daerah yang menekan MoU dengan kelompok profesi agar memakai jatah warga miskin untuk menyekolahkan anak mereka," kata anggota ORI Ahmad Suaedy, kepada Media Indonesia, Minggu 9 Juli 2017.

ORI Perwakilan Kalbar menemukan pelanggaran berupa pungli. Menurut Kepala ORI Kalbar Agus Priyadi, di SMPN 2 dan SMPN 3 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pihak sekolah mewajibkan calon siswa baru membeli map seharga Rp10 ribu. "Kami minta sekolah mengembalikan semua uang tersebut."

Kantor ORI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahkan dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Kepala ORI DIY Budi Masthuri menduga peristiwa itu terkait dengan aduan dan laporan PPDB SMP-SMA yang sedang ditangani pihaknya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ari Santoso mengakui kementerian juga menerima beragam laporan dan aduan dari masyarakat. Laporan mencakup pelanggaran zonasi, kendala teknis, dan adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PPDB.

"Tetapi tidak banyak. Semua sudah diserahkan kepada inspektorat jenderal. Kebijakan pasti akan dievaluasi," ujar Ari.

Baca: Sengkarut PPDB di Tangsel

Di lain pihak, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengunggah laporan pelanggaran PPDB dari sejumlah daerah di laman www.laporpendidikan.com. Lagi-lagi, pelanggaran didominasi soal zonasi dan transparansi kuota siswa.

"Sistem zonasi perlu ditinjau ulang karena menyangkut kualitas dan SDM yang belum merata," ungkap Koordinator JPPI Abdullah Ubaid.

Pemerhati Pemerintah Kota Tasikmalaya, Evi Hilman, menengarai tidak sedikit pejabat daerah, anggota dewan, dan pengurus ormas yang menitipkan anak mereka ke sekolah-sekolah di luar zonasi. "Sekolah negeri favorit harus menyediakan kuota sekitar 30% bagi calon siswa titipan. SDN Citapen dan SDN Galunggung, SMPN 1, 2, dan 5, serta SMAN 1, 2, dan 5 merupakan sekolah yang paling banyak diminati para orangtua," pungkas Evi. (OGI)

Sumber : <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/4KZE9Qwk-pelanggaran-penerimaan-siswa-baru-marak>

Orangtua Palsukan Surat Tidak Mampu agar Anaknya Masuk Sekolah Negeri



Ilustrasi penerimaan siswa baru. (Foto: Antara)

Maria Fatima Bona / FMB Rabu, 5 Juli 2017 | 21:42 WIB

Jakarta - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 berbeda dengan sebelumnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 17/2017 tentang PPDB. Salah satunya, sekolah wajib menerima siswa miskin yang berada di zonasi dengan kuota 20 persen.

Kuota siswa miskin tersebut menjadi polemik. Pasalnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menemukan adanya pihak orangtua yang diduga memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Koordinator JPPI, Abdullah Abaid mengatakan, pemalsuan ini merugikan kesempatan siswa benar-benar miskin untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri karena haknya dirampas.

"Ditemukan orangtua murid yang membuat SKTM dari kelurahan untuk kepentingan masuk sekolah sebenarnya bukan berasal dari keluarga miskin. Sekolah harus melakukan verifikasi dengan data siswa miskin dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat(KIS)," kata Abdullah kepada Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik), di Jakarta, Rabu(5/7).

Meksi ada temuan, Abdullah enggan untuk menunjukkan bukti. Ia mengaku, pihaknya masih mengumpulkan data -data sehingga belum dapat memberikan informasi secara rinci tentang masalah tersebut.

Kepada pemerintah, Abdullah meminta, harus memberikan sanksi tegas. Dalam hal ini, jika siswa terbukti memalsukan SKTM, siswa harus dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan ke sekolah yang sesuai. Maka, sangat penting peran serta dari Inspektorat Jenderal dan pengawas sekolah untuk menegakan peraturan.

Menurutnya, adanya surat sakti tersebut, menguntungkan sejumlah pihak. Yakni siswa dapat masuk sekolah tujuan dan sekolah dapat menjadikan lahan pungutan liar (pungli).

Secara terpisah, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lestyarti mengatakan, banyaknya siswa menggunakan SKTM untuk dapat masuk sekolah incaran membuat sekolah kewalahan. Sehingga sekolah menerima siswa hanya berpatok pada 20 persen kuota siswa miskin dari pemerintah.

Menurut Retno, sekolah tidak dapat disalahkan jika menolak siswa pemegang SKTM. Peralnya, sekolah memenuhi Permendikbud PPDB, dengan menerima 20 persen siswa miskin. Maka, seharusnya yang disalahkan pemerintah yang membuat kebijakan, karena tidak ada solusi. Peralnya, pendidikan jenjang SMA/MA dan sederajat belum 100 persen dibiayai oleh APBN, seperti pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP.

"Kenapa dalam peraturan menyebutkan 20 persen kuota untuk siswa miskin. Ini yang menjadi pemicu orangtua membuat SKTM. Biaya sekolah kan mahal. Jika, banyak orangtua memanfaatkan kebijakan wajib menerima siswa miskin. Ini akan membahayakan sekolah. Kalau tidak ada biaya, siapa yang nanggung? Emang gampang cari uang membiayai keperluan sekolah. Pemerintah harus evaluasi peraturan ini,"kata Retno kepada Suara Pembaruan, Rabu (5/7).

Dijelaskan dia, sekolah negeri menolak siswa miskin, bukan tidak memberikan kesempatan pada siswa miskin. Tetapi, sekolah mempertimbangkan biaya pendidikan jangka panjang. Retno menambahkan, dalam menyelesaikan masalah di lapangan. Negara harus hadir, jangan hanya sekedar mengeluarkan regulasi. Peralnya, kebijakan 20 persen ini membatasi anak bangsa. Serta merugikan siswa yang benar- benar miskin karena maraknya SKTM.

Untuk itu, Retno mengharapkan pemerintah memberi solusi. Apalagi anggaran APBD setiap daerah berbeda, tidak dapat disamaratakan dengan DKI Jakarta yang mampu mengalokasikan anggaran pendidikan diatas 20 persen sehingga SD-SMA gratis. Sedangkan, daerah lain belum dapat menerapkan sekolah gratis. Sehingga, kebijakan zona dengan mewajibkan sekolah menerima siswa miskin dimanfaatkan oleh orangtua siswa.

Mantan kepala sekolah SMAN 3 Jakarta ini menuturkan, berdasarkan pengaduan yang diterima FSGI, kecurangan PPDB selalu terjadi tiap tahun. Dalam hal ini, terjadi pada daerah yang belum memperlakukan PPDB Online. Sehingga sekolah masih bisa menjual kursi, karena tidak transparan. Orang tua dan siswa tidak dapat memantau langsung.

Menurutnya, diberlakukan PPDB Online membentuk transparansi. Orangtua dan siswa dapat mengakses langsung karena berpatok pada nilai. Namun, untuk tahun ini, FSGI tidak membuka posko aduan. Sebab, hasil analisis aduan tersebut tidak berpengaruh pada kebijakan. Peralnya, kelapa dinas pendidikan (Kadisdik) tidak menindaklanjuti temuan tersebut.

"Sekolah negeri jual kursi sering terjadi dan cukup banyak. Karena belum menggunakan menggunakan PPDB online. Tapi kan dilaporkan dinas pendidikan tidak bisa buat apa- apa,"kata Retno.

Ia juga mengatakan, kecurangan tidak terjadi di DKI karena menerapkan sistem online. Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah membenahi dan mengevaluasi sebelum mengeluarkan regulasi agar tidak memunculkan masalah baru.

Sementara untuk kebijakan zonasi, Retno mengaku, FSGI mendukung. Sistem zonasi akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di suatu sekolah. Peserta didik yang unggul akan tersebar merata ke berbagai sekolah sehingga siswa unggul tidak berkumpul di sekolah tertentu sehingga tidak melahirkan sekolah favorit menurut masyarakat.

Selain itu, sistem zonasi menguntungkan semua pihak. Seperti; siswa akan mendaftar di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya, sehingga waktu tempuh lebih singkat dan dapat berjalan kaki atau naik sepeda. Siswa tidak kelelahan, berangkat tidak terburu-buru dan teman sekolahnya juga tetangganya.

Retno juga menyebutkan, bagi kota besar, zonasi akan berdampak mengurangi kemacetan karena sekolah dengan rumah dekat. Selain itu, dapat mengurangi potensi tawuran pelajar, karena umumnya tawuran pelajar terjadi karena gesekan sepele saat siswa dalam perjalanan ke dan dari sekolah.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajdir Effendy mengatakan, meski ada Permendikbud Nomor 17/2018 ini. Pemerintah masih memberi kebebasan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menerapkan aturan sendiri dalam menggelar seleksi PPDB 2017.

Untuk jenjang SMA/SMK sederajat mengacu kepada peraturan gubernur, sedangkan pada jenjang SMP/SD sederajat pada peraturan walikota/bupati. Meski demikian, ia tetap berharap pemda menerapkan Permendikbud PPDB terutama tentang sistem zonasi. Sistem tersebut, mengharapkan sekolah untuk tidak menolak siswa miskin yang berada di zona sekolah.\

Sumber: Suara Pembaruan

Sumber : <http://www.beritasatu.com/nasional/439998-orangtua-palsukan-surat-tidak-mampu-agar-anaknya-masuk-sekolah-negeri.html>

Kamis 06 Juli 2017, 19:28 WIB

JPPI: Penolakan Siswa Miskin dan Pungli masih Ada di PPDB 2017

Jabbar Ramdhani - detikNews



Pendaftaran Murid Baru SMA di Jakarta (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) membuka posko pengaduan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Hasilnya, ada sebesar 41 persen masyarakat yang melaporkan bermasalah dengan sistem zonasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Laporan soal sistem zonasi ini menjadi yang terbesar karena banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Oleh sebab itu, banyak yang ditolak di sekolah negeri atau favorit karena sistem ini. "Kebijakan soal zonasi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga mereka terkena dampak secara langsung. Ada beragam alasan bagi mereka yang terkena sistem ini," jelas JPPI lewat keterangan tertulis yang diterima, Kamis (6/7/2017).

Di antara alasan yang disampaikan di antaranya ialah nama anak belum masuk kartu keluarga (KK), tinggal di kecamatan atau kabupaten sebelah mengikuti orang tua kerja, ikut keluarga merantau, dan pisah dengan orang tua dan tinggal bersama sanak saudara.

Selain itu, ada juga alasan tidak mau pilih sekolah sesuai zonasi karena minimnya infrastruktur dan ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Kasus ini masuk ke JPPI dari daerah Nunukan, Bali, Aceh, dan Kota Tangerang.

Atas laporan ini, JPPI merekomendasikan peninjauan ulang kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Selain itu, sosialisasi sistem mesti disampaikan dari jauh-jauh hari.

“Sistem zonasi perlu ditinjau ulang sebab banyak memakan korban, hanya gara-gara ketidaklengkapan administratif. Perlu ada sosialisasi jauh-jauh hari supaya calon peserta didik menyiapkan segala keperluan administratif. Juga, sistem ini dinilai menimbulkan masalah karena kualitas sekolah dan SDM-nya belum merata,” katanya.



Diagram laporan masyarakat ke Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Diagram laporan masyarakat ke Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 (Foto: Dok. JPPI)

Laporan terbanyak kedua ialah soal adanya sekolah swasta atau negeri yang menolak siswa miskin. Banyak sekolah yang menolak siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) banyak yang ditolak dengan alasan kuota sudah penuh.

“Ini harusnya tidak boleh terjadi, karena batas kuota di Permendikbud No.17/2017 adalah minimal 20 persen. Jadi, bisa lebih banyak dari 20 persen. Harusnya bisa ditambah. Karena mereka adalah kelompok rentan putus sekolah,” tulisnya.

Kasus ini terjadi di Bandung, Surabaya, Kabupaten Tangerang, dan Ambon. Bahkan, di daerah Kulonprogo tidak menerapkan kuota untuk orang miskin sama sekali.

Namun, kuota 20 persen siswa miskin memiliki problem lain. Dalam PPDB 2017 ini masyarakat melaporkan adanya pemalsuan data siswa miskin.

Banyak kalangan yang memanfaatkan hal ini dengan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Di temukan SKTM abal-abal yang tidak sesuai dengan fakta seperti punya mobil tapi mempunyai SKTM. Laporan atas kasus ini banyak terjadi di propinsi Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur.

Persoalan pungutan liar (pungli) saat mendaftar juga masih terjadi. Laporan ini banyak terjadi di sekolah swasta yang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Ada sekolah swasta yang meminta biaya formulir pendaftaran Rp 150 ribu dan dana sumbangan pendidikan (DSP) mencapai Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Harusnya, untuk sekolah swasta yang tidak mendapatkan BOS, boleh saja memungut biaya. Tapi, untuk sekolah swasta yang mendapatkan BOS, maka dilarang memungut biaya saat PPDB.

JPPI meminta pihak Kemendikbud menindak tegas oknum yang melakukan pungli dan jual beli bangku di sekolah. Sebab rata-rata semua sekolah swasta di daerah menerima dana BOS, hanya sedikit yang tidak terima dana BOS.

"Jadi, masuk sekolah negeri tanpa biaya, juga daftar di sekolah swasta juga tanpa biaya," tegasnya.

Persoalan lain yang dilaporkan oleh masyarakat di antaranya ialah adanya laporan siswa titipan pejabat, tidak ada transparansi saat pengumuman kelulusan karena sistem online yang hang, dan daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, harus daftar ke swasta tapi berbayar. (jbr/dhn)

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3550861/jppi-penolakan-siswa-miskin-dan-pungli-masih-ada-di-ppdb-2017>

PENERIMAAN SISWA BARU

Aturan Bukti Kemiskinan Harus Jelas, Bukan SKTM

22 Juni 2017

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

JAKARTA, KOMPAS — Ketentuan kuota 20 persen untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu dalam penerimaan peserta didik rawan diselewengkan. Surat keterangan tidak mampu mudah dipalsukan demi mendapat bangku di sekolah yang diinginkan. Karena itu, hendaknya ada aturan jelas mengenai bukti kemiskinan yang bisa diverifikasi dengan mudah.

“Semestinya bukti kemiskinan yang digunakan oleh sekolah ataupun lembaga lainnya ialah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Siswa Miskin. Para penerima kartu-kartu itu sudah pasti terdaftar di pangkalan data negara sehingga bisa langsung diverifikasi,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdullah Ubaid, di Jakarta, Rabu (21/6).

Ia mengkritisi sekolah-sekolah yang masih bertumpu pada SKTM sebagai bukti bahwa calon siswa dari keluarga miskin sehingga bisa masuk ke dalam kuota 20 persen di sekolah. “Ini sebenarnya modus lama menyelewengkan aturan pemerintah agar sekolah dapat pemasukan dari orangtua,” katanya.

Aturan penerimaan peserta didik baru menegaskan, sekolah tak boleh menarik biaya apa pun dari orangtua. Namun, katanya, ada sekolah yang melakukan jual-beli bangku melalui kuota 20 persen untuk siswa miskin.

Misalnya, sebenarnya anak tersebut tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan karena nilainya tidak mencukupi atau ia berasal dari rayon lain. Melalui penggunaan SKTM, ia bisa masuk sekolah tersebut dengan mengambil jatah bangku siswa miskin. Orangtua juga membayar sejumlah uang kepada sekolah.

“Ini jelas bentuk korupsi dan merampas hak siswa miskin,” ujar Ubaid. Harus ada aturan tertulis melarang pemakaian SKTM. Kuota 20 persen bertujuan agar anak-anak miskin bisa mendapat akses pendidikan di sekolah terdekat sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, SKTM sudah tidak berlaku. Pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik yang sudah mengurutkan penduduk Indonesia dari yang terkaya hingga termiskin.

Kemensos mengambil 25 persen penduduk di urutan terbawah. Mereka menerima bantuan pemerintah berupa beras miskin, program keluarga harapan, KKS, dan KIP. Data para penerima tengah diintegrasikan oleh Kemsos dengan data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (DNE)

“Semestinya bukti kemiskinan yang digunakan oleh sekolah ataupun lembaga lainnya ialah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Siswa Miskin. Para penerima kartu-kartu itu sudah pasti terdaftar di pangkalan data negara sehingga bisa langsung diverifikasi,”

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/06/22/aturan-bukti-kemiskinan-harus-jelas-bukan-sktm/>

Langkan Kompascetak

13 Juni 2017

Diusulkan, E-Tata Kelola Guru

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Pengawasan kinerja dan peningkatan kapasitas guru melalui moda dalam jaringan niscaya dilakukan. Selain mudah, hal ini juga membuat pemutakhiran data bisa cepat, tidak perlu berbelit-belit dan berjenjang. "Cara kerjanya bisa ditiru dari e-tata kelola dosen. Setiap kali dosen mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ataupun butuh perubahan data tinggal memasukkan informasi terbaru ke situs e-tata kelola," kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Unifah Rosyidi dalam diskusi "Resolusi Tata Kelola Guru untuk Pendidikan Berkualitas", Senin (12/6), di Jakarta. Acara ini diadakan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Unifah mengkritisi pengelolaan guru oleh pemerintah, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, yang dinilai belum jelas. (DNE)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/06/13/langkan-158/>

Perbaikan Pendidikan

Diusulkan, Tata Kelola Guru secara dalam Jaringan

Laraswati Ariadne Anwar

13 Juni 2017 • 07:27 WIB



KOMPAS/HARRY SUSILO

Ratusan guru honorer menggelar doa bersama di lapangan upacara Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (21/4). Lewat aksi simpatik itu, mereka mendesak Wali Kota Bekasi untuk mengubah status mereka dari guru honorer menjadi tenaga kerja kontrak atau TKK. Guru honorer hanya memperoleh bayaran Rp 500.000-Rp 1 juta per bulan meskipun memiliki beban kerja yang sama dengan TKK ataupun pegawai negeri sipil. TKK bisa mendapatkan honor hingga Rp 3 juta sebulan.

JAKARTA, KOMPAS — Pengawasan kinerja guru dan peningkatan kapasitasnya melalui moda dalam jaringan atau daring niscaya harus dilakukan. Selain mudah, hal ini juga membuat pemutakhiran data bisa berlangsung cepat, tidak perlu berbelit-belit dan berjenjang.

“Cara kerjanya bisa ditiru dari e-tata kelola dosen. Setiap kali dosen mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ataupun butuh perubahan data tinggal memasukkan informasi terbaru ke situs e-tata kelola,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi dalam diskusi “Resolusi Tata Kelola Guru untuk Pendidikan Berkualitas” di Jakarta, Senin (12/6).

Acara tersebut diadakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Turut hadir sebagai pembicara Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Garti Sri Utami dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Suyitno.

Unifah mengkritik pengelolaan guru oleh pemerintah, baik Kemdikbud dan Kemenag, yang ia nilai belum jelas. Belum ada kerangka rancangan pengelolaan guru beserta target capaian untuk lima tahun ke depan ataupun jangka waktu lebih lama lagi.

"Data pokok pendidikan milik Kemdikbud sudah lama tidak diperbarui. Sistemnya lama karena harus menunggu laporan lengkap berjenjang dari sekolah, wilayah, dan provinsi. Kalau memakai e-tata kelola, setiap guru bisa memutakhirkan data pribadi langsung dari telepon pintar ataupun komputer mereka," kata Unifah. Pemerintah tinggal menyiapkan saringan untuk memverifikasi kebenaran data yang diunggah guru.

Kejelasan status

Dalam kesempatan yang sama, Unifah juga mengkritik ketidakjelasan pemerintah menangani 500,000 guru tidak tetap (GTT) yang belum tersertifikasi. Menurut data Kemdikbud, di Indonesia ada 2,9 juta guru yang terdiri dari 2,2 juta guru pegawai negeri sipil dan 700,000 GTT.

Dalam uji kompetensi guru pada 2015 dan 2016, sebanyak 500,000 guru tidak mendapatkan sertifikasi. "Akan tetapi, ketika pemerintah menghitung rasio guru dengan siswa, yaitu 1:18, GTT tersebut tetap dimasukkan. Ini tidak adil karena di satu sisi jasa mereka digunakan, tetapi hak mereka diabaikan," ucap Unifah.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional JPPI Abdullah Ubaid mengusulkan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah. Langkah pertama ialah mendeteksi alasan guru-guru tersebut belum tersertifikasi. Ia menduga ada dua kemungkinan, pertama adalah urusan administrasi yang masih belum selesai. Kedua, guru tersebut memang tidak memenuhi syarat kompetensi.

"Kalau disebabkan alasan kedua, harus dicari cara peningkatan kapasitas guru-guru tersebut. Pada kenyataannya, mereka masih mendidik siswa di sekolah. Kalau guru tidak ditingkatkan kemampuannya, siswa yang merugi," kata Ubaid.

Garti mengungkapkan, bagi guru tersertifikasi, pemerintah menyediakan berbagai modul pelatihan. Ada yang berupa dalam jaringan selama tiga bulan dan ada pula kursus intensif tiga pekan. Sementara di Kemenag, Suyitno menjelaskan pada 2017 baru akan didata kompetensi guru-guru madrasah. "Harus dicari dulu peta permasalahannya. Baru bisa mendapat langkah intervensi yang tepat," ujarnya. (DNE)

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2017/06/13/diusulkan-tata-kelola-guru-secara-dalam-jaringan/>

Pendidikan 8 Jam, JPPI: Sita Kebebasan Bermain Anak

Kontributor



12 Juni 2017, 19:37 WIB

Pendidikan 8 Jam, JPPI: Sita Kebebasan Bermain Anak

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menanggapi rencana Mendikbud menerapkan kebijakan full day school yang akan diterapkan pada bulan Juli 2017. Ia mengimbau kepada Mendikbud untuk tidak tergesa-gesa menerapkan kebijakan ini di tahun ajaran baru 2017/2018. Harusnya dilakukan evaluasi dan koordinasi antarinstansi sehingga tidak terjadi tabrakan.

“Misalnya, imbas dari kebijakan ini akan sangat berdampak besar terhadap eksistensi pendidikan Islam, yang menurut sejarahnya hadir lebih dulu daripada sekolah,” katanya kepada rilis.id, Senin (12/6/2017).

Menurutnya, kebijakan Mendikbud ini jelas menutup kesempatan jutaan siswa untuk dapat belajar di lembaga pendidikan keagamaan Islam. Biasanya, sekolah-sekolah keagamaan ini jam belajarnya bervariasi, antara jam 13.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Ubaid malah mengindikasikan bakal terjadi pendangkalan pembelajaran agama di sekolah yang mengakibatkan banyak peserta didik dan juga gurunya mempunyai paham keagamaan yang intoleran. Bahkan tidak sedikit yang terlibat di ormas radikal.

“Jadi, sekolah bukan sega-galanya. Karena itu, problem anak tidak harus diselesaikan di sekolah, tapi sekolah perlu bersinergi dengan institusi lain untuk melakukan revolusi mental di dunia pendidikan,” imbuhnya.

Soal lainnya, menurutnya adalah pembatasan kebebasan anak dengan lingkungannya. Kebijakan ini jelas membatasi ruang bermain anak dengan lingkungan sosialnya.

“Anak setiap hari hanya diberi kesempatan untuk belajar di sekolah. Kapan waktu bermain untuk mengembangkan kreatifitasnya?” ucapnya.

Apalagi, lanjut Ubaid, jika pendidikan hanya mengandalkan kualitas guru di sekolah. Bukannya meremehkan kualitas guru, tapi begitulah adanya.

“Karena itu, gagasan Mendikbud ini hanya sebatas perubahan aturan, dan tidak akan berdampak banyak pada reformasi pendidikan dalam rangka revolusi mental seperti yang didengang-dengungkan,” jelasnya.

Ia meminta kepada Mendikbud untuk menanggihkan kebijakan sekolah dengan 8 jam sehari dan 5 hari dalam satu minggu pada tahun ajaran baru 2017/2018. Selain itu, Mendikbud harus melakukan koordinasi secara sinergis dengan kementerian terkait, antara lain Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerinrah Daerah. Hal ini untuk mengintegrasikan penyelegaraan pendidikan keagamaan Islam dengan sekolah.

“Serta memperhatikan kebebasan, kreatifitas, dan tumbuh kembang anak di luar sekolah. Karena sekolah adalah bukan segala-galanya. Dalam kasus ini, bukan lagi soal 8 jam atau lebih panjang lagi, tapi sejauh mana substansi pendidikan yang memerdekakan dan mencerdaskan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah, dengan tidak menjadikan sekolah sebagai satu-satunya sumber belajar,” tandasnya.

Sumber : <http://rilis.id/pendidikan-8-jam-jppi-sita-kebebasan-bermain-anak.html>

Aturan Sekolah Libur di Hari Sabtu Tuai Polemik

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Senin, 12/06/2017 18:22 WIB



Aturan Sekolah Libur di Hari Sabtu Tuai Polemik Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak Mendikbud mengkaji ulang. Sementara, Mendikbud meyakinkan aturan tak ganggu pendidikan agama. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru mengenai pemberlakuan libur di Sabtu dan delapan jam sehari menuai pro dan kontra.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menambah daftar panjang organisasi yang mengeluarkan pernyataan dan mengajukan penolakan. Sebelumnya, dikabarkan kebijakan ini juga menuai kritik dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), guru, dan juga beberapa kepala daerah. Aturan ini akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2017-2018.

Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI mengimbau agar Mendikbud tidak tergesa-gesa untuk menerapkan kebijakan yang disebut berlaku pada Juli mendatang tersebut. Harusnya, kata dia, dilakukan evaluasi dan koordinasi antar instansi sehingga tidak terjadi tabrakan.

Ia menilai imbas dari kebijakan ini akan sangat berdampak besar terhadap eksistensi pendidikan Islam, yang menurut sejarahnya hadir lebih dulu daripada sekolah. Di antaranya adalah Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Pendidikan Al-Quran seperti TKA (Taman Kanak-Kanak Alquran), TPA (Taman Pendidikan Alquran), dan TQA (Ta'limul Quran lil-Awlad).

"Kebijakan Mendikbud ini jelas menutup kesempatan jutaan siswa untuk dapat belajar di lembaga pendidikan keagamaan Islam, seperti selama ini dilakoninya," ungkapnya seperti

pernyataan yang diterima redaksi CNNIndonesia.com, pada Senin (12/6).

Biasanya, kata dia, sekolah-sekolah keagamaan ini jam belajarnya bervariasi, antara jam 13.00 sampai dengan 16.00 WIB. Bagaimana nasib mereka dan juga puluhan ribu lembaga-lembaga penyelenggaranya? Jika kebijakan tersebut diterapkan, Ubai menilai ini akan mengkebiri pendidikan keagamaan.

Selain itu, aturan ini akan membatasi kebebasan anak dengan lingkungannya. Kebijakan ini jelas membatasi ruang bermain anak dengan lingkungan sosialnya. Anak setiap hari hanya diberi kesempatan untuk belajar di sekolah sehingga kehilangan waktu bermain.

Berdasarkan pemikiran itu, JPPI lalu meminta Mendikbud untuk menanggukkan kebijakan sekolah dengan 8 jam sehari dan 5 hari dalam satu minggu pada tahun ajaran baru 2017/2018. Sebab, proses pembelajaran di sekolah akan berlangsung hingga sore hari, dan itu akan mengkebiri bahkan mematikan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam yang selama ini telah berlangsung.

Di samping itu, mereka juga meminta Mendikbud melakukan koordinasi secara sinergis dengan kementerian terkait, antara lain Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah. Hal ini untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam dengan sekolah.

Terakhir, mereka mendesak Mendikbud memperhatikan kebebasan, kreativitas, dan tumbuh kembang anak di luar sekolah, karena sekolah adalah bukan segala-galanya. Dalam kasus ini, bukan lagi soal delapan jam atau lebih panjang lagi, tapi sejauh mana substansi pendidikan yang memerdekakan dan mencerdaskan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah, dengan tidak menjadikan sekolah sebagai satu-satunya sumber belajar.

Tanggapan Mendikbud

Dihubungi terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berpendapat, pembelajaran delapan jam sehari tidak akan mempengaruhi praktik penyelenggaraan pendidikan keagamaan swadaya masyarakat.

Muhadjir menegaskan, pemberlakuan belajar mengajar lima hari dalam seminggu tidak akan mempengaruhi apalagi mematikan penyelenggaraan Madrasah Diniyah dan pesantren.

"Sama sekali kami tidak ada pikiran menghilangkan, malah justru akan jadi partner sekolah menguatkan program karakter," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/6).

Ia mengatakan, pemerintah memiliki lima target pembentukan karakter melalui program pembelajaran delapan jam per hari yakni religi atau keberagaman, integritas, nasionalisme, kerja keras, dan gotong royong. Penguatan karakter ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Beban Tugas Guru yang juga menjadi dasar per Juli sekolah hanya dari Senin hingga Jumat.

Dalam penyelenggaraannya, sekolah sangat mungkin bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti madrasah, masjid, gereja, pura, sanggar kesenian, hingga pusat olahraga.

"Jangan diartikan anak dapat pelajaran terus terusan di kelas, bukan itu," ucap mantan Rektor Muhammadiyah Malang ini. Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan seluruh siswa SD, SMP, dan SMA hanya akan bersekolah lima hari. Hal ini sejalan dengan tugas yang dibebankan kepada aparat sipil negara, termasuk guru yakni 40 jam per minggu.

Kendati demikian, kritik diberikan menyikapi kebijakan ini. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia. MUI meminta Mendikbud mengkaji ulang peraturan ini sebab dikhawatirkan mengganggu model pendidikan Madrasah.

Diketahui, kegiatan keagamaan seperti itu biasanya dimulai siang hari setelah pelajar pulang dari sekolah umum.

Bukan lagi soal delapan jam atau lebih panjang lagi, tapi sejauh mana substansi pendidikan yang memerdekakan dan mencerdaskan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah, dengan tidak menjadikan sekolah sebagai satu-satunya sumber belajar.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170612154646-282-221173/aturan-sekolah-libur-di-hari-sabtu-tuai-polemik?>

JPPI Tolak Kebijakan Mendikbud Soal Waktu Sekolah 8 Jam Sehari

Senin 12 Juni 2017, 11:54 WIB



Sumber Foto : Istimewa

Redaksi Oleh : Desy Viani

BANDUNG, (PRFM) - Tahun ajaran baru 2017/2018 akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan kebijakan baru mengenai waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kebijakannya, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus diselenggarakan minimum 8 jam dalam sehari.

Terkait kebijakan itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar Mendikbud untuk tidak tergesa-gesa menerapkannya. Harusnya dilakukan evaluasi dan koordinasi antar instansi sehingga tidak terjadi bentrokan. Pasalnya, imbas dari kebijakan ini akan sangat berdampak besar terhadap eksistensi pendidikan Islam yang menurut sejarahnya hadir lebih dulu daripada sekolah.

JPPI menilai, kebijakan ini akan menutup kesempatan jutaan siswa untuk belajar di lembaga pendidikan keagamaan Islam. Biasanya, sekolah-sekolah keagamaan ini jam belajarnya bervariasi, antara jam 13.00 sampai dengan 16.00 WIB.

"Ini sangat disayangkan. Apalagi belakangan ini, adanya indikasi pendangkalan pembelajaran agama di sekolah, yang mengakibatkan banyak peserta didik, dan juga gurunya mempunyai paham keagamaan yang intoleran, bahkan tidak sedikit yang terlibat di ormas radikal. Jadi,

sekolah bukan sega-galanya. Karena itu, problem anak tidak harus diselesaikan di sekolah, tapi sekolah perlu bersinergi dan berbati dengan institusi lain untuk melakukan revolusi mental di dunia pendidikan," ungkap Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam rilis yang diterima PRFM, Senin (12/6/2017).

Soal lainnya, lanjut Ubaid mengenai pembatasan kebebasan anak dengan lingkungannya. Kebijakan ini jelas membatasi ruang bermain anak dengan lingkungan sosialnya. Anak setiap hari hanya diberi kesempatan untuk belajar di sekolah.

"Kapan waktu bermain untuk mengembangkan kreatifitasnya? Apalagi, jika kita mengandalkan kualitas guru di sekolah. Bukannya meremehkan kualitas guru, tapi begitulah adanya. Karena itu, gagasan Mendikbud ini hanya sebatas perubahan aturan, dan tidak akan berdampak banyak pada reformasi Pendidikan dalam rangka revolusi mental seperti yang didengang-dengungkan," terangnya.

Sumber : <http://prfmnews.com/berita.php?detail=jppi-tolak-kebijakan-mendikbud-soal-waktu-sekolah-8-jam-sehari>

JPPI: Kalangan Muda Diharap Lebih Melek Anggaran

Admin NEW Indonesia

Jum at,09 Juni 2017



Konsultan Anggaran/Peneliti Senior Achmad Taufik (sedang menunjuk) menjadi panelis kunci tindak lanjut kajian kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan yang digelar di sekretariat Seknas JPPI di Jakarta (6/7) | NEW Indonesia

Jakarta, NEW Indonesia – Sejumlah aktivis muda peduli pendidikan berkumpul di sekretariat nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Jakarta Selasa (6/7), guna menindaklanjuti pelatihan reguler yang pernah digelar sebelumnya mengenai kebijakan anggaran dan riset-riset bidang pendidikan di tanah air.

Konsultan Anggaran Achmad Taufik mengatakan, pelatihan reguler terkait anggaran di sektor pendidikan dapat mempertajam pengetahuan peserta pelatihan saat berada di lapangan.

Membekali aspek teknis secara menyeluruh, tambah Achmad Taufik, dapat mengatasi berbagai kendala dan membekali peneliti menghasilkan kajian mendalam dalam melakukan riset anggaran, menjamin akurasi dan lebih produktif.

Baru-baru ini kalangan muda DKI, dari sejumlah organisasi dan kampus terkemuka berpartisipasi dalam pelatihan analisis kebijakan anggaran pendidikan yang diprakarsai oleh Seknas JPPI dan mitra.

Koordinator Seknas JPPI Ubaid Matraji menekankan keutamaan kalangan peneliti muda agar lebih proaktif berpartisipasi dalam berbagai program kajian ilmiah, terutama terkait transparansi dan kebijakan anggaran sektor pendidikan.

Menurut Ubaid, memahami secara komprehensif postur dan mekanisme pengesahan anggaran dan turunannya, akan mencerminkan transparansi kebijakan suatu wilayah tertentu, baik provinsi dan kabupaten/kota dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan.

“Melek anggaran bagi kalangan muda, khususnya sektor pendidikan jadi prioritas kita.” Demikian tegas Ubaid.

Beberapa wilayah di tanah air dinilai sudah cukup transparan dalam mempublis dokumen-dokumen anggaran pembangunannya yang dapat diakses publik, namun sebagian yang lain masih perlu konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut untuk kebutuhan kajian-kajian ilmiah terkait kebijakan anggaran pendidikan atau sektor lain dengan seluruh peruntukannya.

Sebagai koalisi terbesar pertama untuk advokasi kebijakan pendidikan di tanah air Sekretariat Nasional JPPI sedikitnya memiliki dua puluh organisasi mitra sejak terbentuk 2010 lalu. Seknas JPPI sampai sejauh ini bertekad mendorong lahirnya kebijakan wajib belajar/pendidikan dasar 12 tahun di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan nasional. Mendorong akses pendidikan lanjutan bagi anak perempuan, Mendorong sistem akreditasi sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah sehingga Terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-haknya atas pendidikan dan kebijakan publik yang mendukung Pendidikan Untuk Semua (Education for All – EFA).

Seknas JPPI/NEW Indonesia merupakan koalisi organisasi sipil pendidikan yang cukup produktif di tanah air menjadi anggota asosiasi dunia ASPBAE, sebuah organisasi strategis yang berpartisipasi dalam seluruh agenda global terkait kajian-kajian modul-model pendidikan yang diselaraskan dengan perjuangan negara-negara dalam mewujudkan Target Pembangunan Berkelanjutan SDGs.

Maret 2017 lalu, Seknas JPPI bersama 13 organisasi nirlaba dari sejumlah negara bermitra dengan salah satu badan kajian pendidikan dunia RTEI telah menghasilkan kajian peringkat pendidikan lintas negara yang diharapkan dapat memacu negara-negara lebih proaktif dalam menentukan kebijakan prioritas pembangunan pendidikannya multi aspek.

Analisis mengatakan, menyorot sektor pendidikan memiliki ruang lingkup cukup luas. Beberapa agenda prioritas pendidikan menjadi kewajiban semua negara, maka sangat dibutuhkan kajian komprehensif dunia pendidikan; mulai kebijakan dan alokasi anggaran, kurikulum, tata kelola guru, sarana prasarana, akses, termasuk tantangan negara dalam mengatasi berbagai ketimpangan dan aspek sosial lainnya yang sering berimbas dalam dunia pendidikan, antara lain masalah intoleransi, kekerasan, gizi siswa, korupsi dan pungli, serta berbagai aspek regulasi pendidikan yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan warga negara.

Sumber : <http://new-indonesia.org/beranda/2016-03-25-08-28-09/berita-new-indonesia/850-praktisi-penting,-kalangan-muda-lebih-melek-anggaran.html>

Rektor Dipilih Presiden, Kepercayaan Terhadap Akademisi Luntur

Agregasi Sindonews.com, Jurnalisi · Kamis 08 Juni 2017 11:09 WIB



Foto: Shutterstock

JAKARTA - Rencana rektor perguruan tinggi dipilih melalui pertimbangan presiden terus mendapat pertentangan dari publik. Rencana tersebut dinilai sebagai bentuk upaya mengintervensi kampus untuk kepentingan politik tertentu.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji khawatir jika rencana itu berjalan mulus bisa mengubah kampus menjadi daerah kekuasaan partai politik. Dia mengingatkan, kampus memiliki otonomi sendiri.

"Berarti presiden tidak mempercayai ilmuan, akademisi, dan guru besar yang ada di kampus," ujar Ubaid seperti dilansir dari SINDOnews, Kamis (8/6/2017).

Dia menegaskan, adanya kekhawatiran jaringan ISIS masuk dunia kampus bukan alasan tepat untuk memuluskan rencana tersebut. Menurutnya kementerian terkait cukup melakukan evaluasi pola pendidikan di kampus dan sekolah yang terindikasi disusupi paham radikal, bukan membuat rencana pemilihan rektor melalui pertimbangan presiden.

"Pola pendidikan agama di sekolah dan kampus perlu dievaluasi," ucapnya.(sus)

Sumber : <https://news.okezone.com/read/2017/06/08/65/1710690/rektor-dipilih-presiden-kepercayaan-terhadap-akademisi-luntur>

Kepercayaan Presiden terhadap Akademisi Dinilai Semakin Luntur

Rakhmatulloh

Jum'at, 2 Juni 2017 - 13:51 WIB

views: 7.463



Kegiatan di Perguruan Tinggi. Foto/Dok/SINDOnews/Ilustrasi.

JAKARTA - Rencana rektor perguruan tinggi dipilih melalui pertimbangan presiden terus mendapat pertentangan dari publik. Rencana tersebut dinilai sebagai bentuk upaya mengintervensi kampus untuk kepentingan politik tertentu.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji khawatir jika rencana itu berjalan mulus bisa mengubah kampus menjadi daerah kekuasaan partai politik. Dia mengingatkan, kampus memiliki otonomi sendiri.

"Berarti presiden tidak mempercayai ilmuan, akademisi, dan guru besar yang ada di kampus," ujar Ubaid kepada SINDOnews melalui telepon, Jumat (2/6/2017).

Dia menegaskan, adanya kekhawatiran jaringan ISIS masuk dunia kampus bukan alasan tepat untuk memuluskan rencana tersebut. Menurutnya kementerian terkait cukup melakukan evaluasi pola pendidikan di kampus dan sekolah yang terindikasi disusupi paham radikal, bukan membuat rencana pemilihan rektor melalui pertimbangan presiden. (Baca: Klarifikasi Mendagri Soal Rektor Dipilih Presiden)

"Pola pendidikan agama di sekolah dan kampus perlu dievaluasi," ucapnya. (kur)

Sumber : <https://nasional.sindonews.com/read/1210146/144/kepercayaan-presiden-terhadap-akademisi-dinilai-semakin-luntur-1496386278>

Polisi Usut Video Anak-anak ‘Bunuh Ahok’ saat Pawai Obor

Marselinus Gual, CNN Indonesia | Jumat, 26/05/2017 15:41 WIB



Polisi Usut Video Anak-anak ‘Bunuh Ahok’ saat Pawai Obor Polisi akan mengusut keberadaan video anak-anak yang bernyanyi “bunuh si Ahok’ saat pawai obor di Jakarta beberapa hari lalu. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya akan menyelidiki video anak-anak yang bernyanyi ‘bunuh si Ahok’ saat pawai obor warga menyambut bulan Ramadan di satu kawasan di Jakarta, Rabu (24/5) lalu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, polisi akan menyelidiki apakah ada pihak yang menyuruh anak-anak menyerukan kata yang kurang pantas itu.

“Semuanya kami cari untuk mendapatkan itu,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/5). Argo mengatakan pihaknya membuka ruang jika ada warga yang memberikan kesaksian adanya peristiwa itu. Saat ini, kata dia, polisi perlu membuktikan apakah video itu asli atau bukan.

Video itu viral di media sosial dan saat yang bersamaan terjadi ledakan bom bunuh diri di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dalam video itu anak-anak berteriak dan bernyanyi dengan kalimat yang mengandung kekerasan. Mereka menyanyikan: “bunuh, bunuh si Ahok sekarang juga”.

Dalam video yang diambil pada malam hari itu tampak anak-anak dan orang dewasa berpakaian serba putih berpawai membawa bendera dan obor.

Menanggapi video itu, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengaku khawatir benih-benih kebencian yang muncul dari anak-anak akan menjadikan mereka kelompok radikal baru di masa mendatang.

Lihat juga:IPW: Bom Kampung Melayu Serangan Terbesar terhadap Polri

Menurut dia, sejumlah hal yang harus dievaluasi adalah materi Pendidikan Agama Islam (PAI) termasuk kualitas gurunya.

Ubaid mengatakan pihaknya melihat konten agama Islam di sekolah umum relatif masih mengajarkan hal-hal yang intoleran terhadap warga yang berbeda. Sehingga, jelas dia, ada anggapan bahwa 'saya muslim' dan 'anda kafir.'

Menurut Ubaid, anak-anak tersebut dikhawatirkan akan tumbuh dengan memusuhi kelompok yang berbeda dengan dirinya sebagai orang Islam.

"Mereka akan memusuhi yang lain," kata Ubaid.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170526153128-20-217474/polisi-usut-video-anak-anak-bunuh-ahok-saat-pawai-obor?>

Video 'Bunuh si Ahok', Anak Dikhawatirkan Tumbuh Radikal

Anugerah Perkasa, CNN Indonesia | Jumat, 26/05/2017 08:39 WIB



Youtube. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkhawatirkan benih-benih kebencian yang muncul dari anak-anak akan menjadikan mereka kelompok radikal baru di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Koordinator JPPI Ubaid Matraji menanggapi video yang beredar tentang anak-anak yang meneriakan, "bunuh ... bunuh si Ahok sekarang juga..." Dia menuturkan sejumlah hal yang harus dievaluasi adalah materi Pendidikan Agama Islam (PAI) termasuk kualitas gurunya.

Ubaid menegaskan pihaknya melihat konten agama Islam di sekolah umum relatif masih mengajarkan hal-hal yang intoleran terhadap warga yang berbeda. Sehingga, papar dia, ada anggapan bahwa 'saya muslim' dan 'anda kafir'.

"Mereka akan memusuhi yang lain," kata Ubaid ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (26/5). "Berpotensi radikal jika ini terus dipupuk dan akan menjadi 'sumbu pendek' kapan pun."

Menurutnya, anak-anak tersebut dikhawatirkan akan tumbuh dengan memusuhi kelompok yang berbeda dengan dirinya sebagai orang Islam.

Diketahui, video yang menyebar di media sosial itu merekam anak-anak berteriak dan bernyanyi dengan kalimat yang mengandung kekerasan, diduga diambil saat pawai menyambut bulan Ramadan di satu kawasan di Jakarta, Rabu (24/5).

Dalam video yang diambil pada malam hari itu tampak anak-anak dan orang dewasa berpakaian serba putih berpawai membawa bendera dan obor.

Kalimat yang diucapkan adalah: "bunuh ... bunuh ... bunuh si Ahok ... bunuh si Ahok sekarang juga."

JPPI meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengevaluasi materi ajaran PAI yang mengajarkan intoleransi.

Ubaid menuturkan pihaknya meminta agar pendidikan guru PAI pun dapat menggandeng organisasi Islam moderat macam NU dan Muhammadiyah yang relatif memiliki pandangan toleran terhadap kelompok lainnya.

Radikal di Tingkat SMA

Dalam survei yang dilakukan Setara Institute pada Mei 2016, ditemukan sejumlah siswa SMA negeri di Jakarta dan Bandung Raya setuju dengan sistem khilafah dan perjuangan ISIS. Dalam riset itu dipaparkan, terdapat 11 persen siswa yang menyatakan khilafah adalah sistem terbaik.

Survei itu dilakukan di 171 sekolah di Jakarta dan Bandung Raya dengan sampel 760 siswa.

Selain itu, ada pula yang mendukung apa yang diperjuangkan oleh ISIS. "Terdapat 1 persen responden yang menyatakan mendukung apa yang diperjuangkan ISIS. Ada pula 0,4 persen responden yang menyatakan mendukung aksi terorisme," demikian Aminuddin Syarif, Peneliti Setara Institute, dalam keterangan resminya yang dikutip CNNIndonesia, Jumat (26/5).

Setara merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama serta dinas pendidikan memastikan iklim kondusif untuk penguatan toleransi di lingkungan sekolah. Selain itu, kata Aminuddin, pemerintah juga dapat memberikan pendidikan berkelanjutan bagi guru PAI.

"Terorisme adalah puncak dari intoleransi, maka kinerja pemberantasan terorisme dan radikalisme juga harus mencakup pada promosi dan penguatan toleransi bagi siswa," kata dia.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170526082933-20-217359/video-bunuh-si-ahok-anak-dikhawatirkan-tumbuh-radikal?>

“Terorisme adalah puncak dari intoleransi, maka kinerja pemberantasan terorisme dan radikalisme juga harus mencakup pada promosi dan penguatan toleransi bagi siswa,”

JPPI Mengecam Keras Dugaan Penganiayaan Taruna Akpol

May 19, 2017



ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, SEMARANG: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam keras terhadap penganiayaan hingga mengakibatkan kematian yang dialami Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL) tingkat II Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) asal Ambon Mohammad Adam.

Dugaan sementara dipukuli oleh senior dan sekitar 21 orang yang menjadi saksi. Diduga karena korban telah melakukan kesalahan terkait kedisiplinan, Kamis (18/05/2017) kemarin.

Menurut Nailul Faruq selaku kordinator advokasi JPPI, kekerasan pendidikan Akpol yang dialami Brigadir Mohammad Adam sampai meninggal dunia kurang pengawasan dari pengasuh.

"Saya dari pihak JPPI, mengecam keras atas aksi penganiayaan yang terjadi dan sampai mengakibatkan hilang nyawa seorang Taruna Akpol Tingkat II (Brigdatar) Muhammad Adam, bila perlu Pak Kapolri ikut turun tangan dan mengusut tuntas masalah ini," ujarnya kepada kanalindonesia, saat dikonfirmasi lewat sambungan telephone seluler, Jumat (19/05/2017).

Nailul mengatakan, motif kejadian ini semacam tradisi ketika junior bertemu senior lalu kemudian ada semacam penggojlokkan dan ada motif semacam balas dendam. merujuk kejadian

sebelumnya tidak hanya yang dialami Akpol saja, kejadian seperti kasus-kasus lain dalam dunia pendidikan Indonesia sudah sangat mencoreng.

Merujuk hasil penelitian yang dilakukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam indeks layanan pendidikan di Indonesia pada tahun 2016 yang disebut Right To Education Indeks (RTEI) menyebutkan bahwa ada 3 problem utama pendidikan di Indonesia

1. Kualitas guru rendah
2. Sekolah tidak ramah terhadap anak
3. Diskriminasi kelompok marjinal

Menyikapi tindak kekerasan hingga menewaskan salah satu Taruna di Akpol, Nailul Faruq mengatakan, JPPI memandang bahwa:

1. Kekerasan masih dianggap sebagai bagian dari pembelajaran
2. Lengahnya pengawasan dari pemerintah dan dewan pendidikan
3. Relasi senior dan junior masih menjadi tradisi di sekolah yang diwarisi turun menurun
4. Sanksi atas pelaku pelanggaran kekerasan di lingkungan sekolah masih belum mengenai semua pihak yang terlibat, tapi hanya pelaku dilapangan.
5. Lemahnya peran komite sekolah dan peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan atas kasus-kasus pendidikan.
6. Pelaku harus diusut dan dihukum berat sesuai pasal yang berlaku, sampai ada efek jera.

Dia menambahkan, perlu adanya kesadaran kuat dari pihak terkait. Misalnya pembiasaan dan teladan, menjelaskan filosofi dan nilai – nilai perilaku, kalau memberikan punishment harus dengan cara mendidik dan menimbulkan kesadaran, bukan malah memberikan sakit hati atau sakit fisik.

"Kami berharap semoga kasus ini menjadi yang terakhir di dunia pendidikan dan polisi bisa bergerak cepat serta mengusut tuntas masalah yang dialami Taruna Akpol yang meninggal dunia (Brigdatar) Mohammad Adam, bila perlu dihukum berat oknum yang sudah membunuhnya."tegasnya. (Andi)

Sumber : <https://kanalindonesia.com/18108/2017/05/19/jppi-mengecam-keras-dugaan-penganiayaan-taruna-akpol/>

Categories Hukum

Kasus Penganiayaan Taruna dan Kekerasan Dunia Pendidikan

REDAKSIJum'at, 19/05/2017 17:00 WIB



Akademi kepolisian Semarang/Twitter.com

Dunia akademisi kembali digegerkan dengan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Kali ini peristiwa itu menimpa Taruna Akademi Kepolisian (Akp) Semarang Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dunia akademisi kembali digegerkan dengan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Kali ini peristiwa itu menimpa Taruna Akademi Kepolisian (Akp) Semarang Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam.

Adam diketahui tewas dengan kondisi luka di kedua paru-paru. Kondisi tewasnya korban diketahui setelah Rumah Sakit Bhayangkara Semarang melakukan otopsi terhadap jenazah korban. "Korban tewas dengan luka di kedua paru-paru," ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Djarod Padakova, Kamis (18/5).

Dijelaskan Djarot dari pemeriksaan luka luar, diketahui terdapat luka memar di dada tengah, kiri, dan kanan. Berdasarkan analisa tim medis, korban tewas akibat luka di kedua paru-paru sehingga mengalami gagal napas dan kekurangan oksigen.

“Hasil autopsi sudah keluar. Korban luka di paru-paru kanan dan kiri karena tekanan kuat. Korban pingsan dan kekurangan oksigen,” tutur Djarod.

Luka-luka tersebut ditengarai akibat penganiayaan. Korban sendiri dinyatakan tewas sekitar pukul 02.45 WIB, Kamis (18/5). Sebelumnya korban sempat tewas di gudang, yang diduga juga menjadi tempat kejadian perkara. Sebelumnya korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Akpol, namun kondisi korban sangat kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit tersebut.

POLisi pun langsung menggelar penyidikan atas tewasnya taruna tingkat II Brigdadar Muhammad Adam. Sejauh ini menurut Djarod polisi telah menyita sejumlah barang bukti diantaranya s

Polisi sendiri menyatakan belum mengetahui pemilik barang tersebut. Namun diakui Djarot kedua benda itu ditemukan di lokasi kejadian yaitu flat A yang merupakan ruangan kosong.

“Di flat A, ruangan kosong yang disebut gudang, berkumpulnya di situ. Kopel milik siapa belum tahu,” tandasnya.

Polisi sejauh ini juga belum mengungkap pelaku yang diduga telah melakukan penganiayaan itu. Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian berjanji akan mengungkap seterang-terangnya kasus tersebut.

“Saya perintahkan Gubernur (Akpól), selain korban dibantu, juga lakukan tindakan tegas kepada taruna yang terlibat. Saya minta untuk dipidanakan. Saya juga minta Kapolda, Pak Condro untuk memproses pidana,” kata Tito.

Tito bahkan meminta Propam untuk turun tangan langsung ke Akpol. Untuk mengusut dan mengevaluasi profesionalitas dan kinerja para pengasuh taruna.

“Saya minta Propam turun ke sana untuk melihat sampai sejauh mana lembaga Akpol untuk menghentikan budaya kekerasan pemukulan senior-junior,” ujar Tito.

Tito memang mengaku geram dengan kejadian tersebut. Ia merasa seperti kecolongan dengan kejadian ini. Sebab sebelumnya dalam kunjungannya ke Akpol Semarang telah mewanti-wanti agar para taruna dan pengasuh Akpol untuk menghentikan budaya kekerasan dan pemukulan di lingkungan Akademi Polisi.

Ia menilai budaya tersebut lebih banyak mudaratnya dan tidak menguntungkan. Juga diingatkan sesuai Program Promoter, budaya kekerasan untuk dikurangi dan tidak berlebihan.

“Saya menyesalkan peristiwa itu karena beberapa bulan lalu saat saya kunjungan ke Akpol, saya tegaskan ke seluruh taruna dan pengasuh supaya budaya kekerasan pemukulan nggak terjadi lagi,” ujar Tito di (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/5) kemarin.

Jenazah taruna Mohammad Adam yang akrab dipanggil Nando telah dimakamkan di Jalan Makam, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Isak tangis mengiringi pemakamannya pada Jumat siang. Namun keluarga tak ribut-ribut mempersoalkan kematian pemuda yang pada 20 Juni nanti genap berusia 21 tahun ini. Hanya berharap pelakunya bisa dihukum setimpal atas perbuatannya.

KEKERASAN DUNIA PENDIDIKAN MEMPRIHATINKAN - Kasus kekerasan dan penganiayaan di lingkungan pendidikan sepertinya terus saja terjadi. Kejadian di Akademi Kepolisian Semarang dan sejumlah lembaga pendidikan lainnya sepertinya tak pernah menjadi pelajaran, untuk memperbaiki diri.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pun mengecam keras aksi kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Taruna Akademi Kepolisian (Akp) Semarang Tingkat II, Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam. Ia diduga tewas setelah dipukuli para seniornya yang menurut dugaan awal, karena korban melakukan kesalahan disiplin.

JPPI menilai kekerasan anak di sekolah di berbagai daerah di Indonesia sudah memasuki tahap memprihatinkan. Merujuk hasil penelitian JPPI dalam indeks layanan pendidikan di Indonesia atau Right to Education Index (RTEI), ada 3 Problem Utama Pendidikan Indonesia: 1). Kualitas Guru Rendah, 2). Sekolah Tidak Ramah Anak, dan 3). Diskriminasi Kelompok Marjinal

Menanggapi aksi kekerasan di Akpol Semarang, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memandang, bahwa kekerasan masih dianggap sebagai bagian dari cara pembelajaran, misalnya untuk pendisiplinan, hal ini dinilai tidak tepat. "Semestinya pendidikan ditanam melalui penyadaran, bukan ancaman," ujar Nailul Faruq, Koordinator Advokasi JPPI dalam keterangannya kepada gresnews.com.

Selain itu pengawasan pemerintah dan dewan pendidikan juga dinilai lengah. Relasi senior dan junior masih menjadi tradisi di sekolah yang diwariskan turun temurun. Sementara sangsi atas pelaku pelanggaran kekerasan di sekolah masih belum mengenai semua pihak yang terlibat, tapi hanya pelaku lapangan.

Disisi lain lemahnya peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan atas kasus-kasus pendidikan. Untuk itu pelaku kekerasan harus diusut tuntas dan dihukum berat sesuai pasal yang berlaku, sehingga ada efek jera. (dtc)

Sumber : <http://www.gresnews.com/berita/hukum/170195-kasus-penganiayaan-taruna-dan-kekerasan-dunia-pendidikan/1/>

PENDIDIKAN

Penerimaan Siswa Baru Diatur dengan Ketat

ESTER LINCE NAPITUPULU 18 Mei 2017 • 16:45 WIB



JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan siswa baru dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA/SMK sederajat diatur dengan ketentuan baru dalam Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Dalam ketentuan baru ini diatur secara ketat soal syarat penerimaan, seleksi, biaya, jumlah rombongan belajar, dan zonasi.

Persoalan ini diungkap dalam Diskusi Publik bertema "Menyoal Kebijakan Penerimaan Siswa Baru Kemdikbud dan Kemenag 2017" di Jakarta, Kamis (18/5). Diskusi digelar Network for Education Watch (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Indonesia Corruption Watch, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan.

Hartono dari Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, mengatakan, Permendikbud soal PPDB 2017/2018 dikeluarkan tanggal 8 Mei lalu. Dengan demikian, peraturan pemerintah daerah soal PPDB harus menyesuaikan dengan aturan baru ini.

"Ada hal baru soal zonasi. Pemda harus menetapkan zonasi sesuai kondisi daerah dan daya tampung sekolah. Terkait zonasi, paling sedikit 90 persen menerima siswa yang tinggal di daerah yang masuk zonasi supaya jarak rumah dan sekolah terjangkau," kata Hartono.

Selain itu, diatur bahwa sekolah negeri ataupun swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak boleh memungut dana PPDB. Jumlah siswa per kelas hingga jumlah rombongan belajar di tiap sekolah juga ditetapkan dari jumlah minimal dan maksimal.

Koordinator JPPI Ubaid Maraji mengatakan, aturan pemerintah pusat soal PPDB terlambat. "Sudah ada sekolah dan madrasah yang terima siswa baru. Kami menyayangkan Permendikbud ini yang baru keluar, padahal di lapangan PPDB sudah terjadi," kata Ubaid.

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/05/18/penerimaan-siswa-baru-diatur-dengan-ketat/>

JPPI Kecam Aksi Kekerasan di Lingkungan Akademisi Polisi Semarang



Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Nailul Faruq

VIEWS: 3.420

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam keras, aksi kekerasan yang merenggut nyawa Taruna Akademi Kepolisian (Akpil) Semarang Tingkat II, Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam.

Brigdatar Mohammad Adam, diduga tewas setelah dipukuli oleh para seniornya. Akibat korban telah melakukan kesalahan disiplin pada Kamis (18/05/2017) kemarin.

Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq mengatakan, kekerasan pada anak di sekolah yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sudah memasuki tahap memprihatinkan. Hal tersebut, merujuk pada hasil penelitian JPPI dalam indeks layanan pendidikan di Indonesia pada tahun 2016 silam, yang disebut Right to Education Index (RTEI). menyebutkan bahwa ada sekitar 80 persen siswa menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan dengan tiga problem utama pendidikan di Indonesia.

“Dari hasil penelitian ada tiga problem utama pendidikan di Indonesia. Pertama, terkait kualitas guru yang rendah. Kedua, sekolah tidak ramah anak. Kemudian yang ketiga, diskriminasi kelompok marjinal,” kata Nailul Faruq, kepada SUARADEWAN.com, Jum’at (19/5).

Nailul Faruq menjelaskan, menyikapi aksi kekerasan di Akpol Kota Semarang tersebut, JPPI memandang bahwa, pertama, kekerasan masih dianggap sebagai bagian dari cara pembelajaran, misalnya untuk pendisiplinan dan ini salah. Semestinya pendidikan harus ditanam melalui penyadaran, bukan ancaman. Kedua, lengahnya pengawasan dari pemerintah dan dewan pendidikan.

Ketiga, relasi senior dan junior masih menjadi tradisi di sekolah yang diwarisi turun temurun. Keempat, sangsi atas pelaku pelanggaran kekerasan disekolah masih belum mengenai semua pihak yang terlibat, tapi hanya pelaku lapangan. Kelima, lemahnya peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan atas kasus-kasus pendidikan. Keenam, pelaku harus diusut tuntas dan dihukum berat sesuai dengan pasal yang berlaku, sampai ada efek jera.

“Selain itu, perlu adanya penyadaran yang kuat dari pihak terkait, tentunya dengan cara melakukan pembiasaan dan teladan. Menjelaskan filosofi dan nilai-nilai dari perilaku. Kemudian, kalau memberlakukan punishmen, juga harus dilakukan dengan cara yang mendidik dan menimbulkan kesadaran, bukan malah membuat sakit hati dan sakit fisik,” jelasnya. (fn)

Sumber : <http://www.suaradewan.com/jppi-kecam-aksi-kekerasan-di-lingkungan-akademisi-polisi-semarang/>

SISTEM ZONASI DITERAPKAN, SISWA HARUS MENDAFTAR...

PENERIMAAN SISWA BARU

Sistem Zonasi Diterapkan, Siswa Harus Mendaftar di Sekolah Terdekat

ESTER LINCE NAPITUPULU 19 Mei 2017 • 09:24 WIB



KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Siswa baru SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat mulai tahun ajaran baru ini akan diutamakan diterima di sekolah terdekat dengan rumah tinggal. Siswa di Kepulauan Aru, Maluku, sedang berkumpul di halaman sekolah, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan peserta didik tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat mulai tahun ajaran 2017/2018 harus mengikuti ketentuan mengenai zonasi. Peserta didik harus diterima di sekolah yang terdekat dengan rumah. Namun, ketentuan soal zonasi ini dapat dilakukan secara bertahap, bergantung kesiapan pemerintah daerah masing-masing.

“Ada semangat untuk membuat mutu sekolah sama baiknya. Karena itu, sistem zonasi mulai diterapkan dalam penerimaan siswa baru mulai tahun ajaran baru nanti, yang pendaftaran untuk sekolah negeri pada Juni-Juli. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang baru diterbitkan Mei ini. Nanti, pemda yang menindaklanjuti sesuai kondisi di daerah masing-masing,” kata Kepala Subbagian Hukum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan M Hartono dalam acara diskusi publik bertema “Menyoal Kebijakan Penerimaan Siswa Baru Kemdikbud dan Kemenag 2017” di Jakarta, Kamis (18/5). Diskusi digelar Network for Education Watch (NEW)/Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP).

“Ada hal baru soal zonasi. Pemda harus menetapkan zonasi sesuai kondisi daerah dan daya tampung sekolah. Terkait zonasi, paling sedikit 90 persen menerima siswa yang tinggal di daerah yang masuk zonasi supaya jarak rumah dan sekolah terjangkau,” kata Hartono.

Sekolah tetap bisa menerima siswa di luar zonasi dari jalur prestasi sekitar 5 persen dari daya tampung. Demikian pula siswa yang pindah dari daerah lain karena mengikuti orangtua yang pindah atau karena bencana alam sekitar 5 persen.

Mengacu pada permendikbud terbaru soal PPDB, ditetapkan untuk SD diutamakan menerima siswa baru yang sudah berumur 7 tahun dan mempertimbangkan jarak rumah dan sekolah. “Tidak boleh ada tes membaca, menulis, dan menghitung untuk siswa SD,” ujar Hartono.

“Tidak boleh ada tes membaca, menulis, dan menghitung untuk siswa SD.”

M Hartono

Adapun untuk siswa SMP dan SMA, soal jarak sekolah dan rumah jadi pertimbangan utama, selain pertimbangan lain, seperti nilai saat lulus di sekolah sebelumnya atau prestasi lainnya. SMK tidak mengikuti zonasi karena bidang keahlian yang beragam.

Jumlah siswa

Menurut Hartono, penerimaan siswa baru juga harus mengikuti ketentuan jumlah siswa per kelas dan jumlah rombongan belajar per sekolah. Untuk SD, setiap kelas menampung 20-28 siswa, SMP 20-32 siswa, SMA 20-36 siswa, serta SMK 15-36 siswa. Untuk SD luar biasa ditetapkan maksimal lima siswa serta SMP dan SMA luar biasa masing-masing maksimal 8 siswa per kelas.

Sekolah pun, ujar Hartono, harus mulai mengikuti ketentuan soal jumlah rombongan belajar atau kelas. Di SD ditetapkan 6-24 rombongan belajar, SMP 3-33 rombongan belajar, SMA 3-36 rombongan belajar, dan SMK 3-72 rombongan belajar.

“Ketentuan ini supaya ada pemerataan siswa di sekolah-sekolah. Apalagi, ke depannya dengan sistem zonasi, pemerintah harus menjamin mutu sekolah yang setara di daerahnya,” kata Hartono.

Selain itu, diatur bahwa sekolah negeri dan swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak boleh memungut dana PPDB. Meski demikian, sekolah diperbolehkan membuka sumbangan yang besarnya tidak diatur serta tidak memaksa.

Sekolah diperbolehkan membuka sumbangan yang besarnya tidak diatur serta tidak memaksa.

Memastikan kualitas

Koordinator JPPI Ubaid Maraji mengatakan, semangat dalam permendikbud soal PPDB terutama zonasi patut diapresiasi. Namun, pemerintah dan pemda harus memastikan sekolah yang ada di pinggiran pun, yang diakses siswa miskin, punya kualitas yang sama baik dengan sekolah-sekolah di kota. "Ketentuan ini harus dipastikan bisa diimplementasikan pemda. Soal peningkatan mutu sekolah, bisa dilakukan dengan merotasi guru-guru berkualitas ke sekolah yang butuh dukungan dalam peningkatan mutunya," ujar Ubaid.

Koordinator KMSTP dan Peneliti ICW, Febri Hendri, mengatakan, penerimaan siswa baru harus transparan dan akuntabel, bebas dari intervensi pejabat hingga politisi yang mau menitipkan anak atau kenalannya di sekolah tertentu yang dianggap favorit. Selain itu, perlu juga mengawasi sekolah swasta yang semakin mahal mematok biaya sekolah demi melindungi masyarakat untuk benar-benar mendapatkan layanan pendidikan bermutu seperti yang dijanjikan pengelola.

Sekretaris Asosiasi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia Jumono mengatakan, masyarakat, terutama siswa miskin, sering terhambat urusan administrasi dan biaya dalam penerimaan siswa baru. "Harus dipastikan siswa baru tidak terhambat dalam penerimaan," kata Jumono.

Sumber : <https://kompas.id/baca/utama/2017/05/19/sistem-zonasi-diterapkan-siswa-harus-mendaftar-di-sekolah-terdekat/>

JPPI Kecam Keras Aksi Kekerasan di Akpol Semarang

Jumat, 19 Mei 2017 | 08:48 WIB



Skalanews - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam keras aksi kekerasan hingga meninggalnya Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Tingkat II, Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam.

Diduga korban tewas akibat dipukuli oleh para seniornya karena korban telah melakukan kesalahan disiplin pada Kamis (18/05) kemarin.

"Kekerasan anak di sekolah di berbagai daerah di Indonesia sudah memasuki tahap memprihatinkan," ujar Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq dalam keterangan tertulis ke skalanews, Jakarta, Jumat (19/5)

Nailul menambahkan berdasar hasil penelitian JPPI dalam indeks layanan pendidikan di Indonesia pada tahun 2016, yang disebut Right to Education Index (RTEI). Menyebutkan bahwa ada tiga Problem Utama Pendidikan Indonesia. Yakni, kualitas guru rendah, sekolah tidak ramah anak, dan diskriminasi kelompok marjinal.

Untuk menyikapi aksi kekerasan di Akpol Semarang itu Nailul mengungkapkan bahwa aksi kekerasan masih dianggap sebagai bagian dari cara pembelajaran, misalnya untuk pendisiplinan. "Ini salah. Semestinya pendidikan harus ditanam melalui penyadaran, bukan ancaman," tegasnya

Ia juga mengatakan lengahnya pengawasan dari pemerintah dan dewan pendidikan. Relasi senior dan junior masih menjadi tradisi di sekolah yang diwarisi turun temurun. Sanksi atas pelaku pelanggaran kekerasan di sekolah masih belum mengenai semua pihak yang terlibat, tapi hanya pelaku lapangan.

Dan juga lemahnya peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan atas kasus-kasus pendidikan. Pelaku juga harus diusut tuntas dan dihukum berat sesuai dengan pasal yang berlaku, sampai ada efek jera.

Selain itu, Nailul mengatakan perlu adanya kesadaran yang kuat dari pihak terkait. Kesadaran bisa dilakukan dengan pembiasaan dan teladan. "Pendidikan kita miskin teladan. Misalnya guru melarang siswa membuat gaduh di kelas dengan nada teriak," katanya.

Kemudian, menjelaskan filosofi dan nilai-nilai dari perilaku. Misalnya, bukan soal datang tepat waktu atau terlambat, tapi siswa harus diberikan pemahaman makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam disiplin waktu.

Lalu, jelas Nailul kalau memberlakukan punishment, juga harus dilakukan dengan cara yang mendidik dan menimbulkan kesadaran, bukan malah membuat sakit hati dan sakit fisik. (deddibayu/bus)

Sumber : <https://skalanews.com/detail/nasional/umum/288545-JPPI-Kecam-Keras-Aksi-Kekerasan-di-Akpol-Semarang>

Meningkatnya Angka Kekerasan di Sekolah

Senin, 15/05/2017 21:00 WIB



Peserta yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) membawa poster pada hari Bebas Kenderaan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI Jakarta Minggu, (14/5) (ANTARA)

Angka kekerasan di lingkungan pendidikan terus meningkat. Angka tersebut didasarkan pada banyaknya laporan pengaduan kasus kekerasan sekolah di situs laporpendidikan.com.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Angka kekerasan di lingkungan pendidikan terus meningkat. Angka tersebut didasarkan pada banyaknya laporan pengaduan kasus kekerasan sekolah di situs laporpendidikan.com. Setidaknya terhitung sejak Januari hingga Mei 2017, tercatat sudah ada 525 kasus pengaduan kekerasan di lingkungan sekolah.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyatakan, 80 persen siswa menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan. Argumentasi itu juga diperkuat hasil survei Right to Education Index (RTEI) yang dilakukan JPPI pada 2016.

Menurutnya ada bermacam-macam kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Paling umum terjadi adalah bullying antarpelajar. Tak hanya itu, tawuran antarsekolah serta senioritas yang menjurus pada penindasan masih kerap terjadi. Lebih memprihatinkan lagi kekerasan di sekolah justru melibatkan pendidik. Pendidik disebut kerap memberi tekanan terhadap murid dengan dalih perintah otoritas sekolah, maupun dengan tujuan untuk mendisiplinkan siswa.

Kondisi ini cukup prihatin karena terus mendera dunia pendidikan Indonesia. Untuk itu, JPPI bekerjasama dengan kelompok pemuda dan pelajar anti kekerasan IPYG (International Peace Youth Group) menggalakan kampanye public menolak kekerasan di dunia pendidikan. Kampanye itu diantaranya dilakukan pada Minggu 14 Mei 2017 di lokasi car free day. Kampanye ini ditempuh dengan melakukan PEACE WALK di sepanjang area car free day di jalan MH. Thamrin Jakarta. Kesempatan itu juga digunakan JPPI untuk mengajak masyarakat agar turut serta melakukan upaya menghentikan kekerasan di sekolah.

Masyarakat dihimbau jika menemukan kasus serupa untuk berperan melaporkan melalui situs pengaduan laporpendidikan.com. Ubaid menuturkan sejauh ini belum banyak masyarakat dan peserta didik yang mau melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dialami. Sebab, tak jarang siswa yang berani melapor lantas dipanggil pihak sekolah. "Mereka dianggap mencemarkan nama baik sekolah, atau malah mendapatkan intimidasi," ujar Ubaid dalam rilisnya.

JPPI sendiri beranggapan bahwa kekerasan di sekolah juga berpotensi buruk dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Salah satunya adalah mengerasnya sifat egoisme dan sikap intoleransi terhadap yang berbeda pandangan. Maka, tak heran jika ada riset yang mengemukakan bahwa kisaran 7 hingga 10 persen siswa berpotensi radikal. Riset ini dilakukan Setara Institut 2015 dan juga Wahid Foundation 2016. Meskipun persentasenya kecil, tetapi jika 10 % dari jumlah siswa maka menemukan jumlah yang banyak.

Oleh karenanya JPPI merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah; untuk lebih tegas dan konsisten melindungi anak, pihak sekolah dan pemerintah harus memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan, Sistem whistleblower harus mendapat dukungan penuh dari pihak pemerintah dan sekolah, Sekolah harus menekankan pengembangan karakter luhur, serta seluruh stakeholder sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan sekolah sehat, aman dan ramah anak.

SOLUSI KEKERASAN DI SEKOLAH - Survei International Center for Research on Women (ICRW) beberapa waktu lalu mencatat Indonesia adalah negara dengan tingkat kekerasan tertinggi yakni sebesar 84 persen, atau di bawah Vietnam (79 persen), Nepal (79 persen), Kamboja (73 persen), dan Pakistan (43 persen). Data tersebut juga dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti, Sekolah Ramah Anak menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kekerasan di lembaga pendidikan. Kriteria Sekolah ramah anak ini , antara lain harus aman, memenuhi hak anak, melindungi dari kekerasan, sehat, peduli dan berbudaya serta mendukung partisipasi anak.

Menurutnya, guru dan orangtua harus ada kesepahaman mengenai penanganan pendidikan anak di sekolah. "Seluruh komponen sekolah yaitu kepala sekolah, guru, murid dan orang tua murid harus memiliki perspektif yang sama mengenai pendidikan," ujar Maria Februari lalu.

Menghadapi maraknya kekerasan di sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah sejak 2016 lalu, telah mengeluarkan Permendikbud No 82 Tahun 2015 terkait pencegahan tindak kekerasan oleh siswa maupun dialami siswa. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Anies Baswedan, sempat mengancam jika sekolah tak menjalankan keputusan itu maka sekolah dilarang mengisi Dapokdi.

Dalam Permendikbud itu sekolah diwajibkan untuk membentuk dan memiliki gugus pencegahan kekerasan, yang anggotanya terdiri dari guru, orang tua dan siswa. Disamping itu, ia juga meminta adanya Gugus Pencegahan di tiap kota dan provinsi yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD.

Aturan tersebut juga mengharuskan semua sekolah diwajibkan memajang nomer telpon Kepala sekolah, polsek, Polres, dinas provinsi termasuk email. Tujuannya untuk memberikan jalur melaporkan dan minta pertolongan jika ada masalah.

"Jadi sekarang ini pastikan sekolah ada itu papan dan gugus, kalau tidak ada kita akan tindak tegas," ujarnya kala itu.

Sumber : <http://www.gresnews.com/berita/sosial/210155-meningkatnya-angka-kekerasan-di-lingkungan-sekolah/0/>

Kekerasan di Dunia Pendidikan Masih Tinggi

15 Mei 2017 • 16:15 WIB



KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Suasana kegiatan belajar-mengajar di sebuah SD di Kepulauan Aru, Maluku, beberapa waktu lalu. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah ditengarai masih tinggi.

JAKARTA, KOM PAS — Kekerasan di lingkungan pendidikan masih tinggi. Sekitar 80 persen siswa menjadi korban kekerasan, baik oleh guru maupun sesama siswa.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, di Jakarta, Senin (15/5), menyatakan, 80 persen siswa menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan. Argumentasi itu diperkuat survei Right to Education Index (RTEI) yang dilakukan JPPI pada 2016 dan juga berdasarkan banyaknya laporan pengaduan kasus kekerasan sekolah di situs Laporpendidikan.com.

Terhitung sejak Januari hingga Mei 2017, sudah ada 525 kasus pengaduan kekerasan di sekolah. "Ada bermacam-macam kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Antara lain yang paling umum adalah bullying antarpelajar," ujar Ubaid.

Lebih lanjut Ubaid mengatakan, tawuran antarsekolah serta senioritas yang menjerus pada penindasan masih kerap terjadi. Di samping itu, yang paling memprihatinkan justru kekerasan di sekolah melibatkan pendidik.

"Pendidik disebut kerap memberi tekanan terhadap murid dengan dalih perintah otoritas sekolah atau dengan tujuan untuk mendisiplinkan siswa," ucap Ubaid.

JPPI merasa perihatin dengan kondisi tersebut. Untuk itu, JPPI bekerja sama dengan kelompok pemuda dan pelajar anti kekerasan, International Peace Youth Group (IPYG), melakukan kampanye kepada publik pada Minggu kemarin dalam acara hari tanpa kendaraan bermotor (car free day). Kampanye ini ditempuh dengan melakukan peace walk di sepanjang area car free day. Pada kesempatan tersebut, JPPI mengajak masyarakat untuk turut serta menghentikan kekerasan di sekolah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan, pemerintah berkomitmen mewujudkan sekolah ramah anak. "Termasuk guru tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apa pun dalam dunia pendidikan," kata Sumarna. (ELN)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/05/15/kekerasan-di-dunia-pendidikan-masih-tinggi/>

Langkan Kompas cetak

15 Mei 2017

Stop Kekerasan di Dunia Pendidikan

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menggelar kampanye "Stop Kekerasan di Dunia Pendidikan". Kegiatan ini serangkaian dengan acara Global Action Week 2017. Melibatkan International Peace Youth Group, acara ini dikemas dalam "Peace Walk to Stop School Violence" di Jakarta, Minggu (14/5). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, kekerasan anak di sekolah di sejumlah daerah di Indonesia sudah memprihatinkan. Banyak siswa yang menganggap kekerasan sebagai tindakan wajar. Salah satu faktornya, banyak guru dan orangtua siswa cenderung tidak mengadukan hal itu karena takut disalahkan. (*/ELN)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/05/15/langkan-136/>

Koordinator JPPI: Kekerasan di Sekolah Bibit Intoleransi

M Sholahadhin Azhar • Minggu, 14 May 2017 08:57 WIB kekerasan



Acara Peace Walk for Education Global Action Week 2017 di areal car free day Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat , Minggu 14 Mei 2017/MTVN/Adin

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut kekerasan di sekolah harus dihentikan. Perilaku itu berpotensi membiasakan siswa berlaku buruk.

“Kekerasan ini bibit intoleransi,” tegas Ubaid saat membuka Peace Walk for Education Global Action Week 2017 di areal car free day Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat , Minggu 14 Mei 2017.

Menurut Ubaid, siswa yang awalnya tertindas bakal menjadi penindas pada waktunya. Pada kondisi ini, intoleransi akan tumbuh subur di lingkungan sekolah. Tak hanya itu, kebiasaan tersebut akan mengganggu proses belajar siswa.

Ubaid mempertanyakan kualitas sumber daya manusia (SDM) jika kekerasan ditanamkan sejak dini. Kualitas SDM harus ditingkatkan melalui kebebasan saat belajar.

“Gimana mau meningkat, kekerasan masih ada di sekolah,” kata Ubaid. (OJE)

Sumber : <http://news.metrotvnews.com/news/zNAj7aZb-koordinator-jppi-kekerasan-di-sekolah-bibit-intoleransi>

Rekomendasi JPPI soal Pemberantasan Kekerasan di Sekolah

M Sholahadhin Azhar • Minggu, 14 May 2017 10:13 WIB #Kekerasan



JPPI bersama siswa mengkampanyekan antikekerasan di sekolah/MTVN/Adin

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberi rekomendasi untuk menindak kekerasan yang menimpa pelajar di Tanah Air. Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan, rekomendasi diberikan untuk beberapa pihak, salah satunya pemerintah.

“Pemerintah harus lebih tegas dan konsisten melindungi anak dengan mengoptimalkan program-program perlindungan yang ada,” tegas Ubaid saat membacakan rekomendasi pada acara Peace Walk to Stop School Violence di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 14 Mei 2017.

Tak hanya itu, lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah, harus menekankan pendidikan agama dan pengembangan karakter. Siswa paling tidak diajari bagaimana bertoleransi dan mengasihi, bukan justru intoleransi dengan dasar perbedaan agama.

Sekolah dan pemerintah juga didesak memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan. Apalagi, tindakan yang memakan korban jiwa.

“Sehingga lingkungan sekolah benar-benar bersih dari kekerasan,” kata Ubaid

Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diminta proaktif dengan mengayomi sekolah di wilayah kerjanya. Suasana fasilitas pendidikan yang sehat, aman, dan ramah terhadap anak harus bisa diwujudkan.

Terakhir mengenai sistem whistleblower yang harus mendapat dukungan penuh dari pihak pemerintah dan sekolah. Itu bisa dilakukan dengan membuat pos-pos pengaduan terintegrasi antara sekolah dan pemerintah.

“Untuk menampung pengaduan akan kasus-kasus kekerasan di sekolah dan cepat ditindaklanjuti dengan cepat oleh pihak yang berwajib,” ujar Ubaid.

Perwakilan steering comitte dari International Peace Youth Group (IPYG), Elsa Syarief, menyebut harus ada langkah konkret pemerintah untuk mengatasi itu. Tak bisa dipungkiri, banyak korban kekerasan di sekolah, bahkan menyebabkan kematian.

“Kekerasan di sekolah ini sudah banyak korban meninggal dunia, di mana itu tak perlu terjadi,” sebut Elsa.(OJE)

Sumber : <http://news.metrotvnews.com/news/ObzWvLZk-rekomendasi-jppi-soal-pemberantasan-kekerasan-di-sekolah>

#kekerasan

JPPI: 80% Siswa Masih Mengalami Kekerasan di Sekolah

M Sholahadhin Azhar - 14 Mei 2017 09:39 wib



JPPI bersama siswa mengkampanyekan antikekerasan di sekolah/MTVN/Adin

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengklaim 80 persen siswa menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan. Argumentasi itu diperkuat survei Right to Education Index (RTEI) pada 2016 dengan ribuan koresponden siswa. "80 persen dari mereka itu mengaku masih alami kekerasan di bangku sekolah," kata Ubaid di area car free day (CFD) Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 14 Mei 2017.

Ada bermacam-macam jenis kekerasan terjadi, yang paling umum ialah bullying antarpelajar. Tak hanya itu, tawuran antarsekolah serta senioritas yang menjurus pada penindasan masih kerap terjadi.

Ubaid mengungkapkan, yang paling memprihatinkan justru kekerasan di sekolah melibatkan pendidik. Pendidik disebut kerap memberi tekanan terhadap murid dengan dalih perintah otoritas sekolah.

Ubaid menuturkan, pihaknya telah membuka website untuk mengakomodasi laporan kekerasan melalui laporanpendidikan.com. Sayangnya, tak jarang siswa yang berani melapor kemudian dipanggil sang guru. "Mereka dianggap mencemarkan nama baik sekolah, malah diintimidasi guru," keluh dia. (OJE)

Sumber : <http://m.metrotvnews.com/read/2017/05/14/700002/jppi-80-siswa-masih-mengalami-kekerasan-di-sekolah>

Ini 7 Masalah Pendidikan yang Harus Diselesaikan Pemerintah

Rabu, 3 Mei 2017 | 07:51 WIB



Siswi SMP/ilustrasi - [risman afrianda/skalanews]

Skalanews - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya ada tujuh masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Diketahui Presiden Joko Widodo melalui Nawacita tengah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan.

"Tapi tampaknya masih ada celah yang harus terus diperbaiki, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan," kata Koordinator Nasional JPPI, A.Ubaid Matraji melalui siaran persnya, Jakarta, Selasa (2/5).

Tujuh masalah tersebut yakni pertama, soal nasib program wajib belajar 12 tahun. Menurut JPPI program tersebut masih di persimpangan jalan, sebab tidak adanya payung hukum.

Kedua, angka putus sekolah dari SMP hingga SMA mengalami kenaikan. Hal tersebut dipicu maraknya pungutan liar di jenjang MA/SMK/SMA. Catatan JPPI, banyak Kabupaten/Kota yang

dulu sudah menggratiskan SMA/SMK tapi kini resah karena di provinsi lain membolehkan sekolah menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan.

“Pendidikan agama di sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi, baik metode pembelajarannya maupun gurunya,” imbuhnya.

Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, pada Desember 2016, terdapat 78 persen guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah setuju jika pemerintah RI berdasarkan syariat Islam dan 77 persen guru PAI¹ mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam.

“Ini cara pandang yang berbahaya bagi keutuhan NKRI. Jika dibiarkan, benih-benih intoleransi dan sikap keagamaan yang radikal akan tumbuh subur di sekolah,” cetusnya.

Keempat, masih lemahnya pengakuan negara atas pendidikan pesantren dan madrasah.² Kelima, JPPI mendorong pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu Program BOS, BSM dan KIP perlu dievaluasi karena nyatanya masih banyak anak miskin yang susah masuk sekolah.

Keenam, kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih marajalela. Dan ketujuh, ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

“Saat ini ada lebih dari 7 juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai. Ini menunjukkan bahwa ada gap antara dunia industri dengan ketersediaan tenaga terampil di Indonesia,”

(Frida Astuti/bus)

Sumber : <https://skalanews.com/detail/nasional/umum/287508-Ini-7-Masalah-Pendidikan-yang-Harus-Diselesaikan-Pemerintah>

Ini Tujuh Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut JPPI

Rabu 03 May 2017 04:40 WIB

Rep: Umi Nur Fadhillah/ Red: Bayu Hermawan



Foto: Republika/Prayogi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat tujuh masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan pemerintah untuk mewujudkan Nawacita bidang pendidikan.

"Masih ada celah yang harus terus diperbaiki, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan," kata Koordinator Nasional JPPI, A. Ubaid Matraji kepada Republika.co.id, Selasa (2/5).

Pertama, nasib program wajib belajar (wajib) 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Alasannya, program itu belum memiliki payung hukum. Perbincangan soal realisasi wajib 12 tahun ini mengemuka sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2015.

Namun, sepanjang 2016-2017, tidak ada lagi perbincangan dan langkah untuk mewujudkan hal itu. Menurutnya, mandegnya wajib 12 tahun akibat tidak adanya payung hukum yang dapat mendorong untuk mewujudkannya.

Ubaid beranggapan, seharusnya, UU Sisdiknas harus diamandemen khususnya pasal terkait wajib sembilan tahun diubah menjadi 12 tahun. Atau, bisa juga didorong melalui Instruksi Presiden dan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan wajib 12 tahun di provinsi.

Kedua, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA mengalami kenaikan. Hal ini dipicu maraknya pungutan liar di jenjang MA/SMK/SMA. Banyak kabupaten/kota yang dulu sudah menggratiskan SMA/SMK, tapi kini mereka resah karena banyak provinsi yang membolehkan sekolah untuk menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan.

Menurutnya, alih wewenang pengelolaan jenjang sekolah menengah ini tidak menjawab kebutuhan wajib 12 tahun. Namun, hanya peralihan wewenang yang justru menimbulkan masalah baru.

Ketiga, pendidikan agama di sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi, baik metode pembelajarannya maupun gurunya. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta (Desember 2016), terdapat 78 perden guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah, setuju jika pemerintah berdasarkan syariat Islam dan 77 persen guru PAI mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam.

Ubaid menilai hal itu merupakan cara pandang yang berbahaya bagi keutuhan NKRI. Jika dibiarkan, benih-benih intoleran dan sikap keagamaan yang radikal akan tumbuh subur di sekolah.

Keempat, masih lemahnya pengakuan negara atas pendidikan pesantren dan madrasah (diniyah). Model pendidikan ini berperan sejak dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Namun, kini perannya termarginalkan karena tidak sejalan dengan kurikulum nasional. Maka, tidak heran, jika belakangan ini kekerasan atas nama agama, SARA, dan benih-benih radikalisme tumbuh subur. Sebab, pendidikan agama di sekolah tidaklah cukup memadai.

Pendidikan agama tidak bisa dilakukan secara instan di sekolah. Jadi, sekolah perlu bersinergi dengan lembaga pesantren dan madrasah diniyah untuk memberikan pemahaman agama yang komprehensif (tafaqquh fiddin), yang bervisi rahmatan lil alamin. Untuk itu, RUU madrasah dan pesantren harus masuk Prolegnas 2017.

Kelima, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat waktu. Bersekolah bagi kaum marginal masih jadi impian. Marginal di sini terutama dialami oleh warga miskin dan anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Angka putus sekolah didominasi oleh kedua kelompok tersebut. Program BOS, BSM, dan KIP perlu dievaluasi karena nyatanya masih banyak anak miskin yang susah masuk sekolah. Pendistribusian yang lambat, alokasi yang tidak akurat, dan juga penyelewengan dana turut menyelimuti implementasi program tersebut.

Khusus untuk kelompok difabel, mereka terkendala susahny menemukan sekolah inklusi. Akhirnya, mereka harus bersekolah dengan teman yang senasib, dan semakin menjadikannya tereksklusi dari realitas sosial.

Keenam, kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih merajalela. Potret buram pendidikan

di Indonesia masih diwarnai oleh kasus kekerasan di sekolah dan pengaduan pungli. Modus kekerasan ini sudah sangat rumit untuk diurai, karena para pelakunya dari berbagai arah.

Komponen utama sekolah, yakni, wali murid, guru, dan siswa, satu sama lain berperan ganda. Artinya, masing-masing dapat berperan sebagai pelaku, dapat pula jadi korban. Penerapan sekolah ramah anak menjadi penting untuk direvitalisasi. Di sisi lain, fakta pungutan liar di seakan tidak dapat dikendalikan, terutama terjadi di sekolah negeri yang harusnya bebas pungutan dan juga terjadi di jenjang sekolah menengah.

Ketujuh, ketidak-sesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini ada lebih dari tujuh juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai.

Ini menunjukkan bahwa ada gap antara dunia industri dengan ketersediaan tenaga terampil di Indonesia. Ini penting, sebab di era MEA, serbuan tenaga kerja asing akan meminggirkan dan mempersiundinikan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, perbaikan dan penyempurnaan kurikulum di sekolah juga harus mampu menjawab masalah ini.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi#>

Pemantau Pendidikan Nilai Wajib Belajar 12 Tahun Hanya Retorika

Selasa 02 Mei 2017, 19:43 WIB



Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori

Sumber Foto : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Di Hari Pendidikan Nasional, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan bahwa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih banyak permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan, salah satunya yakni mengenai wajib belajar 12 tahun. Menurut Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut masih sebatas retorika.

"Soal wajib belajar 12 tahun itu masih jadi catatan kita karena dari pemerintah saat ini wajib belajar sudah 12 tahun, akan tetapi kita bilang itu hanya sebatas retorika. Bahkan di lapangan masih nol," ujarnya saat on air di Radio PRFM, Selasa (2/5/2017).

Ubaid menuturkan program pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun belum teralisasi dengan baik terutama di daerah. Lantaran terkendala oleh APBD setempat. Untuk itu ia pun menyarankan agar pemerintahan Joko Widodo ini dapat membuat sebuah program yang baik guna meningkatkan kualitas pendidikan.

"Di daerah masih minim. Bahkan angka partisipasi kasar kita untuk wajib 9 tahun sudah ok. Kalau 12 tahun itu perlu diprogramkan dengan baik," tutup Ubaid.

Sumber : <http://prfmnews.com/berita.php?detail=pemantau-pendidikan-nilai-wajib-belajar-12-tahun-hanya-retorika>

Pemantau Pendidikan Sebut KIP Belum Bisa Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Selasa 02 Mei 2017, 19:56 WIB



Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori

Sumber Foto : Istimewa

BANDUNG, (PRFM) - Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji mengatakan, jika keberadaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi program andalan di masa pemerintahan Joko Widodo belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pasalnya saat ini pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum tepat sasaran dan tepat waktu.

"Nyatanya KIP itu banyak yang salah sasaran dan waktu yang kurang tepat makanya harus dievaluasi cara pendistribusiannya, cara efektifitasnya untuk mendongkrak akses yang rentan terutama untuk yang miskin," katanya saat on air di Radio PRFM, Selasa (2/5/2017).

Menurutnya, angka putus sekolah didominasi oleh kedua kelompok yaitu miskin dan kebutuhan khusus (difabel). Selain itu JPPI juga menilai pendistribusian bantuan masih dianggap lambat, tidak akurat, dan banyak ditemukan penyelewengan dana.

“Khusus untuk kelompok difabel, mereka terkendala sulitnya menemukan sekolah inklusi. Akhirnya, mereka harus bersekolah dengan teman yang senasib, dan semakin menjadikannya tereksklusi dari realitas sosial,”
UBAID.

Sumber : <http://prfmnews.com/berita.php?detail=pemantau-pendidikan-sebut-kip-belum-bisa-tingkatkan-kualitas-pendidikan>

Menimbang Sasaran Anggaran Pendidikan Nasional, Inilah Kelemahannya

Senin, 8 Mei 2017 18:53



ilustrasi
Oleh : Abdul Munir Sara
Tenaga Ahli DPR RI

POS KUPANG.COM - Dalam APBN 2017, alokasi anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp 416,1 triliun. Alokasi anggaran ratusan triliun rupiah ini sebagai keharusan konstitusional yang mewajibkan anggaran pendidikan 20% dari total pagu APBN tiap tahun. Kendatipun alokasi anggaran pendidikan cukup besar, namun belum benar-benar menjadi solusi bagi masalah pendidikan nasional.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015-2016 mengkonfirmasi, terdapat sekitar 946.013 siswa lulus SD yang tak mampu melanjutkan ke tingkat menengah (SMP). Demikian pun data yang menunjukkan, ada 51.541 orang jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP ternyata tak lulus.

Dengan demikian, dari tahun 2015 hingga 2016, ada 997.445 orang anak Indonesia yang hanya berijazah SD. Masih tingginya angka anak putus sekolah, adalah fakta yang menyoal kita, seberapa dalam anggaran pendidikan mengagregasi kemajuan pendidikan nasional?

Anggaran mengikuti program pendidikan

Dengan berbagai faktor penyebabnya, angka anak putus sekolah sebagaimana paparan data Kemendikbud, memberikan tanda, anggaran pendidikan 20% tiap tahun dalam APBN belum menyasar titik soal masalah pendidikan, baik dalam bentuk gerakan penyadaran wajib belajar

pada masyarakat dan fasilitas pembiayaannya bagi yang tak mampu.

Dengan pengertian, program-program pendidikan yang disusun kementerian atau lembaga sektoral pendidikan, harus benar-benar mengena inti soal masalah pendidikan, khususnya masalah anak usia belajar putus sekolah yang masih tinggi.

Masalah kesadaran pendidikan, tak cuma dipicu persoalan ekonomi, tapi juga masalah budaya dan struktur nilainya yang masih mengesampingkan pendidikan.

Mempekerjakan anak usia sekolah atau pernikahan anak usia sekolah adalah fakta-fakta sosial yang menjelaskan pada kita tentang gerakan penyadaran dan pembudayaan pendidikan yang belum terstruktur dalam bangunan nilai masyarakat secara sosiologis. Data BPS dan Unicef tahun 2016 menunjukkan tingkat pernikahan anak usia 18 tahun di Indonesia masih tinggi atau sebesar 23%. Data ini menjadi contoh yang mengkonfirmasi kita, bahwa usia wajib belajar belum benar-benar disadari masyarakat Indonesia.

Faktor-faktor sosiologis masih menjadi kendala tumbuhnya kesadaran pendidikan masyarakat. Meskipun di era pemerintahan Jokowi, kita kembali melembagakan pendidikan sebagai entitas budaya, namun program-program pendidikan berikut anggaran ratusan triliun rupiah tiap tahun dalam APBN, belum mampu mengagregasi kesadaran masyarakat secara signifikan terkait pentingnya pendidikan.

Dengan demikian, paradigma anggaran mengikuti program (money follow program) yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, idealnya bisa ditangkap para pengambil kebijakan pendidikan agar program-program pendidikan yang dicanangkan, benar-benar dapat mentransformasi masyarakat melalui institusi-institusi sosial non pemerintah dalam membangun kesadaran wajib belajar bagi anak usia sekolah.

Kualitas dan paradigma

Tak cuma masalah angka anak putus sekolah yang masih tinggi, kualitas pendidikan pun membentangkan soal yang perlu dipikirkan serius. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dirilis 23 Maret 2017 tentang Right to Education Index (RTEI), indeks kualitas pendidikan di Indonesia berada di posisi 77%, sementara negara dengan masalah kemiskinan dan konflik horisontal akut seperti Ehtiopia, berada di posisi 79% atau kualitas pendidikan di Ehtiopia lebih tinggi dari Indonesia.

Lagi-lagi anggaran pendidikan 20% tiap tahun dari APBN, belum mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Rendahnya indeks kualitas pendidikan ini menggugah sikap kritis kita untuk terus menyelami soal-soal pelik sistem pendidikan nasional.

Masalah kualitas pendidikan kita sebenarnya dimulai dari kurikulum pendidikan yang terus berganti di setiap periode pemerintahan. Akibatnya, secara mikro, sistem pembelajaran di institusi pendidikan dari SD-SLTA acap kali mengalami ambigu dan bongkar pasang metodologi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Di sisi lain, perubahan kurikulum pendidikan di setiap periode pemerintahan, belum benar-benar mengakar pada kebutuhan dan konteks pembangunan nasional. Daya saing industri dalam negeri yang rendah akibat faktor Sumber Daya Manusia (SDM), adalah bentangan fakta yang menggambarkan masalah kualitas pendidikan di Indonesia.

Perkembangan kognitif peserta didik yang terus berakselerasi dengan perubahan inovasi teknologi informasi yang begitu cepat, belum terkejar oleh sistem pendidikan nasional yang acap kali gonta-ganti paradigma. Kebijakan makro pendidikan yang terus berubah, berpengaruh

pada aplikasi mikro pendidikan di institusi pendidikan. Akibatnya, kualitas pendidikan berjalan lambat mengikuti kebijakan makro pendidikan nasional yang acap kali tak konsisten. Di sisi lain, modernisasi pendidikan berbasis inovasi teknologi secara mondial bergerak begitu cepat.

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2017 adalah siklus momentum yang menyadarkan kita tentang pentingnya arah kebijakan pendidikan nasional. Dengan alokasi anggaran pendidikan 20% tiap dalam APBN, sejatinya menjadi pemantik akselerasi kemajuan pendidikan nasional. Program-program pendidikan yang mampu mentransformasi masyarakat di setiap ceruk masalah pendidikan, adalah kebutuhan yang perlu dirancang pemerintah dalam bentuk program nyata.

Demikian pun paradigma kebijakan makro pendidikan yang konsisten dan sejalan dengan UUD 1945, menjadi tempat kita berpijak dan berlari mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju. Semoga. *

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Menimbang Sasaran Anggaran Pendidikan Nasional, Inilah Kelemahannya, <http://kupang.tribunnews.com/2017/05/08/menimbang-sasaran-anggaran-pendidikan-nasional-inilah-kelemahannya?page=all>.

Hardiknas, Pemantau Pendidikan Indonesia Catat 7 Masalah Krusial

Oleh : Tempo.co

Selasa, 2 Mei 2017 17:05 WIB



(Foto ilustrasi)Purwakarta Tampung Semua Siswa Baru di Sekolah Negeri Pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2015- 2016, ada pemberian jaminan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kepada calon siswa baru yang akan masuk sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri. [TEMPO/STR/Budi Purwanto; BPW2014120108] (Komunika Online)

TEMPO.CO, Jakarta - Di Hari Pendidikan Nasional, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan bahwa masih ada celah dari agenda prioritas bidang pendidikan Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya. JPPI mencatat setidaknya ada tujuh masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan.

“Tujuh hal tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah demi mewujudkan nawacita bidang pendidikan,” ujar Koordinator Nasional JPPI, A. Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Mei 2017.

Pertama, JPPI menilai nasib program wajib belajar (wajib) 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Pasalnya, tidak-adanya payung hukum dalam pembahasannya. Padahal, JPPI telah mengikuti perbincangan soal realisasi wajib 12 tahun ini mengemuka sejak awal pemerintahan Jokowi hingga 2015.

Setelah itu, tidak ada lagi perbincangan dan langkah untuk mewujudkan hal tersebut sepanjang 2016-2017. Menurut JPPI seharusnya undang-undang sistem pendidikan nasional harus diamandemen, khususnya pasal terkait wajib sembilan tahun, diubah menjadi 12 tahun.

Kedua, JPPI masih mencatat adanya kenaikan angka putus sekolah dari sekolah menengah pertama (SMP) ke jenjang sekolah menengah atas (SMA). JPPI menilai masalah tersebut dipicu karena maraknya pungutan liar di SMA. Banyak sekolah di kabupaten atau kota yang dulu sudah gratis, tapi kini malah membolehkan sekolah untuk menarik iuran dan SPP.

“Alih wewenang pengelolaan jenjang sekolah menengah ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru menimbulkan masalah baru,” kata Ubaid.

Ketiga, JPPI mendesak pendidikan agama di sekolah untuk dievaluasi dan dibenahi. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta pada 2016, sebagian besar guru agama Islam mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam.

“Ini cara pandang yang berbahaya bagi keutuhan NKRI. Jika dibiarkan, benih-benih intoleran dan sikap keagamaan yang radikal akan tumbuh subur di sekolah,” kata Ubaid.

Keempat, Ubaid menilai pengakuan atas pendidikan pesantren dan madrasah (diniyah), kini perannya termarginalkan karena tidak sejalan dengan kurikulum nasional. Hal tersebut dinilai bisa menyuburkan kekerasan atas nama agama, suku, ras, dan benih-benih radikalisme. Sementara itu, pendidikan agama di sekolah tidaklah cukup memadai.

“Pendidikan agama tidak bisa dilakukan secara instan di sekolah. Jadi, sekolah perlu bersinergi dengan lembaga pesantren dan madrasah diniyah untuk memberikan pemahaman agama yang komprehensif (tafaqquh fiddin), yang bervisi rahmatan lil alamin,” kata Ubaid.

Kelima, JPPI mendorong agar pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat waktu. Menurut dia, angka putus sekolah didominasi oleh kedua kelompok miskin dan kebutuhan khusus. JPPI juga menilai pendistribusian bantuan masih dianggap lambat, tidak akurat, dan banyak ditemukan penyelewengan dana.

“Khusus untuk kelompok difabel, mereka terkendala susah menemukan sekolah inklusi. Akhirnya, mereka harus bersekolah dengan teman yang senasib, dan semakin menjadikannya tereksklusi dari realitas sosial,” ujar Ubaid.

Keenam, JPPI masih menemukan kekerasan dan pungutan liar di sekolah yang masih merajalela. Adapun modus kekerasan dinilai sudah sangat rumit untuk diurai. Adapun pelakunya disinyalir bisa dari berbagai komponen, seperti wali murid, guru, dan siswa. Mereka bisa menjadi korban atau pelaku sekaligus.

“Di sisi lain, fakta pungutan liar seakan tidak dapat dikendalikan, terutama terjadi di sekolah negeri yang harusnya bebas pungutan dan juga terjadi di jenjang sekolah menengah,” ujar Ubaid.

Terakhir, masih ada ketidaksesuaian (mismatch) antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. JPPI mencatat ada lebih dari 7 juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan.

Sementara itu, di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai. “Untuk itu, perbaikan dan penyempurnaan kurikulum di sekolah juga harus mampu menjawab masalah ini,” ujar Ubaid.

LARISSA HUDA

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/871496/hardiknas-pemantau-pendidikan-indonesia-catat-7-masalah-krusial/full&view=ok>

Rabu 3/5/2017 | 06:30

Nawacita Pendidikan Nasional Masih Banyak Masalah



Foto : istimewa

Jakarta – Agenda prioritas Presiden Joko Widodo dalam Nawacita salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi tampaknya masih ada celah yang harus terus diperbaiki. Terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan.

“Karena itu, pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2017 ini, JPPI mencatat, setidaknya ada 7 masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dalam mewujudkan nawacita bidang pendidikan,” kata Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, di Jakarta, Selasa (2/5).

Dilema pertama, kata Ubaid, program wajib belajar (wajib) 12 tahun masih di persimpangan jalan. Penyebabnya karena tidak adanya payung hukum. Perbincangan soal realisasi wajar 12 tahun mengemuka sejak awal pemerintahan Jokowi hingga tahun 2015. Sepanjang tahun 2016-2017, tidak ada lagi perbincangan dan langkah untuk mewujudkan hal tersebut. ags/AR-3

Sumber : <http://www.koran-jakarta.com/nawacita-pendidikan-nasional-masih-banyak-masalah/>

Entah Bagaimana Nasib Kurikulum 2013

SELASA, 02 MEI 2017 , 10:44:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA



Ilustrasi/Net

RMOL. Arah kebijakan pendidikan nasional hingga saat ini dinilai semakin kabur dan tidak tentu arah. Dua pilar utama pendidikan yaitu kurikulum dan guru, belum mendapat perhatian yang serius.

"Kurikulum 2013, entah bagaimana nasibnya. Sementara Uji Kompetensi Guru 2015 dan 2016 memberikan gambaran suram, betapa kemampuan guru-guru kita belum merata, dan belum cukup memuaskan," kata Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP PKS Fahmy Alaydroes dalam keterangan tertulis Humas DPP PKS yang diterima redaksi, Selasa (2/5).

Fahmy memaparkan, merujuk hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), indeks kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah Ethiopia dan Filipina. Melalui pengukuran Right to Education Index (RTEI); dalam hal mana ada lima indikator yang menjadi bahan pertimbangan, yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari kelima indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ketujuh dengan skor 77 persen.

Di sisi pendidikan informal, kata dia, belum menampakkan adanya iklim yang kondusif bagi pendidikan. Alih-alih mendapatkan hal yang positif, setiap hari mereka malah mendapatkan 'asupan pelajaran' yang merusak mental dan moral mereka.

"Lihat saja segala tayangan televisi, bahkan termasuk iklan-iklan komersilnya, kebanyakan adalah acara-acara yang konsumtif, tayangan sinetron yang miskin nilai dan norma, adegan-adegan yang tidak mendidik, tampilan yang kurang pantas, gaya hidup yang mewah dan hura-hura, tayangan reality show yang sarat kehidupan konflik dan kurang pantas dipirsa apalagi oleh anak-anak kita. Belum lagi dunia internet, dengan segala kemudahannya," urainya, mengkritik.

Sementara itu, elemen pendidikan yang tidak kalah pentingnya, suri keteladanan juga sudah semakin langka. Padahal keteladanan adalah media pembelajaran yang paling mudah dan paling elementer.

“Yang terlihat adalah, yang sering didengar oleh anak-anak kita adalah para pemimpin formal yang sarat masalah. Pemimpin yang tak nampak wibawa dan tak nampak kepandaianya. Pemimpin yang arogan, sering bersikap dan berkata kasar, pemimpin yang terlibat korupsi atau narkoba atau selingkuh dengan wanita. Anak-anak kita jarang melihat dan mendengar pemimpin yang layak jadi teladan,” sesalnya.[wid]

Sumber : <https://nusantara.rmol.co/read/2017/05/02/289798/Entah-Bagaimana-Nasib-Kurikulum-2013->

Perkuat Kemitraan, JPPI Temui Diplomat Jepang

Admin NEW Indonesia

Kamis, 27 April 2017



Koordinator Seknas JPPI A Ubaid Matraji dan rombongan diterima Atase Pendidikan Keiichi Yamaguchi (kemeja batik) dan sejumlah diplomat muda yang tengah bertugas di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta (25/4) | Ist

NEW Indonesia, Jakarta – Momentum bersejarah dan cukup strategis dimulai pekan ini, Koordinator Seknas JPPI menemui sejumlah diplomat muda Jepang di Indonesia membahas khusus kemitraan pendidikan yang dapat diwujudkan dan diselaraskan lebih konkrit dan berkelanjutan.

Laporan-laporan organisasi kemanusiaan global menyatakan, bahwa Jepang merupakan negara dengan kepedulian yang cukup besar terhadap masalah-masalah konservasi, mitigasi bencana dan program kemanusiaan lainnya. Jepang dinilai sebagai salah satu negara dengan kualitas pendidikan, sains dan teknologi terbaik dunia.

Kehadiran Seknas JPPI dan rombongan diterima Atase Pendidikan Keiichi Yamaguchi dan sejumlah diplomat muda yang tengah bertugas di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

"Kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan JPPI (NEW Indonesia) atas kunjungan dan perhatiannya kepada Jepang utamanya terkait dengan program pendidikan dan masa depan kerja sama kedua negara yang lebih konkrit dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh kedua belah pihak." Demikian Keiichi membuka dialog Selasa lalu di Kantor Kedubes Jepang di Jakarta (25/4).

Keiichi Yamaguchi optimistis, peran lembaga swadaya seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi nirlaba (CSO) di Jepang cukup berarti dalam beberapa hal strategis demi terwujudnya peningkatan SDM, perdamaian dan demokrasi di seluruh dunia.

Koordinator Seknas JPPI Abdullah Ubaid dalam kesempatan sambutannya mengatakan, kunjungan JPPI ke Kedutaan Jepang di Jakarta merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan forum LSM Asia Pasifik mengenai penanganan pendidikan dan kebencanaan baru-baru ini yang berlangsung di Tokyo dan sejumlah kota penting di Jepang.

Ubaid menambahkan, tim JPPI bersama sejumlah delegasi negara Asia lainnya selama sepekan di Jepang diperkenalkan banyak hal terkait penanganan pendidikan pascabencana, peran LSM dan komunitas di Jepang dalam kampanye mitigasi dan penanganan masalah-masalah kemanusiaan lainnya.

Ubaid berharap dengan keunggulan sistem pendidikannya, Jepang dapat berkontribusi dari perspektif teknologi aplikatif yang dapat diterapkan langsung dan nyata bagi siswa guna mendorong pendidikan Indonesia yang lebih adil dan berkualitas.

Pertemuan JPPI-Kedubes Jepang Selasa diharapkan pula membuka peluang kemitraan pendidikan yang lebih konkret jangka panjang, mengingat sedikitnya terdapat 20 organisasi sipil (CSO) tergabung dalam sebuah konsorsium yang mewadahi Seknas JPPI, seluruh LSM tersebut konsen dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun lebih menyeluruh di tanah air.

Dubes Jepang untuk Indonesia

Pada tanggal 10 April 2017. Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masafumi Ishii, tiba dan memulai bertugas di Jakarta. Bagi Jepang, seperti dikutip dalam laman resmi kedutaan Jepang <http://www.id.emb-japan.go.jp>, Indonesia merupakan salah satu mitra strategis terpenting dan dapat diibaratkan memiliki hubungan kakak dan adik. Namun karena Indonesia lebih besar, baik dari sisi populasi penduduk maupun luas wilayah, tidaklah salah apabila Indonesia sebagai kakak bagi Jepang. Saya mendengar bahwa tujuan kabinet Y. M. Bapak Presiden Joko Widodo adalah "kerja". Dengan demikian maka hubungan yang sangat baik antara Jepang dan Indonesia merupakan hasil kerja keras dan upaya yang telah dirintis dalam waktu yang cukup lama. Menurut Duta Besar Jepang Masafumi pihaknya akan berusaha untuk mewujudkan "kerja bersama", demi memajukan hubungan baik diantara kedua negara.

Sumber : <http://new-indonesia.org/beranda/2016-03-25-08-28-09/berita-new-indonesia/832-konkritkan-kemitraan-pendidikan,-jppi-temui-diplomat-jepang.html>

JPPI-JICA Bahas Kurikulum Model

Admin NEW Indonesia
Selasa, 18 April 2017



Staf JICA Eko Sulistyanto (kemeja batik) menerima kunjungan Koordinator Nasional Seknas JPPI A. Ubaid Matraji & rekan di Kantor JICA Indonesia (17/4) | NEW Indonesia

Jakarta, NEW Indonesia - Koordinator Nasional Seknas JPPI A. Ubaid Matraji memimpin kegiatan kunjungan serta audiensi dengan pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) di kawasan Senayan Jakarta Senin (17/4). Dalam pertemuan JICA-JPPI dihadiri staf JICA Indonesia Eko Sulistyanto, dan dibahas beberapa isu terkait Pengembangan kemitraan kedua lembaga dan jaringan yang mungkin dapat diwujudkan multiaspek.

Koordinator Seknas JPPI A. Ubaid Matraji mengatakan, pihaknya dan mitra konsorsium JPPI sampai sekarang masih konsisten dalam melancarkan agenda-agenda advokasi nasional terkait WajibBelajar 12 Tahun (#Wajar12Tahun) sebagai bentuk dukungan nyata baik pemajuan pendidikan RI di era persaingan terbuka dalam kurun satu dasa warsa terakhir.

Staf JICA Indonesia Eko Sulistyanto menekankan beberapa prioritas program kemitraan Jepang-RI yang masih cukup besar di tanah air, utamanya terkait bentuk program antar pemerintah kedua negara (G to G) berupa Pinjaman lunak, gelar TOT dan atau Training course yang dibiayai JICA terkait kemitraan G to G, serta program-program bantuan hibah reguler berupa peningkatan teknis berupa gedung sekolah, infrastruktur dan fasilitas publik lainnya dengan seleksi lebih ketat dan terukur.

Namun Eko optimistis, kemitraan strategis pendidikan kedua negara cukup luas guna lebih dikembangkan, terutama kemungkinan JICA menjadi inisiator dan fasilitator kunci mempertemukan praktisi NGO kedua negara dalam mewujudkan kemitraan dan berkontribusi bagi pemajuan pendidikan RI lebih komprehensif berkelanjutan.

Menurut Eko, sebuah sekolah "Hikari" (cahaya) dapat dijadikan rujukan dan pernah dirintis untuk pertama kalinya, terutama dengan menerapkan Pendidikan alternatif berbasis lingkungan ala RI-Jepang, di sebuah kawasan di Tangerang Banten.

Sekolah Hikari

Sekolah Hikari dibangun dengan mempertimbangkan konsep kelestarian lingkungan. Tinggi rendah kontur tanah tidak diratakan, malah dimanfaatkan untuk perkembangan baik motorik anak-anak. Mainan terbuat dari bambu dan ban bekas, seperti dilaporkan situs sekolahhikari.wordpress.com baru-baru ini.

Gagasan sekolah Hikari antara lain, agar anak-anak diharapkan mengenal konsep "kearifan lokal" sejak dini. Ventilasi dan letak pohon diatur sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara dalam kelas terjadi secara konveksi alami hemat energi. Sistem drainase atau rain water run-off, hanyalah saluran berbatu bukan gorong-gorong beton. Saluran berbatu pun hanya memanfaatkan spanduk bekas yang dibolongin, bukan landscape fabrics yang mahal. Air hujan diharapkan ada yang meresap ke tanah tidak semua mengalir begitu saja.

Dalam pertemuan Senin, pihak JPPI menyerahkan kepada tim JICA sejumlah buku dan laporan-laporan riset reguler terkait pendidikan multiaspek.

Kunjungan JPPI ke Jepang

Desember 2016 lalu, tim JPPI bertolak ke Jepang, bersama sejumlah delegasi negara Asia, seperti Nepal dan Filipina guna berpartisipasi aktif dalam sebuah forum dunia untuk pendidikan. Forum menengahkan beberapa program-program model dalam pemulihan sektor pendidikan pascabencana. Forum dihadiri kalangan kementerian luar negeri Jepang, lembaga swadaya jaringan lokal, akademisi, komunitas korban tsunami dan unsur sekolah setempat.

Koordinator Seknas JPPI A Ubaid Matraji menambahkan, "Selama kami di Jepang didampingi oleh aliansi NGO pendidikan, tim JICA dan pihak Kementerian Luar Negeri Jepang."

Persaudaraan Jepang-RI

Baru-baru ini laporan [tribunnews](http://tribunnews.com) dalam Konferensi Dunia Pencegahan Bencana PBB ke-3 di Sendai, warga Jepang juga diperkenalkan mengenai berbagai informasi pencegahan bencana.

Salah satunya di daerah Kotodai, Aoba-ku Sendai terdapat tenda JICA (Organisasi Kerjasama Internasional Jepang), di dalamnya memperkenalkan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004. Dalam taman Kotodai di daerah Aoba-ku, ada Square bagi pertukaran internasional. Di kemah JICA di sana ditampilkan berbagai penjelasan pulau Simeulue di lautan Hindia sebelah barat Aceh. Demikian pula sejarah tsunami mulai 1854 sampai dengan kini diperkenalkan pula.

Tsunami kasus Hirokawa dari prefektur Wakayama yang dikenal sebagai "Inamura" diperkenalkan pula. Sebuah cerita yang didasarkan pada tsunami besar pada 1854 seiring gempa Nankai tahun yang sama, 1854. Dalam keadaan gelap, untuk menyelamatkan orang-orang yang terlambat untuk melarikan diri, lalu melakukan evakuasi ke kuil di atas bukit.

Asa Tsuchikawa (72) seorang wanita dari daerah Izumi-ku Sendai yang datang ke tenda JICA mengakui, "Ini jadi pelajaran dan pengetahuan (pendidikan) menarik bagi kami dan ingin saya beritahu serta ceritakan kepada cucu saya nanti."

Tantangan Pendidikan RI

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama Results Internasional menyebut ada tiga permasalahan utama pendidikan di Indonesia. Masing-masing, yakni kualitas guru, sekolah yang tidak ramah anak dan deskriminasi terhadap kelompok marginal.

"Ada tiga isu strategis yang perlu mendapat perhatian," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam Seminar Internasional dan Laporan Right to Education Index (RTEI) 2016 di Jakarta, Kamis (23/3).

Ia menyebut, penelitian RTEI mengukur lima faktor utama, yakni pemerintahan, ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan adaptasi. Dari lima faktor itu, Indonesia mendapatkan skor 77 persen untuk laporan pendidikan. Namun, posisi Indonesia sejajar dengan Nigeria dan Honduras.

Ironisnya, ia menyebut, kualitas pendidikan Indonesia berada di bawah Filipina (81 persen) dan Etiopia (79 persen). Penelitian itu menempatkan Inggris (87 persen) di urutan teratas. Disusul, Kanada (85 persen) dan Australia (83 persen). (Berbagai sumber/*rd)

Sumber : <http://www.new-indonesia.org/beranda/2016-03-25-08-28-09/berita-new-indonesia/829-jppi-rangkul-jica-kembangkan-kurikulum-model.html>

WAJAR 12 TAHUN BELUM MEMILIKI DASAR YANG KUAT

April 29, 2017



Ilustrasi media

Reporter: Tita Setiawati – Depdik BEM UNJ 2017

Hai Sahabat Kontribusi □

Jakarta, BEM UNJ – Kamis (27/04) BEM UNJ bersama Education Watch (EDUWA) UNJ mengadakan Kajian Lucu dan Asik (KLASIK) menuju Hari Pendidikan Nasional 2 Mei mendatang. Kajian yang bertemakan "Menuntut Pembentukan Undang-Undang WAJAR 12 Tahun" ini diadakan di Gedung IKK lantai 4 ruang 401 dan dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswi UNJ. Kajian ini mengundang Hendy Santoso, Kepala Departemen Pendidikan dan Penelitian BEM UNJ 2016, sebagai narasumber serta Solehudin, Kepala Departemen Pendidikan BEM UNJ 2017, sebagai moderator.

KLASIK kali ini dilatarbelakangi oleh salah satu dari Nawacita Pemerintah Indonesia yang menggagas Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan gagasan yang bertujuan untuk menekan angka putus sekolah di Indonesia dengan mengadakan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. PIP ini dapat dinikmati oleh peserta didik yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, berjalan tiga tahun kepemimpinan Jokowi, program Wajar 12 tahun ini belum memiliki dasar yang kuat. Bagaimana program bisa terlaksana jika dasarnya belum ada?

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 997.000 manusia usia sekolah di Indonesia hanya lulus pendidikan dasar. Dan ketika dikalkulasi, ternyata terdapat 69 orang dari semua populasi manusia produktif yang dapat melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi. Wajib belajar merupakan sebuah program untuk melaksanakan pendidikan yang berbudaya.

Wajar 6 Tahun digagas dari UU 1945 Pasal 31 ayat 1, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Persiapan realisasi pelaksanaan Wajar 6 Tahun telah dirancang sejak tahun 1964 dan dapat terlaksana di tahun 1970. Wajar 9 Tahun dirancang dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003. Namun, baru dapat dilaksanakan di tahun 2008, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada debat kandidat Pemilihan Presiden lalu, Jokowi menjanjikan Wajar 12 Tahun. Kemudian saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Jokowi, janji Wajar 12 Tahun dimasukkan ke dalam Nawacita. Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Wajar 12 Tahun dilaksanakan. Dalam sebuah wawancara pada Januari 2015, Puan Maharani mengatakan bahwa Wajar 12 Tahun dapat terlaksana dengan berbagai syarat. Selanjutnya, Permendikbud yang dibuat sebelum Anies Baswedan lengser, Permendikbud No. 12 Tahun 2015, menjelaskan tujuan serta sasaran Wajar 12 Tahun. Namun, permendikbud tersebut tidak menjabarkan secara rinci (blue print) sehingga proses pelaksanaannya belum jelas untuk direalisasikan.

“Wajar 12 Tahun ini baru sekedar retorika, karena hingga saat ini pelaksanaannya belum terlaksana padahal sudah lebih dari dua tahun Wajar 12 Tahun digagas. Dua puluh kota di Indonesia masih menyelenggarakan program Wajar 9 Tahun”, menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Wajar 12 Tahun belum terlaksana secara merata di seluruh Nusantara. Hanya kota-kota besar seperti DKI Jakarta yang sudah melaksanakan gagasan ini. Selain itu, berdasarkan pantauan JPPI, alokasi dana untuk pendidikan yang sebesar 20% dari dana APBD/APBN, hanya DKI Jakarta yang APBDnya terserap 20% murni untuk pendidikannya.

Di Kuningan, pihak sekolah memang telah memaparkan mengenai pelaksanaan program Wajar 12 Tahun kepada orangtua/wali peserta didik, tapi tidak seperti pelaksanaan program Wajar 9 Tahun. Peserta didik memang dibebaskan dari uang gedung/uang pangkal, tetapi di luar itu, peserta didik tetap dimintai iuran untuk biaya lain dengan alasan sebagai pendukung untuk melaksanakan program sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Efendi, menyampaikan dalam sebuah wawancara bahwa “yang digratiskan hanya sampai pendidikan menengah pertama, yang menengah atas dapat menarik uang iuran melalui komite sekolah”.

Dalam pelaksanaannya, salah satu syarat peserta didik yang mendapatkan KIP adalah peserta didik yang tidak mampu yang telah diseleksi oleh sekolah atau pemerintah wilayah di masing-masing daerah. Hal ini menyebabkan PIP tidak bisa menyentuh seluruh peserta didik di seluruh Nusantara serta memungkinkan terjadinya kesalahan sasaran untuk mendapatkan KIP. Sehingga diharapkan PIP menjadi program yang ditujukan untuk semua peserta didik di semua wilayah di Indonesia.

Dari kajian yang disampaikan oleh Hendy Santoso, terdapat beberapa saran dari JPPI yang harus dilakukan oleh Kemendikbud, di antaranya:

1. Perlu dibuatkan legalisasi Undang-Undang tentang Wajar 12 Tahun
2. Perlu disusun rancangan yang jelas (blue print) mengenai Wajar 12 Tahun
3. Evaluasi besar-besaran untuk profesionalisme guru, karena guru di Indonesia hanya mendapatkan nilai rata-rata 5 dalam tes UKG yang dilaksanakan pemerintah.

Di akhir diskusi, Hendy mengatakan “banyak orang-orang yang berkerja di bidang pendidikan, tapi sedikit sekali orang-orang yang berkerja di perbaikan pendidikan”. Untuk itu, bagi Calon Guru, kita tidak hanya memerankan tugas kita sebagai guru, tetapi kita juga harus mengambil andil dalam pembuatan kebijakan pendidikan.

Sumber : <https://bemunj.com/2017/04/29/wajar-12-tahun-belum-memiliki-dasar-yang-kuat/>

Langkan Kompas cetak

1 April 2017

Wajib Belajar 12 Tahun di Daerah Tidak Jalan

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Program Wajib Belajar 12 tahun belum berjalan optimal. Regulasi Permendikbud 2013 dan juga program Nawacita tak disambut antusias oleh pemerintah daerah. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji di Jakarta, Kamis (30/3), mengatakan, berdasarkan penelitian JPPI di 20 kabupaten/kota, tidak ada satu daerah pun yang mengalokasikan APBD-nya untuk mendukung wajar 12 tahun. Nomenklatur di APBD masih menggunakan istilah wajar 9 tahun, tetapi belum ada komitmen implementasi wajar 12 tahun. "Sayang, gagasan Wajar 12 tahun ini jangan sampai kandas sebelum berlabuh. Ini harus diwujudkan. Karena ini upaya penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa melalui pengembangan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan generasi muda Indonesia," kata Ubaid. (*/ELN)

Sumber : <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2017/04/01/langkan-104/>

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 April 2017 di halaman 12 dengan judul "Langkan". Halaman 12

JPPI-PGRI Bahas Tata Kelola Guru

Admin NEW Indonesia

Rabu,05 April 2017



Hadir dalam konsolidasi tersebut, Dr. Unifah Rosyidi selaku Ketua Umum PGRI, Sekretaris Jendral PGRI Qudrat Nugraha, dan beberapa jajaran pengurus PB PGRI yang lain. Sementara dari JPPI, Koordinator Nasional JPPI A. Ubaid Matraji, Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq, dan Koordinator Media JPPI Rahmad. Acara berlangsung pada hari Selasa (04/04/2017) di gedung PB PGRI Jakarta. | NEW Indonesia

Jakarta,NEW Indonesia - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan konsolidasi dan silaturahmi dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), konsolidasi ini merupakan kali kedua pertemuan yang serius untuk memperkuat jaringan koalisi dalam rangka mengawal pendidikan Indonesia yang berkualitas.

Hadir dalam konsolidasi tersebut, Unifa Rosyidi selaku Ketua Umum PGRI, Sekretaris Jendral PGRI Qudrat Nugraha, dan beberapa jajaran pengurus PGRI yang lain. Sementara dari JPPI, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq, dan Koordinator Media JPPI Rahmad. Acara berlangsung pada hari Selasa (04/04/2017) di gedung PB PGRI Jakarta.

Sekjen PGRI Qudrat Nugraha membuka acara konsolidasi dengan menyambut baik maksud dan tujuan JPPI yang bertandang ke markas PGRI untuk mempererat koalisi jaringan. Selain itu, Qudrat juga mengapresiasi komitmen JPPI yang masih fokus mengawal dan mengadvokasi wajib belajar 12 tahun dan akses pendidikan yang berkualitas.

"Kemarin JPPI telah melakukan riset dan konferensi pers hasil risetnya dengan baik, ini artinya JPPI masih intens terhadap isu wajib belajar 12 tahun, begitu juga riset anggaran pendidikan di 20 kota/kabupaten, kami mengapresiasi itu dengan baik," kata Qudrat.

Sementara itu, Koordinator Nasional JPPI, A. Ubaid Matraji dalam sambutan pengantarnya

menyampaikan beberapa poin penting soal komitmen dan fokus JPPI. Salah satunya adalah komitmen terhadap mengawal akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Selain itu, Ubaid juga menyinggung soal kualitas pendidikan dan guru yang dianggap masih rendah.

“Penyelenggaraan pendidikan di daerah belum berorientasi pada kualitas, tapi masih pada kesejahteraan guru. Ternyata, kesejahteraan guru ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Hasil Uji Kompetensi Guru terakhir 2016 skornya belum beranjak dari rata-rata 53,05,” papar Ubaid.

Selain itu, Ubaid juga menyampaikan hasil temuan Riset Right To Education Index yang dilakukan oleh 14 negara dan Indonesia menjadi salah satu urutan negara tersebut. Hasilnya, Indonesia menduduki posisi ranking 7 dari 14 negara dengan skor 77%.

“Ada 3 problem utama dalam temuan tim RTEI di Indonesia. Pertama, Rendahnya kualitas guru. Kedua, Diskriminasi pendidikan terhadap kelompok marginal. Dan ketiga, Pendidikan yang belum ramah anak,” tegas Ubaid.

Senada dengan hal itu, Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq mengatakan, fokus kami masih mengawal akses pendidikan 12 tahun sesuai dengan butir nawacita yang menjelaskan soal program wajib belajar 12 tahun yang harus segera di akselerasi.

“Saat ini masih belum ada regulasi yang jelas dan mengikat soal wajib belajar 12 tahun, pasalnya Gugatan terhadap pasal di UU Sisdiknas yang dilakukan JPPI di Mahkamah Konstitusi ditolak. Ini harus ada regulasi yang tepat sebagai peraturan pengganti undang-undang,” kata Nailul.

Selain itu, Nailul juga menyoroti soal lambannya pemerintah dalam melakukan akselerasi wajib belajar 12 tahun. Apakah karena semua dibebankan kepada wewenang daerah, ataukah ketidakmampuan anggaran pendidikan untuk mencover wajar 12 tahun.

“Kami melihat, fokus Mendikbud saat ini adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Sekolah Vokasi dan Pendidikan Karakter. Artinya program wajib belajar 12 tahun tidak terjawab. Lantas bagaimana dengan janji pemerintah dan prolegnas 2015-2019 soal wajib belajar 12 tahun,” Imbuhnya.

Tanggapan PGRI Soal Kualitas Guru dan Wajib Belajar 12 Tahun

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, menyambut baik kunjungan JPPI untuk melakukan kerjasama yang kongkrit pada sektor kualitas pendidikan khususnya peningkatan kualitas guru. Unifah juga menyampaikan bahwa PGRI sudah melakukan upaya untuk komitmen peningkatan kualitas guru khususnya di daerah.

“Ini menjadi salah satu tanggung jawab kami di PGRI, kami sudah melakukan kajian data yang dilakukan oleh tim ahli PGRI terkait jumlah guru dan angka kualifikasi kualitas guru. Kami juga akan terus mendorong kesadaran kolektif untuk peningkatan kualitas guru khususnya di daerah,” papar Unifah.

Selain itu, Unifah juga menyinggung soal perekrutan guru. Menurutnya, perekrutan guru saat ini dinilai lemah. Kenapa, karena saat ini angka pension guru naik, sedangkan kekuatan anggaran masih tetap bertahan. Tetapi soal kualitas guru menurut kami, yang semestinya itu di kelas bukan hanya penilaian dari luar saja.

“Ini menarik untuk JPPI, mari bersama kita lakukan riset data analisis soal tatakelola guru. Karena dengan tata kelola guru inilah kita bisa menilai tingkat kualitas guru. Selain itu, kita juga biar tidak mudah mengatakan kualitas guru rendah. Tapi kita punya data dari semua aspek soal guru,” tegas Unifah.

Unifa juga menambahkan, bahwa kerjasama koalisi PGRI dan JPPI ini harus dibangun dengan

kuat. Kita bisa bekerjasama dalam beberapa hal, misalkan melakukan riset bersama dengan tim PGRI, workshop dan diskusi. Kami siap dan welcome apabila JPPI mau melibatkan PGRI.

"Kami berharap hubungan ini terjalin dengan baik dan melakukan kerjasama yang baik, tentunya kita ingin bersama-sama memajukan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya kualitas guru. Apalagi kita sekarang ini sedang dihadapkan pada isu darurat guru. Maka mari bersama memecahkan persoalan tersebut, " pungkasnya.

Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat PGRI) adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan para guru pada tahun 1912 (*tim*)

Sumber : <http://new-indonesia.org/beranda/2016-03-25-08-28-09/berita-new-indonesia/824-pgri-jppi-perkuat-koalisi-fokus-wujudkan-pendidikan-ri-berkualitas.html>

Kamis 30 Maret 2017, 11:55 WIB

JPPI: Wajib Belajar 12 Tahun Masih Sebatas Retrorika

Cici Marlina Rahayu - detikNews



Foto: Seminar JPPI (Cici-detikcom)

Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan penelitian pendidikan tentang orientasi anggaran pendidikan yang berkeadilan pada program wajib belajar (wajar) 12 tahun. Hasil penelitian menyatakan belum adanya prioritas pemerintah daerah pada program ini.

Penelitian ini dilakukan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara random (acak) yakni, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bengkalis, Kota Palembang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Maros, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, dan Kota Pare-Pare.

Hasil survei ini dipublikasikan dalam diskusi publik 'Peluncuran Buku Temuan Hasil Riset Wajib Belajar 12 Tahun', di Bakkoel Koffie, Jalan Cikini Raya Nomor 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017), dengan mengangkat tema 'Menagih Janji Kebijakan Program Wajar 12 Tahun'.

Seperti yang diketahui, program wajar 12 tahun ini adalah salah satu program dari Nawacita. Namun menurut JPPI hal ini masih belum beranjak dari sekedar retrorika saja.

"Ada saya bilang di sini wajar 12 tahun masih sebatas retorika, di lapangan belum berjalan dengan baik, dari 20 kabupaten atau kota yang kita teliti juga, tidak ada satu pun yang mengalokasikan dana APBD mereka untuk wajar 12 tahun," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji saat ditemui.

Menurut Ubaid di 20 daerah ini masih menggunakan istilah wajar 9 tahun, dan belum ada komitmen dalam implementasi wajar 12 tahun. JPPI juga mengomentari alokasi dana pendidikan tahun 2016 di daerah yang mencapai 32,6 persen.

"Sekilas sudah bagus, kebanyakan berasal dari dana transfer, tapi jika dipisahkan dana murni yang berasal dari daerah tidak sampai 20% untuk pendidikan, tapi kebanyakan pemerintah provinsi hanya menganggarkan 10%, ini sangat ironis, hanya DKI saja yang menggunakan lebih dari 20% dana daerahnya untuk pendidikan," ujarnya.

Temuan lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan di daerah belum berorientasi pada kualitas guru. Menurut Ubaid, kesejahteraan yang diterima guru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas.

"Hasil uji kompetensi guru, terakhir tahun 2016, itu skornya belum beranjak dari 53,05, kalau anak sekolah itu kan tidak lulus, gurunya saja dapat skor segitu, bagaimana kualitas murid nanti," imbuh Ubaid.

Dari hasil penelitian ini, Ubaid berharap gagasan wajar 12 tahun jangan sampai kandas sebelum berlabuh. Maksudnya, hal ini harus terwujud dalam pendidikan di Indonesia.

"Karena ini penting untuk upaya peningkatan kualitas dan daya saing bangsa, melalui pendidikan pengembangan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan generasi muda bisa bertambah," imbuhnya.

JPPI juga menawarkan sebuah website bagi sekolah maupun wali murid yang mempunyai masalah tentang pendidikan. Mereka bisa melaporkan atau mengadu terkait pendidikan ke Laporpendidikan.com. Hal yang dilaporkan akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh JPPI ke lembaga terkait. (rvk/erd)

Sumber : <https://news.detik.com/berita/3460243/jppi-wajib-belajar-12-tahun-masih-sebatas-retrorika>

Wajib Belajar 12 Tahun Masih Sebatas Retrorika



Maret 30, 2017 koran tangerang

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan penelitian pendidikan tentang orientasi anggaran pendidikan yang berkeadilan pada program wajib belajar (wajar) 12 tahun. Hasil penelitian menyatakan belum adanya prioritas pemerintah daerah pada program ini.

Penelitian ini dilakukan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara random (acak) yakni, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bengkalis, Kota Palembang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Maros, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, dan Kota Pare-Pare.

Hasil survei ini dipublikasikan dalam diskusi publik 'Peluncuran Buku Temuan Hasil Riset Wajib Belajar 12 Tahun', di Bakkoel Koffie, Jalan Cikini Raya Nomor 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017), dengan mengangkat tema 'Menagih Janji Kebijakan Program Wajar 12 Tahun'.

Seperti yang diketahui, program wajar 12 tahun ini adalah salah satu program dari Nawacita. Namun menurut JPPI hal ini masih belum beranjak dari sekedar retrorika saja.

"Ada saya bilang di sini wajar 12 tahun masih sebatas retorika, di lapangan belum berjalan dengan baik, dari 20 kabupaten atau kota yang kita teliti juga, tidak ada satu pun yang mengalokasikan dana APBD mereka untuk wajar 12 tahun," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji saat ditemui.

Menurut Ubaid di 20 daerah ini masih menggunakan istilah wajar 9 tahun, dan belum ada komitmen dalam implementasi wajar 12 tahun. JPPI juga mengomentari alokasi dana pendidikan tahun 2016 di daerah yang mencapai 32,6 persen.

“Sekilas sudah bagus, kebanyakan berasal dari dana transfer, tapi jika dipisahkan dana murni yang berasal dari daerah tidak sampai 20% untuk pendidikan, tapi kebanyakan pemerintah provinsi hanya menganggarkan 10%, ini sangat ironis, hanya DKI saja yang menggunakan lebih dari 20% dana daerahnya untuk pendidikan,” ujarnya.

Temuan lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan di daerah belum berorientasi pada kualitas guru. Menurut Ubaid, kesejahteraan yang diterima guru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas.

“Hasil uji kompetensi guru, terakhir tahun 2016, itu skornya belum beranjak dari 53,05, kalau anak sekolah itu kan tidak lulus, gurunya saja dapat skor segitu, bagaimana kualitas murid nanti,” imbuh Ubaid.

Dari hasil penelitian ini, Ubaid berharap gagasan wajar 12 tahun jangan sampai kandas sebelum berlabuh. Maksudnya, hal ini harus terwujud dalam pendidikan di Indonesia.

“Karena ini penting untuk upaya peningkatan kualitas dan daya saing bangsa, melalui pendidikan pengembangan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan generasi muda bisa bertambah,” imbuhnya.

JPPI juga menawarkan sebuah website bagi sekolah maupun wali murid yang mempunyai masalah tentang pendidikan. Mereka bisa melaporkan atau mengadu terkait pendidikan ke Laporphendidikan.com. Hal yang dilaporkan akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh JPPI ke lembaga terkait. @sinta

Sumber : <http://korantangerang.com/wajib-belajar-12-tahun-masih-sebatas-retrorika/>

Lingkungan Sekolah Belum Ramah Anak

posted by Konde Institute



Ilustrasi media.

Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Network for Education Watch Indonesia (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia-JPPI) mengeluarkan sebuah index layanan pendidikan di Indonesia 2016, yang disebut Right to Education Index (RTEI) bekerjasama dengan RESULTS International.

Index RTEI ini juga dilakukan di beberapa negara, yaitu Indonesia, Inggris, Kanada, Australia, Philipina, Korea Selatan, Palestina, Ethiopia, Nigeria, Honduras, Tanzania, Zimbabwe, Kongo, dan Chile. RTEI merupakan indeks yang dirancang untuk mengukur pemenuhan hak atas pendidikan, yang akan mendorong akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan pendidikan.

Dalam pernyataan persnya pada Senin 27 Maret 2017 kemarin, disebutkan ada lima indikator utama yang diukur dalam Index ini antarlain: governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability.

Dari beberapa indicator tersebut, Indonesia mendapatkan skor 77%. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI menyatakan bahwa skor ini tidak membanggakan, karena menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sejajar dengan negara Nigeria dan Honduras. "Ironisnya lagi, ternyata kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah Philipina dan Ethiopia."

Peringkat Kualitas Pendidikan Berdasarkan RTEI 2016:

Dalam Index ini Indonesia menempati tempat ke-7 dari 14 negara yang lain.

1. UK : 87%
2. Canada : 85%
3. Australia : 83%
4. Philippines : 81%
5. Ethiopia : 79%
6. South Korea : 79%
7. Indonesia : 77%
8. Nigeria : 77%
9. Honduras : 77%
10. Palestine : 76%
11. Tanzania : 73%
12. Zimbabwe : 72%
13. Kongo : 70%
14. Chile : 65%

Catatan Hasil Penelitian

Dari beberapa temuan penelitian, ada 3 isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian karena skornya masih rendah, yaitu:

1. Kualitas guru (availability)
2. Sekolah yang tidak ramah anak (acceptability)
3. Diskriminasi terhadap kelompok marginal (adaptability).

Skor kualitas guru yang rendah ini disebabkan karena rasio ketersediaan guru khususnya di daerah terdepan, terluar dan terpencil. Juga, berdasarkan hasil uji kompetensi guru 2016 yang masih di bawah standar. Ini tidak sebanding dengan anggaran yang dihabiskan untuk gaji guru, tapi tidak berpengaruh banyak terhadap peningkatan kualitas.

Lingkungan Sekolah di Indonesia

Lingkungan sekolah di Indonesia yang dianggap masih belum ramah anak. Hal ini disebabkan masih maraknya kekerasan di sekolah, baik fisik maupun non fisik.

Kasus tentang bullying, kekerasan fisik, dan juga kekerasan seksual masih sering menghiiasi pemberitaan media. Setidaknya ada enam tipe kekerasan utama yang terus terulang di lingkungan sekolah:

1. Penganiayaan guru kepada siswa
2. Penganiayaan siswa kepada guru
3. Penganiayaan siswa kepada siswa
4. Penganiayaan wali murid kepada guru

5. Pelecehan seksual
6. Tawuran antarsekolah

“Problem lainnya adalah akses pendidikan bagi kelompok marginal. Kelompok marginal yang masuk kategori ini adalah perempuan, anak di penjara, kelompok difabel, anak keluarga miskin, dan juga para pengungsi. Di antara kelompok marginal ini, yang paling rentan adalah pengungsi,” ujar Ubaid Matraji.

Di Indonesia, ada banyak pengungsi dari berbagai negara, antara lain Myanmar, Irak, Somalia, Afganistan, dan Palestina. Belum lagi ada juga pengungsi dari dalam negeri, akibat konflik dan kemiskinan. Penanganan pengungsi di Indonesia masih bersifat sektoral, yakni hanya berdasarkan koordinasi lintas lembaga pemerintahan tanpa dipayungi oleh kebijakan dan kerangka hukum.

Ketiadaan hukum ini menyebabkan berbagai institusi pemerintahan mencoba melakukan terobosan, namun terkendala karena keterbatasan wewenang yang dimiliki masing-masing lembaga dalam menangani para pengungsi. Akibatnya, hak pendidikan bagi anak-anak tersebut menjadi terbengkalai.

Rekomendasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah

Berdasarkan temuan-temuan RTEI 2016, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain yaitu: kualitas guru harus ditingkatkan. Jangan hanya gajinya saja yang naik, kualitasnya juga harus meningkat.

“Untuk itu, pemerintah harus lebih serius dalam mengembangkan kapasitas guru. Langkah ini harus dilakukan berdasarkan roadmap yang jelas, terukur, dan berkesinambungan. Evaluasi dan monitoring juga harus dilakukan secara berkala. Lalu, menindaklanjuti temuan-temuan evaluasi di lapangan. Jika tidak, maka kualitas guru akan terus masih menjadi dilema yang berkepanjangan.”

Yang kedua, untuk menciptakan rasa aman dan ramah anak di sekolah, pemerintah dan juga pihak sekolah harus memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak manapun apabila melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Selain itu, partisipasi orang tua juga sangat penting untuk digenjut. Ini bagian dari mekanisme kontrol yang harus diperankan orang tua dan juga stakeholder lain di sekolah.

Ketiga yaitu perlunya kebijakan afirmasi untuk kelompok marginal. Diskriminasi pendidikan bagi kelompok marginal harusnya tidak terjadi. Khususnya bagi kalangan miskin, difabel dan para pengungsi. Mereka juga punya hak atas pendidikan.

“Untuk itu, pemerintah harus memberikan kebijakan afirmasi kepada kelompok-kelompok rentan. Karena masih banyak anak yang tidak bisa sekolah, disebabkan identitas yang tidak sesuai dengan domisili. Ini sering menimpa anak-anak pengungsi, baik karena konflik atau akibat kemiskinan yang mendera,” ungkap Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Sumber : <http://www.konde.co/2017/03/lingkungan-sekolah-belum-ramah-anak.html>

Kamis 23 Maret 2017, 12:23 WIB

Pendidikan Indonesia di Bawah Ethiopia, Kemendikbud: Kita Perbaiki

Cici Marlina Rahayu - detikNews



Seminar Bridging The Gap Between Education Policy and Implementation (Cici/detikcom)

Jakarta - Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan indeks kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah Ethiopia dan Filipina. Menanggapi indeks tersebut, Kemendikbud berjanji akan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hendarman mengapresiasi hasil penelitian ini dan mengatakan akan memperbaikinya.

“Menurut saya, ini kan bagus ya harus diapresiasi bahwa ada lembaga lain juga yang melihat dari right-nya itu kan dibuatkan indeks, ini kan bentuk instrumen lain, kan ada untuk pendidikan dipisah, nah ini Right to Education Index (REI). Menurut saya ini, kita lihat nanti, kita manfaatkan ini apa yang harus kita perbaiki,” ujar Hendarman ketika ditemui di Hotel Santika, Jalan Pintu 1 TMII, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (23/3/2017).

Dalam penelitian ini, ada 5 indikator yang menjadi bahan pertimbangan, yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari kelima indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan skor 77%.

“Jadi ini adalah bagian dari masukan dan nanti ini kita olah di Kementerian dan akan kita analisis. Sebenarnya saya ingin tahu tuh, itu kan ada 5 dimensi, saya kan belum tahu tuh 5 indikator itu isinya apa, bagaimana cara metodologinya,” ujarnya.

Menurutnya, ini adalah sebuah masukan yang akan ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Namun ia mengungkapkan sedikit penasaran atas dasar penelitian tersebut.

“Saya sempat kaget juga, dari data ini, apa sih yang digunakan untuk menilai itu. Kemudian masak iya rendah banget sekolah tidak ramah. Bagi saya, overall, secara keseluruhan bagus, saya akan laporkan juga. Kalau boleh kita minta, ini kan bagian dari instrumen yang lain,” ucapnya.

Hendarman mengatakan hal ini akan menjadi bahan pertimbangan. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah dalam menyikapi hal tersebut.

“Indikator governance rendah, kalau ada masalah ya ada free education, kok tinggi. Nah saya juga melihat kok kontradiksi ya, lalu secara umum, ini kan masalah dari hasil studi ini, implementasinya aturannya ada, semua ada. Tapi, saat pelaksanaannya tidak sesuai,” tutur Hendarman.

“Kita kan dari Kementerian punya neraca daerah, nanti Puslitjak akan gunakan ini. Kita di lingkup kami akan kami bicarakan juga. Itu sebabnya, Pak Menteri menekankan sekali, menyelesaikan masalah seperti ini, itu akan kami rundingan kembali,” ujarnya.

Dengan hasil Indonesia menempati urutan ke-7 dengan skor 77%, hal ini sama seperti dua negara lainnya, yaitu Nigeria dan Honduras.

Berikut ini urutan peringkat kualitas pendidikan berdasarkan Right to Education Index (RTEI):

1. Inggris : 87%
2. Kanada : 85%
3. Australia : 83%
4. Filipina : 81%
5. Ethiopia : 79%
6. Korea Selatan : 79%
7. Indonesia : 77%
8. Nigeria : 77%
9. Honduras : 77%
10. Palestina : 76%
11. Tanzania : 73%

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3454747/pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-kemendikbud-kita-perbaiki>

(rvk/erd)

Kamis 23 Maret 2017, 11:59 WIB

JPPI: Indeks Pendidikan Indonesia di Bawah Ethiopia dan Filipina

Cici Marlina Rahayu - detikNews



Foto: Seminar Bridging The Gap Between Education Policy and Implementation (Cici-detikcom)

Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan penelitian Right to Education Index (RTEI) guna mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di berbagai negara. Hasil penelitian menyatakan kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah Ethiopia dan Filipina.

Penelitian ini dilakukan di 14 negara secara random, yakni Inggris, Kanada, Australia, Filipina, Ethiopia, Korea Selatan, Indonesia, Nigeria, Honduras, Palestina, Tanzania, Zimbabwe, Kongo dan Chili. Penelitian ini dipublikasikan dalam 'International Seminar and Report Launch' di Hotel Santika, Jalan Pintu 1 TMII, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (23/3/2017), dengan mengangkat tema 'Bridging The Gap Between Education Policy and Implementation'.

Dalam penelitian ini ada 5 indikator yang diukur oleh JPPI, di antaranya governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari kelima indikator yang diukur Indonesia menempati urutan ke-7 dengan nilai skor sebanyak 77%.

Tentunya hal ini kurang membanggakan, karena menunjukkan kualitas pendidikan yang belum memadai. Skor tersebut sama dengan dua negara lainnya yaitu, Nigeria dan Honduras. Selain itu kualitas pendidikan di Indonesia, berada di bawah Filipina dan Ethiopia.

“Ya jadi dari indeks ini sebenarnya berasal dari 5 indikator itu ya, hasilnya 77%, nah dari beberapa itu ada 3 hal yang skor-nya masih rendah itu tentang kualitas guru (availability), sekolah yang belum ramah anak (acceptability), satu lagi soal pendidikan atau akses bagi kelompok-kelompok marginal (adaptability),” kata Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional JPPI ketika ditemui.

Menurut Ubaid dari 3 hal tersebut, skor kualitas guru rendah karena tidak meratanya ketersediaan guru pada daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Ia juga mengatakan hal ini tidak sebanding dengan anggaran yang sudah dihabiskan untuk gaji guru.

“Kemudian yang kedua lingkungan sekolah belum ramah anak ya, kekerasan, kemudian seksual pelecehan itu sering terjadi di sekolah, dan masih menjadi bulan-bulanan di media lah, dan masih banyak lagi, anak yang diculik segala macam, itu juga skornya kecil, pemerintah harus memberikan pengawasan tidak harus dari sekolah, tapi komite dan yang lainnya juga harus saling berkontribusi, agar kekerasan di sekolah tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Problem lainnya adalah adaptability atau akses pendidikan bagi kelompok marginal. Ia mengaku Indonesia belum bisa memberikan hak pendidikan bagi anak-anak tersebut.

Berikut urutan peringkat kualitas pendidikan berdasarkan RTEI:

1. Inggris : 87%
2. Kanada : 85%
3. Australia : 83%
4. Filipina : 81%
5. Ethiopia : 79%
6. Korea Selatan : 79%
7. Indonesia : 77%
8. Nigeria : 77%
9. Honduras : 77%
10. Palestina : 76%
11. Tanzania : 73%

(rvk/erd)

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-dan-filipina>

Indonesian education index lower than Philippines, Ethiopia

The Jakarta Post

Jakarta | Sat, March 25, 2017 | 10:48 am



Indonesian education index lower than Philippines, Ethiopia Heavily damaged: School officers observe collapsed roofs at state senior high school SMA Negeri 1 Muara Gembong, Bekasi regency, West Java, on Feb. 28. (Antara/Risky Andrianto)

Bookmark this page-5k

A recent study commissioned by the Network for Education Watch Indonesia (JPPI) reveals the index of education services in Indonesia in 2016 ranks lower than the Philippines and Ethiopia.

The Right to Education Index (RTEI) research shows that from indicators measured in the survey, which comprise education governance, availability, accessibility, acceptability and adaptability, Indonesia scores 77 percent.

This indicates that the quality of education in Indonesia is at the same level with Honduras and Nigeria but lower than the Philippines (81 percent) and Ethiopia (79 percent).

The JPPI says three strategic issues need closer attention. These issues include teachers' quality, child-unfriendly schools and discrimination against marginalized groups.

It further says Indonesia's low score in terms of the quality of teachers is a result of the unbalanced ratio on the availability of teachers especially in outermost and secluded areas across the country. Results of a test held in 2016 show that the competency of teachers in Indonesia is still below standard.

Many schools in Indonesia are considered to still have a child-unfriendly environment due to the rise in reports on violence, both physical and non-physical, at school. Cases of bullying, physical violence and sexual violence against school children have emerged so often in mass media.

The JPPI says poor access to education experienced by people from marginalized groups needs an immediate solution. The groups include women, children in prison, disabled people, children from poor families and refugees.

Carried out in 14 countries in collaboration with RESULTS International, the RTEI research aims to measure the fulfillment of people's rights to education. (dis/ebf)

Sumber : <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/25/indonesian-education-index-lower-than-philippines-ethiopia.html>

Ini 3 Isu Utama Pendidikan di Indonesia

Kamis 23 Mar 2017 15:54 WIB

Rep: Umi Nur Fadhillah/ Red: Andi Nur Aminah



Anak sekolah menyebrangi sungai untuk tiba di sekolahnya yang jauh (ilustrasi)
Foto: Republika/Edi Yusuf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama Results Internasional menyebut ada tiga permasalahan utama pendidikan di Indonesia. Masing-masing, yakni kualitas guru, sekolah yang tidak ramah anak dan deskriminasi terhadap kelompok marginal.

"Ada tiga isu strategis yang perlu mendapat perhatian," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam Seminar Internasion dan Laporan Right to Education Index (RTEI) 2016 di Jakarta, Kamis (23/3).

Ia menyebut, penelitian RTEI mengukur lima faktor utama, yakni pemerintahan, ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan adaptasi. Dari lima faktor itu, Indonesia mendapatkan skor 77 persen untuk laporan pendidikan. Namun, posisi Indonesia sejajar dengan Nigeria dan Honduras.

Ironisnya, ia menyebut, kualitas pendidikan Indonesia berada di bawah Filipina (81 persen) dan Etiopia (79 persen). Penelitian itu menempatkan Inggris (87 persen) di urutan teratas. Disusul, Kanada (85 persen) dan Australia (83 persen).

Ubaid menjelaskan, kualitas guru yang rendah disebabkan rasio ketersediaan guru, khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Berdasarkan hasil uji kompetensi guru pada 2016 menunjukkan nilai di bawah standar. Ia menyebut, hal tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk gaji guru.

Sementara itu, Ubaid menjelaskan, hasil penelitian menunjukkan, lingkungan sekolah di Indonesia belum ramah anak. Ia mencontohkan, hal itu terlihat dari masih maraknya kekerasan di sekolah, baik fisik maupun bukan fisik.

Ia menyebut, setidaknya ada enam tipe kekerasan utama yang terus terulang di lingkungan sekolah. Yakni, penganiayaan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, sesama siswa wali murid kepada guru, pelecehan seksual dan tawuran antarsekolah.

Selain itu, Ubaid menyebut, akses pendidikan bagi kelompok marginal masih rendah. Kelompok marginal yang masuk kategori ini adalah perempuan, anak di penjara, kelompok difabel, anak keluarga miskin, dan para pengungsi. Ia mengingatkan, di Indonesia ada banyak pengungsi dari berbagai negara, seperti, Myanmar, Irak, Somalia, Afganista dan Palestina.

Ubaid menyebut, JPPI dan Results Internasional merekomendasikan sejumlah hal untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pertama, meningkatkan kualitas guru butuh komitmen jelas pemerintah dalam mengembangkan kapasitas guru. Pemerintah harus punya peta jalan yang jelas, terukur dan berkesinambungan.

Juga evaluasi dan pemantauan harus dilakukan secara berkala. Sebab, dikhawatirkan kualitas guru akan terus menjadi dilema berkepanjangan.

Kedua, pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Hal itu bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan ramah anak di sekolah. Selain itu, pemerintah harus mendorong sekolah dan orang tua aktif berpartisipasi dan mengontrol sekolah.

Ketiga, Ubaid menjelaskan, perlu kebijakan afirmasi untuk kelompok marginal atas diskriminasi pendidikan yang dialami kelompok itu. Sebab, masih banyak anak tidak bisa sekolah karena identitas yang tidak sesuai dengan domisili.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud, Hendarman menyebut, hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mengatasi sejumlah permasalahan pendidikan. Kendati demikian, ia mempertanyakan rendahnya hasil yang diperoleh Indonesia dalam penelitian itu.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/03/23/on9feb384-ini-3-isu-utama-pendidikan-di-indonesia#>

Ini 7 Rekomendasi JPPI Soal Program Wajib Belajar 12 Tahun

Selasa, 14 Maret 2017 | 14:15 WIB



Ilustrasi. JPPI merekomendasikan program wajib belajar 12 tahun.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan tujuh rekomendasi pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait program wajib belajar 12 tahun.

- Pemerintah dan DPR harus segera menyusun produk legislasi yang memperkuat program Wajib Belajar 12 Tahun karena terkait dengan alokasi APBN yang diatur melalui undang-undang,
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu merumuskan program wajib belajar 12 tahun secara detail, sehingga bisa direalisasikan secepatnya. Diperlukan blue print Wajib Belajar 12 Tahun termasuk kebijakan anggaran yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan SDM dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar 12 Tahun,

- Mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk membuat Rencana Aksi Nasional dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun ditingkat nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,
- Mendorong Pemerintah untuk menginisiasi Rancangan Undang-Undang Wajib Belajar 12 Tahun dan juga mendorong Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk masuk sebagai prioritas Program Legislasi Nasional 2017 di DPR
- Program Wajib Belajar 12 Tahun seharusnya memperkuat kebhinekaan dan mengatasi kesenjangan serta penyeragaman dalam dunia pendidikan,
- Program untuk masyarakat miskin harus benar-benar bisa terukur keberhasilannya.

Hal ini JPPI sampaikan, karena kebijakan tersebut dinilai masih bersifat makro, dan belum bisa beroperasi di lapangan. Kemendikbud maupun Kemenag sebagai salah satu pemegang kebijakan di bidang pendidikan belum merumuskan program wajib belajar 12 tahun secara detail, sehingga bisa direalisasikan secepatnya.

“Hal itu terlihat dari belum adanya blue print wajib belajar 12 tahun yang dibuat secara detail oleh Kemendikbud maupun Kemenag. Pemerintah juga belum membuat kebijakan anggaran wajib belajar 12 tahun yang langsung dicerminkan dengan program-programnya,” ujar Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq dalam laporan tertulis yang redakai terima, Selasa (14/3/2017).

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari

Editor : Sulha Handayani

Sumber : <http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/61919/ini.7.rekomendasi.jppei.soal.program.wajib.belajar.12.tahun>

JPPI Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun

Selasa 14 Mar 2017 03:25 WIB

Rep: Umi Nur Fadilah/ Red: Nidia Zuraya



Wajib Belajar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kebijakan wajib belajar 12 tahun masih bersifat makro.

"Kebijakan tersebut masih bersifat makro, dan belum bisa beroperasi di lapangan," Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (13/3).

Ia menyebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag) sebagai salah satu pemegang kebijakan di bidang pendidikan, belum merumuskan program wajib belajar 12 tahun secara detail. Hal itu berdampak pada realisasi program yang masuk dalam RPJMN 2015-2019.

Nailul menyebut, belum ada blue print (cetak biru) wajib belajar 12 tahun yang dibuat secara detail oleh Kemendikbud maupun Kemenag. Pun ia menilai, pemerintah belum membuat kebijakan anggaran wajib belajar 12 tahun yang langsung dicerminkan dengan program-programnya.

JPPI memandang perlu adanya tata peraturan perundang-undangan yang mampu mendorong program wajib belajar 12 tahun. Sehingga segera dapat dijadikan panduan dalam implementasi di lapangan.

Nailul mengatakan, JPPI merekomendasikan sejumlah hal, pertama pemerintah dan DPR harus segera menyusun produk legislasi yang memperkuat program wajib belajar 12 tahun. Karena terkait dengan alokasi APBN yang diatur melalui undang-undang.

Kedua, Kemendikbud perlu merumuskan program wajib belajar 12 tahun secara detail. Sehingga bisa direalisasikan secepatnya. Diperlukan blue print wajib belajar 12 tahun termasuk kebijakan anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan SDM dalam rangka menunjang program wajib belajar 12 tahun.

Keempat, mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk membuat rencana aksi nasional dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ditingkat nasional.

Kelima, mendorong pemerintah untuk menginisiasi rancangan UU wajib belajar 12 tahun dan juga mendorong Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk masuk sebagai prioritas Program Legislasi Nasional 2017 di DPR.

Keenam, program wajib belajar 12 tahun seharusnya memperkuat kebinekaan dan mengatasi kesenjangan serta penyeragaman dalam dunia pendidikan. Ketujuh, program untuk masyarakat miskin harus benar-benar bisa terukur keberhasilannya.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/03/14/omrou4383-jppi-pertanyakan-komitmen-pemerintah-soal-kebijakan-wajib-belajar-12-tahun#>

PENDIDIKAN JPPI: Pendidikan Seks Harus Masuk Kurikulum Sekolah

28 Feb 2017 21:16



Dalam Kurikulum 2013 lalu, pemerintah mengklaim pendidikan seks sudah dimasukkan dalam kurikulum tersebut, namun pemberlakuan kurikulum 2013 sudah kandas di tengah jalan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pasca permintaan maaf oleh pihak penerbit dan penarikan buku dari peredaran, bukan berarti kasus konten buku porno di sekolah dianggap selesai. Kasus beredarnya buku 'Aku Berani Tidur Sendiri' adalah masalah penting yang harus dipertimbangkan dan perlu diambil tindakan yang tepat, supaya kasus serupa tidak terulang kembali. Jika tidak, pasti akan mudah terulang kembali dan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan pantauan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), satu tahun terakhir ini ada banyak kasus serupa dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Tidak ada satu kasus pun yang diproses secara hukum. Kasus serupa juga terjadi di Jambi, Bali, Samarinda, Pasaman, Bogor, Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta.

“Penyelesaian kasus selalu sama: penerbit meminta maaf lalu selesailah perkara. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Kasus serupa kembali terjadi dan modus yang tak jauh berbeda. Karena tidak ingin terulang lagi, kasus ini harusnya jadi pelajaran bersama dan dicarikan jalan keluar yang terbaik,” kata Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI kepada IndonesiaSatu.co di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Dia menilai, konten porno di buku sekolah ini memang agak tarik-ulur dan belum jelas duduk perkaranya. Dalam beberapa kasus, definisi porno agak kabur. Ketika JPPI melakukan investigasi pada beberapa buku yang “diduga” bermuatan konten porno, ada beberapa kalangan yang mengatakan, termasuk kategori porno. Sementara sebagian yang lain mensinyalir bahwa ini tidak masuk kategori porno, tapi bagian dari pendidikan seks di sekolah.

Di luar perdebatan tersebut, lanjut Ubaid, ternyata memunculkan pertanyaan publik ihwal pendidikan seks di sekolah. “Ini penting untuk diperhatikan, sebab kasus pelecehan dan kekerasan seksual juga kerap terjadi di sekolah. Bahkan, pelakunya tidak jarang berasal dari lingkungan sekolah. Ini disebabkan karena lemahnya pengawasan dan juga ketidaktahuan si korban terhadap pengetahuan seksual,” katanya.

Karena itu, JPPI memandang penting bahwa pendidikan seks harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Dalam Kurikulum 2013 lalu, pemerintah pernah mengklaim bahwa pendidikan seks sudah dimasukkan dalam kurikulum tersebut. Tapi, belum kelihatan secara pasti model tarawaran pendidikan seks di sekolah itu seperti apa. Apalagi, pemberlakuan kurikulum 2013 sudah kandas di tengah jalan.

“Ini menambah kegelisahan masyarakat soal model pendidikan seks di sekolah. Karena itu, JPPI menegaskan dan meminta pemerintah untuk merumuskan model pendidikan seks di sekolah dan memasukkan ke dalam kurikulum,” tegas Ubaid.

Penegakan Hukum

Selain itu, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyebaran konten porno di sekolah, JPPI menedesak penegakan hukum. Pelaku dan siapapun yang terlibat harus dihukum. Karena itu, harus ada penyelidikan secara komprehensif mulai dari penulis, penerbit, distributor, dan pihak sekolah.

“Dari langkah ini, ada banyak hal yang akan ditemukan. Misalnya, dari sisi penulis, perlu ada penyelidikan lebih lanjut mengapa dia sampai menulis buku dengan konten seperti itu. Karena ketidaktahuan, atau kesengajaan, atau malah ada motif lain? Ini penting untuk diketahui oleh publik,” katanya.

Dari sisi penerbit, Ubaid mempertanyakan mengapa penerbit seakan tidak bertanggung jawab terhadap buku yang diterbitkan. Padahal, penerbit tidak boleh menutup mata terhadap buku yang diterbitkan. Sebab, sudah menjadi maklum, bahwa penerbit punya visi dan hanya akan menerbitkan buku-buku yang sejalan, jadi tidak menerbitkan semua jenis buku bacaan.

Karena itu, lanjut dia, menjadi salah dan tidak bisa diterima logika yang mengatakan penerbit tidak tahu-menahu tentang konten buku yang diterbitkan. Begitu pula dengan pihak sekolah, harus ada penyelidikan yang tuntas, apakah ada keterlibatan atau tidak.

“Ini bukan perkara main-main, yang cukup dengan minta maaf, tapi harus ada penegakan hukum supaya tidak gampang terulang kembali. Sebab, dalam aturan hukum sudah jelas, ancaman terhadap kasus ini diatur dalam Pasal 29 UU 44/2008 tentang pornografi yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta rupiah dan paling banyak Rp 6 miliar rupiah,” tegas dia.

Atas dasar itulah, JPPI menyerukan untuk mengganjar para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dengan hukuman yang setimpal, serta mendesak pemerintah untuk memasukkan dan membenahi pendidikan seks di kurikulum sekolah.

--- Sandy Romualdus

Sumber : <http://indonesiasatu.co/detail/jppi--pendidikan-seks-harus-masuk-kurikulum-sekolah>

Pelaku Penyebar Konten Porno di Sekolah Harus Diproses Hukum

Senin, 27 Februari 2017 | 14:32 WIB | Oleh Yudi Rahmat , diterbitkan oleh Juli



Jakarta, InfoPublik - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan selama satu tahun terakhir terjadi banyak kasus penyebaran konten porno di sekolah namun tidak ada satu kasus pun yang diproses secara hukum.

"JPPI berharap penegak hukum memberikan efek jera terhadap pelaku penyebaran konten porno di sekolah, karena kasus serupa terus berulang seperti yang terjadi di Jambi, Bali, Samarinda, Pasaman, Bogor, Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, di Jakarta, Senin (27/2).

Ia menilai, penyelesaian kasus selalu sama hanya dengan penerbit meminta maaf lalu selesailah perkara. Namun yang terjadi kemudian adalah kasus serupa kembali terjadi dengan modus yang tak jauh berbeda. "Karena tidak ingin terulang lagi, kasus ini harusnya jadi pelajaran bersama dan dicarikan jalan keluar yang terbaik," ujarnya.

Selain itu JPPI minta, pelaku dan siapapun yang terlibat harus dihukum, dan harus ada penyelidikan secara komprehensif mulai dari penulis, penerbit, distributor, dan pihak sekolah. Dari langkah ini, ada banyak hal yang akan ditemukan. Misalnya, dari sisi penulis, perlu ada penyelidikan lebih lanjut mengapa dia sampai menulis buku dengan konten seperti itu. "Karena ketidaktahuan, atau kesengajaan, atau malah ada motif lain, ini penting untuk diketahui oleh publik," ungkapnya.

Menurutnya, konten porno di buku sekolah ini memang agak tarik-ulur dan belum jelas duduk perkaranya. Dalam beberapa kasus, definisi porno agak kabur.

"Ketika JPPI melakukan investigasi pada beberapa buku yang diduga bermuatan konten porno, ada beberapa kalangan yang mengatakan, termasuk kategori porno. Sementara sebagian yang lain mensinyalir bahwa ini tidak masuk kategori porno, tapi bagian dari pendidikan seks di sekolah. Mana yang lebih tepat ini perlu diinvestigasi lebih dalam," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, diluar perdebatan tersebut ternyata memunculkan pertanyaan publik ikhwal pendidikan seks di sekolah. Hal ini menurutnya, penting untuk diperhatikan, sebab kasus pelecehan dan kekerasan seksual juga kerap terjadi bahkan pelakunya tidak jarang berasal dari lingkungan sekolah.

"Ini disebabkan karena lemahnya pengawasan dan juga ketidaktahuan si korban terhadap pengetahuan seksual, karena itu, JPPI memandang penting bahwa pendidikan seks harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah," ujarnya.

Dalam Kurikulum 2013 lalu, pemerintah pernah mengklaim bahwa pendidikan seks sudah dimasukkan dalam kurikulum tersebut. Tapi, belum kelihatan secara pasti model pendidikan seks di sekolah itu seperti apa. Apalagi, pemberlakuan kurikulum 2013 sudah kandas di tengah jalan.

Sehingga hal ini dinilai menambah kegelisahan masyarakat soal model pendidikan seks di sekolah. Karena itu, JPPI menegaskan dan meminta pemerintah untuk merumuskan model pendidikan seks di sekolah dan memasukkan ke dalam kurikulum.

Selain itu, dari sisi penerbit tidak boleh menutup mata terhadap buku yang diterbitkan. Sebab, sudah menjadi maklum, bahwa penerbit punya visi dan hanya akan menerbitkan buku-buku yang sejalan, jadi tidak menerbitkan semua jenis buku bacaan.

"Karena itu, menjadi salah dan tidak bisa diterima logika yang mengatakan tidak tahu-menahu tentang konten buku yang diterbitkan. Begitu pula dengan pihak sekolah, harus ada penyelidikan yang tuntas, apakah ada keterlibatan atau tidak," katanya

Menurutnya, dalam aturan hukum sudah jelas, ancaman terhadap kasus ini diatur dalam Pasal 29 UU 44/2008 tentang pornografi yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.

"JPPI menyerukan untuk menggajar para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dengan hukuman yang setimpal, serta mendesak pemerintah untuk memasukkan dan membenahi hal ini," pungkasnya. 323 kali dibaca

Sumber : <http://infopublik.id/read/190766/pelaku-penyebar-konten-porno-di-sekolah-harus-diproses-hukum-.html#>

Pati Optimis Lebih Bangkit Kembangkan Pendidikan

Admin NEW Indonesia
Selasa, 28 Februari 2017



Seminar Nasional Pendidikan bertema "Wajib Belajar 12 Tahun ; Hak atau Kewajiban?" di Kampus IPMAFA Pati (27/2) (dari kiri ke kanan) Panelis seminar Drs Sarpan MM, Drs Akhmad Mundakir MSi, Koordinator advokasi JPPI Ahmad Nailul Faruq Moderator Seminar Inayatul Ulya MSi dari IPMAFA /foto.NEW Indonesia

Pati, NEW Indonesia - Pati, sebuah kabupaten dengan sumber daya maritim dan pertanian berlimpah di Indonesia kini lebih bangkit mengembangkan program dan gagasan pendidikan dengan kearifan lokalnya yang kokoh. Sebagai salah satu wilayah dengan sejarah pendidikan masa lalu yang cukup cemerlang, tokoh dan pemuka agama Kajen Kabupaten Pati memiliki komitmen cukup kuat mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan berbasis pesantren di tanah air.

Rektor Institut Pesantren Mathali'ul Falah IPMAFA Abdul Ghaffarrozin dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional bertema "Wajib Belajar 12 Tahun ; Hak atau Kewajiban?" Senin di Pati (27/2) menekankan tekad dan komitmen para pemangku kepentingan yang memprioritaskan masa depan pendidikan yang cukup potensial , guna lebih menyentuh dan mengatasi masalah kesenjangan pendidikan multiaspek "

Pendidikan tinggi berbasis pesantren, tambah Ghaffarrozin merupakan salah satu formulasi sekaligus sebagai pusat kajian-kajian ilmiah dan sains merupakan semangat kearifan lokal Pati dalam pendidikan dan sumbangsih bagi pendidikan nasional, peran dan partisipasi warga demi mewujudkan kemandirian pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia SDM perlu mendapat ruang dalam pembangunan nasional".

Seminar Nasional Wajib 12 berlangsung interaktif dan cukup produktif , rekomendasi-

rekomendasi hasil seminar diharapkan menjadi masukan bagi semua kalangan ,terutama bagi pemkab dan parlemen kabupaten demi mewujudkan Pati sebagai wilayah pusat kajian keilmuan yang lebih inovatif , serta memberikan sumbangsih besar bagi percepatan upaya nasional dalam mengentaskan kendala serta akses pembangunan , utamanya sektor pendidikan dasar hingga universitas.

Panelis kunci yang tampil dalam seminar Ahmad Nailul Faruq dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia/NEW Indonesia JPPI Jakarta memuji jajaran pemangku kepentingan di Pati yang cukup solid dengan beragam gagasan dan program cemerlang menentukan arah dan mendukung berbagai prakarsa pendidikan model sejak dini, terutama ditandai dengan terus berbenahnya pemkab mewujudkan dan menutaskan program Wajar 12 tahun yang lebih menyeluruh ”.

Menurut Nailul, tata kelola anggaran multiaspek yang lebih berimbang bagi pelayanan publik kependidikan, salah satu wujud nyata yang harus terus digaungkan di Pati, peran serta warga merupakan mitra strategis Pati sebagai wilayah model, modul dan modal dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan global di masa depan, terutaa dalam hal penyediaan SDM profesional dan madani ”.

Kepala Dinas Kantor Kemenag Pati Drs Akhmad Mundakir MSi sebagai panelis seminar mengatakan, tugas fungsi Kemenang RI mewujudkan akses pendidikan untuk semua dan prioritas program-program dalam mengatasi kesenjangan akses diharapkan dapat terwujud dan mendapat dukungan semua pihak.

”Kami ingin pendidikan Pati lebih baik, tambah Mundakir dengan optimistisnya. Kadisdik Pati Drs Sarpan MM memaparkan berbagai terobosan pemerintah lokal soal upaya mengatasi berbagai kendala akses , pemerataan dan mengatasi kesenjangan sektor pendidikan di Pati”. Menurutnya, dari perspektif anggaran Pati sudah mewujudkan amanah Perundangan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan melampaui 20 persen, dan pihaknya cukup terbuka dalam menerima masukan masyarakat terutama dalam mengatasi kendala-kendala akses dan pemerataan kesempatan pendidikan menuju Wajar 12 tahun.

Seminar Nasional Pendidikan IPMAFA-JPPI 2017 terkait Wajib Belajar 12 Tahun , dalam sesi tanya jawab , beberapa peserta menekankan Nawacita pendidikan jangan hanya slogan semata, mesti benar-benar terwujud nyata dan relevan dengan semangat dunia mengentaskan kendala pendidikan untuk semua sebagaimana yang dituangkan dalam salah satu butir pembangan berkelanjutan SDGs.

Penandatanganan MoU JPPI-IPMAFA

Koordinator JPPI Abdullah Ubaid dan Inayatul Ulya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) IPMAFA didaulat menandatangani MoU Kemitraan pendidikan kedua lembaga. Penandatanganan MoU IPMAFA-JPPI disaksikan Rektor dan jajaran dosen serta pengurus yayasan induk IPMAFA Pati.

Beberapa point kemitraan MoU JPPI-IPMAFA salah satunya menjalin kerjasama berbagai program riset serta kajian-kajian terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan multiaspek. Kemitraan diharapkan juga akan mendukung Indonesia mewujudkan Program Wajib Belajar 12 tahun, sebagai salah satu prioritas pembangunan SDM ”Pendidikan untuk semua” di pentas dunia.

IPMAFA

Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Nurussalam Kajen yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah (STAIMAFA). Perubahan status tersebut sesuai Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5492 Tahun 2015 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah menjadi Institut Pesantren Mathali'ul Falah, pada 25 September 2015. Institut Pesantren Mathali'ul Falah sekaligus membuka tiga Program Studi (prodi) baru meliputi Pendidikan Islam adalah prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan prodi Zakat dan Wakaf (ZAWA). (rd)

Sumber : <http://new-indonesia.org/beranda/2016-03-25-08-28-09/berita-new-indonesia/805-pati-lebih-bangkit-kembangkan-model-pendidikan-di-indonesia.html>

Loklatih Analisis Data Anggaran Pendidikan

Admin NEW Indonesia

Rabu, 22 Februari 2017



Hadi Prayitno menjadi instruktur dalam Pelatihan Data Anggaran untuk Advokasi Pendidikan | NEW Indonesia

NEW Indonesia, Jakarta – Baru-baru ini, Loklatih Analisis Anggaran untuk Advokasi Pendidikan JPPI diikuti sedikitnya 30 partisipan aktif, terdiri dari praktisi LSM, akademisi, anggota jaringan JPPI dan kalangan muda terutama mahasiswa dari sejumlah kampus terkemuka di wilayah Jakarta dan Banten.

Menghadirkan instruktur kunci praktisi analisis anggaran, Hadi Prayitno dan Ahmad Taufik, kedua instruktur loklatih memiliki pengalaman berarti dalam bedah kasus dan analisis anggaran sejak keduanya pernah terjun dan menekuni kajian-kajian ilmiah terkait anggaran multisektor di Seknas FITRA Jakarta, sebuah lembaga riset terkemuka Indonesia.

Loklatih berlangsung Jumat di Kantor Seknas JPPI Jakarta (17/2) dinilai cukup interaktif peserta antusias, semua sesi pelatihan disampaikan dengan jelas, instruktur melakukan kombinasi metode teori dan praktik.

Dari sedikitnya 30 peserta Loklatih, disepakati membentuk empat tim analisis yang melakukan praktik, menekankan kerjasama tim dalam menggunakan semua perangkat analisis guna memahami arah dan kebijakan pembangunan sebuah wilayah, salah satunya ditandai dengan kemampuan daerah, kabupaten kota dan provinsi mengalokasikan anggarannya.

Diharapkan peserta lokalatih analisis anggaran ini memahami lebih cepat dengan pengenalan teori dan dasar-dasar analisis anggaran yang diarahkan mempertajam kemampuan analisis anggaran pendidikan yang lebih komprehensif, demikian Hadi Prayitno.

Menurut Ahmad Taufik yang juga Manajer Program JPPI, lokalatih analisis anggaran ini cukup relevan dengan kondisi nasional, terutama guna meningkatkan kesadartahuan kalangan muda, praktisi LSM dan aktivis proanggaran terlibat langsung dalam kajian-kajian kritis dan mendalam tentang anggaran pendidikan, yang diatur dalam regulasi nasional sehingga kebijakan anggaran pendidikan lebih sesuai peruntukannya, tepat guna dan dirasakan warga Negara.

Koordinator Seknas JPPI Abdullah Ubaid memuji kalangan muda yang cukup antusia sebagai partisipan aktif pelatihan kali ini.

Peserta Lokalatih anggaran, tambah Ubaid, akan menjadi mitra JPPI baik personal maupun institusi, dan diharapkan akan menjadi mitra strategis dalam program-program terkait advokasi pendidikan multiaspek.

Ubaid optimistis, besarnya minat kalangan muda merespon kebijakan pemerintah dari perspektif anggaran, diharapkan memicu kepedulian masyarakat terkait kebijakan pendidikan nasional multiaspek. Baik aspek akses, infrastruktur, kualitas serta perjuangan bersama mewujudkan wajib belajar 12 tahun Indonesia, demi mengatasi kesenjangan dan berbagai tantangan pembangunan, mewujudkan SDM Indonesia mandiri dan mampu bersaing.

Salah seorang partisipan pelatihan dari UIN Syarif Hidayatullah Ari Hardi mengatakan, lokalatih analisis anggaran pendidikan cukup menarik dan berguna, kombinasi teori dan praktik membekali kemampuan analisis anggaran yang lebih komprehensif.

Regulasi anggaran

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril, dikutip laman terkemuka MediaIndonesia mengatakan, "korupsi oleh segelintir elite politik di daerah tetap langgeng karena hingga kini celah korupsi (diduga) dibiarkan terbuka.

“Perhatian terhadap tata kelola pemerintahan daerah dari pusat selama ini masih minim, khususnya dari sisi regulasi anggaran. Padahal, tidak bisa dipungkiri sekitar 70% kasus korupsi yang terjadi itu melibatkan agenda pembangunan di daerah,” Oce

Sumber : <http://new-indonesia.org/beranda/2016-03-25-08-28-09/berita-new-indonesia/804-jppi-gelar-lokalatih-analisis-anggaran-untuk-advokasi-pendidikan.html>

PENDIDIKAN JPPI Minta Pemda Tindak Tegas Pelaku Pungli di Sekolah

23 Feb 2017 21:24



Ilustrasi media

“Salah satu yang menjadi penghambat orang tua untuk melaporkan. Karena bisa jadi bagi mereka orang tua murid, yang paling penting adalah anaknya bisa sekolah dengan baik...”

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Maraknya praktik pungutan liar (pungli) di sekolah menjadi perhatian banyak kalangan. Praktik pungli yang dibungkus dalam beragam modus itu harus segera dihentikan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat banyak modus praktik pungli di dunia pendidikan, seperti biaya study tour, biaya praktik-praktik, biaya buku LKS, biaya ekstrakurikuler, biaya ujian, biaya daftar ulang, biaya perpindahan, sumbangan pergantian Kepsek, dana kelas, denda ketika siswa tidak mengerjakan PR, dan lain-lain.

Nailul Faruq – Koordinator Advokasi JPPI menilai, pungli yang dilakukan pihak sekolah masih terus terjadi mungkin karena tidak berjumlah besar, atau hanya kisaran puluhan ribu, sehingga seakan tidak begitu memberatkan orang tua. Akan tetapi hal ini akan membuat praktik pungli di sekolah semakin berjalan mulus tanpa ada penindakan. Dan juga karena masih banyak masyarakat yang tidak berani melaporkan.

“Salah satu yang menjadi penghambat orang tua untuk melaporkan. Karena bisa jadi bagi mereka orang tua murid, yang paling penting adalah anaknya bisa sekolah dengan baik, menerima pelajaran dengan baik, dan semua alat sarana pembelajaran tercukupi, dan tidak mengganggu nilai mata pelajaran si anak,” kata Faruq kepada IndonesiaSatu.co di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Oleh sebab itu, JPPI mengajak kepada publik khususnya orangtua/wali murid, pegiat pendidikan dan media massa untuk bersama-sama mengkampanyekan penghentian pungutan liar di sekolah. Dan adanya keberanian untuk melaporkan kepada pihak terkait apabila terdapat dugaan pungtik di sekolah.

“Kita semua butuh komitmen untuk menghentikan dan memberantas praktik pungli. Mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, masyarakat dan dinas Pendidikan harus satu komitmen memberantas pungli di sekolah,” katanya.

Selain itu, tindakan pungli itu adalah upaya melawan hukum dan masuk dalam kategori tindak pidana yang terindikasi korupsi. Maka peran publik dibutuhkan untuk mendesak pemerintah daerah menindak tegas pelaku pungutan liar di sekolah dan adanya sanksi yang tegas untuk para pelaku kejahatan ini.

JPPI pun memberikan beberapa catatan terkait masih adanya praktik pungli tersebut. Pertama, Pemda harus gencar mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat akan jenis pungli dan juga sanksinya, agar masyarakat memahami jenis-jenis pungli di sekolah.

Kedua, Pemda juga harus tegas untuk memberi sanksi kepada pelaku kejahatan pungli di lingkungan sekolah, seperti mencopot dari jabatan atau dilaporkan dengan tindak pidana seperti kejahatan korupsi.

Ketiga, Pemda harus menyiapkan sarana laporan pengaduan khusus yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat secara luas apabila mendapati lembaga pendidikan atau instansi pemerintah yang melakukan pungli.

Keempat, masyarakat harus berani untuk melaporkan apabila menemukan praktek pungli di lingkungan pendidikan, karena peran serta public sangat penting dalam memberantas dan menghentikan praktek pungli.

--- Sandy Romualdus

Sumber : <http://indonesiasatu.co/detail/jppi-minta-pemda-tindak-tegas-pelaku-pungli-di-sekolah>

News Pendidikan

JPPI Minta Pemda Tindak Tegas Pungli di Sekolah

Rabu, 22 Februari 2017 | 23:29 WIB



Ilustrasi, PemkotBogor

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemda menindak tegas pungutan liar di sekolah atau pungli.

Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq mengatakan selama ini pungli di sekolah tidak berjumlah besar dan dinilai tidak memberatkan orang tua. Hal ini merupakan upaya melawan hukum dan masuk dalam kategori tindak pidana yang terindikasi korupsi.

“Ada banyak modus praktik pungli di dunia pendidikan, salah satunya jenis pungli adalah seperti uang study tour, praktik-praktik, buku LKS Uang ekstrakurikuler, Uang ujian, Uang daftar ulang, Uang biaya perpindahan, Sumbangan pergantian kepek, Uang dana kelas, Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR, dan lain-lain,” kata dia, seperti dikutip Antara, Rabu (22/02/2017).

Menurut dia, hal tersebut membuat pungli berjalan mulus tanpa ada penindakan. JPPI meminta pemerintah daerah harus gencar mengkampanyekan dan menyosialisasikan kepada masyarakat akan jenis pungli dan juga sanksinya, agar masyarakat memahami jenis-jenis pungli di sekolah.

“Pemerintah daerah harus tegas untuk memberi sanksi kepada pelaku kejahatan pungli di lingkungan sekolah, seperti mencopot dari jabatan atau dilaporkan dengan tindak pidana seperti kejahatan korupsi,” Nailul.

Menurut dia, pemerintah daerah harus menyiapkan sarana laporan pengaduan khusus yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat secara luas apabila mendapati lembaga pendidikan atau instansi pemerintah yang melakukan pungli Masyarakat juga harus berani untuk melaporkan apabila menemukan praktek pungli di lingkungan pendidikan, karena peran serta publik sangat penting dalam memberantas dan menghentikan praktek pungli.

Editor : Sulha Handayani

Sumber <http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/57541/jppi.minta.pemda.tindak.tegas.pungli.di.sekolah>

Alih Wewenang SMA/SMK ke Provinsi Dinilai Rawan Pungli

Rabu, 11 Januari 2017 20:50

Alih Wewenang SMA/SMK ke Provinsi Dinilai Rawan Pungli



dok. Google/Ilustrasi pungutan liar

WARTA KOTA, DEPOK - Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Kordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Nailul Faruq berharap pengalihan ini tidak berjalan carut-marut. Sebab jika penanganannya tidak baik akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang mandek.

Nailul melihat ada beberapa masalah yang akan timbul dalam alih wewenang ini. Pertama, akan adanya kerawanan dalam dugaan pungutan liar di SMA/SMK. Sebab kini banyak wali murid yang sudah khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang dulu dan sekarang.

"Sebab banyak kabupaten dan kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan," katanya, Rabu (11/1/2017).

Kedua, kata dia yakni naiknya angka putus sekolah. Sebab pemerintah saat ini masih belum memiliki komitmen jelas soal wajib belajar 12 tahun. "Akibatnya, angka putus sekolah didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA," katanya.

Sebab kata dia Pemerintah daerah hanya menganggarkan wajar 9 tahun sekolah hanya sampai SMP. "Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru rentan menimbulkan masalah baru," katanya.

Ketiga, kata Nailul yakni mengenai status guru honorer yang makin tidak menentu. Sebab banyak guru honorer yang telah diangkat oleh pemerintah Kab/Kota, dengan beralihnya wewenang, mereka bisa jadi akan digeser oleh guru-guru honorer baru yang mengantongi SK Pemprov.

“Kekhawatiran ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah berdasarkan laporan pengaduan yang diterima JPPI. Karena itu, pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan,” katanya. Karenanya kata Nailul diperlukan evaluasi yang matang untuk mengelola jenjang SMA/SMK karena jenjang pendidikan ini ymenentukan kualitas peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, secara umum kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal. “Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, pemerintah pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sahat Farida Berlian Saragih, menuturkan pihaknya akan memonitor agar kekhawatiran JPPI soal pungutan liar di 13 SMA dan SMK negeri yang diserahkan ke Pemprov Jabar dari Pemkot Depok tidak terjadi. Sahat mengaku mendukung penuh pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar.

Sebab katanya hal itu akan sangat membantu Pemkot Depok terutama Dinas Pendidikan Kota Depok agar lebih fokus dan maksimal dalam pelayanan pendidikan di tingkat dasar.

“Hal ini sangat baik sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di tingkat dasar dan menengah serta di tingkat atas dan kejuruannya,” kata Sahat. Ia mengatakan salah satu keuntungan dan dampak positif yang bisa dirasakan di Depok, nantinya adalah mengenai keterbatasan dana untuk pengadaan gedung bagi SMA dan SMK di Depok.

Sebab kata dia dari 13 SMA di Depok, sekitar 5 SMA, gedungnya masih menumpang, dan dari 3 SMK negeri di Depok semuanya menumpang gedung di bangunan milik pihak luar. “Hal-hal seperti ini nantinya akan bisa teratasi lebih cepat, jika pengelolaan SMA dan SMK di pegang provinsi. Diharapkan setelah itu, semua SMA dan SMK negeri di Depok sudah memiliki gedung sendiri,” kata Sahat. Hal yang sama kata Sahat juga bisa terjadi dalam penambahan ruang kelas baru atas beberapa SMA dan SMK negeri di Depok, yang selama ini cukup lambat dan terhambat, padahal sudah sangat dibutuhkan.

Mengenai kekhawatiran soal pengurusan administrasi sekolah yang jaraknya jauh antara Depok dan Bandung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jabar, Sahat mengatakan hal itu bisa diatasi, karena mengenai administrasi tidak selalu pihak sekolah langsung mendatangi Disdik Pemprov Jabar di Bandung.

“Untuk pelaporan bisa menggunakan sarana online atau sarana komunikasi lainnya. Selain itu, untuk administrasi tertentu, Disdik Depok masih bisa diberikan kewenangan untuk koordinasi dengan Disdik Provinsi Jabar,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Alih Wewenang SMA/SMK ke Provinsi Dinilai Rawan Pungli, <http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/11/alih-wewenang-smasmk-ke-provinsi-dinilai-rawan-pungli?page=all>.

Penulis: Budi Sam Law Malau

Editor: Hertanto Soebijoto

Peralihan Kewenangan SMA/SMK ke Provinsi Rawan Pungli

12 Januari 2017



Ilustrasi (sumber foto: [www.medan\[dot\]tribunnews\[dot\]com](http://www.medan[dot]tribunnews[dot]com))

JAKARTA, HarianBernas.com - Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Nailul Faruq mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Antara lain pembagian urusan bidang pendidikan.

SMA/SMK kini tak lagi menjadi wewenang kabupaten/kota. Namun, kini diambil alih oleh pemerintah provinsi. Ia berharap penangan peralihan kewenangan tersebut dilakukan dengan baik karena berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Terlepas hal itu, Nailul mencatat beberapa masalah yang timbul akibat peralihan wewenang tersebut. Pertama, adanya pungutan liar di SMA/SMK. Menurutnya, banyaknya wali murid yang sudah mulai khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang terdahulu dengan saat ini.

"Banyak kab/kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena kabarnya ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (12/1/2017).

Kedua, naiknya angka putus sekolah. Menurutnya belum adanya komitmen dari pemerintah soal wajib belajar 12 tahun. Akibatnya, angka putus sekolah lebih didominasi tidak mampunya

lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA. Pemerintah daerah, kini hanya menganggarkan wajib sekolah 9 tahun.

“Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Ketiga, status guru honorer tak menentu. Menurutnya, masih banyaknya guru honorer diangkat oleh pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai dengan beralihnya wewenang, boleh jadi bakal digeser oleh guru-guru honores baru yang mengantongi SK Pemprov. Karena itu, pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan.

“Kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal. Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, Pemerintah Pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas,” pungkasnya.

Sumber : <https://www.bernas.id/30021-peralihan-kewenangan-smasmk-ke-provinsi-rawan-pungli.html>

Pendanaan Pendidikan Tanggung Jawab Pemerintah

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Kompascetak, halaman 12

Revitalisasi komite sekolah yang diamankan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 75 Tahun 2016 seharusnya difokuskan pada kewenangan komite sekolah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan kinerja serta anggaran sekolah. Adapun pendanaan pendidikan di sekolah tetap menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah.

Koordinator Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan Febri Hendri mengatakan, prioritas pertama pendanaan haruslah dari upaya pemerintah melalui APBN dan APBD. Karena itu, upaya untuk mendorong komite sekolah untuk menggalang bantuan publik dinilai sebagai pengalihan beban anggaran dari pundak pemerintah ke masyarakat.

Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Nailul Faruq menilai, salah satu alasan munculnya permendikbud baru itu adalah sekolah kesulitan meningkatkan mutu pendidikan akibat kekurangan dana. Dana yang bersumber dari APBN dan APBD tidak mencukupi untuk membiayai program peningkatan mutu pendidikan. Sayangnya, pemerintah dan sekolah tidak bersedia menjelaskan secara transparan kepada orangtua dan publik berapa nilai dan rincian dari kebutuhan anggaran tersebut. Permendikbud juga tidak mengatur transparansi kebutuhan dana ini.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan, secara umum sekolah sepakat komite sekolah diperlukan. Sikap ini muncul terkat ketidakmampuan pemerintah menyediakan dana memadai untuk menyelenggarakan pendidikan. Maka, menurut Ramli, pemerintah pusat ataupun daerah harus bisa memastikan bahwa keberadaan komite sekolah tidak memperlebar jurang perbedaan antarsekolah. Pemerintah harus mampu menghapus pengelompokan sekolah serta menjadikan sekolah nonrujukan pada suatu ketika memiliki level yang sama baiknya dengan sekolah rujukan.

Sumber : <https://acdpendonesia.wordpress.com/2017/01/18/pendanaan-pendidikan-tanggung-jawab-pemerintah/>

Pemerintah Diminta Revisi Aturan Komite Sekolah

Admin NEW Indonesia

Rabu, 18 Januari 2017



Panelis kunci konpres KMSTP (dari kiri), Siti J Rachman ICW, Santoso Artikel 33, Achmad Taufik JPPI, Pejabat Kemendikbud dan Koordinator KMSTP Febri Henri AA | NEW Indonesia

NEW Indonesia, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) meminta otoritas Indonesia agar lebih fokus dalam mewujudkan komitmennya bidang pendidikan, KMSTP mengkritisi serius program kementerian soal regulasi yang mengatur tentang Komite Sekolah yang dinilai rawan korupsi dan diskriminasi. Diharapkan Revitalisasi lebih difokuskan kepada penguatan kewenangan Komite Sekolah dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan kinerja serta anggaran sekolah.

Lahirnya Permendikbud 75/2016 Komite Sekolah dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan mutu layanan sekolah yang dinilai selalu terkendala oleh pendanaan. Pada tanggal 30 Oktober 2016, Mendikbud telah menandatangani Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Kebijakan baru ini merupakan perubahan atas Kepmendiknas No. 44/U/2002 tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Gelar konpres KMSTP dihadapan puluhan media nasional di Kantor ICW Kalibata Jakarta, Selasa (17/1), hadir sebagai panelis kunci beberapa mitra jaringan KMSTP, ICW, JPPI NEW Indonesia, Artikel 33 dan perwakilan Kemendikbud.

Laporan-aporan KMSTP sebelumnya menyebutkan bahwa, Pendanaan pendidikan bagi sekolah ternyata tidak cukup hanya bersumber dari APBN dan APBD oleh karena itu, berdasarkan Permendikbud 75/2016 membutuhkan dukungan dari masyarakat, nuana yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan baru yang diklaim merupakan revitalisasi Komite Sekolah sehingga lembaga ini mampu menggalang dana publik selain pungutan sekolah.

Koordinator KMSTP Febri Henri menekankan pentingnya peran komite sekolah dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih komprehensif. Publik diminta proaktif, tambah Febri, terutama terkait kinerja Komite Sekolah (revisi) sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh yang berpotensi kurang transparan multiaspek.

Sementara, Koordinator Artikel 33 (CSO) Santoro mengkhawatirkan, peran dan tugas komite sekolah revisi dari aspek akuntabilitas, kebijakan dan kewenangan yang berpotensi terjadinya praktik korupsi, pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dugaan praktik korupsi perlu diatur dalam mekanisme yang lebih terbuka dan solutif.

Koordinator Program Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ahmad Taufik mengatakan, dari aspek regulasi sektor pendidikan, Indonesia dinilai memiliki komitmen yang cukup guna mewujudkannya, namun tanpa disertai dengan kemauan politik yang kuat, kinerja aparatur, komitmen anggaran yang lebih besar, maka masih sulit kesenjangan pembangunan pendidikan teratasi di tanah air.

Berdasar catatan KMSTP atas Permendikbud No. 75 tahun 2016 dan perbandingannya dengan Kepmen No. 44/U/2002 sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Komite Sekolah berubah

Menurut Kepmen No. 44/U/2002, salah satu tujuan komite sekolah adalah untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Namun hal ini, tidak muncul dalam Permendikbud No. 75/2016. Sebagaimana diketahui, tata kelola sekolah terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masih sangat buruk. Penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sekolah masih dilakukan secara tertutup oleh pihak sekolah tanpa melibatkan Komite Sekolah apalagi orang tua murid.

Begitu juga dengan tugas dan fungsi yang sebelumnya cukup banyak dimiliki oleh Komite Sekolah dalam Kepmendiknas No. 44/U/2002 namun dipotong dan direduksi dalam Permendikbud No. 75/2016. Jadi dimana letak revitalisasinya? Selama ini fungsi kontrol komite sekolah tidak berjalan efektif agar terjadi checks and balance dalam pengelolaan sekolah dan hal ini membutuhkan penegasan dalam Permendikbud. Sayangnya, hal ini luput dalam kebijakan baru ini..

Selain kewenangan ini, pengangkatan pengurus Komite Sekolah ternyata masih ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Seharusnya, Kepala sekolah cukup mengetahui pengangkatan Pengurus Komite Sekolah. Penetapan pengurus Komite Sekolah dikhawatirkan menjadikan Komite Sekolah semakin tidak independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap sekolah.

Pergeseran Pelaku Pungutan

Permendikbud No. 75/2016 melarang Komite Sekolah disemua jenjang pendidikan menarik pungutan dari orang tua murid. Komite sekolah ditugaskan untuk menggalang bantuan dari publik dan sumbangan dari orang tua murid.

Bagaimana dengan pungutan yang biasa ditarik Komite Sekolah dijenjang menengah (SMA/SMK) selama ini? Besar kemungkinan pungutan ini akan diambil alih oleh pihak sekolah (Kepala Sekolah, Guru dan Bendahara). Hal ini terjadi karena selama ini sekolah terutama pada jenjang menengah mengandalkan dana pungutan Komite Sekolah untuk membiayai berbagai program dan kegiatannya. Jadi, jika Komite Sekolah dilarang menarik pungutan maka pihak sekolah yang akan menarik pungutan tersebut dari peserta didik atau orang tua murid. Hal ini dimungkinkan karena pungutan pada jenjang pendidikan menengah diatur dalam PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Jadi, belum ada aturan perundang-undangan yang melarang pihak sekolah dijenjang pendidikan menengah menarik pungutan dari orang tua murid. Aturan pelarangan pungutan hanya ada bagi jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dimana pihak sekolah dan Komite Sekolah dilarang melakukan hal tersebut.

Apa yang akan terjadi jika pihak sekolah (SMA/SMK) mengambil alih peran komite sekolah menarik pungutan? Menurut kami pungutan akan semakin merajalela dan tidak terkendali terutama pada daerah yang melegalkan adanya pungutan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kontrol atas pada SMA/SMK yang menarik pungutan.

Sebelumnya, kontrol dilakukan oleh Komite Sekolah namun saat ini pasca Permendikbud No.75/2016 Komite Sekolah tidak lagi berwenang mengawasi pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Hilangnya kontrol Komite Sekolah akan mendorong pihak sekolah (SMA/SMK) semakin "kreatif dan inovatif" menarik pungutan dari orang tua murid. Transparansi Kebutuhan Biaya Sekolah Untuk Peningkatan Mutu (Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan)

Salah satu alasan munculnya Permendikbud baru ini adalah sekolah kesulitan meningkatkan mutu pendidikan namun kekurangan dana. Dana yang bersumber dari Pemerintah (APBN) dan dari Pemda (APBD) dinilai tidak mencukupi program dan kegiatan untuk pencapaian mutu tersebut. Namun sayangnya, pemerintah dan sekolah tidak bersedia menjelaskan secara transparan kepada orang tua murid dan publik berapa nilai dan rincian dari kebutuhan anggaran tersebut? Sayangnya, Permendikbud tidak mengatur soal transparansi kebutuhan dana ini.

Pendanaan pendidikan di sekolah merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi, prioritas pertama pendanaan haruslah dari upaya pemerintah dan pemerintah daerah melalui APBN dan APBD. Oleh karena itu, upaya mendorong Komite Sekolah menggali bantuan publik dan sumbangan orang tua murid dapat dinilai sebagai pengalihan beban anggaran dari pundak pemerintah ke masyarakat.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah meminta maaf pada publik dan orang tua murid karena tidak mampu memenuhi kewajibannya dan mengalihkannya pada pundak masyarakat dan orang tua murid.

Kemampuan Komite Sekolah Menggalang Bantuan Diragukan

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 menugaskan Komite Sekolah melakukan penggalangan bantuan dari masyarakat dan sumbangan dari orang tua. Penggalangan bantuan dari masyarakat diragukan efektifitasnya karena pengurus Komite Sekolah belum memiliki akses dan kemampuan untuk hal tersebut. Sebagian pengurus komite sekolah diragukan memiliki akses terhadap perusahaan yang memiliki program CSR, tokoh masyarakat, individu dengan kemampuan ekonomi tinggi dan pihak lain. Sebagian Komite Sekolah mungkin mampu mengakses karena sebagian perusahaan berada atau dengan wilayah sekolahnya. Namun sebagian lagi yang lain, berada jauh dari perusahaan yang akan memberikan CSR. Masyarakat disekitar sekolah juga tidak dalam kondisi mampu memberi bantuan atau sumbangan finansial pada sekolah. Diperkotaan

diprediksi akan banyak sekolah mengajukan proposal pada perusahaan atau instansi tertentu. Hal ini akan memicu persaingan dan kompetisi antar Komite Sekolah untuk memperebutkan bantuan dari donatur. Kompetisi ini jelas tidak menguntungkan sekolah dimana pengurus Komite Sekolah tidak memiliki akses dan jaringan yang kuat pada pendonor.

Akibatnya, Komite Sekolah tidak akan dapat memenuhi target bantuan dan kemudian mengandalkan sumbangan dari orang tua murid. Ketika hal ini terjadi, mungkin saja Komite Sekolah memberlakukan sumbangan dengan unsur mengikat atau dengan kata lain sumbangan tersebut pada dasarnya adalah pungutan.

Rekomendasi

Terkait dengan hal Permendikbud No. 75/2016 ini kami merekomendasikan hal berikut :

Revisi Permendikbud No. 75/2016 agar Komite Sekolah benar-benar di revitalisasi. Revitalisasi difokuskan penguatan kewenangan Komite Sekolah dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan kinerja serta anggaran sekolah.

Sekolah perlu membuat perencanaan (rkas detail) yang isinya apa yang akan dilakukan oleh sekolah selama satu tahun ke depan. detail sampai kegiatan dan barang/jasa apa yang mau dibeli. berdasarkan rencana itu, baru ditetapkan besarnya bantuan dan sumbangan. perencanaan ini, selain dibuat bersama komite sekolah, hasilnya harus diumumkan lewat website yang dibangun oleh pemda, atau minimal oleh sekolah dimana orang tua bisa mengakses.

Mendorong pemda untuk membangun mekanisme akuntabilitas, seperti complaint handling sistem, dimana orang tua dan masyarakat dapat melakukan pengaduan jika terdapat penyalahgunaan dana bantuan dan sumbangan. Sistem akuntabilitas adalah infrastruktur yang harus dibangun sebelum permen ini diterapkan, baik dalam hal perencanaan maupun pertanggungjawaban penggunaan dana. Penetapan pengurus Komite Sekolah dilakukan oleh Dewan Pendidikan diketahui oleh Kepala Sekolah. Dengan kondisi ini maka independensi Komite Sekolah dapat dipertahankan.

Mendikbud membuat permen terkait dengan pungutan dan sumbangan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) sebagai amanat PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan pungutan liar yang selama ini terjadi terutama yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Adanya Permendikbud yang mewajibkan Pemda dan sekolah membangun sistem pengaduan atas praktik penerimaan bantuan, sumbangan dan pungutan tersebut. Selain itu, Permendikbud juga mengatur tentang sanksi bagi pihak sekolah atau Komite Sekolah yang terbukti melanggar aturan terkait bantuan, sumbangan dan pungutan serta keanggotan Komite Sekolah.

Media jaringan global BBC 2015 melaporkan , Peringkat tertinggi sekolah-sekolah global telah diterbitkan, dan negara-negara Asia menempati lima posisi teratas sementara negara-negara Afrika dengan peringkat terendah dan Indonesia ke delapan dari bawah. Singapura memimpin di peringkat pertama, diikuti oleh Hong Kong. Di ujung lain, Ghana menduduki posisi terbawah. Sementara Indonesia menduduki posisi nomor 69 dari 76 negara. Inggris menempati peringkat 20, sedangkan beberapa negara Eropa lainnya berprestasi lebih baik. Amerika Serikat bertengger di posisi 28. (tim)

Sumber : <http://new-indonesia.org/beranda/2016-03-25-08-28-09/berita-new-indonesia/760-enggan-revisi-soal-aturan-komite-sekolah,-awal-kiamat-pendidikan-ri.html>

Biaya Ini Sering Diminta Sekolah, Ternyata Pungutan Liar!

23 Januari 2017 14:24 WIB



Ilustrasi media

Di sekolah, kita sering dimintai berbagai macam biaya. Dari formulir pendaftaran ulang, biaya buku dan LKS, pengembangan ruang kelas atau perpustakaan, sampai uang les. Tapi ternyata biaya-biaya itu bisa termasuk jenis pungli sekolah (pungutan liar sekolah) lho!

Pungli artinya biaya-biaya yang harus kita bayar untuk mendapatkan fasilitas dan layanan yang mestinya tak perlu keluar biaya. Menurut Peraturan Mendikbud No. 44 tahun 2012, biaya seperti biaya buku dan LKS juga pengembangan ruang kelas atau perpustakaan itu termasuk pungli, karena harusnya siswa tak perlu keluar uang lagi buat mendapatkan hal itu.

Kenapa begitu?

Ternyata karena pemerintah sudah mengalokasikan uang untuk sekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada juga dana alokasi khusus dari anggaran daerah (APBD).

Menurut ketentuan Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2014 Kemendikbud, dana dari pemerintah bisa dimanfaatkan untuk membiayai operasional sekolah seperti biaya buku sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, uang formulir pendaftaran ulang, biaya praktikum, dan renovasi gedung.

Demikian pula biaya les dengan guru di sekolah. Berdasarkan paparan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti melalui Radar Banyumas (14/10), les dengan guru

hanya dibolehkan selama ditujukan bukan untuk siswa yang diajar di guru tersebut. Kalau guru membuka jasa les bagi siswanya, bisa terjadi konflik kepentingan: guru bisa jadi cuma memberi nilai bagus pada siswa yang ikut les.

Les pun tak boleh bersifat memaksa. Les harus bersifat opsional, bukan memaksa siswa untuk memahami pelajaran cuma kalau mengikuti les.

"Indonesia sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun. Tidak boleh itu pungutan apapun sifatnya terutama SD dan SMP negeri," kata Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud sewaktu diwawancara CNN Indonesia (10/10/2014).

Anggaran pendidikan di beberapa daerah sudah cukup besar untuk menopang pendidikan. Pemko Batam misalnya mengalokasikan anggaran Rp10 miliar tiap tahunnya. Pemprov DKI juga mengeluarkan Rp13 triliun untuk anggaran pendidikan di tahun 2015.

Jadi, apa saja yang termasuk jenis pungutan liar sekolah? Ini dia daftar yang Youth Proactive kompilasi dari Yayasan Satu Karsa Karya, CNN Indonesia, dan Batam Pos.

- Biaya formulir pendaftaran ulang;
- Sumbangan siswa baru;
- Biaya seragam sekolah;
- Biaya LKS atau modul pengayaan;
- Biaya buku sekolah;
- Biaya les atau tambahan pelajaran;
- Biaya praktikum;
- Kegiatan ekstrakurikuler;
- biuran kebersihan dan keamanan;
- Biaya study tour;
- Biaya wisuda kelulusan;
- Sumbangan Pengembangan Sekolah (perpustakaan, laboratorium, dsb);
- Renovasi gedung.

Meski sudah ditetapkan sebagai peraturan, pungutan liar sekolah kerap masih terjadi. Sebut saja misalnya di kisaran Jakarta, provinsi dengan anggaran pendidikan sebesar Rp13 triliun.

Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dilansir Harian Terbit menunjukkan sejumlah pungutan liar masih banyak terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pungutan itu juga tidak membedakan mana siswa miskin dan berada. Alasannya, dana BOS yang diberikan pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh operasional sekolah.

Di Sleman, Yogyakarta, juga terjadi pungutan liar sekolah negeri. Komite sekolah meminta sumbangan sukarela yang diberikan batas waktu pada wali murid. Angkanya berkisar dari Rp1,9 juta hingga Rp3,5 juta. Di Solo, Jawa Tengah, hal serupa pun terjadi. "Banyak pungutan di sekolah yang seolah dilegalkan karena sudah mengatasnamakan Komite Sekolah," kata Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Republik Indonesia (Lapaan RI) Kusumo Putro.

Mendikbud Kabinet Kerja Jilid I Anies Baswedan menyebutkan pungutan liar sekolah bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan setempat. Anies juga mengungkap kalau pelaporan juga bisa dilakukan melalui SMS ke nomor telepon 0811976929 atau via website di laporpungli.kemdikbud.go.id.

Aturan tentang pungli ini, meski begitu, mengecualikan sekolah-sekolah yang tak dapat bantuan dari pemerintah. "Pungutan diperbolehkan buat sekolah swasta saja karena mereka tidak dapat subsidi pemerintah," kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad.

Nah, bagaimana kalau di sekolahmu, Youth?

Sumber : <https://kumparan.com/youth-proactive/biaya-ini-sering-diminta-sekolah-ternyata-pungutan-liar>

JPPI berencana meluncurkan situs pengaduan kasus pendidikan

Selasa, 31 Januari 2017 23:26 WIB



Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Antarasumsel.com/Grafis/Ag/17)

Jakarta (Antarasumsel.com) - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berencana meluncurkan situs pengaduan kasus pendidikan mulai dari bully, pungutan liar (pungli), kekerasan, korupsi, dan lain sebagainya.

"JPPI memang sudah membuat situs itu, bisa dilihat di laporpendidikan.com. Dan peresmiannya nanti pertengahan Februari 2017, sekalian launching buku hasil riset JPPI soal wajib belajar 12 tahun baik terkait kebijakan dan anggaran yang kita lakukan di 20 kota/kabupaten," kata Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq dalam siaran pers, Selasa.

Selain itu, Nailul juga menjelaskan, sampai saat ini sudah banyak pengaduan yang masuk ke kami dengan berbagai kasus pendidikan.

"Kita membuka sekaligus mengajak peran serta publik untuk bersama mengawal problem pendidikan di daerah, selain aspirasi publik juga sebagai proses pembenahan dan PR pemerintah untuk memperbaiki sektor pendidikan," kata Nailul.

Situs pengaduan ini, menurut Nailul, sebagai jembatan atau solusi atas pengaduan problem pendidikan di daerah.

“Kami berharap ini sebagai sarana pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik di bidang pendidikan agar dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara,” kata Nailul.

Nailul juga mengatakan situs pengaduan ini dimaksudkan untuk untuk menjembatani masyarakat dan pemerintah dalam komunikasi pelayanan pengaduan.

Selanjutnya JPPI akan melakukan verifikasi dan menindaklanjuti dengan pemerintah atau lembaga terkait.

“Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mengirim pesan aspirasi pengaduan kepada pemerintah serta menampung seluruh aspirasi masyarakat guna mengevaluasi kebijakan pemerintah dan problem atau kasus yang terjadi di daerah-daerah soal pendidikan,” kata Nailul.

Pewartu : Joko Susilo

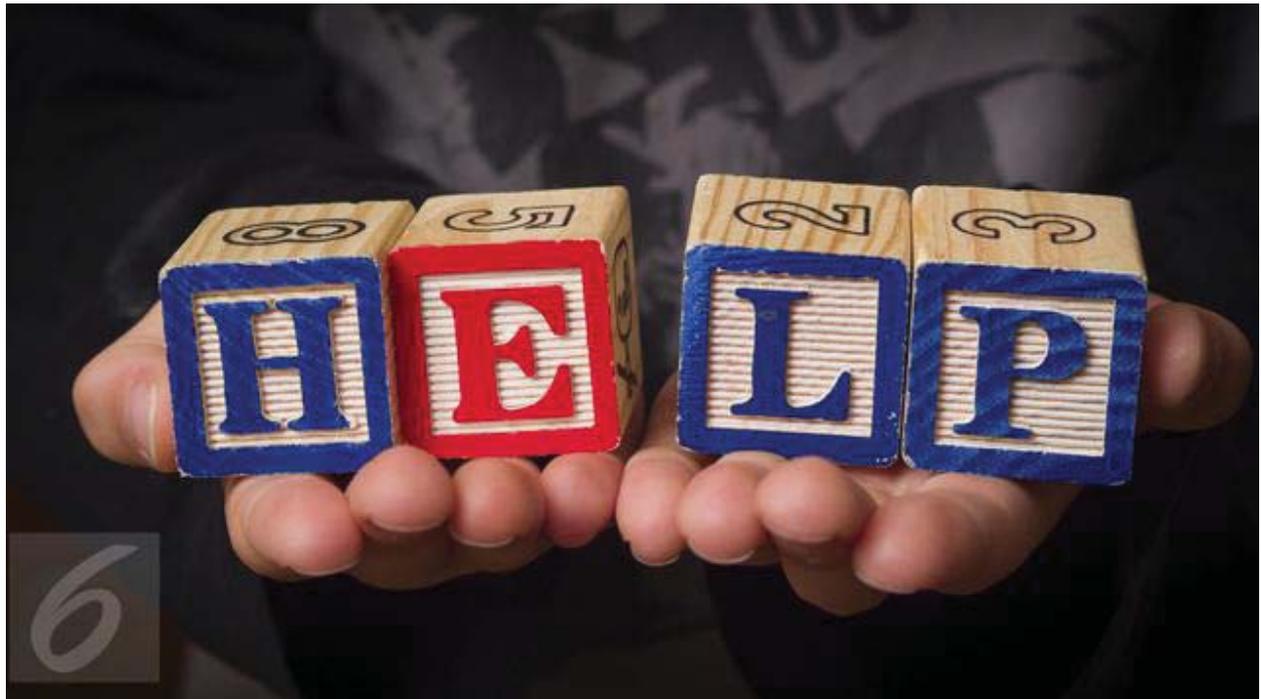
Editor: Ujang

Sumber : <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/311043/jppi-berencana-luncurkan-situs-pengaduan-kasus-pendidikan>

JPPI: Ada 6 Modus Kekerasan di Sekolah

Liputan6Liputan6

15 Des 2016, 18:00 WIB



Ilustrasi Kekerasan Pada Anak (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta Pada penghujung 2016 ini bermunculan tragedi kekerasan anak di sekolah di berbagai wilayah di Indonesia. Siswa ditusuk temannya sampai meninggal (Bantul, Yogyakarta), orang secara brutal menyerang delapan murid SD kelas V dan kelas VI SD (Nusa Tenggara Timur), guru menganiaya mata siswa dengan pulpen (Gowa, Sulsel), orangtua murid menganiaya guru hingga bercucuran darah (Makassar, Sulsel), tawuran siswa SD yang melibatkan 3 sekolah (Semarang), dan masih banyak yang lainnya.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia meminta pemerintah untuk lebih tanggap terhadap terhadap aksi kekerasan di sekolah.

Menurut siaran pers JPPI yang diterima Liputan6.com, tren kekerasan dan modus-modusnya kian beragam. Berdasarkan pantauan mereka, setidaknya ada enam modus kekerasan utama yang terus terulang di lingkungan sekolah: penganiayaan guru kepada siswa, penganiayaan siswa kepada guru, penganiayaan siswa kepada siswa, penganiayaan wali murid kepada guru, pelecehan seksual, dan tawuran antarsekolah.

Fakta ini membenarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Plan International dan International Center for Research on Women yang dirilis tahun 2015. Data ini menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Terdapat 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70 persen. Bahkan, berdasarkan perhitungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sedikitnya ada 1800 anak korban kekerasan tiap tahunnya di Indonesia.

Jika pemerintah tidak serius menangani, masalah ini akan merembet ke masalah lain. JPPI berharap pemerintah lebih serius menegakkan instrumen hukum berupa sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari tindak kekerasan. Seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti-kejahatan Seksual terhadap anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

JPPI menganggap, perangkat hukum ini masih terbentur beragam kendala seperti kurangnya komitmen pemerintah dan juga pihak sekolah. Penerapan yang belum optimal ini membuat anak-anak di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi dan terpapar ancaman kekerasan anak di lingkungan pendidikan.

Sumber : <https://www.liputan6.com/health/read/2679371/jppi-ada-6-modus-kekerasan-di-sekolah>

Setiap Tahun Ribuan Anak Indonesia Alami Tindak Kekerasan

Pemerintah harus antisipatif dan tanggap terhadap aksi kekerasan di sekolah.



Ecka Pramita, Majalah Kartini | 15/12/2016 - 19:30

Majalahkartini.co.id – Beberapa kasus kekerasan di dunia pendidikan telah terjadi tahun ini, diantaranya kasus siswa ditusuk temannya sendiri hingga meninggal dunia (Bantul, Yogyakarta), dan yang baru-baru ini orang tidak dikenal secara brutal menyerang delapan murid SD kelas V dan kelas VI SD (Nusa Tenggara Timur), guru menganiaya mata siswa dengan pulpen (Gowa, Sulsel), orang tua murid menganiaya guru hingga bercucuran darah (makassar, Sulsel), tawuran siswa SD yang melibatkan 3 sekolah (semarang).

Hal tersebut menunjukkan belum ada keseriusan pemerintah dan juga pihak sekolah dalam mencegah aksi kekerasan di sekolah. Pemerintah dinilai jangan hanya memandang bahwa di sekolah itu anak-anak hanya diajari aspek kognitif saja, lalu diuji dengan Ujian Nasional, akan tetapi ada hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu sekolah sebagai tempat anak-anak tumbuh dan berkembang, baik aspek fisik maupun mentalnya.

Kekerasan yang terjadi di sekolah, dapat menghambat pertumbuhan dua aspek tersebut. Untuk itu, pemerintah harus antisipatif dan tanggap terhadap aksi kekerasan di sekolah. Sebab, kekerasan dan modus-modusnya kian beragam.

Berdasarkan pantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), setidaknya ada enam modus kekerasan utama yang terus terulang di lingkungan sekolah: penganiayaan guru kepada siswa, penganiayaan siswa kepada guru, penganiayaan siswa kepada siswa, penganiayaan walimurid kepada guru, pelecehan seksual, dan tawuran antarsekolah.

Fakta tersebut membenarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Plan International dan International Center for Research on Women yang dirilis tahun 2015. Data tersebut menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Bahkan, berdasarkan perhitungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sedikitnya ada 1800 anak korban kekerasan tiap tahunnya di Indonesia.

Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari tindak kekerasan. Seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti-kejahatan Seksual terhadap anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun dalam hal penerapan perangkat hukum ini masih terbentur beragam kendala seperti kurangnya komitmen pemerintah dan juga pihak sekolah. Penerapan yang belum optimal ini membuat anak-anak di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi dan terpapar ancaman kekerasan di lingkungan pendidikan. (Foto: istimewa)

Sumber : <https://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/setiap-tahun-ribuan-anak-indonesia-alami-tindak-kekerasan/>

“Fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Bahkan, berdasarkan perhitungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sedikitnya ada 1800 anak korban kekerasan tiap tahunnya di Indonesia”

Trending Topic

Penting untuk Para Orang Tua: Ketahui 5 Fakta Kasus Kekerasan di Sekolah

15 Dec 2016



Foto: Fotosearch

Akhir tahun ini, selain kasus intoleransi dan radikalisme yang makin marak, para orang tua juga harus memerhatikan kasus-kasus kekerasan di sekolah yang terjadi di berbagai daerah. Berikut 5 di antaranya:

1/ Penusukan di Bantul, Yogyakarta. Sekelompok siswa SMA kelas X di Yogyakarta menjadi korban penyerangan sekelompok pemuda tak dikenal di daerah Imogiri pada Senin (12/12). Saat itu, mereka baru pulang berwisata dari Gunungkidul. Salah satu korban, Adnan Wirawan, tak tertolong karena pendarahan hebat di ginjal. Menurut penyelidikan polisi, rombongan korban

dan rombongan pelaku sama-sama mengaku tidak saling mengenal. Kelompok pelaku mengaku tidak terima dan menyerang karena rombongan korban bermain-mainkan gas motornya. Selain korban jiwa, ada lima orang korban lainnya yang mengalami luka-luka baik karena tusukan senjata tajam dan karena terjatuh dari motor.

2/ Penyerangan siswa SD di Nusa Tenggara Timur. Selasa pagi (13/12), seorang pria secara brutal menyerang 8 murid SD kelas V dan kelas VI di SDN Sabu Barat, NTT dengan sebilah pisau. Tujuh siswa mengalami luka di leher, dada, dan tangan. Para korban kini dirawat di Puskesmas Seba, Sabu Raijua, NTT. Pelaku sempat dihajar warga yang sudah tersulut amarah sebelum diamankan polisi.

3/ Guru menganiaya siswa dengan pulpen di Gowa, Sulawesi Selatan. November lalu, mata kanan seorang siswa SMPN III Gowa harus dioperasi setelah terkena bolpoin gurunya. Sang guru mengaku insiden ini tidak disengaja. Ia sedang mengangkat buku untuk menenangkan siswa yang ribut di kelas. Tapi, ternyata ada pulpen di dalam buku dan ikut mengenai siswa. Kasus ini telah dilaporkan oleh keluarga siswa ke Mapolres Gowa.

4/ Orang tua murid menganiaya guru di Makassar, Sulawesi Selatan. Gara-gara anaknya mengadu dipukul oleh guru, seorang bapak mendatangi guru tersebut ke sekolah. Ia tersulut emosi saat berpapasan di koridor sekolah dan memukul guru tersebut. Bersama anaknya, sang ayah diamankan di Mapolsek Tamalate. Sebelumnya, bapak dan anak itu sempat menjadi bulan-bulanan siswa SMKN 2 Makassar, setelah para siswa mengetahui gurunya dipukul hingga mengalami luka-luka dan patah di bagian ujung hidung.

5/ Tawuran siswa SD yang melibatkan tiga sekolah di Semarang. Akhir November lalu, tawuran antar siswa SD di Semarang melibatkan tiga sekolah yakni SD Al Khotimah, SD PL Gunung Brintik dan SD Pekunden menarik perhatian warga. Tawuran telah direncanakan jauh hari, bahkan para siswa pelaku tawuran telah mempersiapkan yel-yel lagu yang akan digunakan saat tawuran. Para siswa membawa senjata tajam jenis parang dan berhasil diamankan polisi. Mereka mengaku sebabnya adalah cekcok karena saling ejek.

Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), lima kasus ini sesuai dengan 6 modus kekerasan utama yang terus terulang di lingkungan sekolah, yaitu: penganiayaan guru kepada siswa, penganiayaan siswa kepada guru, penganiayaan siswa kepada siswa, penganiayaan wali murid kepada guru, pelecehan seksual, dan tawuran antarsekolah.

Fakta ini juga menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Plan International dan International Center for Research on Women (2015) yang mendapati ada 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Berdasarkan perhitungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sedikitnya ada 1800 anak korban kekerasan tiap tahunnya di Indonesia.

Melihat fakta tersebut, sejauh mana upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan? Dari segi payung hukum, Indonesia punya sejumlah peraturan UU seperti:

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti-kejahatan Seksual terhadap Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Namun, penerapan perangkat hukum ini masih terbentur banyak kendala sehingga anak-anak di Indonesia masih terpapar ancaman kekerasan di lingkungan pendidikan. Untuk itu, selain menyadari fakta ini, para orang tua juga harus ingat, sekolah tidak hanya tempat anak belajar, tapi juga tempat anak-anak tumbuh dan berkembang, baik dalam aspek fisik maupun mental. Kekerasan di sekolah dapat menghambat pertumbuhan anak.

Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua?

1/ Ajaklah anak Anda untuk selalu terbuka tentang kegiatan dan teman-temannya di sekolah. Ajukan pertanyaan terbuka seperti, "Cerita lagi, dong," atau "Bagaimana menurutmu?". Ini menunjukkan Anda siap mendengarkan pendapat mereka tentang masalah yang ada di sekolah. Perlahan bukalah pembicaraan tentang kekerasan, rokok, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman keras. Jangan menunggu sampai anak Anda yang datang untuk bercerita tentang hal-hal ini.

2/ Beri batasan tegas. Pastikan anak tahu aturan yang berlaku, dan apa yang diharapkan dari dirinya di keluarga Anda dan menyadari konsekuensi jika mereka melanggarnya. Tunjukkan teladan lewat sikap Anda agar mereka bertanggung jawab, bisa berempati pada orang lain, mampu mengendalikan amarah, dan mengelola stres.

3/ Perhatikan perubahan pada anak. Jika ada perubahan dramatis pada anak, seperti nilai-nilai yang menurun, perubahan pola makan, suka berbohong dan keluhan kesehatan, Anda harus mulai menyelidikinya.

4/ Selalu terlibat dalam kegiatan di sekolah. Jika anak mulai menunjukkan sikap yang potensial untuk membahayakan orang lain, segeralah turun tangan dan bekerja sama bersama pihak sekolah untuk mencari solusi terbaik. (f)

Rahma Wulandari

Sumber : <http://www.femina.co.id/trending-topic/penting-untuk-para-orang-tua-ketahui-5-fakta-kasus-kekerasan-di-sekolah>

JPPI Desak Mendikbud Hapus Saja Ujian Nasional

Fabian Januarius Kuwado Kompas.com - 04/12/2016, 18:14 WIB



Sekolah juga harus menyenangkan. Itulah alasannya pendidikan di Purwakarta, terutama di pedesaan, banyak belajar di luar kelas. (Dok Humas Pemkab Purwakarta) JAKARTA, KOMPAS.com –

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah sepenuhnya menghapus ujian nasional (UN). Diketahui, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan moratorium UN. “UN hapus saja. Kami pada posisi setuju dengan moratorium UN,” ujar Ubaid Matraji, koordinator Nasional JPPI dalam konferensi pers di sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Minggu (4/12/2016).

JPPI Minta Penjelasan dari Kemendikbud soal Anggaran Meski demikian, bukan berarti JPPI setuju dengan pengganti UN, yakni Ujian Akhir Berstandar Nasional (UASBN). Sebab, belum ada informasi jelas dari pemerintah soal UASBN ini. Jika memang UN diganti dengan UASBN, JPPI berharap agar UASBN harus diletakkan sebagai alat, bukan tujuan akhir pendidikan di Indonesia. “UASBN harus menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukannya hasil akhir. Apalagi menentukan kelulusan sebagaimana UN,” ujar dia.

UASBN, lanjut Ubaid, juga harus mengacu kepada UU Sisdiknas, khususnya Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi “evaluasi hasil belajar murid dilakukan oleh pendidik”. “Jadi, kedaulatan evaluasi bukan di tangan pemerintah, tapi di tangan guru sekolah. Karena itu, penilaian guru tidak boleh asal. Jika guru asal meluluskan, guru yang harus dibenahi,” ujar Ubaid. UASBN juga diharapkan terhindar dari praktik kecurangan atau korupsi. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak boleh didominasi pemerintah saja, melainkan juga oleh partisipasi publik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “JPPI Desak Mendikbud Hapus Saja Ujian Nasional”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/04/18145831/jppi.desak.mendikbud.hapus.saja.ujian.nasional>.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

Ujian Nasional Diwacanakan Dihapus, JPPI Minta Penjelasan dari Kemendikbud soal Anggaran

Fabian Januarius Kuwado Kompas.com - 04/12/2016, 16:45 WIB



Kiri ke kanan : Peneliti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ahmad Taufik, Ketua Institute of Good Governance and Regional Development Eka Simanjuntak, Moderator Kimura, Sekretaris Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan (APPI) Jumono, dan Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri dalam konferensi pers di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/8/2016).(Fachri Fachrudin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, pemerintah belum memiliki kejelasan terkait anggaran ujian sekolah. Hal ini terkait kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). "Pemerintah belum ada kejelasan soal bagaimana nanti anggaran USBN ini," ujar Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq dalam konferensi pers di Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (4/12/2016).

Pertama, soal rencana penggunaan anggaran UASBN. Anggaran UN untuk 2017 dalam APBN, direncanakan sebesar Rp 491 miliar. Sementara itu, anggaran untuk pelaksanaan UASBN diperkirakan Rp 500 miliar.

"Nah ini bagaimana jadinya? Kalau kurang bagaimana?" ujar dia. Kedua, UASBN memiliki pola indikator kelulusan diserahkan ke pendidik alias sekolah. Jika demikian, lanjut Nailul, apakah artinya anggaran itu juga dibebankan ke pemerintah daerah atau tetap dari pemerintah pusat? Berdasarkan catatan JPPI, setiap daerah memiliki anggaran pendidikan.

Dalam anggaran itu, terdapat komponen anggaran ujian. "Jika demikian apakah jika anggaran pusat kurang menggunakan anggaran ujian pemerintah daerah ini? Persoalan lain lagi, apa bisa

anggaran ini dialihkan untuk UASBN? Sementara, itu kan sudah diketok antara kepala daerah dan DPRD,” ujar Nailul. JPPI pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjelaskan hal ini kepada pemerintah daerah agar tidak timbul persoalan di kemudian hari. Diberitakan, penyelenggaraan UN 2017 direncanakan dihentikan sementara. Meski demikian, keputusan itu masih harus menunggu arahan Presiden Joko Widodo terlebih dahulu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ujian Nasional Diwacanakan Dihapus, JPPI Minta Penjelasan dari Kemendikbud soal Anggaran”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/04/16454071/ujian.nasional.diwacanakan.dihapus.jppei.minta.penjelasan.dari.kemendikbud.soal.anggaran>.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA
(JPPI)